



e ISSN 2614-8935

p ISSN 2615-3815

INOVASI

JURNAL POLITIK DAN KEBIJAKAN

Vol. 19 No. 1, Mei 2022

Analisis kualitatif pengendalian Covid-19 berdasarkan kekuatan pentahelix di wilayah pariwisata Kabupaten Pangandaran

(Yuneu Yuliasih, Endang Puji Astuti, Mara Ipa, Tri Wahono, dan Joni Hendri)

Pengaruh modal psikologis dan penerimaan teknologi terhadap sistem pemerintahan berbasis elektronik pada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat

(Mohd Farouq Hasymi Nasution, Abdhy Aulia Adnan dan Siti Zahreni)

Rasio kinerja keuangan daerah dan pembiayaan infrastruktur di Kabupaten Bondowoso

(Kristian Buditiawan dan Eko Budi Santoso)

Optimalisasi pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan dana Desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa di Provinsi Sumatera Utara

(Anton Parlindungan Sinaga, Syafri, Siti Hajar, Kholilul Kholik, Nur Ambia Arma, Dumora Jenny M. Siagian, Silvia Darina dan Afri Winata Lubis)

Kebijakan akuntansi lingkungan untuk mendukung pariwisata berkelanjutan di Kawasan Danau Toba Provinsi Sumatera Utara

(Azizul Kholis, Abdul Fatah Hassanudin, Muhammad Yusuf, La Hanu dan Eko Wahyu Nugrahadi)

Evaluasi kesuksesan sistem pelatihan jarak jauh pada Balai Diklat Keuangan Makassar di masa pandemi Covid-19

(Azwar)

Hubungan self-efficacy dengan kesiapsiagaan menghadapi banjir pada masyarakat Desa Dusun dalam Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci

(Tiurmaida Simandalahi)

Pengelolaan geowisata berkelanjutan dalam mendukung pelestarian warisan geologi: perspektif collaborative governance

(Angga Wijaya Holman Fasa, Mahardhika Berliandaldo)

Diterbitkan oleh :

**Badan Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Sumatera Utara**

Inovasi	Vol. 19	No. 1	Hal. 1 - 97	Medan Mei 2022	e ISSN 2614-8935 p ISSN 2615-3815
---------	---------	-------	----------------	-------------------	--------------------------------------

Terakreditasi sebagai Jurnal Ilmiah
Terakreditasi Peringkat 2 dengan
Nomor Akreditasi : 200/M/KPT/2020



INOVASI

JURNAL POLITIK DAN KEBIJAKAN

Volume 19, Nomor 1

Mei 2022

e-ISSN 2614-8935

INOVASI: Jurnal Politik dan Kebijakan adalah jurnal ilmiah bidang ilmu politik dan kebijakan yang Terakreditasi Peringkat 2 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 200/M/KPT/2020 tanggal 23 Desember 2020.

INOVASI: Jurnal Politik dan Kebijakan sebagai media litbang Provinsi Sumatera Utara memuat karya tulis ilmiah hasil penelitian atau tinjauan kepustakaan dalam bidang pemerintahan dan masyarakat, sosial budaya, ekonomi dan pembangunan, sumberdaya alam dan maritim sebagai bahan kebijakan dan wawasan berpolitik, yang terbit dua kali dalam setahun setiap bulan Mei dan Oktober.

Pengarah/Penanggung Jawab Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara

Penanggung Jawab Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi

Redaktur Nobrya Husni, ST., M.Si

Editor Anton Parlindungan Sinaga, ST., MM
Deni Syahputra, ST., MM
Dumora Jenny Margaretha Siagian, ST., M.Si
Emma Kemalasar, S.Si., M.Si
Silvia Darina, SP

Layouter Boy Utomo Manalu, S.TI
Agus Ertiawan Debatara, S.Kom

Sekretariat Redaksi Yanita, SE
Erwina Saragih, SP
Elidawati Harahap

Mitra Bestari Volume 19, Nomor 1, Mei 2022

Dr. Azizul Kholis, SE., M.Si., CMA., CSRS (*Ekonomi Akuntansi*, Universitas Negeri Medan)
Prof. Dr. Dra. Ida Yustina, M.Si (*Kesehatan*, Universitas Sumatera Utara)
Dr. Jonni Sitorus, ST., M.Pd (*Pendidikan*, Balitbang Provinsi Sumatera Utara)
Dr. Dra. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si (*Sosial*, Universitas Medan Area)
Dr. Ir. Said Muzambiq, M. Si (*Geologi dan Lingkungan*, Universitas Sumatera Utara)
Dr. Wanda Kuswanda, S. Hut., M.Sc (*Kehutanan*, Badan Riset dan Inovasi Nasional)

Alamat Penerbit :
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jl. Sisingamangaraja No. 198 Medan 20126
Tel. (061) 7866225; 7883016 - Fax. (061) 7866248
Website: <http://jurnal.balitbang.sumutprov.go.id>
Email: inovasibpp@gmail.com

PENGANTAR REDAKSI

HORAS.....

Pembaca yang terhormat,

Masih dalam suasana bulan kemenangan yaitu Idul Fitri 1443 Hijriah, Redaksi Jurnal INOVASI mengucapkan:

“Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 H, mohon maaf lahir dan batin”

Setelah hampir 2 tahun perayaan hari besar dilakukan secara terbatas, menjadi hal yang menyenangkan karena pada tahun ini Pemerintah memberikan kebebasan untuk mudik serta waktu libur bersama yang lumayan panjang. Euforia mudik dan libur bersama tidak menyurutkan semangat Redaksi Jurnal INOVASI untuk menyajikan tulisan ilmiah yang berkualitas.

Tulisan tentang pengendalian Covid-19 di wilayah pariwisata Kabupaten Pangandaran menjadi artikel pembuka pada edisi Mei 2022, dilanjutkan dengan tulisan tentang pengaruh modal psikologis dan penerimaan teknologi di Kabupaten Pakpak Bharat. Tulisan dengan tema ekonomi dan keuangan turut meramaikan Jurnal INOVASI edisi Mei 2022 yaitu: rasio kinerja keuangan daerah dan pembiayaan infrastruktur di Kabupaten Bondowoso; optimalisasi pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan dana desa di Provinsi Sumatera Utara; serta, kebijakan akuntansi lingkungan di kawasan Danau Toba.

Evaluasi kesuksesan sistem pembelajaran jarak jauh di Balai Diklat keuangan Makassar juga mengisi Jurnal INOVASI edisi Mei 2022. Dilanjutkan dengan artikel tentang kesiapsiagaan masyarakat di Kabupaten Kerinci dalam menghadapi banjir. Tulisan penutup pada edisi kali ini adalah tentang pengelolaan geowisata berkelanjutan untuk mendukung pelestarian warisan geologi.

Semoga tulisan pada edisi kali ini bermanfaat dan memperkaya wawasan keilmuan pembaca sekalian.

Terima kasih dan selamat membaca.

-Dewan Redaksi-



INOVASI

JURNAL POLITIK DAN KEBIJAKAN

Volume 19, Nomor 1

Mei 2022

e-ISSN 2614-8935

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak/dicopy tanpa ijin dan biaya.

DDC 300.6

Yuneu Yuliasih, Endang Puji Astuti, Mara Ipa, Tri Wahono, dan Joni Hendri

Analisis kualitatif pengendalian Covid-19 berdasarkan kekuatan pentahelix di wilayah pariwisata Kabupaten Pangandaran

INOVASI: Jurnal Politik dan Kebijakan, Mei 2022, Vol 18, No. 1, halaman 1-10

Tujuan dari penelitian yaitu mengidentifikasi peran pentahelix dalam implementasi penanganan COVID-19 di Kabupaten Pangandaran. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik wawancara mendalam (indepth interview). Informan kunci dalam penelitian ini terdiri dari 50 informan yang berasal dari leading sektor (Dinas Kesehatan, Labkesda, Rumah Sakit dan Puskesmas), lintas sektor (Kecamatan, Desa), dan Satuan Tugas (Satgas) COVID-19. Peran pentahelix dalam implementasi penanganan COVID-19 di Kabupaten Pangandaran secara umum telah berjalan dengan baik terlihat dengan penerbitan Keputusan Bupati yang menjadi kekuatan hukum pelaksanaan kerjasama dan kolaborasi pentahelix dalam pelaksanaan pengendalian COVID-19 di Kabupaten Pangandaran. Semua pihak mengambil peran masing-masing dalam mendukung upaya tersebut. Faktor hambatan berupa kekurangan SDM, sarana dan prasarana serta stigma negatif pada awal pandemi telah berkurang meskipun tetap ada beberapa yang masih menjadi penghambat. Kegiatan pemberdayaan melalui Musyawarah Masyarakat Desa belum mengerucut pada rencana kegiatan yang menjadi inisiatif desa sehingga perlu upaya dalam menggerakkan masyarakat untuk bersinergi dalam peningkatan peran serta dan menginisiasi proses tahapan pemberdayaan masyarakat.

Kata kunci: pentahelix, penanganan, COVID-19, Pangandaran

DDC 321

Mohd Farouq Hasymi Nasution, Abdhy Aulia Adnan dan Siti Zahreni

Pengaruh modal psikologis dan penerimaan teknologi terhadap sistem pemerintahan berbasis elektronik pada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat

INOVASI: Jurnal Politik dan Kebijakan, Mei 2022, Vol 18, No. 1, halaman 11 - 19

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran kapasitas modal psikologis dan penerimaan teknologi dan menganalisis secara empiris pengaruh dari modal psikologis dan penerimaan teknologi terhadap sistem pemerintahan berbasis elektronik pada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan teknik analisis regresi linear berganda. Data penelitian dihasilkan melalui skala likert yang kemudian diolah dan dianalisis untuk menarik kesimpulan.

Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 255 Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat. Pemkab Pakpak Bharat dapat meningkatkan upaya memfasilitasi pengembangan diri khususnya yang berkaitan dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah kabupaten Pakpak Bharat dan menciptakan lingkungan kerja dengan teknologi yang dirasakan kemudahan dan kebermanfaatannya.

Kata kunci: sistem pemerintahan berbasis elektronik, modal psikologis, penerimaan teknologi

DDC 658.15

Kristian Buditiawan dan Eko Budi Santoso

Rasio kinerja keuangan daerah dan pembiayaan infrastruktur di Kabupaten Bondowoso

INOVASI: Jurnal Politik dan Kebijakan, Mei 2022, Vol 18, No. 1, halaman 21 - 30

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui rasio kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Analisis rasio kinerja keuangan adalah salah upaya untuk menilai kinerja keuangan daerah agar memenuhi unsur akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang baik. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kinerja keuangan daerah yang meliputi aspek rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio kemandirian, rasio aktifitas, dan rasio pertumbuhan. Analisis rasio kinerja keuangan daerah diperoleh dengan menghitung Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menggunakan rumus Rasio Kinerja Keuangan Daerah. Pembiayaan infrastruktur dapat menggunakan dana yang bersumber dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah, kerjasama pemerintah dengan badan usaha, dan dana yang bersumber dari CSR perusahaan yang ada di Kabupaten Bondowoso.

Kata kunci: keuangan, efektivitas, efisiensi, otonomi, infrastruktur

DDC 658.15

Anton Parlindungan Sinaga, Syafri, Siti Hajar, Kholilul Kholik, Nur Ambia Arma, Dumora Jenny M. Siagian, Silvia Darina dan Afri Winata Lubis

Optimalisasi pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan dana Desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa di Provinsi Sumatera Utara

INOVASI: Jurnal Politik dan Kebijakan, Mei 2022, Vol 18, No. 1, halaman 31 - 44

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan terhadap dana desa dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat desa di Provinsi Sumatera Utara. Lokasi yang ditentukan adalah

Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Karo dan Kabupaten Batubara. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, melakukan wawancara mendalam, menyebar kuesioner dan telaah dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan yaitu model interaktif Miles, Huberman dan Saldana meliputi tahap pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ditemukan bahwa: 1) Secara keseluruhan proses pengelolaan dana desa di Provinsi Sumatera Utara telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan aturan peraturan perundang-undangan; 2) Pemanfaatan dana desa digunakan untuk pembangunan desa melalui pengembangan potensi desa; 3) Pengawasan dana desa telah dilakukan sesuai dengan standar dan prosedur yang diatur dalam Permendagri no. 73 tahun 2020; dan, 4) Optimalisasi pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan dana desa dapat diselenggarakan dengan baik melalui meningkatkan kapasitas sumber daya dan potensi desa.

Kata kunci: optimalisasi, pengelolaan, pemanfaatan, pengawasan, dana desa

DDC 657.07

Azizul Kholis, Abdul Fatah Hassanudin, Muhammad Yusuf, La Hanu dan Eko Wahyu Nugrahadi

Kebijakan akuntansi lingkungan untuk mendukung pariwisata berkelanjutan di Kawasan Danau Toba Provinsi Sumatera Utara

INOVASI: Jurnal Politik dan Kebijakan, Mei 2022, Vol 18, No. 1, halaman 45 - 52

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan akuntansi lingkungan yang dijalankan oleh perusahaan di kawasan sekitar Danau Toba provinsi Sumatera Utara. Pengambilan sampel dilakukan pada 73 perusahaan di Kabupaten Simalungun, Toba, Samosir, Dairi, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, dan Karo. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan CSR (X1), Dukungan Manajemen (X2) dan Dukungan Masyarakat (X3), memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan akuntansi lingkungan perusahaan (Y). Hasil penelitian ini berkontribusi pada pentingnya perusahaan merumuskan kebijakan akuntansi lingkungan perusahaan yang didasarkan pada teori stakeholder untuk mendukung pariwisata berkelanjutan sehingga diharapkan secara kajian akademik kebijakan akuntansi lingkungan perusahaan memiliki kontribusi terhadap penguatan pariwisata berkelanjutan. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah dapat memilih sampel penelitian pada satu kelompok kategori bidang usaha yang sejenis misalnya pada bisnis perhotelan, perusahaan agen perjalanan wisata ataupun jasa transportasi air. Hasil penelitian juga membuktikan bahwa kesadaran akan pariwisata berkelanjutan sudah dipahami oleh pihak manajemen perusahaan yang dibuktikan dengan adanya dukungan program CSR di Kawasan Danau Toba.

Kata kunci: akuntansi, lingkungan, pariwisata, berkelanjutan

DDC 370.7

Azwar

Evaluasi kesuksesan sistem pelatihan jarak jauh pada Balai Diklat Keuangan Makassar di masa pandemi Covid-19

INOVASI: Jurnal Politik dan Kebijakan, Mei 2022, Vol 18, No. 1, halaman 53 - 67

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kesuksesan implementasi sistem pembelajaran jarak jauh di Balai Diklat Keuangan Makassar pada masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari responden melalui

kuesioner dan pendekatan kuantitatif melalui teknik Pemodelan Structural Equation Modelling (SEM) berbasis komponen atau varian dengan Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum sistem pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan belum sepenuhnya berjalan baik dan berhasil berdasarkan indikator atau pendekatan model DeLone dan McLean. Kualitas sistem berpengaruh terhadap kepuasan pengguna dan kepuasan pengguna juga berpengaruh terhadap manfaat bersih. Sementara kualitas informasi dan kualitas layanan tidak berpengaruh terhadap kepuasan pengguna. Balai Diklat Keuangan Makassar diharapkan dapat melakukan perbaikan kualitas informasi dan kualitas layanan dalam rangka meningkatkan kepuasan peserta pelatihan yang akan berdampak terhadap capaian hasil pembelajaran. Selain itu, diperlukan upaya bersama untuk mewujudkan konsep link and match antara pembelajaran dan pengelolaan pengetahuan dengan target kinerja pada unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan.

Kata kunci: pembelajaran jarak jauh, pelatihan, pandemi

DDC 363.34936

Tiurmaida Simandalahi

Hubungan self-efficacy dengan kesiapsiagaan menghadapi banjir pada masyarakat Desa Dusun dalam Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci

INOVASI: Jurnal Politik dan Kebijakan, Mei 2022, Vol 18, No. 1, halaman 69 - 77

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hubungan self-efficacy dengan kesiapsiagaan menghadapi banjir pada masyarakat Desa Dusun Dalam Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci. Metode penelitian menggunakan deskriptif analitik dengan pendekatan cross sectional. Penelitian dilakukan di Desa Dusun Dalam Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci, selama 1 bulan dari Agustus-September 2019 dengan melibatkan semua kepala keluarga yang berjumlah 264 orang. Sampel berjumlah 69 orang, teknik sampel yang digunakan adalah Random Sampling. Analisa data yang dilakukan adalah analisa univariat melalui distribusi frekuensi, dan bivariat melalui uji Chi-Square dengan kemaknaan 95% ($\alpha=0,05$) yang diolah secara komputerasi. Rekomendasi penelitian yang diusulkan adalah Optimalisasi edukasi terkait kesiapsiagaan & penguatan self-efficacy dalam menghadapi bencana terkhusus Banjir mulai dari level terendah dari masyarakat sampai level tertinggi pemangku dan pengambil kebijakan dengan berkolaborasi dengan stakeholder lain seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat, secara berkala mengadakan pelatihan dan simulasi kesiapsiagaan bencana, optimalisasi kebijakan yang telah diputuskan dan mengimplementasikannya di masyarakat sesuai dengan aturan yang ada, menguatkan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk mengatasi masalah banjir melalui pengadaan program bersama seperti gotong royong, perlombaan, dan lainnya.

Kata kunci: self-efficacy, kesiapsiagaan, banjir

DDC 333.7

Angga Wijaya Holman Fasa dan Mahardhika Berliandaldo

Pengelolaan geowisata berkelanjutan dalam mendukung pelestarian warisan geologi: perspektif *collaborative governance*

INOVASI: Jurnal Politik dan Kebijakan, Mei 2022, Vol 18, No. 1, halaman 79 - 97

Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami urgensi pengelolaan geowisata berkelanjutan dalam mendukung pelestarian warisan geologi, serta peran dan relasi antar para pemangku kepentingan dalam pengelolaan geowisata

berkelanjutan dalam mendukung pelestarian warisan geologi berdasarkan perspektif collaborative governance. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Studi ini menunjukkan beberapa hal: pertama, pengelolaan dan pemanfaatan warisan geologi ini dapat meningkatkan pendapatan negara dari sektor pariwisata dengan pembangunan ekonomi dan budaya lokal, serta keserasian penataan ruang dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Kedua, Peran dan relasi antar pemangku kepentingan amat dibutuhkan dalam kerangka kolaboratif, dan perlu ditunjang oleh sistem kelembagaan yang jelas, khususnya untuk mengelola keuangan dan pendapatan, manajemen fasilitas, masalah teknis, mengurus sistem manajemen harian, regulasi kolaborasi aktor seperti bisnis lokal, akademisi, pengusaha, pemerintah daerah, badan pariwisata dan masyarakat setempat. Ketiga, strategi berbagi peran dalam pengembangan geowisata adalah dengan penerapan model pentahelix yang melibatkan beberapa pihak pemangku kepentingan, antara lain Academy (Riset dan Pengabdian masyarakat), Business (Kerjasama Pembiayaan dan Penyelenggara Bisnis), Community (Pendukung Pariwisata dan Ekonomi kreatif), Government (Koordinator dan Regulator), dan Media (Promosi, Pemasaran, dan Sosialisasi).

Kata kunci: geowisata, warisan geologi, taman bumi, pengelolaan berkelanjutan, geokonservasi, collaborative governance



The discriptors given are keywords. The abstrack sheet may by reproduced/ copied without permission or charge

DDC 300.6

Yuneu Yuliasih, Endang Puji Astuti, Mara Ipa, Tri Wahono, dan Joni Hendri

Empirical Condition of Echelon III and IV Simplification of Sorong City Government

INOVASI: Journal of Politics and Policy, May 2022, Vol 19, No. 1, p. 1-10

COVID-19 is not only the responsibility of the health sector but requires collaboration between various sectors. Pangandaran is a tourist location, and a new Regency in West Java requires optimizing the role of Pentahelix to control COVID-19. The purpose of the study was to determine the Pentahelix's role in the implementation of handling COVID-19 in the Pangandaran Regency. The research is qualitative with an in-depth interview technique. The key informants in this study consisted of 50 key informants of leading sectors (Health Department, District Health Laboratory, Hospitals, and Health Centers), cross-sectoral (District, Village), and COVID-19 Task Force. The role of the Pentahelix in the implementation of the handling of COVID-19 in Pangandaran Regency, in general, has gone well by the issuance of the Regent's Decree, which becomes the legal force for the implementation of Pentahelix cooperation and collaboration. All parties taking their respective roles in supporting these efforts. Barrier factors in the form of shortages of human resources, facilities, and infrastructure, as well as negative stigma at the beginning of the pandemic, have been reduced, although there are still some that are still obstacles. Empowerment activities through Village Community Deliberations have not been converging on activity plans as village initiatives, so it needed efforts to increase community participation and process initiating of community empowerment.

Keywords: pentahelix, handling, COVID-19, Pangandaran

DDC 321

Mohd Farouq Hasymi Nasution, Abdhy Aulia Adnan dan Siti Zahreni

The effect of pshycological capital and technology acceptance of electronic-based government systems on Civil Servants of Pakpak Bharat Regency

INOVASI: Journal of Politics and Policy, May 2022, Vol 19, No. 1, p. 11 - 19

The policy implementing an electronic-based government system is carried out to realize clean, The policy of implementing an electronic-based government system is carried out to realize clean, effective, transparent, and accountable governance as well as quality and reliable public services. However, the implementation by the Pakpak Bharat Regency Government has not been maximized because they are still used to the old bureaucratic system. This study aims to provide an overview of the capacity of psychological capital and acceptance of

technology and to analyze empirically the effect of psychological capital and acceptance of the technology on an electronic-based government system for Civil Servants of the Pakpak Bharat Regency Government. This research method uses quantitative research with multiple linear regression analysis techniques. Research data is generated through a Likert scale which is then processed and analyzed to draw conclusions. The number of samples used in this study was 255 Civil Servants of the Pakpak Bharat Regency Government. The Pakpak Bharat Regency Government can increase efforts to facilitate self-development, especially those related to an electronic-based government system for Civil Service Civil Servants of the Pakpak Bharat Regency Government, and create a work environment with technology that is felt to be easy and useful.

Keywords: electronic-based government system, psychological capital, technological acceptance

DDC 658.15

Kristian Buditiawan dan Eko Budi Santoso

Regional financial performance ratio and infrastructure financing in Bondowoso District

INOVASI: Journal of Politics and Policy, May 2022, Vol 19, No. 1, p. 21 - 30

This study aims to determine the ratio of the government's financial performance Bondowoso Regency. Financial performance ratio analysis is an attempt to assess regional financial performance in order to fulfill the elements of accountability for good governance. Bondowoso Regency's financial performance during the 2016-2020 period can be said to be overall good in terms of effectiveness ratios and efficiency ratios. The independence ratio still shows the proportion of transfer receipts from the provincial/central government is still greater than the original regional income. The activity ratio illustrates that revenue is still more used to finance operational expenditures compared to capital expenditures (providing infrastructure). Infrastructure financing can use funds sourced from General Allocation Funds, Special Allocation Funds, Regional Loans, government collaboration with business entities, and funds sourced from CSR companies in Bondowoso Regency.

Keywords: financial, effectivity, efficiency, autonomy, infrastructure

DDC 658.15

Anton Parlindungan Sinaga, Syafrri, Siti Hajar , Kholilul Kholik, Nur Ambia Arma, Dumora Jenny M. Siagian, Silvia Darina dan Afri Winata Lubis

Growth of Innovation Development Through The Innovation Laboratory for Local Governments in Indonesia

INOVASI: Journal of Politics and Policy, May 2022, Vol 19, No. 1, p. 31 - 44

This study aims to determine the management, utilization, and supervision of village funds to improve the economy of rural communities in North Sumatra Province. The locations determined are Deli Serdang Regency, Langkat Regency, Karo Regency and Batubara Regency. The method used is descriptive qualitative with data collection techniques in the form of observation, conducting in-depth interviews, distributing questionnaires and reviewing documentation. The data analysis technique used is the interactive model of Miles, Huberman and Saldana covering the stages of data collection, data condensation, data presentation and conclusions. The results of the study found that 1) Overall the village fund management process in North Sumatra Province had been carried out following the procedures and laws and regulations; 2) Utilization of village funds is used for village development through the development of village potential; 3) Supervision of village funds has been carried out following the standards and procedures regulated in Permendagri no. 73; 4) Optimization of the management, utilization and supervision of village funds can be carried out properly by increasing the capacity of village resources and potentials.

Keywords: optimization, management, utilization, monitoring, village funds

DDC 657.07

Azizul Kholis, Abdul Fatah Hassanudin, Muhammad Yusuf, La Hanu dan Eko Wahyu Nugrahadi

Environmental accounting policy to support sustainable tourism in Lake Toba area, North Sumatra Province

INOVASI: Journal of Politics and Policy, May 2022, Vol 19, No. 1, p. 45 - 52

This study aims to analyze environmental accounting policies implemented by companies in the area around Lake Toba, North Sumatra province. Sampling was carried out on 73 companies in Simalungun, Toba, Samosir, Dairi, Humbang Hasundutan, North Tapanuli, and Karo Regencies. The analysis technique used is multiple regression with the results of the study showing that CSR Policy (X1), Management Support (X2) and Community Support (X3), have a significant influence on the company's environmental accounting policy (Y). The limitation of this research is that the sample does not group companies based on business categories, so that environmental accounting policies may differ from one company to another. The results of this study contribute to the importance of companies formulating environmental accounting policies based on stakeholder theory to support sustainable tourism. The recommendation for further research is to be able to select research samples in a group of similar business categories, for example in the hotel business, travel agency companies or water transportation services. The results of the study also prove that awareness of sustainable tourism has been understood by the company's management as evidenced by the support for CSR programs in the Lake Toba area.

Keywords: accounting, environment, tourism, sustainability

DDC 370.7

Azwar

Evaluation of the success of distance learning system at financial education and training agency of Makassar during the Covid-19 pandemic

INOVASI: Journal of Politics and Policy, May 2022, Vol 19, No. 1, p. 53 - 67

This study aims to measure the success of the implementation of distance learning system in the Financial Education and Training Agency of Makassar during the pandemic. This study

use data obtained from respondents through questionnaires and quantitative approaches through component or variant-based of Structural Equation Modelling (SEM) techniques with Partial Least Square (PLS). The results show that in general the distance learning system has not fully run well and successfully based on indicators or approach of DeLone and McLean model. The system quality affects user satisfaction and user satisfaction also affects the net benefits. Meanwhile, the information quality and service quality has no effect on user satisfaction. Financial Education and Training Agency of Makassar is expected to improve the quality of information and quality of services in order to improve the satisfaction of training participants that will have an impact on the achievement of learning outcomes. In addition, a joint effort is needed to realize the concept of link and match between learning and knowledge management with performance targets in work units within the Ministry of Finance.

Keywords: distance learning system, training, pandemic

DDC 363.34936

Tiurmaida Simandalahi

Correlation of self-efficacy and preparedness in facing flood OF Dusun Dalam Village COMMUNITY, Siulak Sub-District, Kerinci District

INOVASI: Journal of Politics and Policy, May 2022, Vol 19, No. 1, p. 69 - 77

The research objective was to determine the relationship between self-efficacy and flood preparedness in the people of Dusun Dalam Village, Siulak District, Kerinci Regency. The research method used was descriptive analytic with cross sectional approach. The research was conducted in Dusun Dalam Village, Siulak District, Kerinci Regency, for 1 month from August - September 2019, involving all 264 family heads. The sample was 69 people, the sample technique used was random sampling. The proposed research recommendation is optimizing education related to preparedness & strengthening self-efficacy in dealing with disasters, especially floods starting from the lowest level of the community to the highest level of stakeholders and policy makers by collaborating with other stakeholders such as the local Regional Disaster Management Agency (BPBD), periodically holding training and simulation of disaster preparedness, optimizing policies that have been decided and implementing them in the community in accordance with existing regulations, strengthening community awareness and willingness to overcome flood problems through the provision of joint programs such as mutual cooperation, competitions, and others.

Keywords: self-efficacy, preparedness, flood disaster

DDC 333.7

Angga Wijaya Holman Fasa dan Mahardhika Berliandaldo

Sustainable geotourism management for supporting the conservation of geological heritage: a collaborative governance perspective

INOVASI: Journal of Politics and Policy, May 2022, Vol 19, No. 1, p. 79 - 97

This study aims to identify and understand the urgency of sustainable geotourism management in supporting the preservation of geological heritage, as well as the role and relationship between stakeholders in supporting the preservation of geological heritage based on a collaborative governance perspective. This study shows, first, the management and utilization of geology can increase state revenues from the tourism sector with local economic and cultural development, as well as the harmony of spatial planning in realizing sustainable development. Second, the roles and relations between stakeholders are very much needed in a collaborative framework,

and need to be supported by a clear institutional system, especially for managing finances and income, facility management, technical issues, managing daily management systems, regulation of collaboration of actors such as local businesses, academics, local governments, tourism agencies and local communities. Third, the strategy of sharing roles in the development of geotourism is by applying the pentahelix model that involves several stakeholders, including the Academy, Business, Community, Government, and Media.

Keywords: geotourism, geoheritage, geopark, sustainable management, geoconservation, collaborative governance



INOVASI

JURNAL POLITIK DAN KEBIJAKAN

Volume 19, Nomor 1

May 2022

e-ISSN 2614-8935

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
✍ Analisis kualitatif pengendalian Covid-19 berdasarkan kekuatan pentahelix di wilayah pariwisata Kabupaten Pangandaran <i>(Yuneu Yuliasih, Endang Puji Astuti, Mara Ipa, Tri Wahono, dan Joni Hendri)</i>	1 - 10
✍ Pengaruh modal psikologis dan penerimaan teknologi terhadap sistem pemerintahan berbasis elektronik pada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat <i>(Mohd Farouq Hasymi Nasution, Abdhy Aulia Adnan dan Siti Zahreni)</i>	11 - 19
✍ Rasio kinerja keuangan daerah dan pembiayaan infrastruktur di Kabupaten Bondowoso <i>(Kristian Buditiawan dan Eko Budi Santoso)</i>	21 - 30
✍ Optimalisasi pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan dana Desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa di Provinsi Sumatera Utara <i>(Anton Parlindungan Sinaga, Syafri, Siti Hajar, Kholilul Kholik, Nur Ambia Arma, Dumora Jenny M. Siagian, Silvia Darina dan Afri Winata Lubis)</i>	31 - 44
✍ Kebijakan akuntansi lingkungan untuk mendukung pariwisata berkelanjutan di Kawasan Danau Toba Provinsi Sumatera Utara <i>(Azizul Kholis, Abdul Fatah Hassanudin, Muhammad Yusuf, La Hanu dan Eko Wahyu Nugrahadhi)</i>	45 - 52
✍ Evaluasi kesuksesan sistem pelatihan jarak jauh pada Balai Diklat Keuangan Makassar di masa pandemi Covid-19 <i>(Azwar)</i>	53 - 67
✍ Hubungan self-efficacy dengan kesiapsiagaan menghadapi banjir pada masyarakat Desa Dusun dalam Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci <i>(Tiurmaida Simandalahi)</i>	69 - 77
✍ Pengelolaan geowisata berkelanjutan dalam mendukung pelestarian warisan geologi: perspektif collaborative governance <i>(Angga Wijaya Holman Fasa, Mahardhika Berliandaldo)</i>	79 - 97

Hasil Penelitian

ANALISIS KUALITATIF PENGENDALIAN COVID-19 BERDASARKAN KEKUATAN PENTAHELIX DI WILAYAH PARIWISATA KABUPATEN PANGANDARAN

(QUALITATIVE ANALYSIS OF COVID-19 CONTROL BASED ON THE STRENGTH OF PENTAHELIX IN THE TOURISM AREA OF PANGANDARAN REGENCY)

Yuneu Yuliasih, Endang Puji Astuti*, Mara Ipa*, Tri Wahono*, Joni Hendri***

Badan Riset dan Inovasi Nasional
Gedung B. J. Habibie Jl. M. H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat 10340
DKI Jakarta – Indonesia
Email: yuneu.y@gmail.com

**Loka Libangkes Pangandaran
Jl. Raya Pangandaran KM. 3 Babakan Pangandaran 46396
Jawa Barat -Indonesia

Diterima: 23 Juli 2021; Direvisi: 31 Januari 2022; Disetujui: 08 Februari 2022

ABSTRAK

Kasus COVID-19 tidak hanya tanggung jawab bidang kesehatan saja, dalam penanganannya perlu kerjasama berbagai lintas sektor. Kabupaten Pangandaran sebagai lokasi wisata dan Kabupaten baru di Jawa Barat membutuhkan optimalisasi peran pentahelix dalam upaya pengendalian COVID-19. Tujuan dari penelitian yaitu mengidentifikasi peran pentahelix dalam implementasi penanganan COVID-19 di Kabupaten Pangandaran. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik wawancara mendalam (indepth interview). Informan kunci dalam penelitian ini terdiri dari 50 informan yang berasal dari leading sektor (Dinas Kesehatan, Labkesda, Rumah Sakit dan Puskesmas), lintas sektor (Kecamatan, Desa), dan Satuan Tugas (Satgas) COVID-19. Hasil menunjukkan, implementasi kebijakan merujuk pada kebijakan pusat, dengan menerbitkan Keputusan Bupati Kabupaten Pangandaran Nomor 443/Kpts.92-Huk/2020 tentang Gugus Tugas (Satgas) Percepatan Penanggulangan COVID-19. Peran dan kerjasama telah berjalan dengan baik dengan memanfaatkan wadah Satgas COVID-19 dengan semua pihak mengambil peran masing-masing dalam mendukung upaya tersebut. Faktor pendukung meliputi penerbitan Keputusan Bupati, pemberian insentif dan pemahaman masyarakat yang bagus. Sedangkan faktor penghambat berupa kekurangan SDM, sarana dan prasarana serta stigma negatif yang diterima oleh tenaga medis dan pasien COVID-19 khususnya pada awal-awal pandemi. Kegiatan pemberdayaan masyarakat telah dilakukan dengan melibatkan tim Satgas tingkat kecamatan dan desa melalui kegiatan Musyawarah Masyarakat Desa. Peran pentahelix dalam implementasi penanganan COVID-19 di Kabupaten Pangandaran secara umum telah berjalan dengan baik terlihat dengan penerbitan Keputusan Bupati yang menjadi kekuatan hukum pelaksanaan kerjasama dan kolaborasi pentahelix dalam pelaksanaan pengendalian COVID-19 di Kabupaten Pangandaran. Semua pihak mengambil peran masing-masing dalam mendukung upaya tersebut. Faktor hambatan berupa kekurangan SDM, sarana dan prasarana serta stigma negatif pada awal pandemi telah berkurang meskipun tetap ada beberapa yang masih menjadi penghambat. Kegiatan pemberdayaan melalui Musyawarah Masyarakat Desa belum mengerucut pada rencana kegiatan yang menjadi inisiatif desa sehingga perlu upaya dalam menggerakkan masyarakat untuk bersinergi dalam peningkatan peran serta dan menginisiasi proses tahapan pemberdayaan masyarakat.

Kata kunci: pentahelix, penanganan, COVID-19, Pangandaran

ABSTRACT

COVID-19 is not only the responsibility of the health sector but requires collaboration between various sectors. Pangandaran is a tourist location, and a new Regency in West Java requires optimizing the role of Pentahelix to control COVID-19. The purpose of the study was to determine the Pentahelix's role in the implementation of handling COVID-19 in the Pangandaran Regency. The research is qualitative with an in-depth interview technique. The key informants in this study consisted of 50 key informants of leading sectors (Health Department, District Health Laboratory, Hospitals, and Health Centers), cross-sectoral (District, Village), and COVID-19 Task Force. The results showed policy implementation refers to the central policy by issuing Pangandaran Regency Regent Decree Number 443/Kpts.92-Huk/2020 concerning the Task Force for the acceleration of COVID-19 Response. Roles and collaborations have gone well, and all parties taking their respective roles in supporting these efforts. Supporting factors include the issuance of the Regent's Decree, the provision of incentives, and good public understanding. While the inhibiting factors are the lack of human resources, facilities, and infrastructure as well as the negative stigma received by medical personnel and COVID-19 patients, especially at the beginning of the pandemic. Community empowerment activities have been carried out by involving the District and Village level Task Force teams through Village Community Deliberations. The role of the Pentahelix in the implementation of the handling of COVID-19 in Pangandaran Regency, in general, has gone well by the issuance of the Regent's Decree, which becomes the legal force for the implementation of Pentahelix cooperation and collaboration. All parties taking their respective roles in supporting these efforts. Barrier factors in the form of shortages of human resources, facilities, and infrastructure, as well as negative stigma at the beginning of the pandemic, have been reduced, although there are still some that are still obstacles. Empowerment activities through Village Community Deliberations have not been converging on activity plans as village initiatives, so it needed efforts to increase community participation and process initiating of community empowerment.

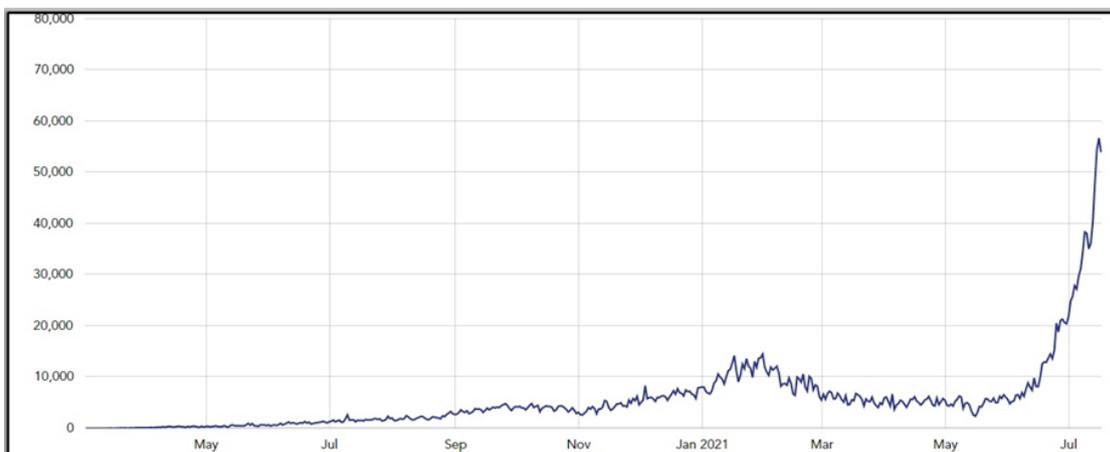
Keywords: pentahelix, handling, COVID-19, Pangandaran

PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 sejak pertengahan tahun 2020 telah memasuki masa transisi Adaptasi Kenormalan Baru (AKB). Secara nasional, laju pertumbuhan kasus masih cenderung mengalami peningkatan hingga akhir tahun 2020. Situasi kasus COVID-19 telah dilaporkan di seluruh provinsi (34 provinsi) di Indonesia. Sejak awal tahun 2021, laju pertumbuhan kasus terus meningkat dan telah terjadi kenaikan yang cukup tajam yang diindikasikan sebagai gelombang kedua pada bulan Juni-Juli 2021. Berdasarkan data harian, jumlah kasus per tanggal 1 Januari 2021 tercatat 8.072 kasus sedangkan per tanggal 15 Juli 2021 mencapai 56.757 kasus. Data kumulatif kasus

terkonfirmasi COVID-19 hingga 16 Juli 2021 sebanyak 2.780.803 dan terjadi pula peningkatan kematian hingga mencapai 71.397 kematian (Komite Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi, 2021).

Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang mempunyai prosentase kasus tertinggi kedua setelah DKI Jakarta yaitu sebesar 18,0% (Komite Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi, 2021). Rasio kasus terkonfirmasi per kab/kota di Jawa Barat, enam tertinggi berturut-turut adalah Kota Depok, Bekasi, Bandung, Bogor, serta Kabupaten Bogor dan Garut (Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Provinsi Jawa Barat, 2021).



Gambar 1. Perkembangan kasus terkonfirmasi COVID-19 per hari
Sumber: Komite Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi(2021)

Kabupaten Pangandaran telah dinobatkan oleh Asiaroom sebagai kabupaten pariwisata dengan potensi pantai terbaik di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Pangandaran juga melaporkan adanya kenaikan kasus COVID-19 walaupun rasio kasus terkonfirmasi di urutan ke-27 dari 27 Kab/Kota di Jawa Barat (Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Provinsi Jawa Barat, 2021). Kabupaten Pangandaran sebagai tempat wisata mempunyai potensi risiko tinggi dalam penularan kasus. Upaya kewaspadaan dini sejak masa awal pandemi hingga masa AKB masih terus dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai upaya dukungan kebijakan pemerintah pusat, mulai dari peningkatan *testing* dan *tracing*, edukasi protokol kesehatan, pengetatan keluar masuk pendatang/wisatawan, persiapan desa siaga (pemberdayaan masyarakat) serta penatalaksanaan kasus COVID-19.

Penanganan kasus COVID-19 tidak dapat hanya dilakukan oleh *leading* kesehatan saja, perlu kerjasama dan peran dari berbagai aspek. Peran pentahelix (multipihak) yang merupakan unsur pemerintah, masyarakat, swasta, fasilitas pelayanan kesehatan/Fasyankes, akademisi) menjadi satu kesatuan yang penting dalam upaya pengendalian COVID-19 yang sinergis. Kabupaten Pangandaran sebagai lokasi wisata dan Kabupaten baru (Pemekaran) di Jawa Barat membutuhkan optimalisasi peran pentahelix dalam upaya pengendalian COVID-19. Upaya sinergitas antara *leading* sektor dan lintas sektor harus selalu dioptimalkan dengan meminimalisir kesenjangan (gap) dan permasalahan.

Hasil penelitian di Kota Pekalongan tahun 2020 melaporkan bahwa berbagai unsur pentahelix telah mengambil peranan walaupun masih terdapat beberapa kesenjangan dalam implementasi pelaksanaan penanganan COVID-19 (Latif, Isrofah and Priharwanti, 2020). Selain itu, masyarakat juga merupakan unsur penting dalam pengendalian COVID-19. Beberapa hasil penelitian melaporkan bahwa pemberdayaan masyarakat dan penguatan unsur forum pemuda juga mampu memperkuat penanganan COVID-19 (Amin *et al.*, 2020; Arisanti and Suderana, 2020).

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka perlu dilakukan upaya-upaya strategis kolaborasi semua pihak baik sektor kesehatan maupun lintas sektor dalam rangka pengendalian kasus COVID-19. Belum adanya penelitian yang menggambarkan tentang kekuatan pentahelix dalam pengendalian COVID-19 pada masa AKB di Kabupaten Pangandaran. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan ingin mengetahui peran pentahelix dalam implementasi penanganan COVID-19 di

Kabupaten Pangandaran. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi penguatan peran pentahelix yang didukung dari potensi yang dimiliki untuk pengendalian COVID-19.

METODE

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang telah mendapat persetujuan etik (*ethical approval*) dari Badan Litbangkes Kemenkes RI Nomor LB.02.01/2/KE.550/2020 dan merupakan analisa lanjut dari penelitian "Penguatan Surveilans Pelacakan Kasus Kontak COVID-19 di Kabupaten Pangandaran". Penelitian dilakukan di empat wilayah kerja Puskesmas terpilih berdasarkan kriteria kasus terbanyak serta perwakilan wilayah pedesaan dan perkotaan. Puskesmas terpilih adalah Puskesmas Pangandaran, Padaherang, Cimerak dan Jadikarya. Pengumpulan data dilaksanakan pada Bulan Agustus – September 2020.

Metode pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dengan teknik wawancara mendalam (*indepth interview*). Validitas data diukur dari pemahaman informan, data yang disampaikan oleh informan dilakukan validasi triangulasi melalui konfirmasi pada beberapa informan (triangulasi sumber) (Rubin and Rubin, 2012). Informan terdiri dari 25 informan kunci yang terdiri dari *leading* sektor (Dinas Kesehatan, Labkesda, Rumah Sakit dan Puskesmas), lintas sektor (Satuan Tugas COVID-19 Kecamatan dan Desa). Sebelum melakukan wawancara mendalam, dilakukan penjelasan dan persetujuan *informed consent* dari informan, kemudian seluruh wawancara direkam untuk menilai keakuratan dalam menginterpretasikan program upaya pengendalian dan penanganan COVID-19 di Kabupaten Pangandaran.

Indepth interview menggunakan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan tema sesuai tujuan penelitian. Analisa data menggunakan teknik analisis tematik yang disajikan secara deskriptif. Data yang telah dikumpulkan dilakukan cleaning data, transkrip hasil rekaman wawancara dan pembuatan matriks berdasarkan tema, selanjutnya dicari kesamaan dan perbedaan yang dikaitkan dengan teori yang relevan. Analisis tematik digunakan untuk menganalisa hasil *indepth interview* pada tema terkait kegiatan penanganan kasus COVID-19 berdasarkan peran dari unsur pentahelix serta faktor pendukung dan penghambat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan. Implementasi kebijakan dalam pengendalian COVID-19 di Kabupaten Pangandaran merujuk pada kebijakan pusat, diterbitkan Keputusan Bupati Kabupaten

Pangandaran Nomor 443/Kpts.92-Huk/2020 tentang Gugus Tugas (Satgas) Percepatan Penanggulangan COVID-19. Keputusan Bupati dengan pembentukan Satgas menjadi satu titik kekuatan hukum pelaksanaan kerjasama dan kolaborasi pentahelix yang terdiri dari berbagai pihak baik *leading* sektor kesehatan, lintas sektor kecamatan-desa, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), aparat (kepolisian, TNI dan satpol PP), perguruan tinggi serta masyarakat.

Dalam kebijakan tingkat daerah yang dibentuk dalam rangka penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Pangandaran, termuat berbagai upaya dan strategi yang diperlukan seperti penerapan protokol kesehatan, pemeriksaan kelompok berisiko, *testing* dan *tracking* kasus kontak dan penanggulangan kegiatan-kegiatan yang berpotensi penularan, seperti penjelasan informan berikut:

"Kalo khusus pangandaran paling berupa perbup perbup aja. Strategi penanggulangannya ya kelompok kelompok berisiko dilakukan pemeriksaan, kemudian setelah ditemukan kasus dilakukan tracking, eee kemudian potensi potensi terjadinya corona juga dilakukan pemeriksaan seperti pelaku wisata begitu itu juga dilakukan pemeriksaan." (Faskes Laboratorium, Kabupaten)

Meskipun kebijakan tingkat daerah telah terbentuk, namun pada implementasinya belum terealisasi dengan optimal, terutama kaitannya dengan implementasi di masyarakat. Kebijakan berupa Keputusan Bupati dan Peraturan Bupati belum juga mampu mengikat masyarakat untuk patuh terhadap protokol kesehatan, meskipun berbagai upaya seperti razia dan sanksi sosial telah diterapkan.

"Kenyataan mereka tidak jera, tidak jera kan ya, dari pusat kan juga ada denda segala macam. Nah salah satu regulasi sekarang Perbupnya ini ya untuk pencegahan penanganan covid ini nah kita itu ditingkatkan dari Perbup menjadi Perda, jadi akan di Perdakan. Akan di Perdakan, sekarang lagi proses, Perda lagi proses di Perdakan supaya lebih kuat. (Leading Sektor Kabupaten)

Implementasi pengendalian COVID-19 terdiri atas beberapa pilar kegiatan diantaranya adalah surveilan epidemiologi selain edukasi dan promosi. Surveilan epidemiologi dan upaya penemuan kasus aktif merupakan salah satu pilar penanggulangan COVID-19 yang sangat penting. Secara umum, kegiatan *testing* dan *tracing* adalah strategi efektif dan kuat sehingga

dapat mengidentifikasi, menilai dan mengelola orang-orang yang berpotensi terinfeksi sebelum gejala yang parah muncul, dan jika dilakukan dengan cukup cepat dapat mencegah transmisi selanjutnya (Hogben M, Collins D, Hoots B, 2016). Proses kegiatan *surveilans* dengan melakukan penekanan pada pemeriksaan pendatang/wisatawan, karantina dan isolasi, sebelumnya telah digunakan mengontrol penyakit seperti TBC, Sindrom Pernafasan Timur Tengah, dan SARS (Glasser JW, Hupert N, McCauley MM, 2011).

Peran dan kerjasama. Pelaksanaan pengendalian COVID-19 di Kabupaten Pangandaran telah berjalan dengan baik dengan memanfaatkan wadah Satgas COVID-19 yang melibatkan semua pihak. Penanganan kasus konfirmasi dan surveilan COVID-19, alur komando di pimpin oleh *leading* sektor kesehatan, pihak lain mengambil peran masing-masing dalam mendukung upaya tersebut. Kegiatan terkait edukasi, sosialisasi dan ketertiban pelaksanaan protokol kesehatan dilaksanakan oleh semua SKPD dan aparat keamanan. Suatu kegiatan upaya pengendalian penyakit menular membutuhkan kompetensi tenaga yang handal dapat menciptakan suatu kegiatan pencegahan dan penanggulangan faktor risiko (Herrera *et al.*, 2015).

Pembagian tugas dan peran masing-masing unsur sangat penting sehingga kegiatan dapat berjalan dengan optimal. Kegiatan pemantauan kasus di Kabupaten Pangandaran dilaksanakan oleh tim Satgas desa dengan bantuan para kader, sedangkan fasilitatornya adalah tim kesehatan puskesmas yang diwakili oleh bidan desa. Pembagian tugas tersebut adalah salah satu upaya dalam meminimalisir adanya kekurangan tenaga. Santoso (2020) mengemukakan hasil penelitian di 216 puskesmas bahwa masih terdapat 15% puskesmas yang belum optimal menyiapkan sumber daya dalam penanganan COVID-19 di wilayahnya (Santosa, 2020). Peran dan kerjasama semua unsur dalam implementasinya terangkum dalam tabel 1.

Berdasarkan hasil wawancara didapatkan bahwa kerjasama lintas sektor di Kabupaten Pangandaran telah ada dan berjalan dengan baik. Mulai dari tingkat Kabupaten hingga tingkat desa telah aktif dengan dibentuknya Satgas COVID-19. Pelaporan dan keputusan dalam penanganan COVID-19 menggunakan media sosial yaitu WhatsApp. Penggunaan media ini dirasakan cukup efektif dalam penanganan kasus COVID-19 sehingga keputusan akan kebijakan yang diambil diketahui oleh semua tim dan SKPD Kabupaten.

Tabel 1. Peran dan kerjasama unsur pelaksana pengendalian COVID-19

Tema	Fasilitas kesehatan (Faskes) Rujukan Tingkat Lanjut	Fasilitas kesehatan (Faskes) Primer	Leading sektor Kecamatan	Leading Sektor Kabupaten
Peran dan Kerjasama	<ul style="list-style-type: none"> • Faskes rujukan tingkat lanjut telah melaksanakan tugas sesuai dengan Panduan Teknis Faskes • Kerjasama pihak faskes rujukan tingkat lanjut dengan lintas sektor lain terkait penerimaan pasien telah berjalan baik. • Kerjasama pemeriksaan sampel COVID-19 dengan Labkesda dan faskes lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama surveilans faskes dengan lintas sektor lain sudah ada, namun kurang optimal • Stigma negatif terhadap penderita COVID-19 sedikit menyulitkan koordinasi lintas sektor dan tugas surveilans 	<ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama antara leading sektor dan lintas sektor sudah terjalin dan diperkuat dengan Surat Keputusan (SK) • Stigma negatif sedikit menyulitkan surveilans 	<ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama lintas sektor telah dibangun pada setiap level kabupaten hingga desa • Koordinasi lintas sektor dilakukan melalui grup pesan elektronik • Kegiatan berjalan optimal dan setiap unsur telah melaksanakan perannya masing-masing
Dukungan	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala daerah memberikan dukungan terhadap penanganan COVID-19 melalui SK Bupati • Pemberian insentif terkait COVID-19 	<ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama dengan lintas sektor sudah ada dan berjalan • Sarana dan prasarana untuk surveilans memadai 	<ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama lintas sektor sudah terjalin • Lintas sektor membantu promosi dan edukasi mengenai COVID-19 • Masyarakat sudah mulai paham pencegahan dan penanganan pasien COVID-19 	<ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama lintas sektor telah dibangun pada setiap level kabupaten hingga desa • Adanya insentif bagi nakes yang terlibat penanganan COVID-19 • Masyarakat sudah mulai paham pencegahan dan penanganan pasien COVID-19
Hambatan	<ul style="list-style-type: none"> • Keterlambatan proses laporan • Keterlambatan identitas lengkap pasien • Kekurangan sarana dan prasarana penanganan pasien COVID-19 awal masa pandemi 	<ul style="list-style-type: none"> • Rangkap tugas dengan pekerjaan di dinas • Stigma negatif terhadap petugas surveilans di masyarakat masih dijumpai 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih diperlukan promosi dan edukasi ke masyarakat terkait COVID-19 • Masih dijumpai stigma negatif terhadap petugas dan pasien COVID-19 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih dijumpai stigma negatif terhadap petugas dan pasien COVID-19 • Beban kerja nakes yang terlibat penanganan COVID-19 bertambah • Format dan aplikasi pelaporan yang diminta pemerintah pusat dan provinsi berbeda. Menambah beban kerja bagi petugas.

Selain itu, kegiatan komunikasi, edukasi dan informasi (KIE) tentang COVID-19 juga memanfaatkan media sosial seperti adanya website resmi COVID-19 yang dikelola oleh Pikobar Kabupaten Pangandaran, instagram, twitter yang dikelola oleh Humas dan tim publikasi pemerintah daerah serta beberapa media yang mendukung lainnya.

Peran media sosial dapat mempercepat pelaporan dan penyebaran informasi sehingga akan mempercepat pula keputusan dalam pengambilan kebijakan, untuk sebagian besar masyarakat dapat mempermudah pemahaman terhadap informasi terkait COVID-19 (Sampurno, Kusumandyoko and Islam, 2020). Media sosial juga banyak diminati dan digunakan oleh fasilitas kesehatan terutama dalam pemberian informasi terkait COVID-19 (Vionita and Prayoga, 2021).

"Alhamdulillah eee baik Pak karena walaupun jam berapapun ada pasien ya Pak ya Alhamdulillah kita telfon itu selalu diangkat karena memang eee kita udah berkomitmen dari awal mungkin ya. kadang-kadang Labkesda juga siap gitu mereka, walaupun mereka tidak 24 jam gitu." (Faskes Rujukan Tingkat Lanjut)

"Kalau lintas sektor..udh jelas..kalau lintas sektor ada lagi grup ...yaitu grup gugus kecamatan...itu jelas...kalau misal ada permasalahan satu...ada ternyata terindikasi positif satu...langsung kita wa disana...pak kuwunya..ada pak camatnya...pak.yang lintas sektor darimana dishub semua....gtu semua bergerak aktif semua..kalau dipadaherang mah....bagus...gtu penanganannya." (Faskes Primer, Cimerak)

"...Peran lintas sektor dalam tracking paling kalo kita tanyakan ini orang sudah kontak dengan siapa aja biasanya dari lintas sektor suka ikut membantu supaya ada keterbukaan dari pihak keluarga untuk berbicara ee ini orang itu sudah dari mana aja karena kan ada beberapa kasus yang ternyata memimpin pengajian dimana di moshola mana, jadi peran lintas sektor mendampingi begitu supaya berjalan dengan lancar." (Faskes primer, Pangandaran)

Kerjasama ini bukan tanpa masalah. Masalah terbesar berada di level terendah yang berhadapan dengan masyarakat langsung. Beberapa stigma negatif mengenai petugas

kesehatan dan penderita COVID-19 sedikit banyak menyulitkan para petugas untuk melakukan kegiatan surveilan dengan baik. Selain itu, terdapat informan yang menyatakan jika kerjasama lintas sektor yang terjalin kurang optimal dalam kaitannya dengan surveilans COVID-19. Berikut petikan beberapa pernyataan dari informan:

"Kalau lintas program lumayan bagus kita koordinasinya, lintas program maupun lintas sektor, makanya kemaren itu pelaporan lebih cepat dan penanganan juga cepat. Tapi, kendalanya dalah lebih ke pengetahuan mereka untuk penanganan COVID dan kesiapan mereka dalam menangani wabah ini. Belum memahami juga itu, ke masyarakat juga belum. Kita sosialisasi kemana mana tapi kurang dipahami juga. Kayak kemaren mau sekolah mereka kurang memahami juga ya. Jadi, kita yang langsung turun ke bawah, memantaunya." (Faskes primer, Padaherang)

"...kalau dibilang sempurna ga bisa ya, tapi kendala semua bisa di hadapi , kalau kita di kabupaten otomatis dengan tingkat SKPD ,kalau untuk di tingkat desa itu sudah ada satgas desa.. satgas desa, satgas kecamatan langsung satgas kabupaten, kalau kabupaten di ketuai langsung oleh pa SEKDA." (Leading sektor Kabupaten)

Kolaborasi dan kerjasama antara sektor dan lintas sektor telah terjalin dengan baik. Hal ini telah ada payung hukum koordinasi yaitu SK Struktur Satgas COVID-19 yang diterbitkan oleh Bupati. Koordinasi lintas sektor selama ini hanya melalui media sosial yaitu *whatsapp group* dan kontak secara langsung. Koordinasi dengan SKPD lain dapat dilaksanakan berdasarkan SK Bupati, namun alur komando tetap di Dinas Kesehatan. Kolaborasi antara *leading* sektor kesehatan, pemerintah daerah dan lintas sektor (SKPD lainnya) untuk upaya surveilan dan pengendalian COVID-19 di Kabupaten Pangandaran sudah cukup baik pelaksanaannya.

Penelitian Muhammad (2020) menyebutkan bahwa terdapat peran penting saat kegiatan surveilan dan pencegahan COVID-19 pada aspek keamanan yaitu oleh tim Banbinkabtimas dan polisi, dimana mereka berperan sebagai pengawasan dan pengontrol saat di lapangan untuk mengantisipasi saat terjadinya perkumpulan massa yang menyebabkan banyak orang sehingga rawan untuk tertular COVID-19.

Kejadian di Bali juga menyebutkan bahwa sinergitas antara desa adat dan desa dinas memiliki peranan masing masing dalam upaya pencegahan dan upaya percepatan penanggulangan COVID-19, masing-masing memiliki regulasi yang saling mendukung (Udytama and Susrama, 2020).

Faktor pendukung dan hambatan. Berdasarkan hasil wawancara terhadap informasi mengenai dukungan dan hambatan terhadap penanganan COVID-19 di Kabupaten Pangandaran, secara umum terbagi ke dalam dua masa, yakni pada masa awal dan setelahnya. Meskipun tidak begitu jelas waktu pembagian awal pandemi, para informan lebih banyak mengeluhkan banyaknya hambatan pada masa tersebut. Umumnya keluhan hambatan ditujukan terhadap sarana dan prasarana serta stigma negatif yang diterima oleh tenaga medis dan pasien COVID-19. Stigma sosial pada tenaga kesehatan akan memberikan pengaruh terhadap kinerja dan psikologis mereka (Ramaci *et al.*, 2020).

Penolakan dan terjadinya stigma sosial di masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah egosentris individu, informasi bias dan kegagalan edukasi. Timbulnya stigma sosial pada individu yang dipupuk dan ditumbuhkan lalu disebarkan kepada orang lain akan membentuk pemahaman kolektif sehingga terjadinya bentuk stigma sosial dan penolakan oleh kelompok masyarakat (Agustang, Mutiara and Asrifan, 2021).

"Pertama eeeh yang sulitnya memberikan pengertian kepada masyarakat, sosialisasi. Jadi bahwa penyakit eee covid ini seolah-olah aib atau gimana lah jadi sanksi sosial masyarakat stigmanya masih tinggi.karena pemahaman itu makanya masyarakat akhirnya mengucilkan kepada pasien kasian juga..." (Leading sektor Kabupaten)

"Jadi menyikapi masalah pandemic ini, masyarakat ya... jadi penyakit ini dianggap hanya sebagai penyakit biasa. Anggapan mereka ya penyakit ini seperti penyakit biasa gitu. Kita kan di wilayah kampong ya.. jadi pengetahuan mereka itu masih minim ya, tingkat pendidikan kesehatannya. Kebanyakan ke adat sih sebetulnya, jadi masih kuat ke adatnya..." (Faskes primer, Jadikarya)

".....Ya kita koordinasi sama lintas sektor itu ee ada yang berhasil ada yang kurang tapi sementara ini kurang

maksimal kata saya mah....Ngga sih selama ini..Cuma kurang aja partisipasinya aja." (Faskes Primer, Cimerak)

Dukungan dari Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Kab. Pangandaran terhadap tenaga kesehatan telah memberi angin segar bagi kelancaran penanganan COVID-19 diantaranya kegiatan surveilan maupun penanganan kasus COVID-19. Kegiatan promosi kesehatan dan edukasi kepada masyarakat baik dari pihak sektor, SKPD, aparat (polisi, TNI, satpol PP), kecamatan/desa serta tokoh masyarakat/tokoh agama membuahkan hasil dengan menurunnya daya tolak masyarakat terhadap petugas kesehatan dalam menjalankan tugas surveilan.

Dukungan pemerintah daerah mempunyai pengaruh yang baik terhadap penanganan COVID-19, selain itu dukungan sosial juga mempunyai kontribusi terhadap perilaku masyarakat terkait pencegahan COVID-19. Sumber informasi yang terpercaya juga mampu mempengaruhi masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan dan upaya pencegahan COVID-19 (Kundari *et al.*, 2020).

"Kemudian kebijakan pusat kan kebetulan udah tertuang ya dalam Permenkes atau segala macam nah kita ikuti itu juga Pak. Nah kebijakan daerah kita patut acungi jempol ya untuk Kepala Daerah kita yang begitu respect terhadap eee pasien covid jadi eee justru eee dukungan beliau yah yang membuat kami itu semangat untuk segera menindak lanjuti kalau ada pasien yang covid..." (Faskes Rujukan Tingkat Lanjut, Kabupaten)

"He eh, paling yang paling menguatkan ya kenapa daerah pangandaran ini karena adanya surat rujukan dari provinsi bahwa rumah sakit Pandega Pangandaran sebagai rumah sakit rujukan covid, he eh gitu. Kemarin itu kan sempet dari APBD ya, kita dapet insentif dari APBD, artinya dengan begitu pemerintah daerah mengapresiasi nih kinerja petugas covid yang memang betul-betul rentan terpapar gitu ya pak ya nah seperti itu." (Faskes Rujukan Tingkat Lanjut, Kabupaten)

Pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan di Kabupaten Pangandaran melibatkan tim satgas tingkat Kecamatan dan Desa. Setiap wilayah mempunyai strategi dalam melakukan kegiatan pengendalian COVID-19 seperti

melaksanakan edukasi (sosialisasi), pemantauan bagi masyarakat yang melakukan karantina/isolasi, pengawasan keluar masuknya pendatang/wisatawan, pengawasan kegiatan yang bersifat massal (hajatan, kerumunan, dll), serta pengawasan protokol kesehatan bagi para warga. Kerjasama lintas sektor sangat diperlukan dalam penanggulangan dan pencegahan COVID-19.

Beberapa informan yang berhasil ditemui, mereka mempunyai strategi masing-masing dalam penanggulangan COVID-19 di wilayahnya. Kegiatan pengendalian COVID-19 juga disampaikan secara rutin dalam kegiatan forum Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) yang didampingi oleh sektor kesehatan (Puskesmas).

"Mungkin di masyarakat di forum-forum umum kita juga menyampaikan secara informasi tapi dengan, bukan sekedar informasi ya mungkin di sini kami juga sama menerapkan di masyarakat itu dengan apa..bentuk kegiatan misalnya informasi yang mungkin hal2 yang harus kita laksanakan yaitu pemantauan kemudian juga eee...kerumunan2 seperti itu kita antisipasi, satu 2 aja kita adakan kegiatan di sarankan kan untuk masyarakat tetap untuk menjaga protokol kesehatan itu selalu di sampaikan ,kemudian tidak cukup dengan itu kami pun di kala ada kerumunan2 ya dengan gugus tugas desa kana da seperti halnya ada hajatan seperti itu, ya kita survey ke lapangan kita lihat bahkan kita bantu masyarakat yang mengadakan kegiatan hajatan satu contoh disitu kan dia ketika mengadakan siap dengan protokol kesehatan dengan tanda tangan yang di atas materai itu" (Lintas sektor Kecamatan, Cimerak)

"Penyemprotan, itu tiap bulan satu kali mah ada, tiap rutin gitu. ya di usahakan itu masyarakat pakai masker gitu, cuci tangan ,itu mah biasa di sosialisasikan terus"(Lintas Sektor Desa, Jadikarya)

"MMD itu seperti ya pertemuan, itu kan termasuknya di dalamnya itu ada ,dari Desa gitu kan ada sambutan gitu... bisa terlaksanakan gitu dalam urusan kesehatan... di sampaikan juga tentang eta penularan dan pencegahan corona" (Lintas Sektor Desa, Padaherang)

Kegiatan pemberdayaan masyarakat sangat penting dalam menyiapkan desa siaga untuk penanggulangan COVID-19. Upaya ini diwakili

dengan kegiatan surveilan berbasis masyarakat (SBM). Kabupaten Pangandaran telah melaksanakan kegiatan MMD, namun kegiatan ini belum sampai mengerucut pada rencana kegiatan yang menjadi inisiatif desa. Perlu upaya optimal dalam menggerakkan masyarakat untuk bersinergi dalam peningkatan peran serta dan menginisiasi proses tahapan pemberdayaan masyarakat.

Kerjasama dan koordinasi lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat yang baik akan dapat mengoptimalkan setiap upaya kegiatan pengendalian COVID-19 di Kabupaten Pangandaran. Sinergitas antara sektor kesehatan, lintas sektor dan masyarakat akan meningkatkan upaya pengendalian penyakit menular secara optimal (Sommerfeld and Kroeger, 2012).

Upaya pengendalian COVID-19 melalui pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Klaten dengan jargon "Gotong Royong Jogo Tonggo" mampu meningkatkan disiplin protokol kesehatan warga (Nurhidayati, Handayani and Agustiningrum, 2021). Pembentukan satgas COVID-19, kolaborasi beberapa unsur kepemudaan juga mampu memperkuat penanganan COVID-19 (Amin *et al.*, 2020)(Arisanti and Suderana, 2020).

KESIMPULAN

Dukungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pangandaran dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Nomor 443/Kpts.92-Huk/2020 tentang Gugus Tugas (Satgas) Percepatan Penanggulangan COVID-19 yang menjadi kekuatan hukum pelaksanaan kerjasama dan kolaborasi pentahelix dalam pelaksanaan pengendalian COVID-19 di Kabupaten Pangandaran. Peran dan kerjasama telah berjalan dengan baik dengan memanfaatkan wadah Satgas COVID-19 dengan semua pihak mengambil peran masing-masing dalam mendukung upaya tersebut. Faktor pendukung meliputi penerbitan Keputusan Bupati, pemberian insentif dan pemahaman masyarakat yang bagus. Sedangkan faktor hambatan berupa kekurangan SDM, sarana dan prasarana serta stigma negatif yang diterima oleh tenaga medis dan pasien COVID-19 khususnya pada awal-awal pandemi telah berkurang meskipun tetap ada beberapa yang masih menjadi penghambat. Optimalisasi kerjasama lintas sektor perlu dilakukan secara massif dan konsisten sampai ke lingkungan terkecil (RW-RT dan keluarga) sebagai upaya peningkatan pemahaman terkait COVID-19 dan meminimalisir stigma.

REKOMENDASI

Kegiatan yang dapat dilakukan sebagai upaya penguatan pengendalian COVID-19 berdasarkan kekuatan pentahelix, yaitu:

1. Pelibatan tokoh masyarakat, agama dan organisasi sosial yang dekat dengan masyarakat sebagai upaya edukasi massif terkait COVID-19 untuk meminimalisir stigma.
2. Ekstensifikasi dan penguatan tenaga surveilans COVID-19 sebagai upaya perluasan cakupan *Tracing, Testing* dan *Treatment* (3T) dan ketepatan pengiriman laporan dengan mengikutsertakan tenaga relawan COVID-19 dari berbagai SKPD di tingkat Kabupaten.
3. Optimalisasi peran setiap SKPD di tingkat Kabupaten dalam upaya penanganan COVID-19 melalui legalitas dari Bupati.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Litbangkes Kemenkes RI, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Kepala Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Pangandaran yang telah memberikan kesempatan dan dukungan sehingga penelitian ini terlaksana. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran; Lintas Sektor Kabupaten Pangandaran; Puskesmas Pangandaran, Padaherang, Cimerak dan Jadikarya; Kecamatan dan Desa di wilayah Pangandaran, Padaherang, Cimerak dan Jadikarya. Selanjutnya juga ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Agustang, A., Mutiara, I. A. and Asrifan, A. 2021. Genealogi Stigma Sosial Terhadap Pasien Covid 19. [Online] Dari: https://www.researchgate.net/publication/348373218_Genealogi_Stigma_Sosial_Terhadap_Pasien_Covid_19?enrichId=rgreq-58acabdf8ee2d31541a8f9260608c029-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM0ODM3MzIxODtBUzoXMDkzMjI1MDcwNzY4MTUwQDE2Mzc2NTY1NzY4NjM%3D&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf [Diakses:5 Juli 2020].

Amin, M. *et al.* 2020. 'Pembentukan Satgas Siaga Covid-19 dan Implementasi Tupoksi Satgas Desa Mulyoagung Kabupaten Malang', *Jurnal Graha Pengabdian*. 2(4) hal. 366-377.

Arisanti, N. M. D. and Suderana, I. W. 2020. Penanganan Pandemi COVID-19: Kolaborasi Pemerintah Kabupaten bersama KNPI Gianyar di Kabupaten Gianyar, Bali. *Spirit Publik: Jurnal*

Administrasi Publik. 15(2) hal. 87-96. doi: 10.20961/sp.v15i2.43097.

Glasser JW, Hupert N, McCauley MM, H. R. 2011. Modeling and public health emergency responses: lessons from SARS. *Epidemics*. 3(2011) hal. 32-37.

Herrera, S. *et al.* 2015. Prospects for Malaria Elimination in Mesoamerica and Hispaniola. *PLOS Neglected Tropical Disease*, May 14, hal. 1-15.

Hogben, M. Collins. D, Hoots, B. *et al.* 2016. Partner Services in Sexually Transmitted Disease prevention programs: A review. *Sex Transm Dis*. 43(2) hal. 53-62. doi: 10.1097/OLQ.0000000000000328.

Komite Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi. 2021. *Peta Sebaran COVID-19*.

Kundari, N. F. *et al.* 2020. Hubungan Dukungan Sosial dan Keterpaparan Media Sosial terhadap Perilaku Pencegahan COVID-19 pada Komunitas Wilayah Jabodetabek Tahun 2020. *Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan*. 30(4) hal. 281-294. doi: 10.22435/mpk.v30i4.3463.

Latif, R. V. N., Isrofah and Priharwanti, A. 2020. Penanganan COVID-19 dalam Perspektif Pentahelix (Studi Kasus di Kota Pekalongan). *Jurnal Litbang Kota Pekalongan*. 18(2) hal. 117-123.

Muhammad, R. 2020. Peran Kepolisian Sektor Kecamatan Sajad Dalam Penanganan Covid-19 Tahun 2020', *Sy'ar: Jurnal Ilmu Komunikasi*. 3(1) hal. 12-29.

Nurhidayati, I., Handayani, S. and Agustiningrum, R. 2021. Upaya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dengan "Gotong Royong Jogo Tonggo" di RW VIII dan RW X Desa Jomboran Klaten Tengah - Klaten. *Jurnal Pengabdian Kesehatan*. 4(1) hal. 1-9.

Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Provinsi Jawa Barat. 2021. *Sebaran Kasus COVID-19 di Jawa Barat*.

Rubin, H. and Rubin, I. 2012. *Qualitative Interviewing: The Art of Hearing Data*. 2nd ed. 2nd edn. Thousand Oaks; SAGE Publications, Inc.

Sampurno, M. B. T. Kusumandyoko, T. C. Islam, M. A. 2020. Budaya Media Sosial, Edukasi Masyarakat, dan Pandemi COVID-19. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. doi: 10.15408/sjsbs.v7i5.15210.

Santosa. 2020. Kesiapsiagaan Wilayah Pada Puskesmas Sebagai Fasyankes Tingkat Pertama Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 Berdasarkan Indikator Sdm Dan Sarana Prasarana. *Akrab Juara*. 5(1) hal. 43-54.

Sommerfeld, J. and Kroeger, A. 2012. Eco-bio-social research on dengue in Asia: a multicountry study on ecosystem and communitybased approaches for

the control of dengue vectors in urban and peri-urban Asia. *Pathogens and Global Health*. 106(8).

Ramaci T, Barattucci M, Ledda C, Rapisarda V. Social Stigma during COVID-19 and its Impact on HCWs Outcomes. *Sustainability*. 2020; 12(9): 3834. <https://doi.org/10.3390/su12093834>.

Udytama, I. W. W. W. and Susrama, I. N. 2020. Sinergi desa adat dan desa dinas dalam pencegahan dan upaya percepatan penanganan COVID-19 di Bali. *Prosiding Seminar Nasional Webinar Nasional Universitas Mahasaraswati Denpasar*, Juni 2020.

Vionita, L. and Prayoga, D. 2021. Penggunaan Media Sosial selama Pandemi Covid-19 dalam Promosi Kesehatan di Rumah Sakit Kabupaten Tangerang. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 20(2).

Hasil Penelitian

PENGARUH MODAL PSIKOLOGIS DAN PENERIMAAN TEKNOLOGI TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

(THE EFFECT OF PSYCHOLOGICAL CAPITAL AND TECHNOLOGY ACCEPTANCE OF ELECTRONIC-BASED GOVERNMENT SYSTEMS ON CIVIL SERVANTS OF PAKPAK BHARAT REGENCY)

Mohd Farouq Hasymi Nasution, Abdhy Aulia Adnan, Siti Zahreni

Universitas Sumatera Utara
Jl. Dr. Mansyur No.9, Medan
Sumatera Utara - Indonesia
Email: abdhy.aa@usu.ac.id

Diterima: 28 Januari 2022; Direvisi: 06 Mei 2022; Disetujui: 17 Mei 2022

ABSTRAK

Kebijakan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dilakukan untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Namun dalam implementasinya oleh Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat belum maksimal karena masih terbiasanya dengan sistem birokrasi lama. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran kapasitas modal psikologis dan penerimaan teknologi dan menganalisis secara empiris pengaruh dari modal psikologis dan penerimaan teknologi terhadap sistem pemerintahan berbasis elektronik pada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan teknik analisis regresi linear berganda. Data penelitian dihasilkan melalui skala likert yang kemudian diolah dan dianalisis untuk menarik kesimpulan. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 255 Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat. Hasil penelitian ini menunjukkan secara umum Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat memiliki kapasitas modal psikologis tinggi dan penerimaan teknologi yang sedang. Variabel Modal psikologis berpengaruh positif dan signifikan terhadap sikap penggunaan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Variabel Penerimaan teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap sikap penggunaan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Variabel modal psikologis dan penerimaan teknologi secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap sikap penggunaan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pemkab Pakpak Bharat dapat meningkatkan upaya memfasilitasi pengembangan diri khususnya yang berkaitan dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah kabupaten Pakpak Bharat dan menciptakan lingkungan kerja dengan teknologi yang dirasakan kemudahan dan kebermanfaatannya.

Kata kunci: sistem pemerintahan berbasis elektronik, modal psikologis, penerimaan teknologi

ABSTRACT

The policy implementing an electronic-based government system is carried out to realize clean, effective, transparent, and accountable governance as well as quality and reliable public services. However, the implementation by the Pakpak Bharat Regency Government has not been maximized because they are still used to the old bureaucratic system. This study aims to provide an overview of the capacity of psychological capital and acceptance of technology and to analyze empirically the effect of psychological capital and acceptance of the technology on an electronic-based government system for Civil Servants of the Pakpak Bharat Regency Government. This research method uses quantitative research with multiple linear regression analysis techniques. Research data is generated through a Likert scale which is then processed and analyzed to draw conclusions. The number of samples used in this study was 255 Civil Servants of the Pakpak Bharat Regency

Government. The results of this study indicate that in general, civil servants of the Pakpak Bharat Regency Government have a high psychological capital capacity and moderate technology acceptance. The variable of psychological capital has a positive and significant effect on the attitude toward using an electronic-based government system. The technology acceptance variable has a positive and significant effect on the attitude toward using an electronic-based government system. The variables of psychological capital and acceptance of technology together have a positive effect on the attitude toward using an electronic-based government system. The Pakpak Bharat Regency Government can increase efforts to facilitate self-development, especially those related to an electronic-based government system for Civil Service Civil Servants of the Pakpak Bharat Regency Government, and create a work environment with technology that is felt to be easy and useful.

Keywords: *electronic-based government system, psychological capital, technological acceptance*

PENDAHULUAN

Aksi utama pemerintah mewujudkan *good and clean governance* adalah merealisasikan pelayanan terbaik kepada publik dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). SPBE atau dikenal juga dengan *e-government* berdasarkan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada masyarakat. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Pemerintah Kabupaten (Pekab) Pakpak Bharat sebagai salah satu institusi pemerintah di daerah telah menerapkan SPBE yang terlihat melalui Peraturan Bupati (Perbup) Pakpak Bharat Nomor 25 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan layanan berbasis teknologi informasi.

Implementasi SPBE yang dilakukan Pekab Pakpak Bharat dengan membangun dan menyediakan infrastruktur SPBE seperti infrastruktur jaringan 4G, aplikasi pelayanan publik dan non publik dalam portal website Pekab Pakpak Bharat. Bentuk aplikasi menyediakan fitur layanan pemerintahan, layanan administrasi perkantoran, radio, fasilitas kesehatan, hingga pendidikan. Pekab Pakpak Bharat juga menyediakan sarana prasarana seperti komputer, laptop, tablet, dan *wifi*.

Hal ini membuat Pekab Pakpak Bharat pada Tahun 2019 mendapat penghargaan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang memberikan predikat sebagai "Kabupaten Informatif" Se-Sumatera Utara berdasarkan penyediaan aplikasi melalui portal Pekab Pakpak Bharat.

Pekab Pakpak Bharat juga menyediakan sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan SPBE. Hal ini dilakukan melalui perekrutan tenaga ahli baik melalui Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ataupun tenaga kontrak. Pekab Pakpak Bharat juga melakukan program sosialisasi dan peningkatan kompetensi dalam menggunakan SPBE melalui *workshop*

atau pelatihan baik yang dilaksanakan Pekab Pakpak Bharat atau pihak lainnya.

Namun, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan SPBE oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) tahun 2020 yang mengevaluasi tiga domain SPBE yang yaitu domain kebijakan internal, tata Kelola, dan layanan menyebutkan bahwa pada domain tata kelola SPBE Pekab Pakpak Bharat masih belum mencapai target.

Data Dinas Komunikasi dan Informatika Pekab Pakpak Bharat Tahun 2020 juga menunjukkan bahwa aplikasi yang sudah dibuat masih belum digunakan secara efektif. Dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 2.357 orang, penggunaan aplikasi seperti E-kinerja dan E-surat diakses sebanyak 700/bulan. Kemudian untuk penggunaan aplikasi Sidahari yaitu aplikasi absensi rapat berjumlah 80/bulan.

Kemudian pada penerimaan CPNS Tahun Anggaran 2019 berdasarkan pengumuman nomor 810/3666/BKD/XI/2019 tentang pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS masih menggunakan sistem non elektronik. Para pelamar selain mengisi formulir *online*, juga diminta untuk mengirimkan formulir fisik secara langsung ke panitia seleksi daerah untuk diverifikasi. Meskipun secara institusi Pekab Pakpak Bharat telah melengkapi sarana dan prasarana hingga melakukan pelatihan serta merekrut tenaga ahli melalui Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Kondisi ini disebabkan oleh para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sudah terbiasa dengan sistem kerja lama, belum menguasai penggunaan teknologi, dan merasa disusahkan dengan berproses dengan elektronik (Komunikasi Personal, 2020). Hal ini mengindikasikan bahwa PNS Pekab Pakpak Bharat cenderung memiliki sikap negatif terhadap SPBE.

Hal ini sesuai dengan Studi (Benyamin, 2020) menunjukkan bahwa budaya birokrasi lama masih melekat sehingga lebih senang menggunakan kebiasaan serba manual. Hasil lainnya juga menyebutkan bahwa kurangnya sumber daya manusia di bidang teknologi

informasi yang menyebabkan SPBE belum dapat berjalan secara efektif.

Dalam penerapannya, SPBE dipengaruhi oleh perubahan budaya dan kualitas hidup manusia khususnya kini perkembangan teknologi informasi yang merubah pola budaya dan kebutuhan masyarakat (Indarjit, 2016).

Salah satu hal yang mempengaruhi penerapan sistem elektronik atau teknologi adalah sikap yang berdampak pada niat penggunaan (Chen et al., 2012). Penelitian sebelumnya juga menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi pengguna dalam menggunakan teknologi adalah sikap terhadap teknologi (Nsouli and Vlachopoulos, 2021).

Sikap merupakan pernyataan evaluative baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan mengenai objek, manusia, atau kejadian-kejadian. Terdapat tiga komponen sikap yaitu kognitif, afektif, dan konatif. Sikap dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, pengaruh orang lain, kebudayaan, media massa, lembaga pendidikan atau agama, dan emosional (Azwar, 2013).

Studi oleh (Avey et al., 2011) menyatakan bahwa untuk bisa mencegah munculnya sikap atau perilaku pegawai yang dapat menghambat efektivitas organisasi adalah modal psikologis, yang memiliki hubungan positif dengan efektivitas dan dapat berdampak pada kinerja (Avey et al., 2011).

Modal psikologis adalah serangkaian kondisi psikologis yang positif dan membantu individu agar bisa mengembangkan diri (Luthans et al., 2007). Lebih lanjut Luthans, Avey, and Avolio (2007) menjelaskan bahwa pengertian modal psikologis adalah keadaan psikologis positif dari individu yang ditandai dengan adanya keyakinan diri, optimisme, harapan, dan resiliensi. Hasil penelitian Chen et al., (2012) menyatakan bahwa dua hal yang signifikan dalam penerapan sistem elektronik adalah faktor psikologis yaitu *self efficacy* dan motivasi pengguna dalam menggunakan komputer.

Dalam menerapkan sistem elektronik di organisasi juga dibutuhkan penerimaan pegawai terhadap teknologi secara berkelanjutan (Rosen, Cheever and Carrier, 2015). Sikap individu dalam menerima untuk memanfaatkan teknologi dipengaruhi oleh kemudahan dalam menggunakannya. Hal ini sesuai dengan hasil studi (Fiddin and Dormos 2019) bahwa semakin mudah suatu sistem tersebut maka cenderung membentuk sikap seseorang untuk menggunakannya.

Penerimaan teknologi adalah perilaku penggunaan teknologi karena memiliki persepsi manfaat (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan dalam penggunaan (*perceived ease of*

use) (Davies, 1989). Penerimaan tersebut dapat dilihat melalui *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT). UTAUT model merupakan hasil pengembangan dari delapan teori penerimaan teknologi yang telah terbukti bisa menjelaskan hingga 70% penerimaan dengan variasi niat penggunaan. Model ini juga dapat menggambarkan bagaimana reaksi dan persepsi dari pengguna teknologi. Hal ini dilihat melalui *performance expectation, effort expectation, social influence, dan facilitating conditions* (Venkatesh, Morris and Davis, 2003). Lebih lanjut UTAUT diungkapkan memiliki hubungan positif terhadap pemanfaatan teknologi informasi. Kemudian, studi (Maznorbalia and Awalluddin, 2020) menemukan bahwa seluruh konstruk UTAUT berhubungan positif terhadap penerimaan pengguna layanan *e-government*.

Berdasarkan penjelasan diatas penelitian ini bertujuan untuk, melihat kapasitas modal psikologis dan penerimaan teknologi, serta menganalisis pengaruh modal psikologis dan penerimaan teknologi terhadap SPBE dalam hal ini sikap pengguna pada PNS Pemkab Pakpak Bharat.

Adapun hipotesis penelitian yang diajukan pada penelitian ini adalah : 1) Modal psikologis berpengaruh positif dan signifikan terhadap SPBE pada PNS Pemkab Pakpak Bharat, 2) Penerimaan teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap SPBE pada PNS Pemkab Pakpak Bharat, dan 3) Modal psikologis dan penerimaan teknologi secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap SPBE pada PNS Pemkab Pakpak Bharat. Melalui penelitian diharapkan membantu Pemkab Pakpak Bharat untuk membuat kebijakan penerapan SPBE menjadi lebih efektif dan efisien.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Terdapat tiga variabel yang diukur pada penelitian ini yaitu : 1) sikap penggunaan SPBE (Y), 2) Modal Psikologis (X1), dan 3) Penerimaan Teknologi (X2).

Pada penelitian ini terdapat tiga skala yang digunakan yaitu, skala sikap penggunaan SPBE, skala modal psikologis, dan skala penerimaan teknologi. Ketiga skala ini disusun menggunakan skala *Likert*. Pada skala ini setiap aitem berisi pernyataan yang sifatnya *favourable* (mendukung) dan *unfavourable* (tidak mendukung) dengan lima pilihan yang terdiri dari Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Netral (N), Tidak Sesuai (TS), dan Sangat Tidak Sesuai (STS).

Pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 14 Desember 2021 dengan menggunakan sampel dari populasi

penelitian yaitu PNS Pemkab Pakpak Bharat yang bertugas di Komplek Panorama Indah Sindeka dengan jumlah total sebanyak 735 PNS. Penentuan jumlah sampel menggunakan tabel Isaac dan Michael dimana dengan jumlah populasi 735 orang dan tingkat kesalahan 5% maka jumlah sampel dapat dikatakan representative berjumlah 236 orang dan data yang diterima adalah sebanyak 255 skala. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik *disproportionate stratified random sampling*. Teknik digunakan karena populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak sama atau homogen dan berstrata tetapi kurang proporsional.

Metode analisis data penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda sebagai pengujian hipotesis. Penggunaan analisis regresi linier karena dapat memprediksi atau mengestimasi nilai yang dihasilkan variabel tergantung dengan melihat hasil variabel bebas. Sebelum melakukan pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda maka harus memenuhi beberapa asumsi yaitu normalitas, linearitas, multikolinieritas, dan heteroskedastisitas (Field 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Karakteristik Responden

Karakteristik	Frekwensi (%)
Umur Responden :	
15-24 (<i>Exploration</i>)	3,5
25-44 (<i>Establishment</i>)	87,1
42-56 (<i>Maintenance</i>)	9,4
Jenis Kelamin :	
Perempuan	71,4
Laki-laki	28,6
Masa Kerja :	
0-2 Tahun	40
3-10 Tahun	22,7
> 10 Tahun	37,3
Tingkat Pendidikan :	
SMA	4,7
Diploma	36,1
Sarjana	56,5
Magister	2,7
Pangkat/Golongan :	
II A – II D	28,3
III A – III D	67,9
IV A – IV C	4

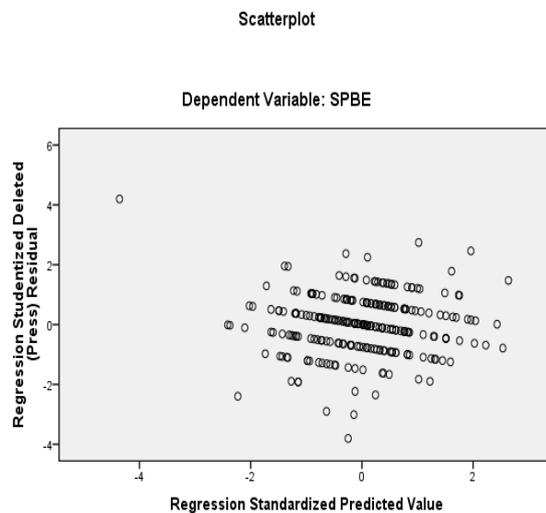
Karakteristik Responden. Total jumlah responden pada penelitian ini berjumlah 255 PNS. Berdasarkan hasil penelitian karakteristik responden yang diperoleh umur responden didominasi kelompok umur 25-44 tahun (72%) jika berdasarkan jenis kelamin responden didominasi oleh perempuan (71,4%). Secara

tingkat pendidikan responden didominasi oleh sarjana (56,5%). Jika berdasarkan masa kerja responden didominasi oleh pegawai yang memiliki 0-2 tahun masa kerja atau *early career stage* (40%), Sedangkan jika ditinjau berdasarkan pangkat/golongan responden didominasi pegawai dengan pangkat/golongan III (67,9%).

Uji Asumsi. Data penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda, maka harus memenuhi asumsi dasar regresi yaitu, uji normalitas, uji linearitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov dihasilkan nilai signifikansi .582 ($p>.05$) sehingga dapat dinyatakan data penelitian memenuhi asumsi normalitas.

Uji linearitas dilakukan antara variabel modal psikologis dengan sikap penggunaan SPBE dihasilkan nilai F 24,123 dan nilai signifikansi *linearity* .000 ($p<0.05$). Kemudian hasil uji linearitas antara variabel penerimaan teknologi dengan sikap penggunaan SPBE dihasilkan nilai F 17.285 dan nilai signifikansi *linearity* .000 ($p<.05$). Dapat disimpulkan bahwa memenuhi asumsi linearitas antara variabel bebas (Modal Psikologis dan Penerimaan Teknologi) dengan variabel terikat (SPBE).

Selanjutnya berdasarkan hasil uji multikolinieritas diketahui bahwa nilai *varians inflation factor* (VIF). variabel modal psikologis dan penerimaan teknologi adalah 1.000 dengan nilai *tolerance* 1.000. Untuk bisa memenuhi asumsi multikolinieritas apabila nilai *tolerance* lebih besar dari 0.1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10 (Field, 2013). Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel bebas.



Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas. Kemudian berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan *scatterplots*.

Hal ini dilakukan untuk menentukan penyimpangan heterokedasitas atau ketidaksamaan varian residual untuk semua pengamatan dalam model regresi. Grafik scatter plot dibawah ini menunjukkan bahwa titik-titik terdistribusi secara disekitar 0, tidak tersistematis, sehingga disimpulkan tidak adanya gejala heterokedasitas. Berdasarkan seluruh uji asumsi yang dilakukan maka data penelitian dapat dilanjutkan untuk dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda untuk menguji hipotesis penelitian.

Uji Hipotesis. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda terhadap pengaruh modal psikologis dan penerimaan teknologi terhadap sikap penggunaan SPBE pada PNS Pemkab Pakpak Bharat dihasilkan $F_{hitung} = 11.872$ dengan nilai signifikansi $p = .000$. Sedangkan nilai F_{tabel} untuk $N = 255$ dan signifikansi $= 0.05$ diperoleh nilai F_{tabel} sebesar 3.03. Hal ini menunjukkan bahwa nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($11.872 > 3.03$). Besar koefisien determinan (R Square) yang dihasilkan adalah .086 (8,6%).

Hal ini berarti bahwa modal psikologis dan penerimaan teknologi berpengaruh secara signifikan terhadap sikap penggunaan SPBE dengan kontribusi variabel modal psikologis dan penerimaan teknologi secara bersama terhadap penerimaan teknologi sebesar 36.8% sedangkan sisanya 63.2% dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model penelitian ini.

Kemudian nilai R yang dihasilkan sebesar .293 dan bernilai positif yang berarti terdapat pengaruh positif modal psikologis dan penerimaan teknologi terhadap sikap penggunaan SPBE. Hal ini juga diartikan bahwa semakin tinggi kapasitas modal psikologis dan penerimaan teknologi para PNS Pemkab Pakpak Bharat maka semakin positif sikap terhadap sikap penggunaan SPBE. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian ketiga pada penelitian ini diterima yang dapat diartikan modal psikologis dan penerimaan teknologi secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap sikap penggunaan SPBE.

Selanjutnya untuk mengetahui hubungan antara masing-masing variabel bebas (modal psikologis dan penerimaan teknologi) terhadap variabel tergantung (SPBE) dilihat melalui koefisien korelasi parsial. Pada hubungan antara variabel modal psikologis terhadap sikap penggunaan SPBE dihasilkan koefisien korelasi sebesar .229 dengan sig. .000 ($p < .05$). Dapat disimpulkan bahwa variabel modal psikologis mempengaruhi sikap penggunaan SPBE PNS secara positif dan signifikan atau hipotesis pertama penelitian ini terpenuhi.

Sedangkan hubungan antara variabel penerimaan teknologi dengan sikap penggunaan

SPBE dihasilkan koefisien korelasi sebesar .197 dengan sig. .000 ($p < .05$). Dapat disimpulkan bahwa variabel modal psikologis mempengaruhi sikap penggunaan SPBE secara positif dan signifikan atau hipotesis kedua penelitian ini terpenuhi. Persamaan regresi penelitian dirumuskan sebagai berikut :

$$SPBE = 12.022 + .058 X_1 + .092 X_2 \dots (1)$$

Berdasarkan persamaan regresi (1) terlihat konstanta sebesar 12.022 menunjukkan bahwa, apabila variabel modal psikologis dan penerimaan teknologi bernilai 0, maka sikap penggunaan SPBE memiliki nilai sebesar 12.022. Untuk nilai koefisien regresi variabel modal psikologis bernilai sebesar .058. Hal ini berarti bahwa setiap modal psikologis meningkat satu kali maka meningkatkan sikap penggunaan SPBE sebesar .058. Sedangkan pada variabel penerimaan teknologi nilai koefisien korelasi bernilai sebesar .092. Hal ini berarti bahwa setiap penerimaan teknologi meningkat satu kali maka akan meningkatkan sikap penggunaan SPBE sebesar .092.

Gambaran Sikap Penggunaan SPBE. SPBE dalam penelitian ini berfokus pada sikap penggunaan yaitu suatu reaksi atau respon evaluative baik yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan dari individu terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi kebijakan, stakeholder dan sumber daya manusia, sistem informasi manajemen, dan infrastruktur. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 95,7% PNS Pemkab Pakpak Bharat cenderung memiliki sikap positif terhadap penggunaan SPBE.

Tabel 2. Kategorisasi Sikap Penggunaan SPBE

Kategori	Frekwensi (%)
Negatif	3.6
Netral	95.7
Positif	0.07

Gambaran Modal Psikologis. Modal Psikologis adalah serangkaian kondisi positif pada individu yang terdiri dari *self efficacy*, *optimism*, *hope*, dan *resiliency*. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 75.7% PNS Pemkab Pakpak Bharat memiliki kapasitas modal psikologis yang tinggi.

Tabel 3. Kategorisasi Modal Psikologis

Kategori	Frekwensi (%)
Rendah	0
Sedang	24.3
Tinggi	75.7

Gambaran Penerimaan Teknologi. Penerimaan teknologi adalah persepsi dari

pengguna teknologi terhadap teknologi yang dipengaruhi oleh *performancy expectancy*, *effort expectancy*, *social influence*, dan *facilitating conditions* sehingga memunculkan niat untuk berperilaku (*behavioral intention*) dan perilaku untuk menggunakan teknologi (*use behavior*). Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 99.6% PNS Pemkab Pakpak Bharat cenderung memiliki tingkat penerimaan teknologi yang sedang.

Tabel 4. Kategorisasi Penerimaan Teknologi

Kategori	Frekwensi (%)
Rendah	0.4
Sedang	99.6
Tinggi	0

Hipotesis pertama dalam penelitian membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif modal psikologis terhadap sikap penggunaan SPBE. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi kapasitas modal psikologis PNS maka semakin positif sikap penggunaan SPBE. Hasil ini sesuai dengan penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu lainnya juga mengungkapkan modal psikologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan teknologi informasi dalam bekerja yang akan membantu pekerja untuk bisa berinovasi (Ziyae, Mobaraki, and Saedyoun 2015).

Penelitian terdahulu lainnya menyebutkan bahwa modal psikologis merupakan salah satu hal yang dapat berperan untuk mengembangkan dan membentuk kekuatan mental sumber daya manusia dalam organisasi. Ketika sumber daya manusia yang tersedia memiliki kapasitas modal psikologis yang tinggi maka akan menimbulkan keyakinan dan sikap untuk bisa melakukan pekerjaan, merasa optimis, dan memiliki harapan serta ketahanan dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan tuntutan organisasi (Venkantesh and Blaskovich, 2012).

Berdasarkan tabel 3 hasil penelitian modal psikologis, bahwa secara umum kapasitas modal psikologis pada PNS Pemkab Pakpak Bharat cenderung tinggi sedangkan sikap penggunaan SPBE yang juga cenderung netral hal ini terlihat dari tabel 2. Hal ini menjelaskan bahwa para PNS Pemkab Pakpak Bharat secara umum dinilai memiliki komitmen dan tanggung jawab yang besar dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan tuntutan organisasi meskipun berhadapan dengan perubahan sistem kerja manual ke sistem elektronik.

Apabila kapasitas modal psikologis para pegawai tinggi akan membentuk sikap positif terhadap pekerjaan yang dilakukan. Sehingga meskipun sistem elektronik adalah sistem baru

di dalam pemerintahan, para pegawai masih bisa beradaptasi untuk mampu melakukan pekerjaan dengan baik dan mencapai hasil kerja yang sesuai dengan diharapkan oleh organisasi. Oleh sebab itu hal ini menunjukkan bahwa dengan kapasitas modal psikologis yang tinggi akan membantu untuk bisa mensukseskan pekerjaan sesuai dengan tuntutan organisasi dalam hal bekerja dengan sistem elektronik dan meninggalkan sistem manual. Hal ini disebabkan karena modal psikologis berkaitan dengan persepsi terhadap diri, orientasi etika, sikap pada pekerjaan, dan gambaran umum tentang kehidupan sehingga berdampak pada performa individu.

Guna mempertahankan kapasitas modal psikologis dibutuhkan pengembangan secara berkelanjutan terhadap sumber daya manusia sehingga pengetahuan, keahlian, dan kemampuan pegawai terus berkembang. Kemudian pengembangan kompetensi melalui pelatihan dan pengembangan, pembelajaran organisasi, manajemen kepemimpinan, serta manajemen pengetahuan dalam rangka kepentingan peningkatan kinerja pegawai baik yang dilaksanakan oleh organisasi ataupun inisiatif pribadi pegawai (Rowley and Jackson 2012).

Berkaitan dengan hal tersebut Pemkab Pakpak Bharat telah melakukan upaya dengan menyertakan PNS dalam pelatihan dan *workshop* dan pengayaan kemampuan mengoperasionalkan teknologi untuk bisa meningkatkan kompetensi pegawai. Oleh sebab itu organisasi perlu memperluas akses dan fasilitas, serta kenyamanan psikologis bagi pegawai sehingga dapat mempertahankan kapasitas modal psikologis yang tinggi dan dapat meningkatkan sikap penggunaan SPBE yang positif.

Hipotesis kedua dalam penelitian membuktikan bahwa pengaruh modal penerimaan teknologi terhadap sikap penggunaan SPBE adalah positif. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi penerimaan teknologi maka semakin tinggi sikap penggunaan SPBE. Penerimaan teknologi dilihat melalui model UTAUT. Model ini menjelaskan bahwa teknologi informasi selalu berkaitan dengan penerimaan penggunaan teknologi. Model UTAUT menjelaskan niat untuk berperilaku (*behavioral intention*), dan perilaku untuk menggunakan teknologi (*use behavior*) yang dipengaruhi oleh persepsi individu.

Berdasarkan penelitian sebelumnya dinyatakan bahwa semakin sulit menggunakan teknologi maka semakin negatif sikap terhadap teknologi (Park et al., 2022). Berdasarkan tabel 4 hasil penelitian penerimaan teknologi bahwa secara umum tingkat penerimaan teknologi pada

PNS Pemkab Pakpak Bharat cenderung sedang dan diikuti oleh sikap penggunaan SPBE yang juga cenderung netral hal ini terlihat dari tabel 2. Hal ini menjelaskan bahwa para PNS Pemkab Pakpak Bharat secara umum dinilai cukup menerima untuk bekerja dengan SPBE.

Penelitian terdahulu lainnya juga menyebutkan bahwa *performancy expectancy*, kepercayaan terhadap internet, *effort expectancy*, dan *facilitating condition* dapat mempengaruhi individu untuk menunjukkan sikap positif terhadap *e-government* sehingga memiliki keinginan untuk menggunakan *e-govern* (Mansoori, Sarabdeen and Tchantchane, 2018).

Hipotesis ketiga dalam penelitian membuktikan bahwa modal psikologis dan penerimaan teknologi secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap sikap penggunaan SPBE. Berdasarkan hasil ini maka dapat dinyatakan bahwa jika modal psikologis dan penerimaan teknologi semakin tinggi maka pegawai akan semakin positif sikap penggunaan SPBE. Kontribusi yang diberikan oleh variabel modal psikologis dan penerimaan teknologi adalah sebesar 8.6%, yang diartikan bahwa modal psikologis dan penerimaan teknologi secara bersama-sama memberikan sumbangan efektif sebesar 8.6% untuk meningkatkan sikap penggunaan SPBE.

Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya bahwa kepercayaan diri terhadap internet dan keterampilan komputer, merasakan manfaat yang dirasakan dari teknologi berpengaruh terhadap adopsi *e-government* (Alomari, 2014). Penelitian ini juga menunjukkan bahwa PNS Pemkab Pakpak Bharat memiliki skor tinggi pada variabel modal psikologis dan sedang pada variabel SPBE dan penerimaan teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa sejauh ini PNS Pemkab Pakpak Bharat dianggap memiliki kapasitas modal psikologis dan cukup menerima teknologi dalam pekerjaan untuk menerapkan SPBE secara efektif, sehingga cukup siap untuk menerima dan menghadapi SPBE.

Namun kondisi ini memiliki potensi untuk menjadi naik maupun turun. Ketika kondisi yang tidak menguntungkan, hal ini dapat menyebabkan pegawai memiliki sikap negatif terhadap penggunaan SPBE. Kondisi ini menjadi perhatian bagi Pemkab Pakpak Bharat untuk terus mengembangkan dan meningkatkan langkah-langkah untuk membuat sikap penggunaan SPBE positif.

Pada prinsipnya penerapan SPBE merupakan aksi utama pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Untuk bisa menerapkan secara efektif maka sumber daya yang manusia yang ada haruslah adaptif dengan target pemerintah menerapkan

SPBE. Berdasarkan penelitian sebelumnya disebutkan bahwa dengan kapasitas modal psikologis yang tinggi dari individu maka akan memfasilitasi program menjadi efektif dengan adanya pengembangan yang berkelanjutan (Chen et al. 2017).

Ketika individu memiliki kapasitas modal psikologis yang tinggi maka akan individu tersebut akan memiliki sikap positif dalam bekerja (Luthans, Avey and Avolio, 2007), Hal ini disebabkan karena individu dengan modal psikologis memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi tugas-tugas meskipun tugas tersebut hal baru.

Individu dengan modal psikologis juga memiliki atribusi positif untuk bisa meraih kesuksesan dalam pekerjaan. Selanjutnya individu juga akan memiliki harapan sehingga tidak mudah menyerah dalam mencapai kesuksesan. Kemudian individu dengan modal psikologis juga akan mampu bertahan dan mengatasi kesulitan apapun yang dialami dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Penerapan teknologi informasi kedalam organisasi adalah suatu faktor yang penting dalam menunjang efektivitas organisasi termasuk pemerintahan. Hal ini dilakukan agar organisasi tetap unggul, bertahan sesuai zaman, berkualitas, dan menguntungkan (Hughes 2012). Kurangnya penerimaan terhadap teknologi akan berpengaruh terhadap kesuksesan penerapan teknologi ke dalam sistem organisasi.

Persepsi individu terhadap teknologi berpengaruh terhadap sikap untuk menggunakan teknologi. Ketika organisasi mampu menciptakan persepsi adanya kemudahan, kebermanfaatan, lingkungan sosial yang mendukung, dan dilengkapinya fasilitas akan mempengaruhi secara positif sikap penggunaan teknologi (Hartini and Afnisari, 2013). Ketika ini dapat dilakukan oleh organisasi maka akan membantu mengoptimalkan penerapan SPBE.

Secara umum hasil penelitian menunjukkan bahwa PNS Pemkab Pakpak Bharat berada pada kategori tinggi dan positif di setiap variabel. Hal ini dapat dijadikan sebagai pionir untuk membantu Pemkab Pakpak Bharat untuk mengoptimalkan penerapan SPBE. Hal ini perlu menjadi perhatian Pemkab Pakpak Bharat untuk membuat PNS memiliki sikap penggunaan SPBE yang positif. Ketika individu memiliki kepercayaan dan sikap yang positif terhadap *e-government* maka akan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan mengurangi penyimpangan dalam pelayanan publik (Ahmad, Waqas and Zhang, 2021).

KESIMPULAN

Terdapat pengaruh positif dan signifikan modal psikologis terhadap sikap penggunaan SPBE pada PNS PNS Pemkab Pakpak Bharat. Artinya semakin tinggi kapasitas modal psikologis yang dimiliki pegawai, maka semakin positif sikap penggunaan SPBE. Kemudian, terdapat pengaruh positif dan signifikan penerimaan teknologi terhadap sikap penggunaan SPBE pada PNS Pemkab Pakpak Bharat. Artinya semakin tinggi penerimaan teknologi pada pegawai maka semakin positif sikap penggunaan SPBE. Modal psikologis dan penerimaan teknologi berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap sikap penggunaan SPBE PNS Pemkab Pakpak Bharat. Artinya secara bersama-sama semakin tinggi kapasitas modal psikologis dan penerimaan teknologi yang dimiliki pegawai, maka akan semakin positif sikap penggunaan SPBE. Besarnya kontribusi variabel modal psikologis dan penerimaan teknologi secara bersama-sama terhadap sikap penggunaan SPBE PNS adalah sebesar 8.6 %. Secara umum PNS Pemkab Pakpak Bharat memiliki kapasitas modal psikologis yang tinggi dan tingkat penerimaan teknologi yang sedang, serta memiliki sikap netral terhadap penggunaan SPBE.

REKOMENDASI

Beberapa rekomendasi untuk penerapan SPBE di Pemkab Pakpak Bharat adalah :

1. Mengingat proses penerapan SPBE yang akan terus berlanjut maka perlu dilakukan sosialisasi, *workshop*, pendidikan dan pelatihan mengenai penerapan SPBE, sehingga PNS lebih siap dalam menerapkan SPBE dalam organisasi.
2. Kapasitas modal psikologis PNS Pemkab Pakpak Bharat secara umum tinggi. Hal ini diharapkan terus dipertahankan. Pemkab Pakpak Bharat dapat terus meningkatkan untuk memfasilitasi pengembangan diri pegawai baik secara institusi ataupun pribadi yang dapat meningkatkan harapan, kepercayaan diri, resiliensi, dan optimisme ditempat kerja.
3. Tingkat penerimaan teknologi PNS Pemkab Pakpak Bharat secara umum tergolong sedang. Hal ini diharapkan terus dikembangkan sehingga dapat meningkat dan tidak menurun. Upaya peningkatan dapat dilakukan dengan meningkatkan kenyamanan penggunaan dengan menstandarisasi teknologi, sehingga sistem elektronik atau teknologi yang ada bisa langsung dirasakan kemudahan dan kebermanfaatannya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Universitas Sumatera Utara sebagai pendukung utama dalam penelitian ini sehingga dapat terlaksana sehingga dapat dipublikasikan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, N., Waqas, M. and Zhang, X., 2021. Public Sector Employee Perspective towards Adoption of E-Government in Pakistan: A Proposed Research Agenda. *Data and Information Management*, 5(1), pp.119-124. <https://doi.org/10.2478/dim-2020-0029>.

Alomari, M.K., 2014. DISCOVERING CITIZENS REACTION TOWARD E-GOVERNMENT: FACTORS IN E-GOVERNMENT ADOPTION. *JISTEM*, [online] 11(1), pp.1807-1775. <https://doi.org/10.1590/S1807-17752014000100001>.

Avey, J.G., Reichard, R.J., Luthans, F. and Mhatre, K.H., 2011. Meta-Analysis of The Impact of Positive Psychological Capital of Employee Attitudes, Behavior, and Performance. *Human Resource Development Quarterly*, 22, pp.127-152.

Azwar, S., 2013. Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya. In: 2nd ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Benyamin, R.A., 2020. Studi Penerapan E-Procurement Dalam Mewujudkan Tata Pengadaan Barang Yang Efektif Di Pemda Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Politicon*, IX(1).

Chen, M.-Y., Chang, F.M.-T., Chen, C.-C., Huang, M.-J. and Chen, J.-W., 2012. *Why do Individuals Use e-Portfolios. Educational Technology & Society*.

Chen, Q., Wen, Z., Kong, Y., Niu, J. and Hau, K.T., 2017. Influence of leaders' psychological capital on their followers: Multilevel mediation effect of organizational identification. *Frontiers in Psychology*, 8(OCT). <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.01776>.

Davies, F.D., 1989. *A Technology Acceptance Model For Emprically Testing New End User Information Systems: Theory and Result. Massachusetss Institut of Technology*.

Fiddin, F. and Dormos, E., 2019. Pengaruh Kemudahan dan Keyakinan Penggunaan Sistem Informasi Baru terhadap Minat Pemanfaatan Sistem Informasi pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Riau. *Jurnal Inovasi dan Bisnis*, 9, pp.111-115.

Field, A., 2013. *DISCOVERING STATISTICS USING IBM SPSS STATISTICS*. 4th ed. Sage.

Hartini, S. and Afnisari, K., 2013. *Pilar Nusa Mandiri 113 UNIFIED THEORY OF ACCEPTANCE AND USE OF TECHNOLOGY (UTAUT)*.

Hughes, C., 2012. *Valuing People and Technology in the Workplace*. IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-4666-0240-3>.

Indrajit, R.E., 2016. *Konsep dan Strategi Electronic Government*.

Luthans, F., Avey, J.B. and Avolio, B.J., 2007. *Psychological Capital Developing The Human Competitive Edge*. New York: Oxford University.

Mansoori, K.A. al, Sarabdeen, J. and Tchantchane, A.L., 2018. Investigating Emirati citizens' adoption of e-government services in Abu Dhabi using modified UTAUT model. *Information Technology and People*, 31(2), pp.455-481. <https://doi.org/10.1108/ITP-12-2016-0290>.

Maznorbalia, A.S. and Awalluddin, M.A., 2020. Users Acceptance of E-Government System in Sintok, Malaysia: Applying The UTAUT Model. *Policy & Governance Review*, 5(1), pp.66-81.

Nsouli, R. and Vlachopoulos, D., 2021. Attitudes of nursing faculty members toward technology and e-learning in Lebanon. *BMC Nursing*, 20(1). <https://doi.org/10.1186/s12912-021-00638-8>.

Park, I., Kim, D., Moon, J., Kim, S., Kang, Y. and Bae, S., 2022. Searching for New Technology Acceptance Model under Social Context: Analyzing the Determinants of Acceptance of Intelligent Information Technology in Digital Transformation and Implications for the Requisites of Digital Sustainability. *Sustainability*, 14(1), p.579. <https://doi.org/10.3390/su14010579>.

Rosen, L.D., Cheever, N.A. and Carrier, L.M., 2015. *The Wiley Handbook of Psychology, Technology and Society*. Jhon Wiley & Sons, Ltd.

Rowley, C. and Jackson, K., 2012. *Manajemen sumber daya manusia : The Key Concepts*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.

Santoso, S., 2018. *Menguasai Statistik Dengan SPSS 25*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Venkantesh, M.G. and Blaskovich, J., 2012. The Mediating Effect of Psychological Capital on the Budget Participation-Job Performance Relationship. *Journal Of Management Accounting Research*, 24, pp.159-175.

Venkantesh, M.G., Morris, G.B. and Davis, F.D., 2003. User Acceptance of Information Technology: Toward a Unified View. *MIS Quarterly*, 27, pp.425-478.

Ziyae, B., Mobaraki, M.H. and Saeediyoun, M., 2015. The Effect of Psychological Capital on Innovation in Information Technology. *Journal of Global Entrepreneurship Research*, 5(1). <https://doi.org/10.1186/s40497-015-0024-9>.

Hasil Penelitian

RASIO KINERJA KEUANGAN DAERAH DAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR DI KABUPATEN BONDOWOSO

(REGIONAL FINANCIAL PERFORMANCE RATIO AND INFRASTRUCTURE FINANCING IN BONDOWOSO DISTRICT)

Kristian Buditiawan, Eko Budi Santoso***

*Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur
Jl. Gayung Kebonsari No. 56 Surabaya
Jawa Timur - Indonesia
Email: k_buditiawan@yahoo.com

** Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Jl. Teknik Kimia Surabaya
Jawa Timur - Indonesia

Diterima: 31 Januari 2022; Direvisi: 22 Maret 2022; Disetujui: 26 April 2022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui rasio kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Analisis rasio kinerja keuangan adalah salah upaya untuk menilai kinerja keuangan daerah agar memenuhi unsur akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini membahas tentang rasio kinerja keuangan daerah yang dan kemampuan daerah dalam mendanai penyediaan infrastruktur di Kabupaten Bondowoso. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kinerja keuangan daerah yang meliputi aspek rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio kemandirian, rasio aktifitas, dan rasio pertumbuhan. Analisis rasio kinerja keuangan daerah diperoleh dengan menghitung Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menggunakan rumus Rasio Kinerja Keuangan Daerah. Kinerja keuangan Kabupaten Bondowoso selama periode 2016-2020 dapat dikatakan secara keseluruhan sudah baik dari sisi rasio efektifitas dan rasio efisiensi. Rasio kemandirian masih menunjukkan proporsi penerimaan transfer dari pemerintah Provinsi/pusat masih lebih besar dari pendapatan asli daerahnya. Rasio aktifitas menggambarkan bahwa penerimaan masih lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja operasional dibandingkan dengan belanja modal (penyediaan infrastruktur). Pembiayaan infrastruktur dapat menggunakan dana yang bersumber dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah, kerjasama pemerintah dengan badan usaha, dan dana yang bersumber dari CSR perusahaan yang ada di Kabupaten Bondowoso.

Kata kunci: keuangan, efektivitas, efisiensi, otonomi, infrastruktur

ABSTRACT

This study aims to determine the ratio of the government's financial performance Bondowoso Regency. Financial performance ratio analysis is an attempt to assess regional financial performance in order to fulfill the elements of accountability for good governance. This study will discuss the ratio of regional financial performance associated with the ability of the region to finance development in Bondowoso Regency. The analytical method used is an analysis of regional financial performance which includes aspects of the effectiveness ratio, efficiency ratio, independence ratio, activity ratio, and growth ratio. The ratio analysis of regional financial performance is obtained by calculating the Realization of the Regional Revenue and Expenditure Budget using the Regional Financial Performance Ratio formula. Bondowoso Regency's financial performance during the 2016-2020 period can be said to be overall good in terms of effectiveness ratios and efficiency ratios. The independence ratio still shows the proportion of transfer receipts from the provincial/central government is still greater than the original regional income. The activity ratio illustrates that revenue is still more used to finance operational expenditures compared to capital expenditures (providing infrastructure). Infrastructure financing can use funds sourced from General Allocation Funds, Special Allocation Funds, Regional Loans,

government collaboration with business entities, and funds sourced from CSR companies in Bondowoso Regency.

Keywords: *financial, effectivity, efficiency, autonomy, infrastructure*

PENDAHULUAN

Pada era desentralisasi setiap daerah otonom di Indonesia memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menetapkan arah tujuan pembangunan sesuai dengan kondisi daerahnya termasuk juga dalam pengelolaan sumber pendapatan keuangan daerah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional (Tarnoto and Haryanto, 2018). Perkembangan undang-undang yang mengatur tentang pemerintah daerah telah menghasilkan pada suatu keadaan dimana masing-masing daerah memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan daerahnya masing-masing, termasuk juga dalam hal pengelolaan keuangan daerahnya salah satunya melalui kebijakan desentralisasi fiskal.

Desentralisasi fiskal juga dapat menyeimbangkan laju pembangunan antar daerah sehingga tidak ada lagi dikotomi daerah maju dan tertinggal karena masing-masing daerah mempunyai kesempatan membiayai pembangunan di daerahnya secara mandiri sesuai potensi daerahnya (Susilawati, Intan and Rahmawati, 2018; Hodžić and Muharemović, 2019). Pemerintah Indonesia telah mengatur tata pemerintahan daerah melalui Undang-Undang No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang ini membuka kesempatan luas kepada daerah dalam menjalankan roda pemerintahannya termasuk pemanfaatan segenap potensi dan sumber daya produktif yang tersedia di daerahnya demi kemakmuran masyarakatnya dengan sedikit bergantung kepada bantuan pemerintah pusat/provinsi. Untuk itu Pemerintah Daerah berusaha menggunakan pendapatan asli daerahnya dengan sebaik-baiknya untuk membiayai proses pemerintahan yang berlangsung (Shi, 2018).

Nilai pendapatan keuangan asli daerah yang potensial terangkum dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin besar perolehan sumber keuangan dari PAD menunjukkan bahwa kinerja keuangannya semakin baik dan tingkat ketergantungannya relatif kecil terhadap sumber-sumber pendapatan di luar daerahnya, seperti bantuan transfer dari pemerintah pusat/provinsi (Qur'ani and Panggiarti, 2021).

Setiap pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah mewajibkan dilaksanakan dengan prinsip efisiensi dan efektifitas untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat untuk itu semangat desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran mutlak diperlukan dalam rangka menciptakan iklim

pemerintahan daerah yang bertanggungjawab (Sadalia *et al.*, 2019). Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan bukti bahwa keuangan daerah dikelola dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab serta memiliki nilai akuntabilitas (Adisasmita, 2011).

Akuntabilitas adalah ciri dari pelaksanaan tata pemerintahan yang baik, yaitu bahwa pemerintah melaporkan secara transparan, real, dan penuh tanggung jawab setiap program kerjanya kepada masyarakat. Rasio kinerja keuangan daerah adalah salah satu bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Park and Kim, 2021). Hasil dari analisis rasio kinerja keuangan tersebut dapat digunakan sebagai standar penilaian efektifitas, efisiensi, kemandirian, aktifitas, dan pertumbuhan PAD keuangan daerah. Tingkat kemandirian keuangan daerah menunjukkan seberapa besar bantuan dari pemerintah pusat atau provinsi dalam mendanai pembangunan di daerah. Semakin mandiri jika pemerintah daerah tersebut mampu membiayai sendiri pembangunan di daerahnya tetapi tidak akan menghilangkan dana perimbangan sebab dana perimbangan digunakan untuk mengakselerasi pembangunan di daerah. Upaya untuk meningkatkan tingkat kemandirian keuangan dapat ditempuh dengan cara optimasi penerimaan daerah melalui pendapatan asli daerah (Agus and Safri, 2016; Saragih and Siregar, 2020).

Belanja modal adalah cerminan komitmen pemerintah dalam penyediaan layanan publik. Belanja modal jika digabungkan dengan belanja barang dan jasa memiliki hubungan dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah/daerah. Belanja modal dapat berkontribusi pada perekonomian wilayah jika ditujukan pada penyediaan infrastruktur daerah. Ketersediaan infrastruktur merupakan kunci tumbuhnya investasi. Pembangunan infrastruktur menjadi pemicu tumbuhnya sektor-sektor lain untuk aktif berproduksi, dapat menyediakan lapangan kerja, konektivitas antar wilayah serta meningkatkan konsumsi masyarakat dan pemerintah yang akan berdampak pada perputaran uang sehingga kegiatan ekonomi tersebut berjalan (Nugraheni and Priyarsono, 2012; Sugiarto, 2019).

Daya saing infrastruktur di Indonesia perlu terus ditingkatkan. Menurut laporan Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Indonesia bahwa kendala pembangunan

infrastruktur di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua aspek yaitu aspek teknis dan kelembagaan. Aspek teknis terkait dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur itu sendiri seperti misalnya tahap persiapan dimana permasalahan yang muncul adalah kurangnya kualitas penyiapan proyek dan keterbatasan dana. Selain itu terdapat masalah terkait pengadaan lahan yang berimbas pada terhambatnya kesepakatan *financial close*. Aspek kelembagaan lebih kepada lambatnya pengambilan keputusan sebagai akibat dari adanya masalah koordinasi antar stakeholder, faktor pembagian resiko yang menghambat proses pendanaan oleh pihak ketiga.

Konsep keberlanjutan dalam penyediaan infrastruktur adalah berfokus pada konektivitas sentra-sentra produktif ekonomi rakyat yang akan menggerakkan perkembangan ekonomi regional antar wilayah. Laju distribusi akan semakin lancar dan daya saing meningkat dan kompetitif diantara produsen yang akan memicu iklim berusaha yang baik, inovatif, dan kreatif. Keberlanjutan pembangunan infrastruktur akan memicu munculnya pusat ekonomi baru secara merata di lain wilayah. Selain itu, keberlanjutan pembangunan infrastruktur ekonomi diperlukan untuk merubah ekonomi berbasis konsumsi menjadi ekonomi berbasis investasi, keterjangkauan yang akan menurunkan biaya logistik dan mendorong bergairahnya investasi produktif pada berbagai wilayah (Kusuma and Muta'ali, 2019; Sumardjoko and Akhmadi, 2019).

Beberapa kajian pernah dilakukan sebelumnya hanya memberikan gambaran saja tentang kondisi kinerja keuangan daerah, seperti kajian yang dilakukan oleh Heldi dan Zelika (2020) yang menganalisis Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemkab Bandung Barat (TA 2013-2017) menunjukkan bahwa jika tingkat desentralisasi sebesar 16,27% dapat dikategorikan sebagai kurang. Jika rasio ketergantungan menunjukkan angka 80,01% maka dapat dipastikan bahwa tingkat ketergantungannya tinggi terhadap bantuan pemerintah pusat/provinsi. Kategori konsultatif rendah jika rasio independensi 21,82%. Kategori efektif diperoleh jika rata-rata rasio efektivitas PAD mencapai 100%, dan efisiensi PAD termasuk kategori tidak efisien karena rata-rata hanya mencapai 90,01%.

Begitu pula kajian yang dilakukan oleh Susilawati, Intan dan Rahmawati (2018) dan Rosaliena dan Zulkifli (2019) juga menyimpulkan tentang kinerja keuangan daerahnya saja. Penelitian yang dilakukan oleh Siregar dan Panggabean (2021) menyimpulkan ada hubungan positif antara rasio kemandirian

dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sejalan dengan tingginya rasio kemandirian suatu daerah. Tetapi di sisi lain efektivitas pengelolaan keuangan daerah kota-kota di Provinsi Sumatera Utara masih rendah dan belum mencapai target pajak daerah.

Sedangkan kajian yang ditulis oleh Wiguna dan Jati (2019) menyimpulkan bahwa secara terpisah tidak ada hubungan antara kinerja keuangan dengan pendapatan asli daerah. Penelitian yang digagas oleh Mahulae (2018) yang menganalisis kinerja keuangan daerah pada beberapa kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2009-2016. Penelitian tersebut juga mengevaluasi dampak kinerja keuangan tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran dan indeks kemiskinan beberapa kota di Provinsi Sumatera Utara. Hasil dari penelitian ini adalah dampak yang ditunjukkan tidak signifikan atau kurang berpengaruh.

Penelitian kali ini akan membahas tentang rasio kinerja keuangan daerah yang dikaitkan dengan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan di Kabupaten Bondowoso. Beberapa rasio yang menggambarkan kinerja keuangan daerah tersebut adalah rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio kemandirian, dan rasio pertumbuhan. Hasilnya akan dibandingkan dari tahun ke tahun sehingga dapat diketahui kinerja keuangan daerah tersebut dari waktu ke waktu. Berbeda dengan beberapa studi yang sudah pernah dilakukan sebelumnya dimana hasil akhir hanya memberikan gambaran terhadap kondisi kinerja keuangan daerah tetapi pada penelitian kali ini akan ditambahkan bagaimana upaya pembiayaan infrastrukturnya dengan melihat hasil telaah kinerja keuangan daerah melalui rasio kemandirian.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan mulai bulan April hingga November 2021 di Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Bondowoso dipilih karena penulis memiliki data keuangan daerah yang lengkap sehingga hasil penelitian ini lebih lengkap. Kajian ini berupa penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis rasio kinerja keuangan Kabupaten Bondowoso selama periode tahun 2016-2021.

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2016-2020 (audited) adalah data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini. Data tersebut berasal dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso. Metode analisis menggunakan perhitungan rasio kinerja keuangan daerah, yang meliputi rasio efektivitas,

rasio efisiensi, rasio kemandirian, rasio aktifitas, dan rasio pertumbuhan PAD. Analisis rasio dilakukan secara series tahun 2016-2020 sehingga didapatkan perbandingan dari tahun ke tahun.

Rasio Efektifitas. Rasio ini menunjukkan bagaimana pemerintah kabupaten memastikan penerimaan yang diperolehnya sesuai dengan perencanaan yang didasarkan pada potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Semakin tinggi semakin baik dan efektif jika dapat mencapai angka 100%. Kriteria efektifitas PAD adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Kategori Rasio Efektifitas

No.	Kategori	Persen
1.	Sangat Efektif	>100
2.	Efektif	90-100
3.	Cukup Efektif	80-90
4.	Kurang Efektif	60-80
5.	Tidak Efektif	<60%

Sumber: (Rosalienna and Zulkifli, 2019)

Rasio ini diperoleh dengan cara:

$$Rasio\ Efektifitas = \frac{Realisasi\ Penerimaan}{Target\ Penerimaan} \times 100\% \dots \dots \dots (1)$$

Sumber: (Rosalienna and Zulkifli, 2019)

Rasio Efisiensi. Rasio efisiensi menunjukkan tingkat efisiensi pemanfaatan realisasi sumber-sumber penerimaan untuk membiayai komponen belanja (baik belanja operasional, belanja modal, maupun belanja tidak terduga). Nilai semakin baik (sangat efisien) jika perbandingan antara belanja dan realisasi penerimaan kurang dari 60%.

Tabel 2. Kategori Rasio Efisiensi

No.	Kategori	Persen
1.	Tidak Efisien	>100
2.	Kurang Efisien	90-100
3.	Cukup Efisien	80-90
4.	Efisien	60-80
5.	Sangat Efisien	<60

Sumber: (Rosalienna and Zulkifli, 2019)

Rasio ini diperoleh dengan cara:

$$Rasio\ Efisiensi = \frac{Belanja}{Realisasi\ Penerimaan} \times 100\% \dots \dots \dots (2)$$

Sumber: (Rosalienna and Zulkifli, 2019)

Rasio Kemandirian. Rasio kemandirian adalah perbandingan antara penerimaan yang berasal dari pendapatan asli daerah dengan penerimaan yang diperoleh dari dana pihak lain

seperti transfer pemerintah pusat atau provinsi. Semakin tinggi prosentasenya berarti bahwa penerimaan yang berasal dari pendapatan asli daerah jumlahnya lebih banyak dari dana transfer tersebut. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat mengoptimalkan penerimaan yang berasal pendapatan asli daerahnya.

Tabel 3. Kemandirian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

No.	Kategori	Persen
1.	Sangat Kurang	0-10
2.	Kurang	10-20
3.	Sedang	20-30
4.	Cukup	30-40
5.	Baik	40-50
6.	Sangat Baik	>50

Sumber: (Rosalienna and Zulkifli, 2019)

Rasio ini dihitung dengan rumus:

$$Rasio\ Kemandirian = \frac{PAD}{Bantuan\ Pemerintah\ Pusat\ atau\ Provinsi} \times 100\% \dots (3)$$

Sumber: (Rosalienna and Zulkifli, 2019)

Rasio Aktifitas. Rasio aktifitas dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar alokasi anggaran yang digunakan untuk keperluan belanja rutin (operasional) dan belanja modal (pembangunan). Ada kecenderungan bahwa alokasi anggaran lebih banyak digunakan untuk membiayai keperluan rutin sehingga pembangunan infrastruktur berkurang porsinya. Rasio ini diukur dengan rumus:

$$Rasio\ Belanja\ Rutin = \frac{Belanja\ Rutin}{Total\ APBD} \times 100\% \dots (4)$$

$$Rasio\ Belanja\ Pembangunan = \frac{Belanja\ Pembangunan}{Total\ APBD} \times 100\% \dots (5)$$

Sumber: (Rosalienna and Zulkifli, 2019)

Rasio Pertumbuhan. Rasio pertumbuhan dapat mengetahui besaran pertambahan atau pengurangan penerimaan pendapatan daerah dan gambaran keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kerjanya dalam mengelola keuangan daerahnya. Hal ini juga dapat menjadi dasar dalam menentukan kebijakan fiskal pada daerah yang bersangkutan. Rasio pertumbuhan diukur dengan rumus:

$$Pertumbuhan\ PAD = \frac{PAD\ skr - PAD\ tahun\ sbim}{PAD\ tahun\ sbim} \times 100\% \dots (6)$$

$$Pertumbuhan\ Pendapatan = \frac{Pdpt\ skr - Pdpt\ tahun\ sbim}{Pdpt\ tahun\ sbim} \times 100\% \dots (7)$$

Sumber: (Rosalienna and Zulkifli, 2019)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 4. Rasio Kinerja Keuangan Kabupaten Bondowoso Tahun 2016-2020 (persen)

No.	Rasio Kinerja Keuangan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Efektifitas	100,2	98,9	102,6	99,9	100,5
2.	Efisiensi	89,6	100,6	96,0	102,3	82,8
3.	Kemandirian	10,6	14,5	12,3	12,3	13,5
4.	Aktifitas Rutin	67,7	66,4	68,0	68,5	71,1
5.	Aktifitas Pembangunan	21,9	19,9	13,6	17,9	11,7
6.	Pertumbuhan PAD	10,2	29,4	-11,3	7,5	1,9
7.	Pertumbuhan Pendapatan	7,4	-1,0	8,8	3,0	-10

Sumber: Hasil Analisis (2021)

Rasio Kinerja Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan semata-mata untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dilakukan secara begitu saja tetapi membutuhkan tata kelola yang baik sehingga target pembangunan nasional dapat tercapai. Asas pengelolaan keuangan daerah yang utama adalah memenuhi nilai akuntabilitas berorientasi pada hasil, yaitu setiap pengguna anggaran wajib memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangannya baik dalam tingkat keberhasilan maupun memberikan masukan penyebab kegagalan sebuah program berikut solusi terbaiknya sehingga kegagalan dapat diantisipasi di masa yang akan datang (Muhajir, 2019).

Beberapa kriteria dalam menyelenggarakan keuangan daerah yang memenuhi prinsip akuntabilitas adalah tertib administrasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, efektif dan efisien; biaya seminimal mungkin dengan manfaat yang diperoleh besar, dilaporkan secara apa adanya/transparan, memenuhi rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat (Suhartini, 2019).

Guna mengukur tingkat keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi nilai akuntabilitas seperti yang telah disebutkan diatas, diperlukan indikator atau metode pengukuran yang tepat sehingga keberhasilannya dapat diketahui. Tingkat keberhasilan masing-masing indikator diukur dengan rumus efektivitas yaitu membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya, dihitung dalam persentase. Jika hasilnya melebihi dari angka 100% berarti tingkat keberhasilan tinggi karena realisasi melebihi target. Jika angka keberhasilan dibawah 100% maka program tidak berhasil dan perlu dievaluasi penyebab tidak tercapainya target tersebut.

Kinerja efektifitas penerimaan APBD Kabupaten Bondowoso menunjukkan

perubahan dari tahun ke tahun tetapi masih dalam kategori sangat efektif dan efektif. Rasio efektivitas penerimaan adalah gambaran bagaimana pemerintah daerah merealisasikan target perencanaan sebagai penerimaan yang sesungguhnya (Nurhasanah and Maria, 2017). Tingginya rasio efektifitas menunjukkan kemampuan kemampuan daerah dalam merealisasikan target dalam perencanaan menjadi sebuah kenyataan penerimaan pendapatan. Kinerja paling baik ditunjukkan pada tahun 2016 dan 2020 dimana rasio efektifitasnya mencapai >100% (sangat efektif). Hal ini berarti bahwa Kabupaten Bondowoso mampu memwujudkannyatakan target anggaran penerimaannya.

Kinerja efisiensi keuangan Kabupaten Bondowoso pada periode tahun 2016 dan 2020 menunjukkan kategori paling baik cukup efisien (80-100%) selain itu masuk dalam kategori kurang efisien dan tidak efisien. Rasio efisiensi menunjukkan perbandingan realisasi anggaran belanja dibandingkan dengan realisasi penerimaannya. Angka prosentase yang semakin kecil menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik karena pendapatan semakin besar dan belanja semakin kecil. Pokok-pokok belanja pada struktur keuangan Kabupaten Bondowoso meliputi belanja operasi, belanja, dan belanja tak terduga. Faktor yang menjadi penyebab ketidakefisiensi ini adalah bahwa anggaran penerimaan digunakan untuk membiayai kebutuhan belanja.

Rasio kemandirian menunjukkan bahwa suatu daerah memiliki kapabilitas untuk membiayai pembangunan di daerahnya dengan menggunakan sumber pemasukan dari pendapatan asli daerahnya. Meskipun ada bantuan dari pihak lain (pemerintah pusat/provinsi) namun persentasenya relatif lebih kecil dari pendapatan asli daerah seperti yang berasal dari pajak, retribusi, pengelolaan potensi sumber daya alam daerah, dan lain-lain yang sah.

Rasio kemandirian dapat menjadi indikator seberapa besar peran masyarakat dalam

membayai pembangunan di daerahnya melalui pembayaran pajak dan retribusi daerah (Suartini and Sulistiyo, 2020). Pajak dan retribusi daerah dapat digunakan sebagai sumber dana pembiayaan pembangunan infrastruktur. Hal itu juga cerminan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin baik (Pramono, 2014; Suranta *et al.*, 2017).

Kinerja kemandirian keuangan Kabupaten Bondowoso pada tahun 2016-2020 masih menunjukkan kategori sangat kurang (10-20%). Ini menunjukkan bahwa jumlah PAD Kabupaten Bondowoso yang berasal dari pajak, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain masih dibawah jumlah gabungan penerimaan yang berasal dari dana transfer pemerintah pusat-dana perimbangan, transfer pemerintah pusat lainnya, dan transfer pemerintah provinsi.

Rasio aktifitas rutin adalah nilai perbandingan antara realisasi anggaran untuk membiayai belanja rutin dengan total APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang diterima pada tahun tersebut. Prosentase yang semakin tinggi menunjukkan pada porsi belanja rutin semakin besar jumlahnya. Rasio aktifitas rutin ini tidak dapat dipisahkan dengan rasio aktifitas pembangunan yaitu besaran prosentase yang diberikan untuk belanja modal atau pembangunan (investasi).

Jika rasio aktifitas rutin tinggi maka dapat dipastikan rasio aktifitas pembangunan akan rendah. Patokan pembagian yang ideal belum ada karena dipengaruhi oleh banyak hal seperti kebutuhan investasi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi. Tetapi untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia diperlukan rasio pembangunan yang lebih tinggi untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan (Nurhayati, 2015).

Menurut hasil perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar penerimaan yang diperoleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso diutamakan untuk membiayai kebutuhan rutin (rata-rata 68%) sehingga belanja modal menjadi kecil (kurang dari 20%). Terbukti dari rata-rata rasio aktifitas rutin lebih besar jika dibandingkan dengan rata-rata rasio aktifitas pembangunan pada periode yang sama. Alokasi belanja rutin/operasional seperti belanja pegawai (gaji) dan belanja barang.

Pemerintah Kabupaten Bondowoso memberikan pos pengeluaran rutin untuk pemenuhan penyelenggaraan roda pemerintahan dan sedikit memberikan perhatian pada pembangunan daerah. Tidak ada patokan besaran minimal yang pasti untuk belanja modal sehingga Pemerintah Kabupaten Bondowoso mengalokasikan anggaran yang

lebih besar untuk kebutuhan rutin sehingga menyebabkan belanja modal menjadi sedikit.

Pertumbuhan PAD terbaik di Kabupaten Bondowoso terjadi pada periode tahun 2017 dimana pertumbuhannya PAD mencapai 29,4% (Rp. 52.125.160.188,41) sedangkan pertumbuhan pendapatan terbaik terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 8,8% (Rp. 170.044.999.048,54). Peningkatan ini terjadi hampir pada semua komponen PAD seperti pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah. Peningkatan PAD ini disebabkan karena Pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui Badan Pendapatan Daerah telah menerapkan dua kebijakan yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi.

Intensifikasi pajak daerah melalui perubahan tata administrasi pemungutan yang lebih sederhana dan merasionalisasi pajak dan retribusi daerah. Identifikasi sumber-sumber pendapatan daerah baru dan mendorong pertumbuhan dunia usaha yang ada di wilayahnya merupakan upaya-upaya ekstensifikasi peningkatan PAD. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan (M, Nursadik and Yunus, 2019; Salehoddin, 2019; Fransisca, 2020) bahwa upaya intensifikasi dan ekstensifikasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan PAD.

Sumber Dana Pembiayaan Infrastruktur.

Rasio kemandirian keuangan daerah dapat menunjukkan kekuatan suatu daerah untuk menyediakan infrastruktur (melaksanakan pembangunan di segala bidang) secara mandiri. Kunci rasio kemandirian terletak pada pendapatan asli daerah (pajak, retribusi, dll). Pendapatan Asli Daerah dapat digunakan untuk memperbaiki sarana dan prasarana publik yang rusak sehingga pelayanan publik kepada masyarakat dapat ditingkatkan dan dengan demikian pertumbuhan ekonomi ikut bertumbuh.

Pertumbuhan ekonomi yang baik menandakan bahwa kondisi ekonomi atau kesejahteraan masyarakat tinggi sebab fungsi-fungsi ekonomi (produksi, distribusi, dan konsumsi) berjalan dengan baik (Widani and Erawati, 2016). Desentralisasi fiskal menuntut konsekuensi bawah setiap daerah dapat membiayai pembangunannya tetapi kemampuan membiayai pembangunan ini tidak sama setiap wilayah dikarenakan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber PAD-nya tidak sama. Sumber PAD ini harus dapat dikonversi menjadi sebuah kegiatan yang bernilai ekonomis sehingga tercipta perputaran uang untuk membiayai pembangunan yang berkelanjutan (Nawawi, 2021).

Berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan daerah Kabupaten Bondowoso bahwa rata-rata rasio kemandirian pada periode 2016-2020 adalah 12,6% maka dapat dipastikan untuk penyediaan infrastruktur membutuhkan peran pihak lain dalam pembiayaannya. Untuk itu diperlukan skema penyediaan infrastruktur diantaranya Dana Perimbangan DAU (dana alokasi umum), dana alokasi umum merupakan bagian dari APBN yang digunakan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur (Hidayah and Setiyawati, 2014; Herdiyana, 2019).

Dana alokasi umum ini adalah dana transfer dari pemerintah pusat dimana peruntukannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah yang menerimanya sejalan dengan visi misi kepala daerah. Dana desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat ini dapat digunakan dalam penyediaan sarana dan prasarana untuk kepentingan publik maupun pemerintahan. Ketersediaan sarana dan prasarana akan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah (Hidayah and Setiyawati, 2014; Sumangkut, Kindangen and Walewangko, 2016).

Dana alokasi khusus (DAK) berasal dari APBN yang diberikan kepada daerah dengan maksud membiayai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah sekaligus menjadi prioritas pembangunan nasional. Dana alokasi khusus dapat mengurangi beban biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam menanggung kegiatan khusus yang dilaksanakan di daerahnya. Pelaksanaan DAK terbatas hanya pada investasi pembangunan, pembangunan dan perbaikan sarana pelayanan umum/publik sehingga memiliki masa guna/manfaat yang panjang (Pratama, 2019).

Pinjaman Daerah dapat digunakan untuk mempercepat pembangunan sarana dan prasarana pelayanan publik sehingga tercipta efisiensi kegiatan ekonomi. Penggunaan pinjaman daerah harus tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan prioritas pembangunan daerah. Pencapaian pembangunan daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah dapat diakselerasi dengan pinjaman daerah ini (Sudarlan, Sampeallo and Anggraini, 2018; Hakim, 2020).

Jika pemerintah daerah memutuskan melakukan pinjaman maka timbul kewajiban untuk mengembalikan pinjaman daerah tersebut melalui komponen angsuran pokok pinjaman, bunga, dan biaya administrasi. Denda muncul jika ada keterlambatan mengangsur pinjaman daerah. Oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Bondowoso harus berhati-hati apabila mengambil keputusan melakukan pinjaman

daerah karena mengandung konsekuensi denda/pinalti atas keterlambatan membayar angsuran pinjaman. Sumber dana pinjaman daerah dapat berasal dari pemerintah maupun swasta seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank dan bukan bank, dan obligasi daerah (Sofi, 2020).

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha disingkat KPBU adalah sebuah bentuk kerjasama saling menguntungkan antara pemerintah (government) dengan badan usaha (baik milik swasta atau pemerintah sendiri) dalam penyediaan kebutuhan infrastruktur umum. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha diatur dalam Perpres No. 38 Tahun 2015 yang mana menyebutkan bahwa sumberdaya yang digunakan dapat berasal sebagian atau seluruhnya dari badan usaha dengan mempertimbangkan kemungkinan resiko yang akan terjadi.

Skema ini bukan sebuah bentuk pengalihan tanggung jawab pemerintah sebagai penyedia sarana dan prasarana tetapi upaya pelibatan badan usaha baik milik swasta atau pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan di daerah (Noor, 2016; Casnoto, 2019). Badan usaha yang dimaksud adalah sektor swasta, BUMN, BUMD, PT, atau lembaga pembiayaan dari luar negeri. Pemerintah Kabupaten Bondowoso dapat menggunakan skema pembiayaan KPBU ini sebagai alternatif pembangunan infrastruktur di wilayahnya sehingga mengurangi beban APBD untuk pendanaan infrastruktur (Artiningsih *et al.*, 2019).

Pemerintah Kabupaten Bondowoso dapat memanfaatkan peran perusahaan yang ada di wilayahnya melalui *Corporate Social Responsibility* yang merupakan bentuk partisipasi perusahaan dalam pembangunan melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat. Kegiatan CSR utamanya seputar kegiatan sosial seperti penyehatan lingkungan, penyediaan rumah ibadah, pemberdayaan masyarakat, dll (Fahham, 2011; Ernawan, 2014; Hidayat *et al.*, 2020). Sampai dengan saat ini Pemerintah Kabupaten Bondowoso telah bekerjasama dengan beberapa perusahaan yang ada di wilayahnya untuk turut serta membangun infrastruktur seperti air bersih, perbaikan rumah tidak layak huni, sarana MCK pada lingkungan pondok pesantren, pembangunan sekolah, pembangunan masjid.

KESIMPULAN

Rasio efektifitas kinerja keuangan Kabupaten Bondowoso menunjukkan kinerja sangat efektif dimana target penerimaan anggaran sesuai dengan perencanaan. Rasio efisiensi menunjukkan kategori cukup efisien.

Hal ini berarti bahwa kinerja efisiensi keuangan Kabupaten Bondowoso masih terfokus pada kategori belanja, baik belanja modal maupun belanja operasi. Faktor yang menjadi penyebab ketidakefisiensi ini adalah bahwa anggaran penerimaan digunakan untuk membiayai kebutuhan belanja. Kinerja kemandirian keuangan Kabupaten Bondowoso pada tahun 2016-2020 masih menunjukkan kategori sangat kurang (10-20%). Ini menunjukkan bahwa jumlah PAD Kabupaten Bondowoso yang berasal sumber asli pendapatan daerah (pajak, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain) masih dibawah jumlah gabungan penerimaan yang berasal dari dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat/provinsi. Sebagian besar penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja rutin (rata-rata 68%) sehingga rasio belanja modal relatif kecil (kurang dari 20%). Terlihat dari rata-rata rasio kedua kinerja tersebut bahwa rata-rata rasio belanja rutin lebih besar jika dibandingkan dengan rata-rata rasio belanja modal. Besarnya alokasi dana belanja rutin terutama digunakan untuk belanja pegawai (gaji) dan belanja barang. Pembiayaan infrastruktur dapat menggunakan dana yang bersumber dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah, kerjasama pemerintah dengan badan usaha, dan dana CSR perusahaan yang ada di Kabupaten Bondowoso.

REKOMENDASI

Rekomendasi kebijakan strategis yang dapat dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Bondowoso, yaitu:

1. Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah merencanakan peningkatan alokasi APBD untuk belanja modal. Peningkatan belanja modal memberikan jaminan penyediaan infrastruktur dapat terlaksana dengan baik.
2. Membentuk Tim Optimalisasi PAD yang terdiri dari Badan Pendapatan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu. Tim ini akan bertugas mengoptimalkan setiap komponen pendapatan asli daerah dapat terealisasi sesuai dengan perencanaannya. Program kerja yang dilaksanakan adalah penegakan administrasi kewajiban pajak terhadap wajib pajak yang lalai, selain itu Tim ini juga memberikan laporan tentang penerimaan pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi yang potensial atau baru.

3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso menginisiasi pembentukan Forum Corporate Social Responsibility. Forum ini dibentuk dengan tujuan memberikan kesempatan kepada perusahaan/ korporasi untuk turut serta melaksanakan pembangunan di Kabupaten Bondowoso terutama untuk pembangunan sosial kemasyarakatan, seperti penyediaan fasilitas MCK, musholla, perbaikan jalan kampung, dan lain-lain.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso membuat MoU (Memo of Understanding) dengan badan usaha. Nota Kesepahaman ini akan membuka kesempatan kepada badan usaha untuk turut serta membiayai pembangunan salah satunya melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala BALITBANG Provinsi Jawa Timur yang telah memberi kesempatan kepada Penulis melakukan penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Pejabat Fungsional Peneliti di lingkungan BALITBANG Provinsi Jawa Timur atas saran dan masukannya untuk perbaikan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adismita, R. 2011. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agus, E. and Safri, M. 2016. Kinerja Keuangan Daerah dan Pembiayaan Belanja Modal Kabupaten Merangin, *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 4(1), pp. 37-50. Available at: <https://online-journal.unja.ac.id/JES/article/view/3531/6310>.
- Artiningsih *et al.* 2019. Skema Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Non-Konvensional Di Kota Semarang, *Jurnal Riptek*, 13(2), pp. 92-100.
- Casnoto, H. 2019. Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur pada Daerah Otonom melalui Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (Studi pada Pemerintah Kota Bandung). in *Tantangan Administrasi dalam Mewujudkan SDGs di Era Revolusi Industri 4.0*. Bandung: Politeknik STIA LAN Bandung.
- Ernawan, E. 2014. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility). *Jurnal Performa*, 11(2), pp. 20-36. doi: <https://doi.org/10.29313/performa.v0i2.3026>.
- Fahham, A. M. 2011. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Penerapannya pada Perusahaan di Indonesia. *Jurnal Aspirasi*, 2(1), pp. 111-119. doi: <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v2i1.430>.

- Fransisca, A. 2020. *Pengaruh Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Parkir Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Surabaya*. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Hakim, M. A. Al. 2020. *Mengenal Pinjaman Daerah*. [Online] Dari: <https://www.kompasiana.com/muhammad06020/5eb8dcdad541df5f710f5862/mengenal-pinjaman-daerah> [Diakses: 21 December 2021].
- Heldi and Zelika, Y. Z. 2020. Kinerja Keuangan Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. *Jurnal Politicon*, 2(1), pp. 48–60. doi: <https://doi.org/10.15575/politicon.v2i1.8098>.
- Herdiyana, D. 2019. Analisis Data Peta Kapasitas Fiskal Daerah', *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 1(1), pp. 112–133.
- Hidayah, N. and Setiyawati, H. 2014. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Langsung di Propinsi Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi*, 18(1), pp. 45–58. doi: <http://dx.doi.org/10.24912/ja.v18i1.549>.
- Hidayat, R. et al. 2020. Analisis Yuridis Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Terhadap Masyarakat Sekitar. *Jurnal de Jure*, 20(4), p. 544. doi: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.531-544>.
- Hodžić, S. and Muharemović, A. 2019. Fiscal Decentralization and Efficiency of Regional Government in Croatia: A Data Envelopment Analysis. *Lex Localis*, 17(3), pp. 453–470. doi: <https://doi.org/10.4335/17.3.453-470>.
- Kusuma, M. E. and Muta'ali, L. 2019. Hubungan Pembangunan Infrastruktur dan Perkembangan Ekonomi Wilayah Indonesia. *Jurnal Bumi Indonesia*, 8(3), pp. 1–14.
- M, N., Nursadik, M. and Yunus, M. 2019. Strategi Peningkatan PAD Melalui Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Enrekang. *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 5(1), pp. 37–48. doi: <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp/article/view/6500>.
- Mahulae, P. J. M. 2018. Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode Tahun 2009 s/d 2016. *Jurnal Inovasi*, 15(2), pp. 125–136. doi: <https://doi.org/10.33626/inovasi.v15i2.75>.
- Nawawi, A. 2021. Analisis Respon Belanja APBD terhadap Transfer Tidak Bersyarat dari Pemerintah Pusat: Studi Kasus Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018-2020. *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia*, 3(1), p. 55.
- Noor, M. M. H. 2016. *Mengenal Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Skema Public Private Partnership (PPP) di Indonesia*. [Online] Dari: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/11824/Mengenal-Kerjasama-Pemerintah-dengan-Badan-Usaha-KPBU-Skema-Public-Private-Partnership-PPP-di-Indonesia.html> [Diakses: 15 August 2021].
- Nugraheni, D. and Priyarsono, D. S. 2012. Kinerja Keuangan Daerah, Infrastruktur, dan Kemiskinan: Analisis Kabupaten/Kota di Indonesia 2006–2009. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 12(2), pp. 148–167. doi: <https://doi.org/10.21002/jepi.v12i2.495>.
- Nurhasanah and Maria. 2017. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 1(1), pp. 60–73.
- Nurhayati. 2015. Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Cano Ekonomos*, 4(1), pp. 55–66.
- Park, S. and Kim, S. 2021. How Does Fiscal Autonomy Influence Fiscal Outcomes Depending on Corruption. *Lex Localis*, 19(1), pp. 91–109. doi: <https://doi.org/10.4335/19.1.91-109>.
- Pramono, J. 2014. Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Surakarta). *Among Makarti*, 7(1), pp. 83–112. doi: <http://dx.doi.org/10.52353/ama.v7i1.97>.
- Pratama, M. Y. (2019) *Mengenal DAK dan Kebijakan Baru DAK Non Fisik 2019*. [Online] Dari: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/mengenal-dak-dan-kebijakan-baru-dak-non-fisik-2019/> [Diakses: 15 September 2021].
- Qur'ani, S. and Panggiarti, E. K. 2021. Analisis Rasio Keuangan Daerah Sebagai Penilaian Kinerja Pada Pemerintahan Kota Magelang. *Jurnal Bilancia*, 5(1), pp. 60–70. Available at: <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/article/view/897>.
- Rosaliena, V. and Zulkifli, Z. 2019. Analisis Rasio untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2017. *Jurnal Kajian Bisnis*, 27(2), pp. 175–189. doi: <https://doi.org/10.32477/jkb.v27i2.60>.
- Sadalia, I. et al. 2019. How the Financial Openness Accelerates the Economic Growth of Leading ASEAN Economies. *Journal of Security and Sustainability Issues*, 9(2), pp. 473–487. doi: [http://doi.org/10.9770/jssi.2019.9.2\(9\)](http://doi.org/10.9770/jssi.2019.9.2(9)).
- Salehodin. 2019. Strategi Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pamekasan. *Jurnal DiE*, 10(2), pp. 114–119. Available at: <https://doi.org/10.30996/die.v10i02.3397>.

- Saragih, F. and Siregar, I. A. 2020. Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tebing', in *Skenario Pemulihan Pasca Pandemi Berbasis Pembangunan Desa*. Medan: Universitas Pembangunan Panca Budi, pp. 43-53. Available at: <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/scenario/article/view/1153/1029>.
- Shi, Y. 2018. An Empirical Assessment of Local Autonomy and Special District Finance in the US. *Local Government Studies*, 44(4), pp. 531-551. doi: <https://doi.org/10.1080/03003930.2018.1471395>.
- Siregar, O. K. and Panggabean, F. Y. 2021. Analisis Kinerja Keuangan Daerah Berbasis Rasio dan Pertumbuhan Ekonomi Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Sumatera Utara (Studi Kasus Mebidangrokat). *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 11(2), pp. 27-37. Available at: <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/akuntansibisnisdanpublik/article/view/1154/1024>.
- Sofi, I. 2020. *Pilihan Pembiayaan Infrastruktur Daerah Makin Luas*. [Online] Dari: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/pilihan-pembiayaan-infrastruktur-daerah-makin-luas/> [Diakses: 23 December 2021].
- Suartini, S. and Sulistiyo, H. 2020. Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Kemiskinan: Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Inovasi*, 17(2), pp. 195-202. doi: <https://doi.org/10.33626/inovasi.v17i2.230>.
- Sudarlan, Sampeallo, Y. G. and Anggraini, N. 2018. Analisis Pinjaman Daerah Sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah Kutai Kartanegara. *Jurnal Akuntansi Multi Dimensi*, 1(1), pp. 37-43. doi: <http://dx.doi.org/10.96964/jamdi.v1i1.192>.
- Sugiarto, E. C. 2019. *Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur dan Indonesia Maju*. [Online] Dari: https://setneg.go.id/baca/index/melanjutkan_pembangunan_infrastruktur_dan_indonesia_maju [Diakses: 12 January 2020].
- Suhartini, S. 2019. Mekanisme Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara. *Jurnal de Jure*, 11(2), pp. 1-16. doi: <https://doi.org/10.36277/v11i2.347>.
- Sumangkut, E. Y., Kindangen, P. and Walewangko, E. N. 2016. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Belanja Daerah di Kota Bitung', *Jurnal Pembangunan dan Ekonomi Daerah*, 18(2), pp. 57-73. doi: <https://doi.org/10.35794/jpekd.12792.18.2.2016>.
- Sumardjoko, I. and Akhmadi, M. H. 2019. Pengembangan Infrastruktur Konektifitas Sebagai Daya Ungkit Ekonomi Dan Pemangkas Kemiskinan Jawa Timur. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 1(1), pp. 22-31.
- Suranta, S. et al. 2017. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Komparasi Propinsi Jawa Tengah Dan Kalimantan Selatan. *Jurnal Akuntansi*, 5(2), pp. 111-124. doi: [10.24964/ja.v5i2.284](https://doi.org/10.24964/ja.v5i2.284).
- Susilawati, D., Intan, L. K. W. and Rahmawati, F. 2018. Menilai Kinerja Keuangan dengan Analisis Rasio Keuangan: Studi Kasus BKAD Sleman. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 1(2), pp. 91-99. doi: [10.18196/jati.010210](https://doi.org/10.18196/jati.010210).
- Tarnoto and Haryanto, J. T. 2018. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Studi Kasus: Provinsi Banten Tahun 2011-2015. *Jurnal Inovasi*, 15(1), pp. 1-10. doi: <https://doi.org/10.33626/inovasi.v15i1.22>.
- Widani, C. I. K. and Erawati, N. M. A. 2016. Pengaruh Kapasitas Fiskal Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah pada Indeks Pembangunan Manusia', *E-Jurnal Akuntansi*, 17(1), pp. 203-232.
- Wiguna, K. A. and Jati, I. K. 2019. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-Lain PAD yang Sah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah', *E-Jurnal Akuntansi*, 28(1), pp. 85-108. doi: <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v28.i01.p04>.

Hasil Penelitian

OPTIMALISASI PENGELOLAAN, PEMANFAATAN DAN PENGAWASAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA DI PROVINSI SUMATERA UTARA

(OPTIMIZATION OF THE MANAGEMENT, UTILIZATION AND SUPERVISION OF VILLAGE FUNDS IN IMPROVING THE ECONOMY OF VILLAGE COMMUNITIES IN NORTH SUMATRA PROVINCE)

*Anton Parlindungan Sinaga**, *Syafri**, *Siti Hajar***, *Kholilul Kholik****,
*Nur Ambia Arma*****, *Dumora Jenny M. Siagian**, *Silvia Darina**, *Afri Winata Lubis**

*Badan Penelitian dan Pengembangan Sumatera Utara
Jalan Sisingamangaraja no.198 Medan 20126
Sumatera Utara – Indonesia
Email: antonsinaga94@gmail.com

** Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jl. Kapten Mochtar Basri No.3 Medan
Sumatera Utara - Indonesia

***Universitas Pembangunan Panca Budi
Jl. Gatot Subroto Km. 4,5 Medan
Sumatera Utara – Indonesia

****Universitas Dharmawangsa
Jl. K. L. Yos Sudarso No. 244, Medan
Sumatra Utara - Indonesia

Diterima: 04 Februari 2022; Direvisi: 21 Maret 2022; Disetujui: 17 Mei 2022

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan terhadap dana desa dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat desa di Provinsi Sumatera Utara. Lokasi yang ditentukan adalah Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Karo dan Kabupaten Batubara. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, melakukan wawancara mendalam, menyebar kuesioner dan telaah dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan yaitu model interaktif Miles, Huberman dan Saldana meliputi tahap pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ditemukan bahwa: 1) Secara keseluruhan proses pengelolaan dana desa di Provinsi Sumatera Utara telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan aturan peraturan perundang-undangan yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan; 2) Pemanfaatan dana desa digunakan untuk pembangunan desa melalui pengembangan potensi desa sebagai upaya peningkatan PAD dan ekonomi masyarakat yaitu melalui pembentukan BUMDes, namun masih ada keterbatasan sumber daya manusia dalam mengelolanya; 3) Pengawasan dana desa telah dilakukan sesuai dengan standard an prosedur yang diatur dalam Permendagri no. 73 tahun 2020 sehingga dapat menghasilkan optimalisasi pengawasan dana desa dan meminimalisir penyimpangan dan konflik yang terjadi dalam pengelolaan dana desa; dan, 4) Optimalisasi pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan dana desa dapat diselenggarakan dengan baik melalui meningkatkan kapasitas sumber daya dan potensi desa sehingga menjadi daya dukung pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan serta sebagai wujud nyata implementasi kebijakan desa tahun 2014.

Kata kunci: optimalisasi, pengelolaan, pemanfaatan, pengawasan, dana desa

ABSTRACT

This study aims to determine the management, utilization, and supervision of village funds to improve the economy of rural communities in North Sumatra Province. The locations determined are Deli Serdang Regency, Langkat Regency, Karo Regency and Batubara Regency. The method used is descriptive qualitative with data collection techniques in the form of observation, conducting in-depth interviews, distributing questionnaires and reviewing documentation. The data analysis technique used is the interactive model of Miles, Huberman and Saldana covering the stages of data collection, data condensation, data presentation and conclusions. The results of the study found that 1) Overall the village fund management process in North Sumatra Province had been carried out following the procedures and laws and regulations which included the stages of planning, implementation, administration, accountability and reporting. 2) Utilization of village funds is used for village development through the development of village potential as an effort to increase PAD and the community's economy, namely through the establishment of BUMDes, but there are still limited human resources in managing it. 3) Supervision of village funds has been carried out following the standards and procedures regulated in Permendagri no. 73 of 2020 to optimize the supervision of village funds and minimize deviations and conflicts that occur in the management of village funds. 4) Optimization of the management, utilization and supervision of village funds can be carried out properly by increasing the capacity of village resources and potentials so that they become the carrying capacity of management, utilization and supervision as well as a tangible manifestation of the implementation of village policies in 2014.

Keywords: optimization, management, utilization, monitoring, village funds

PENDAHULUAN

Desa membangun merupakan salah satu program Nawacita yang dicanangkan oleh pemerintah, yang bertujuan membangun Indonesia dari kawasan pinggir. Program desa membangun ini diharapkan dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat desa dalam menghadapi tantangan dan peluang di masa kini dan akan datang. Tindakan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan program desa membangun merupakan solusi terhadap sumber pendapatan desa, seperti yang diungkapkan oleh Masruroh (2018), bahwa keberadaan UU Desa diperkuat dengan Peraturan Menteri Desa No. 21 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa dan mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembangunan.

Gunawan (2018), menjelaskan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini, diharapkan dapat mewujudkan desa yang mandiri, seperti yang diungkapkan oleh Ridha (2019), dimana: 1) Desa bukan hanya sekedar sebagai obyek penerima manfaat, melainkan sebagai subyek

pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat; 2) Sebagai komponen desa mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan asset lokal sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi warga masyarakat; 3) Desa mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat seperti pangan, energi, layanan dasar dan lain-lain. Dengan demikian, dalam mengimplementasikan UU Nomor 6 Tahun 2014 ini harus adanya komitmen Negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera melalui peningkatan dan pengembangan perekonomian masyarakat.

Pengembangan ekonomi masyarakat perlu dilakukan agar terciptanya peningkatan ekonomi melalui upaya relokasi aktivitas ekonomi dalam masyarakat (Tesoriere, 2008). Hal ini juga berguna untuk merevitalisasi masyarakat serta memperbaiki kualitas hidupnya. Sedangkan Kartasmita (1996) menyatakan bahwa pengembangan ekonomi masyarakat sebagai upaya atau metode yang digunakan untuk menjalankan aktivitas ekonomi agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri, baik individu maupun kelompok sehingga terciptanya kesejahteraan masyarakat. Sueharto (2010) menjelaskan adanya beberapa hal yang perlu diupayakan dalam mengembangkan ekonomi masyarakat agar mencapai tujuan, yakni: 1) Memenuhi kebutuhan pokok masyarakat; 2) Meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan

partisipasi masyarakat; 3) Meningkatkan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan; 4) Menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk membangun dirinya sendiri; 5) Membangun serta memelihara sarana dan prasarana fisik wilayahnya; serta, 6) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hal di atas, maka dapat dipahami bahwa tujuan dari peningkatan perekonomian masyarakat desa adalah untuk memastikan bahwa terjadinya perubahan kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat di suatu wilayah. Berkaitan dengan dana desa, dimana penggunaannya adalah untuk melakukan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, maka secara tidak langsung dana desa diperlukan dalam menunjang terjadinya peningkatan perekonomian masyarakat. Dalam hal ini, dana desa biasanya digunakan untuk menjalankan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sebagaimana Eko, dkk (2015) mengatakan bahwa BUMDes merupakan suatu lembaga yang dibentuk dan didirikan oleh pemerintah desa dengan kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat desa yang berkepentingan kepada masyarakat serta mencari keuntungan desa.

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan (2020) menunjukkan bahwa pada tahun 2015 telah digulirkan dana desa sebesar Rp 20,8 triliun dan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hingga pada RAPBN 2021 sebesar Rp 72 triliun, angka ini mengalami kenaikan 1,1% dari tahun sebelumnya yakni sebesar Rp 71,2 triliun pada tahun 2020. Pemberian dana desa di Provinsi Sumatera Utara di tahun 2020 telah dialokasikan sebesar Rp 7,9 triliun ke desa, yang digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, selanjutnya di tahun 2021 pemberian dana desa dialokasikan sebesar Rp 4,5 triliun, namun yang cair ke desa sebesar Rp 855 miliar. (<https://sumatra.bisnis.com/read/20210524/534/1397166/dana-desa-di-sumut-cair-rp855-miliar-dari-alokasi-rp45-triliun>).

Dana desa yang rutin diberikan oleh Pemerintah Pusat ke Desa rentan terjadi korupsi. Rentan terjadinya korupsi di desa disebabkan oleh kurangnya akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Salah Korupsi dana desa juga terjadi di beberapa desa di Provinsi Sumatera, di tahun 2019 kasus korupsi dana desa sebanyak 14 kasus. Kasus korupsi dana desa di Provinsi Sumatera Utara juga membawa dampak kepada perekonomian masyarakat desa, dan juga terhadap perkembangan kemajuan pembangunan desa. Kasus korupsi dana desa ini

juga disebabkan oleh pengelolaan yang kurang akuntabilitas dan transparansi sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara optimal. Tidak hanya pengelolaan yang baik namun juga harus dibarengi dengan pengawasan yang optimal dari pihak inspektorat baik dari Kabupaten maupun Provinsi sehingga dana desa ini dapat tersalurkan dengan baik dan benar.

Bunga, et.al (2018) berpendapat bahwa pencegahan korupsi dana desa dilakukan dengan 4 (empat) langkah, yakni: pembuatan MoU masyarakat dan perangkat desa untuk komitmen membangun desa, pembentukan tim pengawas independen yang awasi jalannya pengelolaan dana desa, sumpah perangkat desa menggunakan kitab suci dan sanksi yang tegas pelaku penyalahgunaan dana desa. Selanjutnya, Karmani, et.al (2019) bahwa upaya pencegahan korupsi dana desa yakni dengan pembentukan klinik desa yang berada di bawah inspektorat Provinsi untuk mendeteksi dini adanya potensi penyalahgunaan dana desa. Kemudian, Moonti (2018), langkah pencegahan korupsi dana desa yakni dengan mengenali modus-modus korupsi dana desa, peningkatan kapasitas perangkat desa dan pendamping desa.

Secara teoritis bahwa penelitian ini diharapkan dapat mewujudkan optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan dana desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa yang berorientasi kepada pengembangan potensi desa dan penciptaan lapangan kerja. Sedangkan secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan pelaksanaan pengawasan terhadap optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan dana desa dalam rangka mendukung peningkatan perekonomian masyarakat desa.

Winardi (1999) memandang optimalisasi dari dua hal. Pertama, dari sudut pandang usaha, optimalisasi dikenal sebagai usaha memaksimalkan kegiatan dalam mewujudkan keinginan yang dikehendaki. Kedua, optimalisasi diartikan juga sebagai ukuran untuk semua kegiatan yang dipenuhi dari kegiatan yang dilaksanakan, sehingga disimpulkan bahwa optimalisasi dapat diwujudkan apabila dilakukan secara efektif dan efisien. Pendapat lain menyebutkan optimalisasi sebagai penyelesaian terbaik dari suatu permasalahan yang diarahkan pada titik maksimal atau minimal dari suatu fungsi tujuan jika dilihat dari pendekatan normative (Astuti, 2013). Lebih lanjut dijelaskannya jika dari aspek bisnis, optimalisasi dilakukan apabila mereka memaksimalkan keuntungan dengan meminimumkan biaya produksinya. Sehingga

persoalan optimalisasi adalah persoalan bagaimana memaksimalkan laba serta penjualan dan meminimumkan biaya produksinya.

Namun Siringoringo (2005) menyatakan bahwa optimalisasi sebagai proses pencarian solusi terbaik, dimana tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang dapat tercapai jika tujuan pengoptimalannya memaksimalkan keuntungan dan sebaliknya, tidak hanya biaya yang paling kecil yang bisa ditekan apabila tujuannya adalah meminimumkan biaya. Sehingga dapat disimpulkan pada dasarnya optimalisasi mengarah kepada pencapaian tujuan dengan memaksimalkan hasil yang dicapai. Yuniar (2017) menjelaskan terdapat 3 elemen yang harus diperhatikan dalam mengidentifikasi optimalisasi suatu kegiatan, yaitu: 1) Tujuan, berbentuk maksimal atau minimal. Bentuk maksimal digunakan apabila tujuan dari optimalisasi berhubungan dengan keuntungan, penerimaan dan sejenisnya. Sedangkan bentuk minimal digunakan apabila tujuan dari pengoptimalan adalah berkaitan dengan biaya, waktu, jarak dan sejenisnya; 2) Alternatif Keputusan, yang berarti pilihan yang harus disediakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Alternatif keputusan ini berkaitan dengan penggunaan sumberdaya terbatas yang dimiliki pengambil keputusan. Alternatif ini digunakan untuk pencapaian tujuan yang telah ditentukan; dan, 3) Sumber daya yang dibatasi. Sumberdaya merupakan pengorbanan yang harus dilakukan dalam mencapai tujuan. Adanya sumberdaya yang terbatas, sehingga mengakibatkan harus adanya optimalisasi pelaksana, yaitu mencapai tujuan dengan sumberdaya yang tersedia.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat dan memahami setiap konteks fenomena secara keseluruhan. Creswell (2014), mengemukakan bahwa metode kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu dan kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.

Penelitian yang dilaksanakan merupakan penelitian lapangan yang dilakukan mulai bulan Mei sampai Agustus 2021. Narbuko dan Ahmadi (2012) menjelaskan bahwa penelitian lapangan adalah mempelajari secara intensif tentang latar belakang, keadaan sekarang dan interaksi sosial

individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Lokasi penelitian ditetapkan berdasarkan teknik *random sampling* yaitu Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Karo dan Kabupaten Batubara.

Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari observasi, wawancara mendalam, penyebaran Kuestioner dan teknik studi dokumentasi. Informan ditentukan secara sengaja berdasarkan tingkat kepentingan, terdiri dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Inspektorat, dan Tokoh Masyarakat. Serta Teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif Miles, Huberman dan Saldana (2014) yang terdiri atas kegiatan: pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejak era reformasi, makna pembangunan nasional berubah dari pembangunan daerah menjadi membangun daerah. Dimana istilah ini terkait kepada pembangunan yang diangkat kepada bagaimana membangun daerah sesuai dengan asas otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan otonomi daerah yang telah dimulai sejak tahun 2001 mengandung konsekuensi yang cukup menantang bagi daerah. Idris (2014) berpendapat, bahwa di satu sisi, kebebasan berkreasi membangun daerah benar-benar terbuka lebar bagi daerah, namun demikian disisi lain telah menghadang setumpuk masalah yang harus diselesaikan. Masalah yang sangat mendasar adalah perubahan pola pengelolaan keuangan daerah dari sentralistik menjadi desentralistik, misalnya sumber dana untuk membiayai pembangunan, sumber daya manusia sebagai aparat pelaksana seluruh aktivitas pembangunan, dan masih banyak yang lainnya (Idris, 2014).

Pembangunan desa perlu dijadikan prioritas mengingat desa memiliki karakteristik permasalahan yang selalu membelit desa dan cenderung telah menjadi stigma bagi desa. Permasalahan desa antara lain: **Pertama**, desa memiliki Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung bantuan yang sangat kecil pula. **Kedua**, kesejahteraan masyarakat desa rendah sehingga susah bagi desa mempunyai Pendapatan Asli Desa (PADes) yang tinggi. **Ketiga**, masalah itu diikuti oleh rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan. Keempat, tidak kalah penting bahwa banyak

program-program pembangunan dan pemberdayaan masuk ke desa, tetapi hanya sebagian kecil yang melibatkan masyarakat. Kelima, masalah yang selalu membelit desa yakni banyaknya masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan dimana pendapatan masyarakat jauh dari kata cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya (Bambang Hidayana dalam Jusman, 2016).

Terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang merupakan energi baru dalam tata pemerintahan yang memberikan kewenangan dan kepercayaan lebih besar pada pemerintahan desa untuk melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, UU Desa sekaligus merupakan pengesahan bahwa desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. UU Desa membawa misi utama bahwa negara wajib melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokrasi sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan.

Penyelenggaraan pemerintahan desa melalui penyaluran dana desa, sangat membutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak sehingga dapat meningkatkan pencegahan penyimpangan penggunaan dana desa. Salah satu tindakan preventif yang harus dilakukan adalah penguatan kompetensi tenaga pendamping untuk memperkuat kapasitas dan kapabilitas aparat desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penyusunan laporan tentang laporan pertanggungjawaban. Seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Crisbiantoro dan Takwim (2019), bahwa kemampuan desa dalam mengatur pengelolaan dan memanfaatkan dana perlu ditingkatkan sehingga tidak terjadi penyimpangan di tataran pemerintah desa dalam mewujudkan *good governance*.

Dana desa bertujuan untuk mengembangkan potensi desa sehingga dapat memajukan perekonomian masyarakat desa dan memperkuat dalam kemandirian dan kreativitas masyarakat sehingga kebijakan desa dapat terealisasi dengan baik dan benar. Dana desa yang diberikan kepada desa merupakan hak desa untuk mengelola pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatannya secara otonom.

Pemanfaatan dana desa ini, maka desa dapat berperan aktif dalam menggerakkan pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik dan dapat memperoleh pemerataan pembangunan sehingga terciptanya demokratisasi di tingkat desa. Pemanfaatan dana desa ini juga dituntut pemerintah desa

untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah desa, dengan memperbaiki layanan publik desa dan mendorong efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pengelolaan dan pemanfaatan dana desa merupakan implementasi kebijakan dana desa yang bertujuan untuk melindungi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memenuhi hak-hak desa sehingga mendapatkan pemerataan pembangunan dan layanan publik yang optimal. Selain itu, dana desa juga sebagai bantuan langsung yang dapat melaksanakan pembangunan bidang sarana dan prasarana desa, hal ini dimaksudkan sebagai bantuan stimulant atau dana perangsang untuk mendorong dalam pembiayaan program pemerintah di tingkat desa di bidang pemerintahan dan pemberdayaan.

Berdasarkan hasil penelitian, di 4 (empat) kabupaten, yaitu Langkat, Batubara, Deli Serdang dan Karo, bahwa dana desa yang dikelola memberikan manfaat, meliputi: a) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya; b) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki; c) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dalam rangka pengembangan sosial ekonomi masyarakat; serta, d) Mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.

Pengelolaan dana desa yang dioptimalkan dalam penyerapannya diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2018 yang mencakup tentang prioritas Penggunaan Dana Desa sehingga meminimalisir adanya penyelewengan, maka dalam pemanfaatan dana desa tersebut diharapkan sesuai dengan APBDes sebagai rancangan arah dan prioritas dalam penggunaan dana desa. Dana desa yang sesuai dengan arah dan pandangan yang telah ditetapkan di Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa melalui penyusunan APBDes akan dapat memberikan manfaat serta peran positif sebagai roda ekonomi untuk kemajuan desa melalui program pembangunan tetapi harus sesuai dengan klasifikasi dalam penggunaannya dengan tata kelola yang baik, menghindari penyalahgunaan penggunaannya, transparan, optimal melalui swakelola serta dapat dipertanggungjawabkan.

Penggunaan dana desa yang sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, maka dapat menghindari adanya penyalahgunaan dana desa.

Hal inilah yang menjadi alasan utama pentingnya pengawasan yang optimal dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana desa yang telah diberikan kepada pemerintah desa. Banyak terjadi penyimpangan dana desa di beberapa daerah termasuk Provinsi Sumatera Utara, antara lain: a) Pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai; b) *Mark-up* anggaran yang biasanya tidak melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa; c) Penyelewengan dana desa untuk kepentingan pribadi; dan, d) Lemahnya pengawasan.

Tujuan utama pemberian dana desa ini adalah untuk membantu perekonomian masyarakat desa, maka proses pengawasan yang diselenggarakan juga harus melibatkan masyarakat sehingga transparansi dana desa dapat berjalan sebagaimana mestinya sehingga dapat mendukung kecepatan dan ketepatan penyaluran, penggunaan dan pengelolaan dana desa. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dana desa dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga perwakilan masyarakat di tingkat desa yang berfungsi sebagai pengawas dan membantu mengevaluasi regulasi dana desa, serta mensosialisasikan program-program yang dapat meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dana desa yang dikelola dan dimanfaatkan pada beberapa daerah yang ada di Provinsi Sumatera Utara, diprioritaskan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa, diuraikan sebagai berikut.

Kabupaten Deli Serdang, Desa Pematang Johar. Pemerintah desa Pematang Johar telah menciptakan berbagai program yang menciptakan lapangan kerja bagi warganya, yaitu Wisata Sawah, Air Isi Ulang, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Batik yang dikelola oleh BUMDes, yang diberi nama MANDIRI JAYA. Kegiatan yang dilakukan ini telah mampu meningkatkan perekonomian masyarakat, selain dari dana desa juga mendapatkan bantuan dari beberapa perusahaan lokal yang bekerjasama dengan pemerintah desa. Bantuan lokal ini bersumber dari hasil kerjasama desa dengan beberapa perusahaan atau industry yang berada di Kawasan Industri Medan (KIM), hal ini sebabkan oleh Desa Pematang Johar berbatasan langsung dengan KIM sehingga memudahkan akses investasi dalam pengembangan desa ke masa depan.

Beberapa kegiatan atau program yang dilaksanakan pemerintah desa yang bertujuan untuk membangun dan mengembangkan desa serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat selalu mendapatkan dukungan dari pihak industri terutama PT. POKPHAND sebagai mitra

desa. Kerjasama yang berprinsip pada kemitraan ini telah memberikan hasil nyata bagi masyarakat desa yaitu bantuan CSR sebagai implementasi dalam pemberdayaan masyarakat, yang bermitra dengan BUMDes. Pemanfaatan dana desa yang dijadikan sumber dana oleh pemerintah desa, tidak hanya dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat tetapi juga pelayanan publik.

Pelayanan publik yang dirancang oleh pemerintah desa berkaitan dengan program e-Desa yang dirancang oleh pemerintah sebagai inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Tujuan program ini adalah memberikan kemudahan untuk masyarakat desa dalam pengurusan dokumen sesuai dengan kebutuhannya. Mewujudkan program e-Desa ini juga bersumber dari dana desa, tetapi program ini belum dapat dilaksanakan dengan maksimal dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia dan didukung oleh fasilitas yang kurang memadai. Program e-Desa ini juga menjadi prioritas dalam pemanfaatan dana desa yang bertujuan untuk mewujudkan desa berbasis teknologi informasi.

Kabupaten Deli Serdang, Desa Sekip. Upaya yang dilakukan pemerintah desa Sekip, dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana desa adalah menciptakan lapangan kerja lebih berorientasi kepada pengembangan UMKM. Desa ini merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Lubuk Pakam, yang menjadi daerah yang berada di pusat kota dan perkantoran pemerintahan daerah Kabupaten Deli Serdang. Dana desa yang dikelola dan dimanfaatkan secara langsung oleh pemerintah desa dan masyarakat berorientasi pada pengembangan UMKM produk-produk lokal yang dihasilkan oleh masyarakat desa. Produk-produk UMKM, yang dikembangkan meliputi snack (peyek, kacang, kue). Selain UMKM, BUMDes Desa Sekip yang diberi nama SEKIP JAYA, memberikan pelayanan pembelian tiket dan paket tour, voucher hotel, umroh dan haji, token PLN dan listrik, pembayaran tagihan BPJS, telepon dan pembelian pulsa untuk semua operator.

Desa Sekip juga menjadi desa terbaik di Kabupaten Deli Serdang, yang dinilai dari kinerja pemerintah yang baik, dan dilihat dari sisi pembangunan. Di masa pandemic ini, desa Sekip mampu memberikan pelayanan yang baik terkait partisipasi dalam penanggulangan covid 19, salah satunya adalah penyediaan tempat isolasi mandiri bagi masyarakat yang tidak mau ke rumah sakit. Hal inilah menjadi salah satu kriteria penilaian bagi pemerintah desa Sekip, karena mampu memanfaatkan dana desa dengan tepat sasaran. Posisi desa juga memberikan

peluang dan kesempatan Desa Sekip untuk lebih cepat berkembang dikarenakan letaknya di kawasan perkantoran pemerintahan daerah Kabupaten Deli Serdang.

Kabupaten Deli Serdang, Desa Bandar Setia. Merupakan daerah padat penduduk, maka di desa ini banyak pemukiman masyarakat. Kepadatan penduduk desa ini menjadi desa terpadat di Provinsi Sumatera Utara dan akhirnya menjadi alasan dalam pembentukan BUMDes di desa Sekip. Pemanfaatan dana desa yang digunakan oleh pemerintah desa lebih berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan Bank Sampah yang dikelola oleh BUMDes dan menciptakan lapangan kerja sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

Selain, pemberdayaan masyarakat yang dijadikan program dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana desa tetapi juga dengan melaksanakan tata pemerintahan yang baik melalui optimalisasi pelayanan publik dengan memanfaatkan dana desa untuk membuat website sebagai upaya memberikan informasi-informasi terkait pengembangan desa dan program desa yang berkelanjutan sehingga masyarakat dapat terlibat langsung dalam pengawasan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa.

Kabupaten Langkat, Desa Bekiung. Penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Bekiung diselenggarakan dari sumber pendapatan desa terutama dari dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaiknya serta tepat sasaran. Pengelolaan dana desa telah dilakukan dengan perencanaan yang disusun oleh pemerintahan desa dengan berbagai pihak yang terlibat di dalam musyawarah desa yaitu Musrembang.

Dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa dilaksanakan sesuai dengan APBDes sehingga pemanfaatan dana desa dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dana desa yang diberikan dikelola dan dimanfaatkan oleh pemerintah desa yang berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat dengan membentuk BUMDes yang diberi nama BANGUN MANDIRI. Tujuan dibentuknya BUMDes ini adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

BUMDes BANGUN MANDIRI bergerak di bidang perdagangan, pertanian dan peternakan, meliputi perdagangan beras, membuka BRI Link yang bekerjasama dengan BRI serta mengembangkan limbah peternakan dan pertanian sehingga dapat dimanfaatkan kembali sebagai pakan ternak dan pupuk pertanian.

BUMDes BANGUN MANDIRI Desa Bekiung juga menjadi BUMDes terbaik di tingkat nasional dengan kategori Desa Brilliant dari PT. BRI.Tbk dan mendapatkan penghargaan yang lainnya. Pengembangan BUMDes ini juga didukung oleh sumber daya manusia yang memadai dan berpendidikan dan pakar di bidangnya. BUMDes ini sangat memberikan kontribusi yang besar bagi kemajuan desa Bekiung melalui hasil yang diperoleh dari pengelolaan BUMDes yang tepat sasaran.

Desa Bekiung merupakan desa yang berada di daerah perkebunan PTPN II Langkat, yang bergerak di bidang kelapa sawit. Walaupun sebagian dusunnya terletak di perkebunan tidak menjadikan desa ini tidak dapat berkembang, namun dengan letak geografisnya menjadi salah satu daya dukung dalam membangun desa untuk mengembangkan potensi desa melalui BUMDes.

Potensi desa yang dikembangkan menjadi prioritas pemerintah desa untuk memanfaatkan dana desa sebaik mungkin melalui program pemberdayaan masyarakat yang bekerjasama dengan berbagai pihak, meliputi PT. BRI. Tbk, kelompok masyarakat dan lainnya dalam optimalisasi pemanfaatan dana desa yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa.

Kabupaten Langkat, Desa Pasar 8. Merupakan desa yang berada di Kabupaten Langkat, dan pengguna dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat sebagai upaya dalam mengembangkan desa yang berkemajuan serta terwujudnya pemerataan pembangunan dari daerah pinggiran. Dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan APBDes yang telah disusun dan disahkan melalui hasil MUSRENBANG tingkat desa. Perencanaan APBDes menjadi pedoman dalam pemanfaatan dana desa yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan serta tuntutan masyarakat.

Walaupun, pengelolaan dana desa sudah melalui perencanaan yang efektif melalui sistem SISKEUDES sebagai salah satu upaya mengimplementasikan kebijakan dana desa dan kebijakan desa, namun desa ini belum dapat memanfaatkan dana desa sebagaimana mestinya, hanya berorientasi kepada pembangunan infrastruktur dan tidak memiliki BUMDes sebagai lembaga yang dapat memberikan manfaat terhadap peningkatan perekonomian masyarakat desa melalui pemanfaatan dana desa secara optimal.

Ketidak optimalan dalam pemanfaatan dana desa ini diakibatkan karena sumber daya manusia yang minim dan fasilitas yang tidak mendukung, yaitu kapabilitas SDM yang rendah,

daya dukung yang tidak memadai terkait pengembangan potensi desa sebagai faktor utama yang dapat didukung menjadi asset desa. Maka, diperlukan pendampingan yang maksimal untuk memberikan motivasi bagi pemerintah desa sehingga dapat mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Kabupaten Langkat, Desa Stabat Lama.

Peluang dan tantangan dalam melaksanakan kebijakan desa sangatlah terkait kepada kemampuan pemerintahan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik. Penyelenggaraan pemerintahan ini terkait pada pengelolaan dan pemanfaatan dana desa yang tepat sasaran sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan perekonomian desa yang meningkat. Pengelolaan dana desa telah diatur dalam Permendagri nomor 113 Tahun 2014 sehingga hanya tinggal menyesuaikan dengan ketentuan yang ada, selain dari segi perencanaan, administrasi sampai kepada laporan pertanggungjawaban yang langsung dilaporkan ke sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

Tidak hanya pengelolaan yang harus diperhatikan, tetapi juga pemanfaatan dana desanya seperti pada Desa Stabat Lama yang belum dapat mengoptimalkan pemanfaatan dana desa mengarah kepada pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik. Pemanfaatan dana desa yang dilakukan masih berorientasi kepada pembangunan infrastruktur dan perbaikan pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, namun belum terbentuk BUMDes dikarenakan keterbatasan sumber daya dalam pembentukan dan pengelolaan lembaga ini sehingga belum ada optimalisasi pemanfaatan dana desa di Desa Stabat Lama, sedangkan BUMDes merupakan salah satu ukuran optimalnya pemanfaatan dana desa karena menjadi upaya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

Kabupaten Batubara, Desa Tanjung Kasau. Dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa berorientasi dan mengarah kepada APBDes sehingga dapat dimanfaatkan dengan tepat sasaran sesuai dengan tujuan penyaluran dana desa. Desa ini memiliki BUMDes yang bergerak di bidang UMKM Batik, dimana produk batik Tanjung Kasau ini telah memiliki sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dengan nama BATIK PRIMA JAYA sehingga menjadi keunggulan tersendiri dalam memasarkan produk batik di tingkat nasional dan internasional. Selanjutnya, BUMDes Tanjung Kasau juga sedang mengembangkan ternak melalui pembibitan dengan nama TERNAK MAKMUR.

Kemudian, desa ini juga sudah dapat memanfaatkan dana desa sesuai dengan kebijakan desa dengan mengembangkan pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan pembuatan Batik Tanjung Kasau dan mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pelayanan publik, yaitu terciptanya inovasi e-government dengan fasilitas website desa yang dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan administrative dan melakukan penilaian kinerja bagi aparatur desa sehingga dapat mendukung kapabilitas dan integritas aparatur dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Kabupaten Batubara, Desa Pulau Sejuk.

Perencanaan yang disusun dalam APBDes menjadi pedoman dan acuan dalam mengelola dana desa yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan utama dalam mewujudkan masyarakat sejahtera. APBDes ini sebagai kebijakan yang mengarah kepada pengelolaan dana desa yang harus dimanfaatkan dengan tepat sasaran sesuai yang diatur dalam Permendagri nomor 113 Tahun 2014 dan juga salah satu upaya dalam mengimplementasikan kebijakan desa di Desa Pulau Sejuk.

Kegiatan pemanfaatan desa yang mengarah kepada peningkatan perekonomian masyarakat desa dengan membentuk kelompok masyarakat untuk mengembangkan potensi desa seperti hasil kerajinan tangan berupa tas dan sepatu juga makanan khas desa yaitu keripik dan snack yang dipasarkan oleh UMKM melalui Galeri Kito sebagai lembaga yang bertujuan untuk memasarkan produk-produk hasil masyarakat desa. Galeri ini dikelola oleh BUMDes yang bersumber dari dana desa yang dapat memberikan kontribusi kepada pendapatan desa sehingga perekonomian masyarakat desa juga dapat meningkat.

Berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana desa melalui BUMDes, salah satunya adalah menjangkau kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung program membangun desa sebagai implementasi kebijakan desa di Desa Pulau Sejuk. Salah satu kerjasama yang berorientasi kemitraan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan PT. SOCFINDO Perkebunan Tanah Gambus, adalah program penggemukan sapi. Mitra desa ini memberikan bantuan bibit rumput indigo vero, dan rumput gamal untuk penggemukan sapi. Kerjasama ini merupakan langkah yang baik dalam membangun dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

Kabupaten Batubara, Desa Binjai Baru.

Pengembangan potensi desa menjadi kegiatan utama yang dirancang dan disusun dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Binjai Baru. Potensi desa ini dikembangkan melalui pemberdayaan masyarakat yang disusun dalam APBDes sehingga dapat menjadi acuan dan pedoman dalam mengelola dan memanfaatkan dana desa dengan tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan kebijakan dana desa. Penggalan potensi yang menghasilkan inovasi desa dalam pemanfaatan dana desa merupakan tujuan utama desa Binjai Baru dalam mengelola dana desa dengan optimal. Selain inovasi desa yang dapat dikembangkan melalui potensi desa, juga bertujuan dapat menghasilkan bibit-bibit entrepreneur handal sehingga dapat memperkokoh fondasi ekonomi desa, yaitu dengan pembentukan BUMDes.

Peningkatan perekonomian desa melalui pemanfaatan dana desa diperoleh dari pengembangan BUMDes yang bergerak di bidang UMKM Batik, kuliner dan lainnya. Batik Desa Binjai Baru dikenal dengan nama batik jumputan yang bernuansa songket batubara, kemudian desa ini juga dikenal dengan kuliner puding kelapa yang menjadi makanan khas dari desa ini dan saat ini sedang pengembangan pada ternak ikan lele. Pengelolaan dana desa yang direncanakan oleh desa sudah tersusun rapi di dalam APBDes sehingga setiap program yang dilaksanakan merupakan arah dan kebijakan yang telah dirancang di dalam prioritas APBDes dengan sistem musyawarah. BUMDes telah berhasil memberikan keuntungan kepada pendapatan asli desa dengan memasarkan produk-produk khas desa seperti Batik dan Songket yang langsung dibuat oleh masyarakat desa dan menjadi kerajinan tangan serta souvenir desa.

Kabupaten Karo, Desa Kuta Rakyat.

Prioritas dana desa yang dikelola lebih mengarah kepada pembangunan infrastruktur karena masih tahapan revitalisasi dari bencana gunung sinabung sehingga dana desa lebih berorientasi kepada pembangunan fisik. Pengelolaan dana desa yang dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan dalam Permendagri nomor 113 Tahun 2014 serta tahapan pengelolaan dana desa ini diselenggarakan berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.

Pengembangan desa juga dirancang di dalam APBDes termasuk perencanaan desa wisata yang dirancang oleh pemerintah dengan pihak-pihak terkait melalui sistem musyawarah. Pengembangan desa wisata ini dirancang untuk pembentukan BUMDes sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

Kabupaten Karo, Desa Merdeka.

Pengelolaan dan pemanfaatan dana desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa telah dilaksanakan berdasarkan hasil musyawarah di dalam MUSRENBANG desa untuk menentukan APBDes dan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam Permendagri 113 Tahun 2014. Pengelolaan dan pemanfaatan dana desa juga dibantu oleh pendamping desa dalam membuat pelaporan dan pelaksanaan pembangunan fisik. Penyelenggaraan BUMDes belum dapat terealisasi dengan baik sebagai upaya untuk mengembangkan usaha pertanian dalam mendistribusikan hasilnya, selain pertanian juga mengelola wisata. Tahun 2019, desa merdeka menjadi desa terbaik tingkat kabupaten dalam pengelolaan dana desa sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal.

Kabupaten Karo, Desa Raya. Pengelolaan dan pemanfaatan dana desa telah terealisasi dengan baik melalui pendirian BUMDes yang dapat memberikan penambahan pendapatan asli dengan membentuk dan mengelola BUMDes dengan baik yang bernama BUMDes Ersada Raya. Di tahun 2020, BUMDes Ersada Raya telah mendapatkan penghargaan terbaik di tingkat pusat, BUMDes ini mengelola wisata yaitu Taman Seribu Bunga. Dana desa yang dikelola dan dimanfaatkan dengan baik di desa ini telah mampu meningkatkan perekonomian masyarakat serta menciptakan lapangan pekerjaan di sekitar taman wisata bunga yang dikelola oleh BUMDes ini.

Pengelolaan dan pemanfaatan dana desa yang dilaksanakan dengan baik dapat meningkatkan kesadaran, pengetahuan serta partisipasi masyarakat dalam program pembangunan desa. Dana desa ini juga dapat meningkatkan pelayanan publik sehingga dapat mendukung kegiatan pelayanan administrasi serta memberikan kemudahan terhadap mobilitas penduduk secara spasial. Dana desa yang digunakan juga dapat digunakan sebagai upaya pengembangan kawasan perdesaan yang disesuaikan dengan faktor demografis sehingga pemanfaatan dana desa dapat tersalurkan sesuai dengan kebutuhan yang diprioritaskan. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

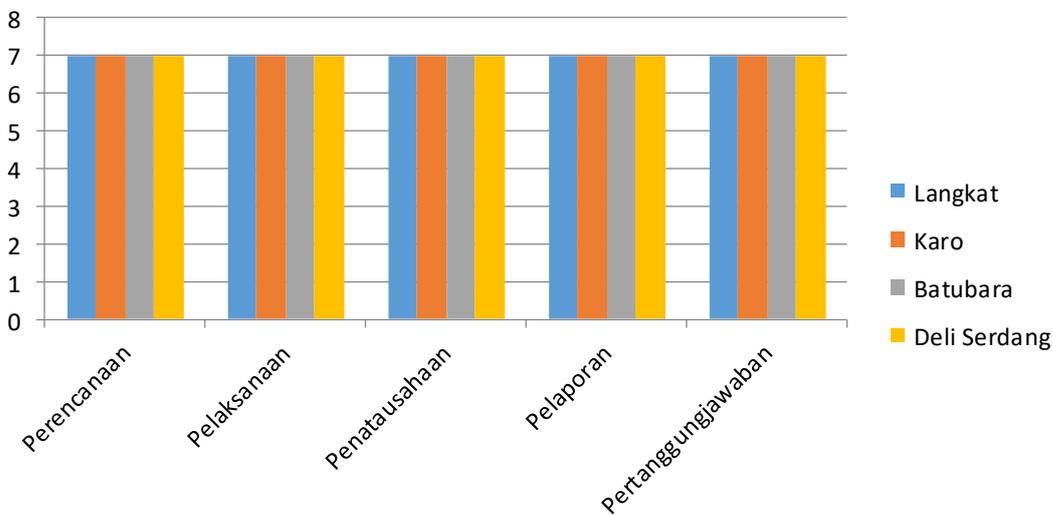
Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan dana desa juga dapat mengakselerasi pembangunan desa melalui pengelompokan kawasan Perdesaan sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan keterpaduan perkembangan desa dan perekonomian desa

dengan memperhatikan: a) Terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik input, proses maupun output kegiatan dapat dipertanyakan dan diberikan masukan oleh masyarakat kawasan perdesaan; b) Bermanfaat langsung sebagai pusat ekonomi dan pemberdayaan masyarakat; c) Partisipatif yang melibatkan lapisan masyarakat setempat dan pemangku kepentingan secara aktif; dan, d) Keswadayaan program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan yang dikembangkan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat guna mendorong tingkat keswadayaan masyarakat setempat.

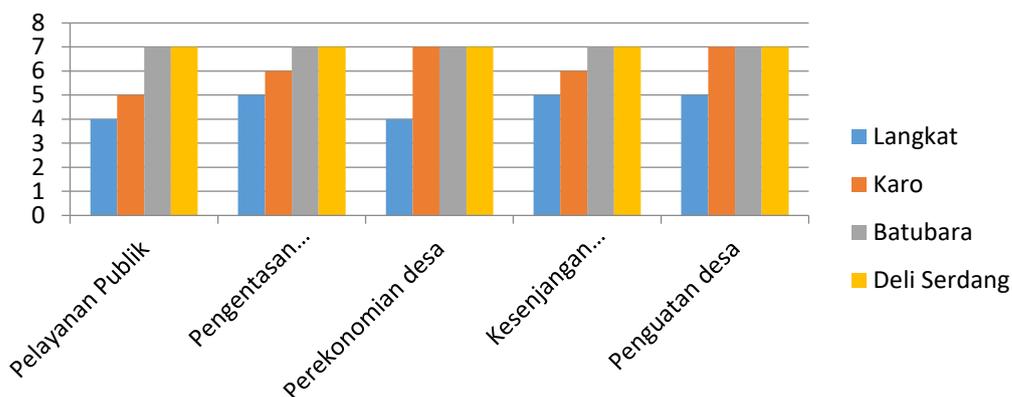
Maka, pengelolaan dan pemanfaatan dana desa di Provinsi Sumatera Utara dapat dikelompokkan berdasarkan kawasan perdesaan sebagai tindak lanjut bagi implementasi kebijakan tentang desa yang menjadi solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh desa untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan dana desa dan juga dapat memaksimalkan dana desa kepada kebutuhan

prioritas masyarakat serta dapat memberikan manfaat dalam peningkatan ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan Gambar 1, terlihat bahwa pengelolaan dana di desa di masing-masing daerah sudah diselenggarakan dengan optimal. Sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 sebagai pedoman dalam pengelolaan dana desa yang diaplikasikan dalam sistem SISKEUDES. Sistem ini sebagai salah satu untuk mengoptimalkan pengelolaan dana desa dengan berpedoman pada APBDes sehingga pemanfaatan dana desa dapat disalurkan sesuai dengan yang telah dimusyawarahkan di tingkat desa. Sistem ini juga memberikan kemudahan bagi pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan dana desa, selain itu juga memudahkan optimalisasi pengawasan dana desa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dalam sistem pengawasan dana desa, yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Camat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dan Inspektorat Kabupaten.



Gambar 1. Grafik pengelolaan Dana Desa di 4 Kabupaten lokasi penelitian
Sumber: Data penelitian (2021)



Gambar 2. Grafik pemanfaatan Dana Desa di 4 Kabupaten lokasi penelitian
Sumber: Data penelitian (2021)

Berdasarkan Gambar 2, beberapa daerah belum dapat mengoptimalkan pemanfaatan dana desa berdasarkan kebijakan yang telah ditentukan. Dana desa yang dikelola masih dimanfaatkan untuk pembangunan fisik seperti infrastruktur yang terkait perbaikan jalan/gang, sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik masih minim. Optimalisasi pemanfaatan dana desa ini juga sebagai salah satu yang dapat menguatkan desa dalam mengembangkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa, apabila sesuai dengan kebijakan desa yang diimplementasikan dengan baik dan benar.

Akselerasi pembangunan desa dengan penggunaan dana desa dapat dilaksanakan dengan pemanfaatan dana desa berbasis kawasan yang mengarah kepada pengelolaan sumber daya alam yang disesuaikan dengan tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi sehingga potensi dan permasalahan desa dapat terpetakan dan diselesaikan dalam perspektif yang lebih komprehensif. Hal ini juga untuk memudahkan pembentukan BUMDes yang disesuaikan dengan potensi desa yang ada.

Upaya mewujudkan optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan dana desa juga membutuhkan pengawasan yang optimal. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait, yaitu inspektorat, PMD, Kecamatan dan BPD tidak hanya melihat kepada dokumen tetapi pada realitas pelaksanaannya sehingga sesuai dengan standar kinerja yang telah ditetapkan. Pengawasan yang dilakukan juga bertujuan untuk menimalisir atau menghindari risiko besar yang dihadapi pemerintah desa dalam pengelolaan dana.

Penyalahgunaan atau penyimpangan terjadi dikarenakan 3 (tiga) kondisi yang disebut Fraud Triangle oleh Wells (2011), yaitu adanya kesempatan, adanya tekanan serta karena sikap atau karakter. Tiga kondisi ini juga dapat memicu konflik di dalam pemerintahan desa, maka penting juga dalam pengawasan bahwa masyarakat juga ikut terlibat di dalam melakukan pengawasan dan pemantauan pembangunan desa. Masyarakat desa dapat melakukan pengawasan dan pemantauan pembangunan dan pengelolaan APBDes di tiga tahapan, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan serta pertanggungjawaban.

Upaya menimalisir risiko yang terjadi dalam pengelolaan dana desa, selain masyarakat juga ada pendamping desa yang ditunjuk oleh Kementerian Desa yang bertugas untuk mendampingi desa mulai dari perencanaan,

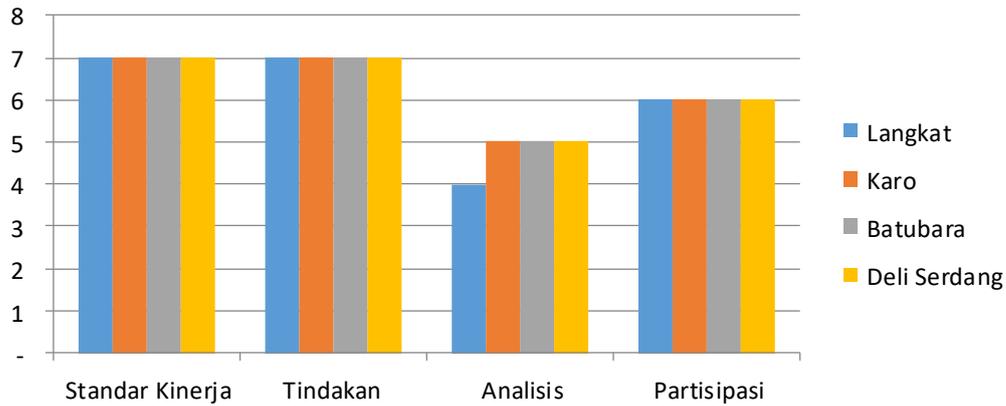
pelaksanaan hingga pertanggungjawaban dana desa. Pengawasan dana desa yang dilaksanakan secara langsung dapat dilakukan untuk mengarahkan desa agar pemanfaatan dana desa dan prosesnya sesuai dengan aturan dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kemiskinan.

Pengawasan tingkat desa dilakukan oleh BPD yang bertugas melakukan pengawasan perencanaan dan pengelolaan dana desa yang sesuai dengan APBDes. Namun, masih terdapat kelemahan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan sumber daya dalam melaksanakan pengawasan secara langsung. Pengawasan dana desa juga dilakukan secara tidak langsung oleh lembaga yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan dana desa, yaitu Inspektorat di tingkat Kabupaten.

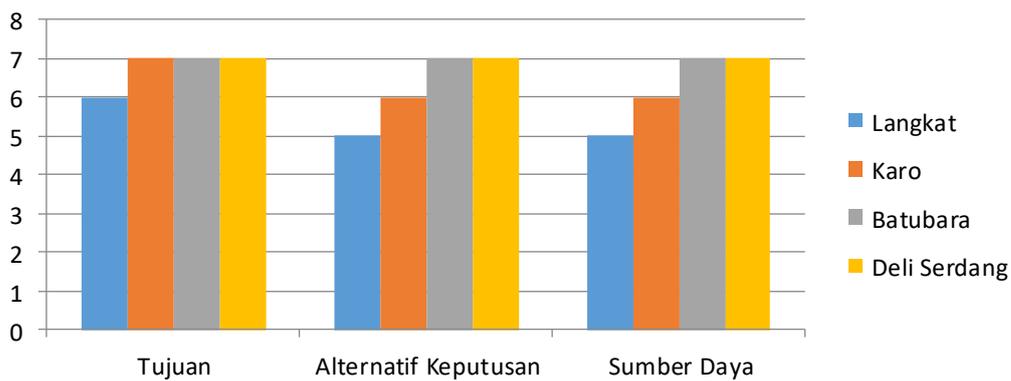
Pengawasan yang dilaksanakan oleh lembaga ini harus sesuai dengan standar yang telah ditentukan terkait pelaporan pertanggungjawaban keuangan dana desa yang beracuan pada APBDes dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disusun dan disahkan pada tingkat desa. Pengawasan dana desa ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah desa menjadi lebih baik. Pengawasan dana desa ini juga diatur dalam Permendagri nomor 73 Tahun 2020 tentang pengawasan dana desa, dimana sudah dilaksanakan program pemeriksaan berbasis risiko di setiap kabupaten sehingga optimalisasi pengawasan dana desa ini dapat terwujud.

Program pemeriksaan berbasis risiko menjadi salah satu upaya dalam mengoptimalkan pengawasan dana desa berdasarkan kepada pemilihan desa yang belum maksimal dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana desa yang diberikan kepada desa. Hal ini bisa terlihat pada sistem keuangan desa yang berkaitan dengan perencanaan, pengelolaan dan sampai pada pelaporan pertanggungjawaban dana desa.

Berdasarkan Gambar 3, pengawasan dana desa yang dilaksanakan sudah sesuai dengan Permendagri No 73 Tahun 2020 tetapi perlu ditingkatkan keterlibatan masyarakat pada pengawasan dan pemantauan pengelolaan dana desa di dalam perencanaan sehingga tersusun menjadi APBDes dan dapat menjadi acuan dalam pemanfaatan dana desa. Pada prinsipnya peran masyarakat ini dibutuhkan untuk melihat, mengamati dan merasakan langsung proses pengelolaan dana desa sehingga tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.



Gambar 3. Grafik pengawasan Dana Desa di 4 Kabupaten lokasi penelitian
 Sumber: Data penelitian (2021)



Gambar 4. Grafik Optimalisasi Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pengawasan Dana Desa di 4 Kabupaten lokasi penelitian
 Sumber: Data penelitian (2021)

Tidak hanya BPD dan masyarakat yang dibutuhkan optimalisasinya dalam pengawasan dana desa, namun peran Camat juga sangat dibutuhkan sebagai unsur pengawas dan Pembina desa yang dijelaskan dalam PP 43 Tahun 2014, dimana tugas seorang Camat tidak dapat dilegaskan kepada orang lain termasuk kepada Kepala Urusan Pemerintahan Desa atau staf yang lainnya. Lemahnya unsur pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat dapat menyebabkan pemerintah desa berada pada kondisi yang lemah dan tertekan dan akhirnya mengalami kesulitan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban dana desa.

Lembaga lain yang berhak melakukan pengawasan adalah Inspektorat Kabupaten. Pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan Permendagri No. 73 Tahun 2020 yang dilakukan secara sistem yang terintegrasi berdasarkan ketentuan yang berlaku sehingga dapat mempengaruhi kinerja pemerintah desa dan menimalisir permasalahan atau konflik dalam penggunaan dana desa.

Berdasarkan Gambar 4, pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan dana desa yang dilaksanakan belumlah dapat dikategorikan maksimal, karena masih terdapat beberapa faktor yang menghambat optimalisasi tersebut, khususnya keterbatasan sumber daya desa. Dengan demikian, dalam melaksanakan pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan dana desa tidak dapat diselenggarakan dengan ketentuan yang sama terutama dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana desa. Hal ini disebabkan oleh perbedaan geografis dan demografis daerah sehingga terlihat keunggulan yang khas dari masing-masing daerah yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan, sehingga penggunaan dana desa dapat dimanfaatkan dengan sebaiknya.

Penggunaan dana desa juga diperlukan evaluasi sebagai bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Camat ke desa sehingga dapat menjadi perbaikan di pengelolaan dana desa selanjutnya yang mengarah kepada pemulihan ekonomi, program prioritas nasional yaitu pembentukan BUMDes dan adanya revitalisasi pembangunan desa yang mengarah kepada

pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik sehingga kebijakan desa dapat terimplementasi dengan baik.

Tabel 1. Matriks Optimalisasi Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pengawasan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa

Kawasan perdesaan yang berpusat pada perkantoran	Desa yang letak geografisnya terletak di daerah ibu kabupaten
Kawasan perdesaan yang berpusat pada pengembangan industri	Desa yang letak geografisnya terletak di daerah kawasan industri
Kawasan perdesaan yang berpusat pada permukiman dan perdagangan	Desa yang letak geografisnya terletak di daerah mobilitas penduduk yang tinggi dan dataran tinggi
Kawasan perdesaan yang berpusat pada kawasan pinggiran, pesisir dan pertanian	Desa yang letak geografisnya terletak di daerah garis pantai

Sumber: Data diolah (2021)

Kegiatan pengawasan dana desa, dapat dioptimalkan melalui: a) Program pemeriksaan berdasarkan resiko dapat memudahkan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat di tingkat Kabupaten sehingga dapat meminimalisir konflik serta meningkatkan kinerja pemerintah desa; dan, b) Pengawasan berbasis kawasan yang didasarkan pada komunitas penduduk secara spasial, meliputi; Kawasan perdesaan yang berpusat pada perkantoran, Kawasan perdesaan yang berpusat pada pengembangan industri, Kawasan perdesaan yang berpusat pada permukiman dan perdagangan, serta Kawasan perdesaan yang berpusat pada kawasan pinggiran pesisir dan pertanian (Tabel 1).

Pengelompokan kawasan desa ini untuk memudahkan mengembangkan potensi desa yang ada sehingga dapat mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan dana desa berdasarkan potensi yang ada. Pengelompokan ini juga memudahkan prosedur dan dapat menjadi standar dalam pelaksanaan pengawasan dana desa.

KESIMPULAN

Pengelolaan dan pemanfaatan dana desa yang dilakukan oleh desa yang ada di Provinsi Sumatera Utara sudah optimal, yaitu dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan, guna menggunakan dana berdasarkan kepentingan masyarakat. Sistem penatausahaan, pertanggungjawaban serta laporan dilakukan melalui aplikasi sistem keuangan desa yang terintegrasi terpusat sehingga tidak akan terjadinya penyelewengan. Dana desa yang digunakan untuk pembangunan desa melalui pengembangan potensi desa sebagai upaya untuk meningkatkan PAD dan ekonomi

masyarakat, antara lain pembentukan BUMDes yang bertujuan untuk mengelola asset desa dan dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat desa. Kecuali pada desa stabat lama, desa pasar 8 Kabupaten Deli serdang dan desa Kuta Rakyat serta desa Merdeka pada Kabupaten Karo yang belum termanfaatkan pada BUMDes, namun masih pada pembangunan infrastruktur. Dana desa ini juga membutuhkan dedikasi dari pemerintah desa tetapi karena keterbatasan kemampuan sumber daya manusia sebagai pengelola dana desa dan kepala desa.

Pengawasan dana desa juga dilaksanakan secara optimal sehingga dapat meminimalisir penyimpangan dan konflik yang terjadi pada pengelolaan dana desa. Pengawasan publik juga diperlukan yaitu dari masyarakat namun, hal ini masih lemah karena keterbatasan pengetahuan masyarakat dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa. Optimalisasi pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan dana desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat adalah dengan meningkatkan kapasitas sumber daya masyarakat dan jejaring kerjasama dalam upaya mengembangkan potensi desa dan BUMDes, khususnya bagi desa-desa yang belum memanfaatkan dana desa pada pembangunan BUMDes. Selain itu untuk memudahkan mengenal potensi desa, dibentuklah pemetaan berdasarkan kawasan diantaranya 1) kawasan perkotaan yang berpusat pada pengembangan industri; 2) kawasan perdesaan yang berpusat pada pengembangan industri; 3) kawasan perdesaan yang berpusat pada pemukiman dan perdagangan; serta 4) kawasan perdesaan yang berpusat pada kawasan pinggiran, pesisir dan pertanian.

REKOMENDASI

1. Untuk Pemerintahan Desa;
 - a. Mengelompokkan potensi desa sebagai sumber daya yang menjadi daya dukung utama dan keunggulan desa melalui perencanaan desa yang berpedoman pada kebijakan desa
 - b. Penguatan keunggulan desa melalui BUMDes
 - c. Membentuk BUMDes yang berprinsip kemitraan dengan menjaring kerjasama dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal
2. Untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - a. Penguatan kompetensi sumber daya di bidang tata kelola dana desa dengan program kemandirian masyarakat desa
 - b. Membuat rancangan perencanaan yang terintegrasi berdasarkan pengelompokan potensi desa berbasis kawasan
 - c. Menyusun standarisasi kemitraan BUMDes dengan pihak-pihak yang terlibat melalui kerangka kerja yang bersifat komprehensif.
3. Untuk Inspektorat;
 - a. Menciptakan standarisasi kinerja pemerintahan desa berbasis tata kelola dana desa yang terintegrasi
 - b. Memperkuat sistem pengawasan melalui tata kelola pengelompokan kawasan perdesaan
 - c. Membuat perencanaan terpadu dalam sistem pengawasan yang berorientasi kepada inovasi desa

DAFTAR PUSTAKA

- Bunga, et.al. 2018. Konsepsi Penyelamatan Dana Desa dari Perbuatan Korupsi. *Halu Oleo Law Review*, 2 (2), 448. <https://doi.org/10.33561/holrev.v2i2.4318>
- Creswell, W. John. 2014. *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed)* Edisi Ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Crisbiantoro, Jefry dan Takwin. 2019. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Percepatan Pembangunan di Kabupaten Konawe. *Jurnal Akrab Juara* Volume 4

Nomor 5 Edisi Desember 2019; Yayasan Akrab Pekanbaru

Eko, Sutoro, dkk. 2015. *Modul Pelatihan Pendampingan Desa: Implementasi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Gunawan, Adi. 2018. *Optimalisasi Pengawasan Dana Desa*. Prosiding Semnasdal I, Oktober 2018; ISBN: 978-623-90592-0-0

Kartasasmita, Ginanjar. 1996. *Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: CidesKementerian Keuangan.

Miles, Matthew B, A Michael Huberman dan Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis: a Methods Sourcebook*. California; Sage Publication, Inc

Moonti, R. M., dan Kadir, Y. (2018). Pencegahan Korupsi dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 6 (3), 430. <https://doi.org/10.29303/ius.v6i3.583>

Narbuko, Cholid, and Abu Ahmadi. 2012. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Ridha, Fahrul. 2019. Analisis Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume IV No. 2 Juli – Desember 2019

Sumatra Bisnis. 2021. Dana Desa di Sumut cair Rp855 Miliar dari alokasi Rp45 Triliun. [Online] Dari: <https://sumatra.bisnis.com/read/20210524/534/1397166/dana-desa-di-sumut-cair-rp855-miliar-dari-alokasi-rp45-triliun> [Diakses: 20 Oktober 2021]

Tesoriere, Jim Ife Frank. 2008. *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi: Community Development*, Terjemahan Sastrawan Manulang dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Winardi. 1999. *Pengantar Manajemen Penjualan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Yuniar, Krisna Amelia. 2017. *Optimalisasi Pengelolaan Zakat dan Efektifitas Amil Zakat terhadap Peningkatan Perolehan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tulungagung*. Tulungagung: Skripsi.

Hasil Penelitian

KEBIJAKAN AKUNTANSI LINGKUNGAN UNTUK MENDUKUNG PARIWISATA BERKELANJUTAN DI KAWASAN DANAU TOBA, PROVINSI SUMATERA UTARA

(ENVIRONMENTAL ACCOUNTING POLICY TO SUPPORT SUSTAINABLE TOURISM IN LAKE TOBA AREA, NORTH SUMATRA PROVINCE)

Azizul Kholis, Abdul Fatah Hassanudin**, Muhammad Yusuf*,
La Hanu*, Eko Wahyu Nugrahadi**

*Universitas Negeri Medan
Jalan Willem Iskandar Pasar V Medan Estate, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan, 20221
Sumatera Utara - Indonesia
Email: azizulkholis@unimed.ac.id

**Universitas Garut
Jl. Raya Samarang, Jl. Hampor Kecamatan No.52A, Mekarwangi, Kabupaten Garut, 44151
Jawa Barat - Indonesia

Diterima: 14 Pebruari 2022; Direvisi: 04 April 2022; Disetujui: 26 April 2022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan akuntansi lingkungan yang dijalankan oleh perusahaan di kawasan sekitar Danau Toba provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan teori, pariwisata berkelanjutan mencakup tiga aspek yaitu ekonomi, lingkungan dan sosial maka ketiga faktor tersebut dalam penelitian ini diuji menjadi penentu kebijakan akuntansi lingkungan perusahaan. Proksi ekonomi diukur melalui dukungan manajemen perusahaan, proksi lingkungan adalah kebijakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan proksi sosial adalah dukungan masyarakat. Pengambilan sampel dilakukan pada 73 perusahaan di Kabupaten Simalungun, Toba, Samosir, Dairi, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, dan Karo. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan CSR (X1), Dukungan Manajemen (X2) dan Dukungan Masyarakat (X3), memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan akuntansi lingkungan perusahaan (Y). Keterbatasan penelitian ini adalah pada sampel yang tidak mengelompokkan perusahaan berdasarkan kategori bidang usaha, sehingga dapat saja berbeda kebijakan akuntansi lingkungan antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Hasil penelitian ini berkontribusi pada pentingnya perusahaan merumuskan kebijakan akuntansi lingkungan perusahaan yang didasarkan pada teori stakeholder untuk mendukung pariwisata berkelanjutan sehingga diharapkan secara kajian akademik kebijakan akuntansi lingkungan perusahaan memiliki kontribusi terhadap penguatan pariwisata berkelanjutan. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah dapat memilih sampel penelitian pada satu kelompok kategori bidang usaha yang sejenis misalnya pada bisnis perhotelan, perusahaan agen perjalanan wisata ataupun jasa transportasi air. Hasil penelitian juga membuktikan bahwa kesadaran akan pariwisata berkelanjutan sudah dipahami oleh pihak manajemen perusahaan yang dibuktikan dengan adanya dukungan program CSR di Kawasan Danau Toba.

Kata kunci: akuntansi, lingkungan, pariwisata, berkelanjutan

ABSTRACT

This study aims to analyze environmental accounting policies implemented by companies in the area around Lake Toba, North Sumatra province. Based on the theory of sustainable tourism covering three aspects, namely economic, environmental and social, these three factors in this study were tested to determine the company's environmental accounting policies. Economic proxies are measured through company management support, environmental proxies are CSR policies and social proxies are community support. Sampling was carried out on 73 companies in Simalungun,

Toba, Samosir, Dairi, Humbang Hasundutan, North Tapanuli, and Karo Regencies. The analysis technique used is multiple regression with the results of the study showing that CSR Policy (X1), Management Support (X2) and Community Support (X3), have a significant influence on the company's environmental accounting policy (Y). The limitation of this research is that the sample does not group companies based on business categories, so that environmental accounting policies may differ from one company to another. The results of this study contribute to the importance of companies formulating environmental accounting policies based on stakeholder theory to support sustainable tourism. The recommendation for further research is to be able to select research samples in a group of similar business categories, for example in the hotel business, travel agency companies or water transportation services. The results of the study also prove that awareness of sustainable tourism has been understood by the company's management as evidenced by the support for CSR programs in the Lake Toba area.

Keywords: *accounting, environment, tourism, sustainability*

PENDAHULUAN

Kinerja sosial perusahaan saat ini sudah menjadi tuntutan global (Kholis, 2016). Salah satu indikator kinerja sosial perusahaan adalah menjalankan program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Program CSR saat ini sangat mengemuka dan sudah dijalankan oleh perusahaan karena telah diatur dalam berbagai regulasi. Potensi dana CSR di Provinsi Sumatera Utara sangatlah besar. Hasil penelitian Azizul (2016) CSR perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp 155 Milyar per tahun, CSR Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Rp 250 Milyar per tahun (Azizul, 2021), dan CSR Perusahaan BUMN sebesar Rp 175 Milyar per tahun (Kholis, 2021).

Merujuk ketiga hasil penelitian tersebut potensi dana CSR di Provinsi Sumatera Utara secara rata-rata mencapai Rp 575 Milyar per tahun. Salah satu aspek penting dari kegiatan CSR mencakup program keberlanjutan lingkungan yang harus diakomodir pembiayaannya dalam akuntansi perusahaan. Akuntansi ini disebut dengan akuntansi lingkungan dan saat ini banyak dibicarakan para kalangan akuntan di berbagai negara, seperti Ha dan Chen (2018) yang menjelaskan tentang pentingnya kebijakan akuntansi lingkungan.

Kebijakan ini sangat penting karena dapat mendukung pembangunan berkelanjutan yang berasal dari kalangan pelaku usaha. Secara khusus kebijakan akuntansi lingkungan menjadikan perusahaan lebih berorientasi pada lingkungan sekitarnya yang dewasa ini merupakan bagian penting dari *going concern* (Keberlangsungan Bisnis). Perspektif lain tentang akuntansi lingkungan juga dijabarkan oleh Tormo (2016) merujuk pada beberapa kajian tentang akuntansi lingkungan maka pada prinsipnya perusahaan harus mau mengeluarkan pengorbanan ekonomis sebagai bagian dari mendukung lingkungan di sekitarnya sehingga dalam konteks kebijakan internal harus dilakukan oleh perusahaan.

Sari (2014) menyatakan bahwa perusahaan melakukan kebijakan akuntansi lingkungan untuk pengelolaan limbahnya sehingga memiliki

relevansi terhadap komponen biaya lingkungan dan Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan No.1 paragraf 11, PSAK No.14, dan PSAK No. 1 revisi 2009 untuk perlakuan akuntansi biaya lingkungan di Indonesia. Penelitian Yustotul (2018) juga telah membuktikan secara empiris bahwa perusahaan ternyata telah melakukan kebijakan akuntansi lingkungan untuk mendukung kepentingan internal dan eksternal perusahaan.

Carolina dkk (2011) juga menjelaskan bahwa akuntansi lingkungan dapat menjadi satu solusi dalam penerapan CSR di Indonesia. Jika dilihat dari beberapa penelitian yang sudah dilaksanakan tentang akuntansi lingkungan, maka belum ada yang meneliti pada upaya akuntansi lingkungan yang terkait dan menghubungkannya dengan sektor pariwisata. Padahal sektor ini merupakan salah satu sektor andalan bangsa Indonesia dan banyak perusahaan yang terlibat dalam sektor ini.

Penelitian ini mengkaji tentang kebijakan Akuntansi lingkungan, khususnya yang telah dijalankan oleh perusahaan di Kawasan Danau Toba Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menjadi penting karena Danau Toba sudah ditetapkan menjadi destinasi prioritas nasional. Sejalan dengan hal tersebut maka sangat perlu dikaji dukungan dunia usaha melalui program CSR yang diharapkan dapat memberikan kontribusi secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat, pemerintah daerah agar pariwisata berkelanjutan dapat terwujud. Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan keterkaitan kebijakan akuntansi lingkungan dengan faktor pendorongnya meliputi dukungan manajemen perusahaan, program CSR perusahaan dan dukungan masyarakat.

METODE

Penelitian dilaksanakan mulai bulan Agustus sampai dengan November 2021 dengan pengambilan data melalui survey lapangan dan sebagian kuesioner dikirimkan melalui jasa pos. Populasi penelitian adalah seluruh perusahaan yang beroperasi di 7 (tujuh) Kabupaten pada Kawasan Danau Toba yaitu sebanyak 412

perusahaan (Berdasarkan data pada Kadin Sumut, 2020). Pengambilan sampel dilakukan sebanyak 73 perusahaan dengan teknik acak sederhana (*simple random sampling*) yaitu pada tahap satu dibuat daftar perusahaan di seluruh kabupaten, kemudian pada tahap dua secara sederhana dipilih perusahaan yang berada di nomor urut ganjil untuk ditetapkan sebagai sampel. Perincian sumber daerah sampel adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Distribusi perusahaan sampel

No	Kabupaten	Perusahaan sampel	Jumlah Responden
1	Simalungun	16	16
2	Toba	13	13
3	Samosir	11	11
4	Dairi	9	9
5	Humbang Hasundutan	8	8
6	Tapanuli Utara	9	9
7	Karo	7	7
	Jumlah	73	73

Sumber : Data Primer (2021)

Pengambilan data penelitian bersumber dari jawaban kuesioner pada responden yang diajukan dengan variabel kebijakan Akuntansi lingkungan perusahaan, kebijakan CSR, Dukungan Manajemen, dan Dukungan Masyarakat. Berdasarkan jawaban responden maka dilakukan tabulasi data untuk dianalisis. Alat analisis data untuk pengujian hipotesis adalah regresi berganda. Dengan persamaan regresi berikut:

$$Y = a + bX1 + bX2 + bX3 + e.....(1)$$

Dimana:

Y = Kebijakan akuntansi lingkungan Perusahaan

a = Konstanta

b = Koefisien regresi

X1 = Kebijakan CSR

X2 = Dukungan Manajemen

X3 = Dukungan Masyarakat.

Penjelasan tentang definisi operasional, indikator dan skala pengukuran variabel disajikan pada tabel 2. Sedangkan Profil responden disajikan pada tabel 3.

Tabel 2. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Uraian	Pernyataan ataupun kisi kisi pengukuran variabel	Skala Pengukuran
Y	Kebijakan Akuntansi Lingkungan perusahaan terdiri dari rencana strategis, program, kegiatan tentang akuntansi lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. perusahaan memiliki rencana strategis tentang akt lingkungan 2. perusahaan merumuskan program dan kegiatan akt lingkungan 3. perusahaan menjalankan program AKT lingkungan 4. Perusahaan memiliki dokumen kebijakan tentang akuntansi lingkungan 5. kebijakan perusahaan dalam mendukung pengembangan pariwisata di Kawasan Danau Toba 	Interval dengan model likert 1 s.d 5
X1	Kebijakan CSR	<ol style="list-style-type: none"> 1. perencanaan kegiatan CSR 2. pelaksanaan kegiatan CSR 3. pelaporan kegiatan CSR 4. monitoring dan evaluasi keberlanjutan CSR 5. kebijakan CSR dalam mendukung pariwisata di Kawasan Danau Toba 	Interval dengan model likert 1 s.d 5
X2	Dukungan Manajemen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Anggaran CSR dan pelaporan akuntansi lngkungan yang disetujui top management 2. keterlibatan Top Manajemen secara langsung dalam kegiatan CSR 3. penetapan program prioritas yang berasal dari top management 4. Pemahaman Top manajemen tentang Akuntansi lingkungan 5. Manajemen mendukung pengembangan pariwisata di Kawasan Danau Toba 	Interval dengan model likert 1 s.d 5

Variabel	Uraian	Pernyataan ataupun kisi kisi pengukuran variabel	Skala Pengukuran
X3	Dukungan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Interaksi untuk upaya pemahaman masyarakat terhadap kegiatan sosial perusahaan 2. Program prioritas untuk mendapat penerimaan masyarakat terhadap kegiatan social 3. Pelibatan berbagai elemen dan kelompok masyarakat terhadap kegiatan CSR perusahaan 4. Umpan balik yang diperoleh perusahaan dari masyarakat 5. keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Kawasan Danau Toba 	Interval dengan model likert 1 s.d 5

Sumber: Data Penelitian (2021)

Tabel 3. Profil Responden

Demografi	Deskripsi	Jumlah
Jenis Kelamin	Laki laki	60
	Perempuan	13
Pendidikan	Diploma	18
	Sarjana	52
	Magister	3
Pengalaman Kerja	s.d 5 thn	43
	6 - 15 thn	25
	16- 25 thn	5
	diatas 25 thn	-
Gaji per.bulan	IDR 5 jt	45
	IDR 6 - 10 Jt	13
	IDR 11 - 15 jt	10
	IDR diatas 20 Jt	5
Jabatan	Manager CSR	51
	Kadiv. CSR	9
	Kabar CSR	13

Sumber : Data Primer (2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan tabel 3 di atas dijelaskan bahwa responden lebih banyak berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 60 orang dan perempuan sebanyak 13 orang, ini dapat dipahami karena posisi perusahaan berada di daerah sehingga

ketersediaan SDM wanita relatif lebih sedikit. Responden dengan latar belakang pendidikan S1 sebanyak 52 orang dan hanya 3 orang yang sudah S2, hal ini dapat dipahami karena posisi responden adalah sebagai praktisi. Pengalaman bekerja tertinggi adalah s.d 5 tahun, yaitu sebanyak 43 orang dan kondisi ini sejalan dengan latar belakang pendidikan para responden yang didominasi oleh para staf yang baru lulus dari perguruan tinggi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Gaji pada responden rata-rata pada nilai 5 juta dikarenakan masa kerja yang masih relatif singkat namun ada juga beberapa responden yang memiliki penghasilan di atas 20 juta yaitu yang menjabat manajer perusahaan sekaligus sebagai pengendali CSR. Posisi terbanyak responden adalah sebagai manajer CSR yaitu sebanyak 51 orang. Dimana pada realitanya manajer CSR juga merangkap sebagai manajer humas, manajer *community development*, manajer *public relation* dan manajer umum.

Hasil penelitian lapangan dilakukan analisis secara bertahap mulai pengujian kuesioner penelitian, validitas dan reliabilitas kuesioner, uji kualitas data dan uji asumsi klasik sebagaimana disajikan pada tabel 4.

Tabel 4. Tahapan Analisis Data Penelitian

Pengujian	Teknik Analisis	Hasil
Pengujian Kuesioner	Panel test dan Pilot test	Layak digunakan
Validitas	Pearson correlation butir item pertanyaan dengan total skor pertanyaan	Valid Semua item di atas 0.75
Reliabilitas	Cronbach Alpha	Reliable > 0.85
Normalitas Data	Kolmogorov smirnov	0.999 (Distribusi data adalah normal)
Multikolinieritas	Pearson correlation	Tidak adanya Multikolinieritas anatar sesame variabel independen (Lihat Lampiran)
Heterokedastisitas	Scatter Plot	Tidak ditemukan outlier data

Sumber : Data Primer (2021)

Tabel 5. Analisis Regresi Berganda

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0,475	4.359		2.238	.029
	Kebijakan CSR	.321	.126	.099	2.964	.010
	Dukungan Manajemen	.326	.105	.280	3.108	.003
	Dukungan Masyarakat	.524	.090	.575	5.849	.000

a. Dependent Variable : Kebijakan Akuntansi Lingkungan

Setelah memenuhi uji kualitas data dan uji asumsi klasik untuk model regresi yang digunakan tersebut di atas maka selanjutnya dilakukan pengujian model regresi berganda dengan menggunakan software SPSS versi 21 untuk menjawab hipotesis. Pengujian Analisis regresi berganda menggunakan metode enter yaitu memasukkan data yang sudah ditabulasi pada setiap item variabel dependen maupun independen pada menu *analyze multiple regression* aplikasi SPSS.

Hasil Pengujian hipotesis penelitian disajikan pada tabel 5, meliputi pengujian atas pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan Tabel 5 diperoleh hasil perhitungan persamaan regresi linear berganda dengan menggunakan software SPSS versi 21 adalah sebagai berikut :

$$Y = 0,475 + 0,321 X_1 + 0,326 X_2 + 0,524 X_3 + \dots(2)$$

Nilai hasil pengujian yang dimasukkan ke dalam persamaan regresi tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa Kebijakan Akuntansi Lingkungan (Y) sebesar 0.475. Nilai variabel Kebijakan CSR (X1) sebesar 0,321, hal ini membuktikan bahwa secara koefisien regresi yang mengalami kenaikan pada satu pada variabel kebijakan CSR maka akan terjadi peningkatan pada variabel kebijakan akuntansi lingkungan sebesar 0,321 dan demikian juga dengan variabel lainnya masing-masing sebesar 0,326 untuk variabel dukungan manajemen serta 0,524 untuk variabel dukungan masyarakat. Sementara itu hasil uji SPSS terhadap nilai t hitung dari kebijakan CSR adalah 2,964 dan nilai

Sig sebesar 0,010 dapat dijelaskan bahwa nilai t hitung $|2,964| < t \text{ tabel } |1,666|$ dan $\text{Sig } 0,010 < 0,05$, sehingga kebijakan CSR berpengaruh terhadap kebijakan Akuntansi Lingkungan, kesimpulannya adalah Ha1 Diterima. Demikian juga untuk variabel dukungan manajemen adalah 3.108 dan nilai Sig sebesar 0,003, nilai t hitung $|3.108| > t \text{ tabel } |1,666|$ dan $\text{Sig } 0,003 < 0,05$, sehingga Ha2 diterima. Hipotesis ke-3 yaitu dukungan masyarakat adalah 5.849 dan nilai Sig sebesar 0,000, nilai t hitung $|5.849| > t \text{ tabel } |1,666|$ dan $\text{Sig } 0,000 < 0,05$, juga dapat diterima. Selanjutnya pengujian ketepatan model disajikan pada tabel 6.

Berdasarkan Tabel 6, nilai koefisien determinasi (R Square) adalah 0,827 (82,7%). Penelitian ini menggunakan nilai R Square, yang berarti bahwa Kebijakan Akuntansi Lingkungan bisa dipengaruhi oleh Kebijakan CSR (X1), Dukungan manajemen (X2), dan Dukungan Masyarakat (X3) sebesar 82,7%. Sedangkan sisanya sebesar 18,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini. Artinya model yang digunakan dalam penelitian ini mampu menjadi sebuah model prediktif yang baik.

Hasil pengujian ketiga hipotesis dan kesesuaian model di atas mencerminkan bahwa kebijakan akuntansi lingkungan dipengaruhi oleh faktor Dukungan Manajemen perusahaan, Kebijakan CSR dan Dukungan masyarakat. Artinya penelitian ini telah membuktikan keseluruhan variabel yang berpengaruh secara signifikan telah dijalankan oleh perusahaan yang beroperasi di Kawasan Danau Toba Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 6. Pengujian Koefisien Determinasi best fit Model

Model Summary ^b						
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics	
					R Square Change	F Change
1	.909 ^a	.827	.765	.24974	.827	13,344

- a. Predictors: (Constant), kebijakan CSR, dukungan manajemen, dukungan masyarakat
b. Dependent Variable: Kebijakan akuntansi Lingkungan

Hasil penelitian ini masih sejalan dengan temuan Kholis (2016) yang menjelaskan bahwa faktor internal (struktur kepemilikan, manajemen perusahaan, budaya organisasi) dan faktor eksternal perusahaan (Pemerintah, Masyarakat dan Lingkungan) menjadi penentu program CSR perusahaan yang merupakan bagian dari kebijakan akuntansi lingkungan perusahaan.

Hasil penelitian ini juga masih konsisten dengan teori stakeholder yang menjelaskan bahwa para pihak dan pemangku kepentingan memiliki peran yang kuat dalam menunjang keberhasilan sebuah program CSR perusahaan (Hameed, 2018). Hal yang sama juga dikemukakan oleh Anis (2020) dan Erdur (2014) bahwa fungsi penting dari akuntansi lingkungan adalah untuk meningkatkan kualitas lingkungan melalui CSR perusahaan. Artinya secara empiris penelitian ini telah membuktikan terdapat pengaruh yang signifikan kegiatan CSR dengan kebijakan akuntansi lingkungan perusahaan.

Hal yang sama juga masih sejalan dengan beberapa temuan lainnya terkait kebijakan CSR perusahaan yang harus memperhatikan lingkungan sekitar baik dari segi ekonomi maupun kelestarian lingkungan (Afiyah, 2018). Utami (2013) juga turut menjelaskan bahwa penerapan CSR yang fokus pada kelestarian lingkungan merupakan salah satu kebijakan akuntansi lingkungan perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Anindita (2020) menyatakan bahwa Komitmen manajemen perusahaan merupakan salah satu kunci terwujudnya penerapan akuntansi lingkungan. Masud, dkk. (2017) mengemukakan bahwa setiap perusahaan harus memperhatikan masyarakat dan lingkungan sekitarnya, khususnya pada pengolahan limbah, udara dan air.

Menurut Sela (2019) partisipasi masyarakat dalam implementasi CSR memudahkan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan pelestarian lingkungan. Nurhidayat (2020) menyatakan bahwa kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar dan dukungan masyarakat akan menguntungkan perusahaan dan lingkungan sekitarnya sesuai dengan prinsip praktik bisnis yang adil. Keseluruhan temuan penelitian semakin menguatkan bahwa isu akuntansi lingkungan menjadi sangat penting bagi dunia usaha khususnya perusahaan yang berlokasi dan bersinggungan langsung dengan kawasan konservasi seperti di wilayah Danau Toba Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan teori pariwisata berkelanjutan, tiga yang menjadi pilar utama adalah aspek ekonomi, lingkungan dan sosial maka ketiga faktor tersebutlah yang dalam penelitian ini diuji

menjadi penentu kebijakan akuntansi lingkungan perusahaan. Proksi ekonomi diukur melalui dukungan manajemen perusahaan, proksi lingkungan adalah kebijakan CSR dan proksi sosial adalah dukungan masyarakat.

Akuntansi lingkungan sendiri di dalam pernyataan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia pada PSAK nomor 1 menyatakan bahwa perusahaan yang mengeluarkan biaya lingkungan dapat mengungkapkan dan melaporkannya pada catatan atas laporan keuangan yang mencakup kegiatan bidang sosial kemasyarakatan maupun lingkungan. Dengan demikian Kebijakan akuntansi lingkungan bagi manajemen secara langsung dapat menjadi rumusan Kebijakan Akuntansi Manajemen untuk berkontribusi dan berperan penting dalam mendukung pengembangan pariwisata di Kawasan Danau Toba.

Hal ini dikarenakan kebijakan akuntansi lingkungan memudahkan perusahaan dalam mengambil keputusan yang penting terkait dengan lingkungan (Yulianthi, 2018). Dengan adanya kebijakan CSR, dukungan manajemen perusahaan serta dukungan masyarakat akan membantu perusahaan dalam membuat keputusan tentang kebijakan akuntansi lingkungan perusahaan yang bertujuan pada mendukung pengembangan pariwisata di Kawasan Danau Toba sebagai lokasi operasional perusahaan dan bahkan menjadi bagian dari strategi untuk mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaan.

Ilustrasi dari hasil penelitian ini pada implementasinya adalah perusahaan travel dan perhotelan yang benar benar mengandalkan keindahan alam danau toba sebagai destinasi wisata sehingga kelestarian lingkungan sangat penting bagi perusahaan agar bisnis yang dijalankan tetap dapat berjalan. Kemudian dari aspek sosial dukungan masyarakat adat, pagelaran dan atraksi budaya juga diperlukan bagi pelaku bisnis pariwisata untuk menghidupkan event budaya sehingga memiliki daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung di Kawasan Danau Toba yang juga berpengaruh secara langsung terhadap pelestarian adat budaya kearifan lokal dan erat kaitannya dengan promosi bisnis yang dijalankan oleh perusahaan jasa perjalanan wisata.

Temuan empiris penelitian ini membuktikan bahwa perusahaan yang beroperasi di sekitar Danau Toba telah membuat suatu kebijakan akuntansi yang berorientasi pada lingkungan dan masyarakat, karena berkaitan langsung dengan usaha yang dijalankan oleh masing-masing perusahaan. Dengan demikian faktor penentu yang dapat

memperkuat peran kebijakan akuntansi lingkungan adalah dari dua sisi sekaligus yaitu internal dan eksternal perusahaan. Daya dukung dan orientasi bisnis yang berpihak pada lingkungan dan masyarakat memiliki pengaruh langsung untuk mendukung pariwisata berkelanjutan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan CSR (X1), Dukungan Manajemen (X2) dan Dukungan Masyarakat (X3), memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan akuntansi lingkungan perusahaan (Y). Sehingga ketiga faktor tersebut menjadi penting untuk mendorong dirumuskannya kebijakan akuntansi lingkungan. Keterbatasan penelitian ini adalah pada sampel yang tidak mengelompokkan perusahaan berdasarkan kategori bidang usaha, sehingga dapat saja berbeda kebijakan akuntansi lingkungan antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Secara kajian akademik penelitian ini membuktikan bahwa kebijakan akuntansi lingkungan perusahaan memiliki kontribusi terhadap pariwisata berkelanjutan, karena program yang dilakukan oleh perusahaan berorientasi pada mempertahankan keberlangsungan usaha yang didasarkan pada kepentingan pelestarian lingkungan serta dukungan masyarakat sebagai bagian usaha yang dijalankan. Hasil penelitian juga membuktikan bahwa kesadaran akan pariwisata berkelanjutan sudah dipahami oleh pihak manajemen perusahaan yang dibuktikan dengan adanya dukungan program CSR di Kawasan Danau Toba.

REKOMENDASI

1. Kepada perusahaan yang telah menjalankan program kebijakan akuntansi lingkungan agar meningkatkan dan melakukan penguatan yang lebih baik, serta menjalin kerjasama dengan pemerintah Pusat maupun daerah untuk keselarasan program akuntansi lingkungan di Kawasan Danau Toba.
2. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera menerbitkan regulasi berupa peraturan daerah/peraturan Gubernur untuk peningkatan potensi CSR sebagai bentuk konkrit kebijakan akuntansi lingkungan dalam mendukung pariwisata berkelanjutan di Kawasan Danau Toba.
3. Pemerintah Kabupaten yang ada di sekitaran Kawasan Danau Toba agar membentuk forum CSR dengan pengaturan berdasarkan peraturan masing masing agar dapat bersinergi dengan berbagai pihak dalam pengelolaan CSR di Kawasan Danau Toba untuk memperkuat kebijakan

akuntansi lingkungan yang sudah dijalankan oleh perusahaan.

UCAPAN TERMAKASIH

Tim peneliti mengucapkan terimakasih kepada Pimpinan Lembaga Pusat Riset Masyarakat (PRISMA) Indonesia yang telah mendanai penelitian ini dan Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Garut Provinsi Jawa Barat yang turut melibatkan seorang dosen dalam penelitian ini, serta tim Editor Jurnal Inovasi yang menyetujui artikel ini untuk diterbitkan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada manajemen perusahaan yang telah bersedia menjadi responden dan menjawab kuesioner sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik berkat bantuan dari pihak perusahaan yang beroperasi di 7 (tujuh) kabupaten pada Kawasan Danau Toba Provinsi Sumatera Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiah, Y. 2018. Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Sebagai Tolak Ukur Dalam Optimalisasi Tanggung Jawab Sosial Pada Pg Kebon Agung Malang. *El Muhasaba Jurnal Akuntansi* 9(2):87, DOI, 10.18860/em.v11i2.5049.
- Anindita, R., & Hamidah. 2020. Akuntansi Lingkungan dalam Piturur uhur Kejawen. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(2), 278-296. <https://doi.org/10.21776/ub.ja-mal.2020.11.2.17>
- Anis, Valencia Matthew; Sabijono, Harijanto; Walandouw, Stanley Kho. 2020. "Penerapan Akuntansi Lingkungan Dalam Hal Pengelolaan Limbah Produksi Pada Perusahaan Pengalengan Ikan Tuna Pt. Samudra Mandiri Sentosa Bitung. Going Concern: *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol 15, No 3
- Carolina, Verani, et al. 2011. "Akuntansi Lingkungan: Solusi untuk Problematika Penerapan Corporate Social Responsibility di Indonesia." Maksi, 2011.
- Erdur, D. A., & Kara, E. 2014. Analyzing The Effects of Corporate Social Responsibility Performance of Companies: An Application on Bist Corporate Governance Index Included Companies. *Journal of Management Economics and Business*, 227-241.
- Ghozali, I. 2016. Aplikasi, Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Cetakan ke Empat, Penerbit Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ha, J. H., & Chen, X., 2018. Study on the Influence Mechanism and Function of Accounting Environment on Accountants' Professional Ethics Education. *Educational Sciences: Theory & Practice*, 18(5), 2438-2446. <http://dx.doi.org/10.12738/estp.2018.1.0608>

- Hameed, A. A. 2018. Environmental Accounting in India: A Conceptual Study. *NOLEGEIN-Journal of Financial Planning and Management*, 1(2), 32–38.
- Kholis, A. dan Fatma, A. 2018. Determinants of corporate social performance (CSP) through corporate social responsibility (CSR) of foreign investment companies (PMA) in Indonesia. *International Journal of Economic Research*.
- Kholis, A. dan Maksum, A. 2017. Analisis Tentang Pentingnya Tanggungjawab dan Akuntansi Sosial Perusahaan (Corporate Responsibilities and Social Accounting) Studi Kasus Empiris Di Kota Medan. Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi.
- Kholis, A., Husrizalsyah, D. 2020. The Research on the Model of SOE Corporate CSR Budget Management for Optimizing Disaster Management (Covid-19 Case Study in North Sumatra Province). *Advances in Economics, Business and Management Research. Proceedings of the International Conference on Strategic Issues of Economics, Business and, Education (ICoSIEBE 2020)*, volume 163.
- Kholis, A., Lukitaningsih, & Lubis, S. 2021. Policy Model Corporate Social Responsibility during The Covid-19 Pandemic: (Empirical Finding of State Own Enterprises in North Sumatra Province, Indonesia). *Economic Journal: Scientific Journal of Accountancy, Management and Finance*, 1(3), 177-189. <https://doi.org/10.33258/economit.v1i3.491>
- Kholis, A., Syah, D. H., Lubis, S. and Lukitaningsih. 2021. The Research on the Model of SOE Corporate CSR Budget Management for Optimizing Disaster Management. *Proceedings of the International Conference on Strategic Issues of Economics, Business and, Education (ICoSIEBE 2020)*. Issn 2352-5428, isbn 978-94-6239-339-4, <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210220.022>.
- Kholis, Azizul. 2016. Determinants of corporate social performance (CSP) through corporate social responsibility (CSR) of foreign investment companies (PMA) in Indonesia. *International Journal of Economic Research*, 13 (05). pp. 2005-2027. ISSN 0972-9380
- Masud, Md. A.K., Seong M. Bae, and Jong D. Kim. 2017. "Analysis of Environmental Accounting and Reporting Practices of Listed Banking Companies in Bangladesh" *Sustainability* 9, no. 10: 1717. <https://doi.org/10.3390/su9101717>
- Nurhidayat, E., Junaid, A., & Kamase, J. 2020. Penerapan Akuntansi Lingkungan Berdasarkan Triple Bottom Line Pada Rsud HM Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 2(2), 38-80.
- Sari, F. N. 2014, Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Terhadap Pengelolaan LimBAH, Artikel Ilmiah mahasiswa, Universitas Jember, akses <https://repository.unej.ac.id>
- Sela, A. Y.; Karamoy, H.; Mawikere, L M. 2019. Analisis penerapan akuntansi lingkungan pada RSUD DR. Sam Ratulangi Tondano. *Indonesia Accounting Journal*, [S.l.], v. 1, n. 2, p. 63-73, dec. 2019. ISSN 2686-6609.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Bisnis, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Tormo-Carbó, G., Seguí-Mas, E., & Oltra, V. 2016. Accounting ethics in unfriendly environments: The educational challenge. *Journal of business ethics*, 135(1), 161-175. <http://dx.doi.org/10.1007/s10551-014-2455-6>
- Utami. 2013. Pengaruh Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Perusahaan Terhadap Kebijakan Akuntansi Lingkungan (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Jember, Bandung.
- UU no. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Yulianthi, A. D., Sari, I. G. A. M. K. K., & Sudhana, I. G. P. F. P. 2018. Model Penerapan Akuntansi Lingkungan Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Perusahaan di Era Green Tourism Accounting. *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*, 14(3), 160-168. doi:10.31940/jbk.v14i3.1194.

Hasil Penelitian

EVALUASI KESUKSESAN SISTEM PELATIHAN JARAK JAUH PADA BALAI DIKLAT KEUANGAN MAKASSAR DI MASA PANDEMI COVID-19

(EVALUATION OF THE SUCCESS OF DISTANCE LEARNING SYSTEM AT FINANCIAL EDUCATION AND TRAINING AGENCY OF MAKASSAR DURING THE COVID-19 PANDEMIC)

Azwar

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Jl. Inspeksi PAM, Manggala, Kota Makassar 90234
Sulawesi Selatan - Indonesia
Email: azwar.iskandar@gmail.com

Diterima: 04 Juni 2021; Direvisi: 13 Juli 2021; Disetujui: 25 Agustus 2021

ABSTRAK

Menyikapi pandemi Covid-19, proses pembelajaran (diklat) di lingkungan Balai Diklat Keuangan Makassar tidak dapat dilaksanakan sebagaimana biasanya. Balai Diklat Keuangan Makassar kemudian melakukan inovasi dan adaptasi dengan menyelenggarakan pembelajaran daring atau jarak jauh. Mengingat bahwa model pembelajaran jarak jauh ini merupakan sebuah adaptasi atau inovasi baru di lingkungan Balai Diklat Keuangan Makassar khususnya di masa pandemi dan transisi normal baru (new normal), penting untuk melakukan evaluasi untuk melihat sejauhmana kesuksesan implementasi sistem pembelajaran daring ini dengan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi capaian hasil pembelajaran pada pelatihan jarak jauh di masa pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kesuksesan implementasi sistem pembelajaran jarak jauh di Balai Diklat Keuangan Makassar pada masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner dan pendekatan kuantitatif melalui teknik Pemodelan Structural Equation Modelling (SEM) berbasis komponen atau varian dengan Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum sistem pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan belum sepenuhnya berjalan baik dan berhasil berdasarkan indikator atau pendekatan model DeLone dan McLean. Kualitas sistem berpengaruh terhadap kepuasan pengguna dan kepuasan pengguna juga berpengaruh terhadap manfaat bersih. Sementara kualitas informasi dan kualitas layanan tidak berpengaruh terhadap kepuasan pengguna. Balai Diklat Keuangan Makassar diharapkan dapat melakukan perbaikan kualitas informasi dan kualitas layanan dalam rangka meningkatkan kepuasan peserta pelatihan yang akan berdampak terhadap capaian hasil pembelajaran. Selain itu, diperlukan upaya bersama untuk mewujudkan konsep link and match antara pembelajaran dan pengelolaan pengetahuan dengan target kinerja pada unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan.

Kata kunci: pembelajaran jarak jauh, pelatihan, pandemi

ABSTRACT

Responding to the Covid-19 pandemic, the learning process (training) in the Financial Education and Training Agency of Makassar cannot be carried out as usual. The Financial Education and Training Agency of Makassar then innovates and adapts by organizing online or distance learning. Given that this distance learning model is a new adaptation or innovation, especially in the pandemic and the new normal transition, it is important to evaluate to see the extent of the successful of the implementation of this online learning system by analyzing the factors that affect the achievement of learning outcomes in distance training during the Covid-19 pandemic. This study aims to measure the success of the implementation of distance learning systems in the Financial Education and Training Agency of Makassar during the pandemic. This study used data obtained from respondents through questionnaires and quantitative approaches through

component or variant-based of Structural Equation Modelling (SEM) techniques with Partial Least Square (PLS). The results show that in general the distance learning system has not fully run well and successfully based on indicators or approach of DeLone and McLean model. The system quality affects user satisfaction and user satisfaction also affects the net benefits. Meanwhile, the information quality and service quality has no effect on user satisfaction. Financial Education and Training Agency of Makassar is expected to improve the quality of information and quality of services in order to improve the satisfaction of training participants that will have an impact on the achievement of learning outcomes. In addition, a joint effort is needed to realize the concept of link and match between learning and knowledge management with performance targets in work units within the Ministry of Finance.

Keywords: *distance learning system, training, pandemic*

PENDAHULUAN

Menyikapi pandemi Covid-19, proses pembelajaran (diklat) di lingkungan Balai Diklat Keuangan Makassar tidak dapat dilaksanakan sebagaimana biasanya. Kebijakan *physical* dan *social distancing* serta Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dari pemerintah, mengharuskan masyarakat untuk tetap *stay at home*, bekerja, beribadah dan belajar dari rumah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu mengelola pendidikan, pelatihan (pembelajaran), sertifikasi dan manajemen pengetahuan (*knowledge management*) dalam kondisi darurat pandemi Covid-19, Balai Diklat Keuangan Makassar tetap menjalankan protokol kesehatan dan terus melakukan inovasi dan adaptasi terhadap layanan yang diberikan. Balai Diklat Keuangan Makassar diharapkan mampu membuat dan *men-deliver* pembelajaran-pembelajaran model baru yang sesuai dengan kondisi saat ini (BPPK, 2020).

Oleh karena itu, Balai Diklat Keuangan Makassar tidak menghentikan layanan karena kondisi pandemi, tetapi melakukan adaptasi atau konversi layanan dengan mengoptimalkan *platform* digital (Iskandar dan Subekan, 2020; BPPK, 2020). Sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi, fleksibilitas ruang pembelajaran (*flexibility learning space*), pertimbangan efektivitas dan efisiensi, serta kemudahan penerapan pembelajaran terintegrasi, Balai Diklat Keuangan Makassar mengembangkan pembelajaran dalam bentuk pelatihan jarak jauh sebagai alternatif pembelajaran di lingkungan Balai Diklat Keuangan Makassar.

Pelatihan Jarak Jauh (*Distance Learning*) yang kemudian disingkat PJJ merupakan proses pembelajaran yang dilaksanakan di luar tempat penyelenggaraan pelatihan yang menekankan pada pembelajaran mandiri yang dikelola secara sistematis dan tidak terbatas oleh jarak dan waktu dengan menggunakan berbagai media pembelajaran (Iskandar & Subekan, 2020). Pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan dan pengembangan SDM di lingkungan Kemenkeu melalui

pemanfaatan teknologi dan informasi meski terkendala dengan pembatasan penyelenggaraan pelatihan seperti di masa pandemi (Marlena et al., 2018; Nugroho & Lestyowati, 2020; Yang et al., 2012).

Seperti yang telah disebutkan di atas, PJJ di lingkungan Balai Diklat Keuangan Makassar dilaksanakan melalui sistem KLC yang berbasis website (www.klc.kemenkeu.go.id) untuk sesi Non Tatap Muka dan aplikasi *Zoom Virtual Meeting* dan sejenisnya untuk sesi Tatap Muka serta aplikasi *Google Form* dan lainnya untuk sesi latihan, tugas, dan ujian (evaluasi). Model PJJ ini merupakan penggabungan model pembelajaran *synchronous* dan *asynchronous*. Model *synchronous* dalam PJJ ini dilakukan melalui aplikasi *Zoom Virtual Meeting* dimana peserta pelatihan dan pengajar/instruktur berinteraksi secara bersamaan melalui aplikasi tersebut (Narayana, 2016; Iskandar & Subekan, 2020; Darmawan, 2018; Nana & Surahman, 2019). Sementara model *asynchronous* dalam PJJ ini dilakukan melalui sistem KLC dimana pembelajaran berpusat pada peserta pelatihan dengan pendekatan belajar mandiri melalui pemanfaatan sumber belajar online yang diperlukan pada sistem tersebut (Iskandar & Subekan, 2020; Elyas, 2018).

Beberapa PJJ yang diselenggarakan di Balai Diklat Keuangan Makassar dalam masa pandemi tahun 2020 adalah PJJ yang dilaksanakan dengan ujian akhir/komprehensif untuk mengukur capaian hasil pembelajaran yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Pelatihan-pelatihan tersebut di antaranya PJJ Penyuluh Perpajakan, PJJ *Customs Narcotics Team* (CNT) Angkatan I, PJJ *Customs Narcotics Team* (CNT) Angkatan II, PJJ Pengawasan Barang Penumpang, dan PJJ Kepala Hanggar Pabean dan Cukai, dan PJJ Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Bagi Pengguna Barang. Seluruh PJJ ini dilaksanakan dengan tujuan untuk membentuk pegawai DJBC yang memiliki pengetahuan dalam melaksanakan tugas di bidang perpajakan, kepebeanaan dan cukai, dan pengelolaan BMN.

Pembelajaran daring merupakan proses pembelajaran berbasis sistem elektronik, dimana manfaat yang umumnya didapatkan adalah meningkatkan kemampuan belajar mandiri dan kemampuan untuk menampilkan informasi dengan perangkat teknologi. Tidak dapat dipungkiri, sebuah teknologi selalu memiliki dua sisi yaitu kelebihan dan kekurangan. Pembelajaran daring juga memiliki kelemahan, sisi negatif dari sistem pembelajaran daring salah satunya adalah tidak semua dosen dan mahasiswa memiliki tingkat pemahaman yang sama terhadap mengoperasikan perangkat dan permasalahan jaringan internet (Syah dan Angellia, 2020).

Mengingat bahwa model pembelajaran jarak jauh ini merupakan sebuah adaptasi atau inovasi baru di lingkungan Balai Diklat Keuangan Makassar khususnya di masa pandemi dan transisi normal baru (*new normal*), penting untuk melakukan suatu kajian atau evaluasi untuk melihat sejauhmana kesuksesan implementasi sistem pembelajaran daring ini dengan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi capaian hasil pembelajaran pada pelatihan jarak jauh di masa pandemi Covid-19.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelatihan jarak jauh. Septian (2020) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PJJ dengan bantuan *e-learning* dan pengenalan media sosial Edmodo. Penelitian ini menemukan bahwa kegiatan PJJ ini dapat menambah pemahaman guru pamong dalam menggunakan media sosial Edmodo sebagai alat bantu PJJ serta bermanfaat sebagai media pembelajaran yang dilakukan di sekolah.

Epriliyanti dan Ratnasari (2020) melakukan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan sistem pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19 pada mahasiswa ITS di Surabaya. Variabel prediktor yang digunakan antara lain jenis kelamin, fakultas, kesiapan pelaksanaan sistem pembelajaran daring, kemudahan dalam mengoperasikan *platform* pada sistem pembelajaran daring, pemahaman materi pada sistem pembelajaran daring, bantuan kuota internet, pemanfaatan penggunaan kuota internet, dan intensitas penggunaan kuota internet. Hasil penelitian menemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi dengan tingkat signifikansi 0,05 pada keefektifan sistem pembelajaran daring adalah pemahaman materi pada sistem pembelajaran daring, bantuan kuota internet, pemanfaatan penggunaan kuota internet, dan intensitas penggunaan kuota internet.

Selanjutnya, Syah dan Angellia (2020) mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi antusiasme belajar mahasiswa selama belajar Daring selama pandemi Covid 19 pada Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957. Hasil penelitian ini menemukan bahwa faktor jenis media daring, metode pembelajaran dan intensitas pemberian tugas secara signifikan mempengaruhi antusiasme belajar mahasiswa selama belajar Daring selama pandemi COVID-19.

Fahirah, Puteri, dan Arnesia (2020) meneliti tentang kesuksesan Google Classroom sebagai sistem pengganti kegiatan belajar mengajar di sekolah saat Pandemi COVID-19 menggunakan model kesuksesan sistem informasi DeLone dan McLean. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa model tersebut dapat digunakan untuk menganalisis kesuksesan Google Classroom dan terdapat pengaruh antara elemen kesuksesan, yaitu kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna, dan kepuasan pengguna berpengaruh positif dan signifikan terhadap manfaat bersih.

Sari (2020) juga melakukan evaluasi terhadap pelatihan jarak jauh kepada para guru dalam menggunakan aplikasi *Google Form* sebagai media pembelajaran jarak jauh. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa peserta pelatihan memperoleh tambahan keterampilan dan dapat memahami prinsip-prinsip dalam pembuatan kuis secara online menggunakan aplikasi Google. Selain itu, Hidayatullah, *et. al.*, (2020) menguji kesuksesan implementasi sistem pembelajaran berbasis aplikasi Zoom saat pandemi covid-19 di di kota Malang Jawa Timur dengan menggunakan model kesuksesan sistem informasi oleh DeLone and McLean. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna, dan kepuasan pengguna berpengaruh positif terhadap manfaat bersih.

Meskipun beberapa penelitian tersebut di atas telah mencoba mengkaji dan mengevaluasi implementasi sistem pembelajaran/pelatihan pelatihan jarak jauh, akan tetapi penelitian-penelitian tersebut belum mengkaji atau mengevaluasi implementasi sistem pembelajaran/pelatihan pelatihan jarak jauh yang dilaksanakan secara khusus bagi Aparatus sipil Negara (ASN) di masa pandemi. Oleh karena itu, untuk mengisi *gap* tersebut, penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengukur kesuksesan implementasi sistem pembelajaran jarak jauh di Balai Diklat Keuangan Makassar pada masa pandemi dengan

menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pembelajaran.

Penelitian didasarkan pada sudut pandang pengguna (*user*) sebagai sistem yang bersifat *mandatory*, sehingga dengan hasil pembuktian uji empiris model kesuksesan sistem ini diharapkan akan menghasilkan rekomendasi kebijakan terhadap implementasi sistem pembelajaran jarak jauh yang lebih efektif di masa yang akan datang. Evaluasi implementasi dilakukan dengan cara menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesannya menggunakan model pengukuran DeLone dan McLean (2003) pada peserta pelatihan/pembelajaran.

Berdasarkan tinjauan pustaka dan literatur, kebutuhan sistem informasi dalam setiap organisasi memiliki perbedaan yang dipengaruhi oleh kebutuhan informasi, karakteristik dan kompleksitas bisnis, serta tujuan organisasi itu sendiri. Sebuah organisasi harus mampu mendesain dan mengembangkan sistem informasi yang berkualitas untuk menunjang kinerja dan pencapaian tujuan organisasinya (Laudon dan Laudon, 2000). Evaluasi atas kesuksesan implementasi sistem informasi merupakan suatu fenomena yang kompleks karena terdapat berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan dan berbagai ukuran yang dapat digunakan untuk menilai kesuksesannya.

Keberhasilan sistem informasi sering dikaitkan dengan persepsi pengguna mengenai atribut-atribut sistem informasi yang penting untuk mencapai kepuasan pengguna akhir (*end-user satisfaction*). Ives *et al.* (1983) berpendapat bahwa kemampuan untuk menangkap dan mengukur kepuasan pengguna merupakan ukuran yang nyata dalam menilai kinerja dari fungsi, layanan serta aplikasi sistem informasi yang diterapkan dalam suatu organisasi. Selain itu, ukuran kesuksesan SI pada banyak penelitian juga dikaitkan dengan penggunaan dan manfaat bersih (*net benefit*) yang dihasilkan akibat pemanfaatan sistem informasi. Penggunaan (*use*) sebagai ukuran keberhasilan merujuk pada intensitas, utilisasi dan optimalisasi pemanfaatan sistem informasi.

Sementara manfaat bersih (*net benefit*) merujuk pada konsekuensi positif yang diperoleh atas penerapan sistem, yang diukur baik pada level individu, organisasi, industri maupun level lainnya, setelah mempertimbangkan pengorbanan dan konsekuensi negatif yang tidak dapat dihindari.

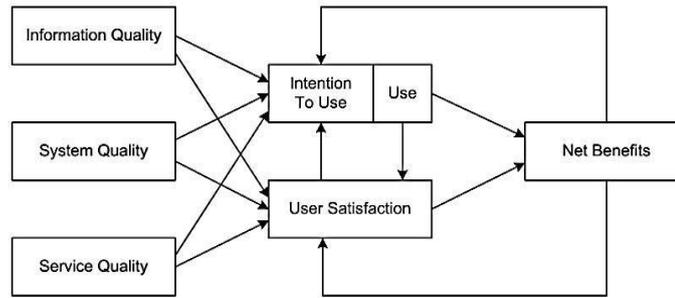
Penelitian terdahulu untuk merumuskan model pengukuran yang tepat dalam rangka mengevaluasi implementasi sistem informasi

telah banyak dilakukan. Dua pendekatan yang paling banyak diadopsi adalah Model Keberterimaan Teknologi (*Technology Acceptance Model*) dan Model Kesuksesan Sistem Informasi. Model Keberterimaan Teknologi yang diperkenalkan oleh Davis (1989) menjelaskan mengapa sebagian sistem informasi lebih siap diterima oleh pengguna dibandingkan dengan sistem informasi lainnya. Namun menurut Petter, *et. al.* (2008), keberterimaan tidak dapat disamakan dengan keberhasilan meskipun keberterimaan suatu sistem informasi sebetulnya merupakan prakondisi yang dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan.

Dalam perkembangannya, model kesuksesan sistem informasi yang diperkenalkan oleh DeLone dan McLean (1992) adalah model yang banyak diaplikasikan dalam penelitian sistem informasi. Sedera dan Gable (2004) telah menguji beberapa model kesuksesan sistem informasi terhadap data empiris, termasuk model DeLone dan McLean serta model Seddon dan Kiew (1996), dan menyatakan bahwa model DeLone dan McLean merupakan model yang paling cocok untuk mengukur kesuksesan sistem perusahaan.

Model kesuksesan sistem informasi oleh DeLone dan McLean difokuskan pada proses bagaimana suatu informasi dapat tersampaikan kepada penerimanya. Menurut model ini, terdapat tiga tingkatan pengukuran informasi yaitu tingkatan teknis, semantik dan efektivitas. Ukuran kesuksesan sistem informasi tersebut dituangkan dalam model yang menggabungkan proses dan hubungan kausal antar dimensi pengukuran yang terdiri dari kualitas informasi (*information quality*), kualitas sistem (*system quality*), penggunaan sistem (*use*), kepuasan pengguna (*user satisfaction*), dampak individu (*individual impact*), dan dampak organisasi (*organizational impact*).

Selanjutnya DeLone dan McLean (2003) melakukan penyempurnaan terhadap model kesuksesan sistem informasi dan memperkenalkan sebuah model yang diperbarui. Model tersebut seperti ditunjukkan oleh Gambar 1. DeLone dan McLean menambahkan satu dimensi baru dalam model yang diperbarui, yaitu kualitas layanan (*service quality*). Perubahan lain yang ditemukan dalam model yang diperbarui adalah penyatuan variabel dampak individu (*individual impact*) dan dampak organisasional (*organizational impact*) menjadi satu variabel yaitu manfaat bersih (*net benefits*). Dimensi intensi penggunaan (*intention to use*) juga ditambahkan sebagai alternatif dari dimensi penggunaan (*use*).



Gambar 1. Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone dan McLean yang diperbarui
Sumber: DeLone dan McLean (2003)

Variabel intensi penggunaan dapat digunakan dalam beberapa konteks tertentu karena sulitnya menafsirkan aspek-aspek multidimensi dari variabel penggunaan. Ketidakcocokan variabel penggunaan dalam suatu model kausal sebagaimana disampaikan oleh Seddon dan Kiew (1996), dapat diselesaikan oleh variabel intensi penggunaan karena variabel tersebut bukan merupakan suatu tingkah laku (*behavior*) melainkan suatu sikap (*attitude*).

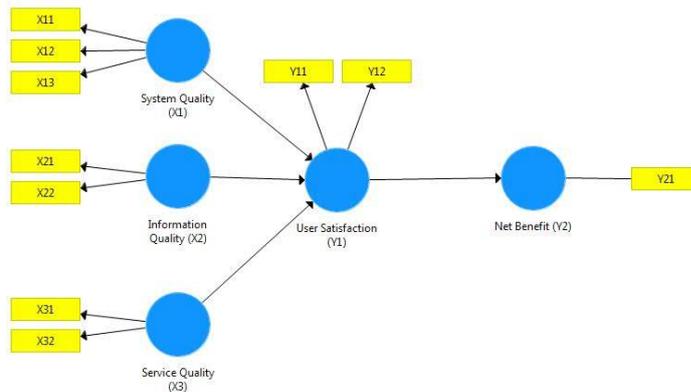
Penelitian ini mengadaptasi model kesuksesan sistem informasi oleh DeLone dan McLean (2003) yang akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pengguna sistem informasi pada organisasi sektor publik dan pengaruh kepuasan tersebut terhadap kinerja individu penggunanya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitas sistem (*system quality*), kualitas informasi (*information quality*), kualitas layanan (*service quality*), kepuasan pengguna (*user satisfaction*), dan manfaat bersih (*net benefit*). Variabel penggunaan (*use*) sebagai salah satu dimensi dalam model kesuksesan SI oleh DeLone dan McLean (2003) tidak diikutsertakan dalam penelitian ini mengingat terdapat kesulitan apabila variabel ini digunakan sebagai alat ukur kesuksesan sistem informasi yang diimplementasikan pada lingkungan *mandatory* (DeLone dan McLean, 1992).

Pengukuran atas penggunaan sistem dalam penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan terhadap implementasi sistem informasi yang bersifat *mandatory* menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Dari hasil penelitian Rai, *et al.* (2002), saat penggunaan sistem bersifat *mandatory*, maka tingkat penggunaan suatu sistem hanya memberikan sedikit informasi mengenai kesuksesan sistem tersebut. Dalam hal ini, pembelajaran PJJ yang merupakan penggabungan model pembelajaran *synchronous* dan *asynchronous* melalui sistem KLC yang berbasis website (www.klc.kemenkeu.go.id) dan *Zoom Virtual Meeting* merupakan sistem yang

bersifat *mandatory*. Oleh karena itu, ukuran penggunaan (*use*) tidak digunakan dalam penelitian ini karena tidak dapat mencerminkan reaksi pengguna terhadap sistem informasi yang bersifat *mandatory* secara tepat (Radityo, 2007).

Fokus analisis variabel manfaat bersih (*net benefit*) dalam penelitian ini berada pada pengukuran manfaat pada level individu (*individual impact*) yaitu berupa peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta. Analisis pada level individu lebih tepat digunakan mengingat unit analisis yang memberikan penilaian pada penelitian ini adalah para pengguna akhir (individu). Berdasarkan telaah literatur yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini mengadaptasi model kesuksesan sistem informasi DeLone dan McLean (2003). Kerangka pikir penelitian disajikan pada Gambar 2.

Berdasarkan kerangka pikir pada Gambar 2, kualitas sistem mencerminkan karakteristik yang melekat pada sistem yang bersangkutan dalam rangka menghasilkan informasi. DeLone dan McLean (2003) menyebutkan bahwa kualitas sistem merupakan ukuran yang dikombinasikan dari kinerja perangkat keras dan perangkat lunak yang ada dalam suatu sistem informasi. Apabila kualitas sistem menurut persepsi pengguna memenuhi kriteria yang baik, maka pengguna sistem akan cenderung merasa puas terhadap sistem tersebut. Oleh karena itu, peneliti menduga bahwa (*ceteris paribus*) semakin baik kualitas sistem akan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan peserta pembelajaran dalam menggunakan sistem pembelajaran pada PJJ. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, maka hipotesis pertama (H_1) yang diajukan dalam penelitian ini yaitu bahwa kualitas sistem berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna.



Gambar 2. Kerangka Pikir Penelitian
Sumber: DeLone dan McLean (2003)

Kualitas informasi merupakan ukuran atas keluaran (*output*) yang dihasilkan oleh suatu sistem informasi, termasuk diantaranya format laporan (DeLone dan McLean, 1992). Seddon dan Kiew (1996) menyatakan bahwa kualitas informasi berkaitan dengan persepsi pengguna mengenai kualitas informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi berbasis teknologi yang digunakan untuk membantu aktivitas operasional sebuah organisasi. Hasil penelitian Seddon dan Kiew (1996) menunjukkan bahwa kualitas informasi merupakan prediktor yang kuat dalam menentukan keberhasilan sistem informasi ketika kepuasan pengguna digunakan sebagai ukuran keberhasilannya.

Apabila kualitas informasi menurut persepsi pengguna memenuhi kriteria yang baik, maka pengguna sistem akan cenderung merasa puas terhadap sistem tersebut. Oleh karena itu, peneliti menduga bahwa (*ceteris paribus*) semakin baik kualitas informasi yang dihasilkan oleh sistem pembelajaran pada PJJ akan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan peserta pembelajaran. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, maka hipotesis kedua (**H₂**) yang diajukan dalam penelitian ini yaitu bahwa kualitas informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna.

Selanjutnya, Parasuraman, *et al.* (1988) mendefinisikan kualitas layanan sebagai sebuah perbandingan antara harapan pelanggan dengan persepsi layanan yang secara nyata mereka terima. Pengertian kualitas layanan menurut Petter, *et al.* (2008) adalah kualitas dari dukungan atau bantuan yang diterima oleh pengguna dari departemen sistem informasi serta petugas yang berkaitan dengannya, yang mencakup tingkat responsivitas, akurasi, keandalan dukungan, serta kompetensi teknis dan empati dari petugas atau pelaksana sistem. Dalam hal ini, peneliti menduga bahwa (*ceteris paribus*) kualitas layanan yang semakin baik dari

penyelenggaraan dan pengajar akan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan peserta pembelajaran. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis ketiga (**H₃**) yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna.

Istilah manfaat bersih (*net benefit*) diungkapkan oleh DeLone dan McLean (2003) untuk menggambarkan karakteristik dari hasil yang diharapkan atas implementasi sistem. Istilah manfaat bersih (*net benefit*) lebih mengisyaratkan hal yang positif dan digunakan untuk menggantikan istilah dampak (*impact*) yang bisa mengarah pada arti yang baik maupun buruk. Manfaat bersih merupakan ukuran kesuksesan sistem informasi yang paling penting karena mencerminkan perbandingan dan selisih antara dampak positif dan negatif atas implementasi sistem informasi terhadap para pemangku kepentingan (DeLone dan McLean, 2003).

Fokus pengukuran manfaat bersih dalam penelitian ini adalah pada dampak implementasi sistem terhadap kinerja individu penggunanya. Apabila peserta pembelajaran merasa puas terhadap sistem, maka mereka akan cenderung merasa bahwa penggunaan sistem pembelajaran akan menunjang peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Oleh karena itu, peneliti menduga bahwa (*ceteris paribus*) kepuasan pengguna yang semakin meningkat akan berpengaruh positif dan signifikan terhadap manfaat bersih dalam kaitannya dengan kinerja individu para penggunanya. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, maka hipotesis keempat (**H₄**) yang diajukan dalam penelitian ini yaitu bahwa kepuasan pengguna berpengaruh positif dan signifikan terhadap manfaat bersih.

METODE

Penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian eksplanatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara

dua atau lebih variabel (Hamdi & Ismaryati, 2019) atau penelitian yang didasarkan pada teori atau hipotesis yang akan dipergunakan untuk menguji suatu fenomena yang terjadi. Silalahi (2009) membedakan penelitian eksplanatif ke dalam dua tipe, yaitu: (i) penelitian asosiasi, yaitu mempelajari apakah perubahan nilai dalam suatu variabel ada hubungannya dengan perubahan nilai dalam variabel lainnya; (ii) penelitian kausal, yaitu mempelajari hubungan sebab-akibat antara dua variabel atau lebih.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini juga termasuk penelitian asosiasi dan kausal karena penelitian ini akan menganalisis hubungan atau pengaruh (sebab-akibat) dari dua atau lebih fenomena melalui pengujian hipotesis (Sekaran, 2006) di antara variabel dana perimbangan dan belanja daerah serta indikator pelayanan publik. Sementara dari sisi pendekatan, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui teknik model ekonometrika atau statistik diferensial (John, 2013; Sarwono, 2006).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta PJJ yang diselenggarakan di Balai Diklat Keuangan Makassar dalam masa pandemi tahun 2020 yang berjumlah 271 orang. Sampel penelitian diambil dengan menggunakan metode *nonprobability sampling*, dimana setiap anggota populasi tidak memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel (Hamdi dan Ismaryati, 2019), yaitu dengan teknik *sampling purposif* (*purposive*), yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu (Ghozali, 2011).

Kriteria dan pertimbangan pemilihan sampel adalah PJJ tersebut dilaksanakan dengan ujian akhir/komprehensif untuk mengukur capaian hasil pembelajaran yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi. Teknik pemilihan sampel ini dipilih karena tidak semua PJJ diselenggarakan dengan ujian akhir/komprehensif, sebagian PJJ diselenggarakan hanya dengan *Pre* dan *Post Test*, dan sebagian lainnya bahkan tidak menyelenggarakan evaluasi pembelajaran yang bersifat kognitif.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka jumlah sampel penelitian ditetapkan sebanyak 170 orang, yang terdiri dari: 20 orang peserta PJJ Pengelolaan BMN bagi Pengguna Barang, 30 orang peserta PJJ Customs Narcotics Team (CNT) Angkatan I, 30 orang peserta PJJ Customs Narcotics Team (CNT) Angkatan II, 29 orang peserta PJJ Pengawasan Barang Penumpang, 30 orang peserta PJJ Kepala Hanggar Pabean dan Cukai, dan 30 orang peserta PJJ Penyuluh Perpajakan.

Sumber data yang digunakan berupa data primer dan sekunder. Data primer berupa data yang dihasilkan secara langsung dari responden, berupa jawaban pertanyaan pada lembar kuesioner dari peserta pelatihan sebagai responden. Sedangkan data sekunder berupa data penunjang yang diperoleh dan tersedia pada instansi terkait seperti Kerangka Acuan Program (KAP) Diklat, Garis-Garis Besar Program Pembelajaran (GBPP), hasil Identifikasi Kebutuhan Diklat (IKD), dan Laporan Penyelenggaraan Pelatihan Seksi Evaluasi dan Informasi Balai Diklat Keuangan Makassar.

Berdasarkan kerangka pikir (Gambar 2), penelitian ini menggunakan lima variabel dari model kesuksesan sistem informasi DeLone dan McLean (2003). Variabel tersebut terdiri dari variabel eksogen dan variabel endogen. Variabel eksogen adalah variabel independen (bebas) yang memengaruhi variabel dependen (terikat) yang ditunjukkan dengan adanya anak panah yang berasal dari variabel tersebut menuju variabel endogen dalam model.

Sedangkan, variabel endogen adalah variabel dependen (terikat) yang dipengaruhi oleh variabel independen (bebas) yang ditunjukkan dengan adanya anak panah yang menuju variabel tersebut dalam model. Variabel eksogen penelitian ini terdiri atas variabel kualitas informasi, kualitas sistem, dan kualitas layanan. Sedangkan, variabel endogen penelitian ini terdiri atas variabel kepuasan pengguna dan manfaat bersih.

Definisi operasional, deskripsi dan indikator masing-masing variabel tersebut dijabarkan pada Tabel 1. Variabel kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas pelayanan dan kepuasan pengguna diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin, yaitu: Tidak Baik (1); Kurang Baik (2); Cukup (3); Baik (4); Sangat Baik (5). Sedangkan variabel manfaat bersih diukur dengan menggunakan skala ordinal, yaitu: Amat Baik (4); Baik (3); Cukup (2); Kurang (1). Item pengukuran yang mewakili indikator untuk mengukur variabel eksogen dan endogen dalam penelitian ini disesuaikan dengan penggunaan sistem pembelajaran pada PJJ agar relevan dengan tujuan penelitian.

Model penelitian berdasarkan kerangka penelitian di atas dianalisis dengan teknik Pemodelan Persamaan Struktural atau *Structural Equation Modelling* (SEM) berbasis komponen atau varian (*component based*) yang populer dengan *Partial Least Square* (PLS) dengan bantuan program *SmartPLS* (Ghozali, 2008). Teknik ini dipilih dengan alasan bahwa teknik PLS tidak membutuhkan banyak asumsi.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

No.	Variabel	Deskripsi	Indikator
1	Kualitas sistem (X1)	Karakteristik yang melekat pada sistem pembelajaran PJJ berdasarkan interpretasi pengguna atas pengalamannya menggunakan sistem tersebut, yaitu: (1) kesesuaian metode pembelajaran dengan materi Pelatihan Jarak Jauh; (2) ketercukupan waktu penyelenggaraan Pelatihan Jarak Jauh dengan jumlah materi yang diberikan; (3) ketercukupan waktu dalam mengerjakan penugasan, kuis atau ujian.	Variabel ini diukur menggunakan tiga item pernyataan yang diadopsi dari penelitian Bailey dan Pearson (1983) antara lain response time, fleksibilitas sistem, dan kesesuaian.
2.	Kualitas informasi (X2)	Karakteristik dari informasi (output) yang dihasilkan oleh sistem pembelajaran PJJ, yaitu: (1) kesesuaian materi pembelajaran dengan harapan/kebutuhan peserta; (2) bahan ajar mudah dipahami.	Variabel ini diukur menggunakan enam item pernyataan yang diadopsi dari penelitian Bailey dan Pearson (1983) yaitu <i>understandability</i> .
3.	Kualitas Layanan (X3)	Persepsi peserta pelatihan mengenai karakteristik layanan bantuan dan dukungan yang diberikan oleh penyelenggara dan pengajar yang secara nyata diterima selama mengikuti pembelajaran, yaitu: (1) kesigapan penyelenggara dalam melayani peserta selama proses Pelatihan Jarak Jauh; (2) kemampuan pengajar dalam memberikan bimbingan secara jarak jauh.	Variabel ini diukur menggunakan lima item pernyataan yang diadopsi dari penelitian Parasuraman et al. (1988) antara lain <i>reliability</i> , <i>responsiveness</i> , dan <i>assurance</i>
4.	Kepuasan pengguna (Y1)	Persepsi peserta pelatihan mengenai kepuasan atas kemudahan fasilitas pembelajaran yang dikur dengan indikator berupa: (1) fasilitas Pelatihan Jarak Jauh mudah diakses; (2) fasilitas Pelatihan Jarak Jauh mudah digunakan.	Variabel ini diukur menggunakan empat item pernyataan yang diadopsi dari penelitian Seddon dan Yip (1992) yaitu <i>system fit for need</i> .
5.	Manfaat bersih (Y2)	Nilai akhir ujian komprehensif peserta setelah mengikuti pembelajaran sebagai indikator kinerja individu berupa peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta.	Variabel ini diukur menggunakan dua item pernyataan yang diadopsi dari penelitian Segars dan Grover (1993) <i>effectiveness</i> .

Data tidak harus berdistribusi *normal multivariate* dan jumlah sampel tidak harus besar (Ghozali merekomendasikan antara 30-100). Selain itu, teknik ini banyak dipakai untuk analisis kausal-prediktif (*causal-predictive analysis*) yang rumit dan merupakan teknik yang sesuai untuk digunakan dalam aplikasi prediksi dan pengembangan teori seperti pada penelitian ini. Selain itu, mengingat jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini kecil maka PLS digunakan sebagai alat analisisnya (Hartono, 2011).

Teknik PLS penelitian menerapkan dua macam komponen pada model kausal yaitu:

model pengukuran (*measurement model*) dan model struktural (*structural model*). Pertama, menilai atau evaluasi model pengukuran (*measurement model*). Model pengukuran adalah penilaian terhadap reliabilitas dan validitas variabel penelitian atau didefinisikan sebagai hubungan antara indikator dengan variabel laten. Kriteria untuk menilai model pengukuran dalam penelitian ini yaitu:

- a. Validitas Konvergen (*Convergent Validity*) dari model pengukuran dengan refleksi indikator dinilai berdasarkan korelasi antara item *score/component score* dengan *construct score* yang dihitung dengan PLS.

Validitas konvergen bertujuan untuk mengetahui validitas setiap hubungan antara indikator dengan variabel latennya. Validitas konvergen dinilai berdasarkan korelasi antara skor item dengan skor variabel. Nilai loading memiliki tingkat validitas tinggi jika lebih besar dari 0,5. Nilai loading yang lebih kecil dari 0,5 akan dihilangkan (*dropped*) dalam model dan dilakukan estimasi ulang (Ghozali, 2008).

- b. Validitas Diskriminan (*Discriminant Validity*) digunakan untuk membuktikan bahwa konstruk laten memprediksi ukuran pada blok mereka lebih baik daripada ukuran pada blok lainnya. Fornell dan Larcker dalam Ghozali (2008) mengatakan bahwa metode untuk mengukur *discriminant validity* adalah dengan melihat nilai *Average Variance Extracted* (AVE). Jika nilai AVE setiap konstruk lebih besar dari 0,5 maka model dikatakan memiliki nilai *discriminant validity* yang baik. Berikut rumus untuk menghitung AVE:

$$AVE = \frac{\sum \lambda_i^2}{\sum \lambda_i^2 + \sum \text{var}(\epsilon_i)} \dots(1)$$

Di mana λ_i adalah *component loading* ke indikator dan $\text{var}(\epsilon_i) = 1 - \lambda_i^2$. Jika semua indikator di-*standardized*, maka ukuran ini sama dengan *average communalities* dalam blok.

- c. Realibilitas Konstruk (*Composite Reliability*) blok indikator yang mengukur suatu konstruk dapat dievaluasi dengan dua macam ukuran yaitu *internal consistency* dan *cronbach's alpha*. Dengan menggunakan output yang dihasilkan oleh PLS, maka *composite reliability* dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\rho_c = \frac{(\sum \lambda_i)^2}{(\sum \lambda_i)^2 + \sum \text{var}(\epsilon_i)} \dots(2)$$

Dimana λ_i adalah *component loading* ke indikator dan $\text{var}(\epsilon_i) = 1 - \lambda_i^2$. ρ_c sebagai ukuran *internal consistency* hanya dapat digunakan untuk konstruk indikator refleksif. Chin dalam Ghozali (2008) menyatakan suatu variabel laten memiliki reliabilitas yang tinggi apabila nilai *composite reliability* di atas 0,7 dan atau *Conbach's Alpha* di atas 0,6.

Setelah dilakukan penilaian model pengukuran (*measurement model*) untuk meyakinkan bahwa pengukuran-pengukuran konstruk valid dan reliabel, maka dilakukan pengujian tahap berikutnya.

Kedua, menilai atau evaluasi model struktural (*structural model*). Pengujian model struktural dilakukan untuk melihat hubungan antara konstruk atau variabel laten, yang dilihat dari nilai *R-Square* (R^2) dari model penelitian dan nilai estimasi koefisien jalur strukturalnya (*estimate for path coefficients*). Nilai *R-Square* (R^2) adalah koefisien determinasi pada konstruk endogen. Koefisien determinasi diartikan sebagai seberapa besar kemampuan semua variabel eksogen dalam menjelaskan varians dari variabel endogennya. Menurut Chin (1998), nilai *R-Square* sebesar 0.67 (kuat), 0.33 (moderat) dan 0.19 (lemah).

Nilai estimasi koefisien jalur struktural pada model (*estimate for path coefficients*) merupakan nilai koefisien jalur yang menunjukkan besarnya pengaruh variabel (konstruk). Nilai estimasi ini dievaluasi dengan menggunakan uji t-statistik yang diperoleh lewat prosedur *bootstrapping* (Ghozali, 2008). *Bootstrapping* adalah metode yang berbasis komputer yang digunakan untuk pengukuran akurasi dari taksiran statistik (pendugaan besaran statistik dan selang kepercayaan).

Pem-*bootstrap*-an merupakan teknik nonparametrik secara inferensial. Penerapan metode resampling dalam *bootstrapping* memungkinkan berlakunya data terdistribusi bebas (*distribution free*), tidak memerlukan asumsi distribusi normal, serta tidak memerlukan sampel yang besar (direkomendasikan sampel minimum 30). Pengujian dilakukan dengan uji t-statistik (*t-test*), dengan kriteria jika diperoleh nilai *p-value* $\leq 0,05$ ($\alpha = 5\%$), maka disimpulkan signifikan dan sebaliknya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah sampel penelitian yang ditetapkan sebagai sampel penelitian ini berjumlah 170 orang. Kuesioner penelitian telah dikirim secara *online* kepada seluruh responden melalui alamat email masing-masing dengan menggunakan sistem evaluasi pada Aplikasi Semantik BPPK dan *Google Forms*. Hingga batas akhir pengembalian kuesioner, jumlah responden yang mengembalikan kuesioner dalam keadaan terisi lengkap hanya sebanyak 150 orang. Hal ini berarti tingkat pengembalian kuesioner (*response rate*) mencapai 88,23% dari jumlah sampel yang ditetapkan.

Meskipun *response rate* tidak mencapai 100%, penelitian tetap dapat dilanjutkan ke tahapan analisis. Hartono (2011) menyebutkan bahwa *response rate* tidak harus mencapai 100%, namun akan semakin baik apabila tingkat respon semakin tinggi. Bahkan kuesioner yang dikirimkan lewat media (seperti pos atau *e-mail*)

dengan tingkat respon sebesar 30% sudah dapat dikatakan memadai. Terhadap kuesioner yang terisi tersebut kemudian dilakukan tabulasi dan pengolahan data.

Evaluasi Model Pengukuran. Analisis data penelitian diawali dengan melakukan evaluasi model pengukuran yang bertujuan untuk mengukur validitas dan reliabilitas variabel dalam penelitian. Tingkat validitas dan reliabilitas dapat dilihat melalui validitas konvergen, validitas diskriminan dan reliabilitas konstruk (Ghozali, 2008). Hasil olah data untuk melihat nilai muatan (*loading*) dalam rangka menguji validitas konvergen (*convergent validity*) indikator penelitian adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Pada Tabel 2, terlihat bahwa bahwa semua indikator penelitian telah memiliki nilai muatan (*loading*) lebih dari 0,50 yang menandakan bahwa semua indikator telah memenuhi syarat validitas konvergen. Selanjutnya, hasil olah data untuk melihat nilai *cross loading* dalam rangka menguji validitas diskriminan (*discriminant validity*) dan reliabilitas konstruk (*composite reliability*) indikator dan konstruk penelitian yaitu melihat nilai AVE, *composite reliability* dan

cronbach alpha disajikan pada Tabel 3. Berdasarkan Tabel 3, nilai AVE semua variabel lebih besar dari 0,5, sehingga seluruh konstruk dan indikator dinyatakan valid. Pada Tabel 3 juga, nilai *cronbach alpha* dan *composite reliability* pada model untuk semua variabel lebih besar dari 0,6 dan 0,70 sebagai nilai rujukan, sehingga dapat dinyatakan bahwa semua konstruk memiliki reliabilitas yang baik dan memenuhi syarat.

Evaluasi Model Struktural. Setelah penilaian model pengukuran (*measurement model*) dilakukan dan seluruh konstruk penelitian adalah valid dan reliabel, tahapan berikutnya adalah melakukan pengujian atau evaluasi model struktural. Evaluasi Model Struktural menggambarkan hubungan antarvariabel laten berdasarkan pada *substantive theory*. Menilai model struktural dapat dilakukan dengan cara melihat model struktural yang terdiri dari hubungan yang dihipotesiskan diantara konstruk-konstruk laten dalam model penelitian. Dengan menggunakan metode *Bootstrapping* pada *SmartPLS 3*, diperoleh nilai koefisien jalur (*path coefficient*), nilai t-statistik dan P-values.

Tabel 2. Nilai Muatan (*Loading*) Indikator

Variabel	Kode	Muatan
Kualitas Sistem (X1)	X11	0.828
	X12	0.836
	X13	0.791
Kualitas Informasi (X2)	X21	0.887
	X22	0.873
Kualitas Layanan (X3)	X31	0.894
	X32	0.892
Kepuasan Pengguna (Y1)	Y11	0.980
	Y12	0.979
Manfaat Bersih (Y2)	Y21	1.000

Sumber: Data Primer (diolah)

Tabel 3. Cronbach Alpha, Reliability dan Nilai AVE Konstruk

Variabel (Konstruk)	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	Nilai AVE
Kualitas Sistem (X1)	0.754	0.859	0.670
Kualitas Informasi (X2)	0.709	0.873	0.775
Kualitas Layanan (X3)	0.746	0.887	0.797
Kepuasan Pengguna (Y1)	0.957	0.979	0.959
Manfaat Bersih (Y2)	1.000	1.000	1.000

Sumber: Data Primer (diolah)

Tabel 4. Koefisien Jalur dan t-Statistik

Jalur Hubungan	Coefficient (original sample)	t-statistics	P-values
Kualitas Sistem (X1) → Kepuasan Pengguna (Y1)	0.739	6.920	0.000
Kualitas Informasi (X2) → Kepuasan Pengguna (Y1)	-0.069	0.543	0.294
Kualitas Pelayanan (X3) → Kepuasan Pengguna (Y1)	0.111	1.017	0.155
Kepuasan Pengguna (Y1) → Manfaat Bersih (Y2)	0.195	1.784	0.038

Sumber: Data Primer (diolah)

Nilai *t-tabel* dihitung terlebih dahulu dengan ketentuan nilai alpha (α) sebesar 0,05 dan *degree of freedom* (df) sebesar $n-2$. Jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100, sehingga nilai df adalah 148. Nilai *t-tabel* untuk $df=148$, *one tail*, dan $\alpha=0,05$ adalah 1.655. Berdasarkan Tabel 4, terlihat bahwa tidak semua nilai *t-statistik* pada tabel di atas lebih besar dari nilai *t-tabel* 1.655. Dengan demikian, tidak semua variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen pada jalur-jalur hubungan variabel pada model.

Jalur hubungan pada persepsi Kualitas Sistem (X1) → Kepuasan Pengguna (Y1) dan persepsi Kepuasan Pengguna (Y1) → Manfaat Bersih (Y2) memiliki jalur hubungan atau pengaruh yang signifikan. Sementara jalur hubungan lainnya, persepsi terhadap Kualitas Informasi (X2) → Kepuasan Pengguna (Y1) dan Kualitas Pelayanan (X3) → Kepuasan Pengguna (Y1), memiliki jalur hubungan atau pengaruh yang tidak signifikan.

Selain itu, untuk melihat kekuatan untuk menjelaskan atau *explanatory power* yang dimiliki model dapat dinilai dengan melihat nilai *R-Square* dari konstruk-konstruk atau variabel dependen. Hasil olah data melalui *Bootstrapping* disajikan pada Tabel 5. Tabel 5 menunjukkan bahwa pada model, sekitar 57.4% (kuat) dari variabilitas (keragaman) total variabel (konstruk) persepsi terhadap Kepuasan Pengguna (Y1) dapat dijelaskan oleh variabel eksogenya yaitu persepsi tentang Kualitas sistem (X1), Kualitas informasi (X2), dan Kualitas Layanan (X3).

Artinya, masih terdapat sekitar 42.6% dari keragaman variabel tersebut yang dapat dijelaskan dari faktor-faktor lainnya seperti lingkungan, organisasi, jaringan internet dan lainnya. Sementara, sekitar 3.80% (lemah) dari variabilitas (keragaman) total variabel

(konstruk) Manfaat Bersih (Y2) dapat dijelaskan oleh variabel-variabel eksogenya yang terdiri dari persepsi tentang Kualitas sistem (X1), Kualitas informasi (X2), Kualitas Layanan (X3), dan Kepuasan Pengguna (Y1).

Pengujian Hipotesis dan Pembahasan.

Dari hasil olah data menggunakan *SmartPLS*, diperoleh nilai koefisien jalur (*path coefficient*) dan nilai *t-statistik* serta *P-values* untuk menunjukkan signifikansinya sebagaimana pada Tabel 4. Secara ringkas, Gambar 3 berikut menggambarkan model estimasi PLS dari model penelitian yang diusulkan.

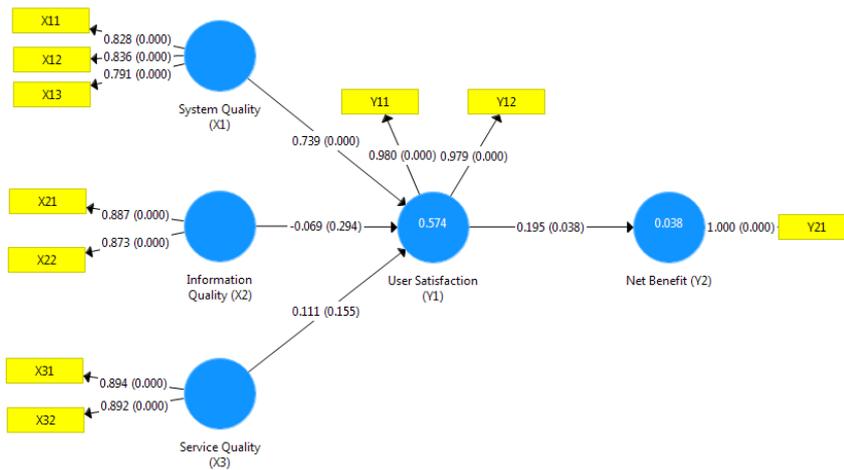
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, baik pada Tabel 4 maupun Gambar 3, tidak semua hasil mendukung hipotesis yang diajukan dengan arah hubungan yang positif. Variabel kualitas sistem ditemukan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna, sedangkan kualitas informasi dan kualitas layanan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pengguna sistem pembelajaran. Di samping itu, variabel kepuasan pengguna ditemukan berpengaruh positif dan signifikan terhadap manfaat bersih.

Hipotesis pertama (H_1) menyatakan bahwa variabel kualitas sistem berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna. Hasil analisis menemukan bahwa hubungan variabel kualitas sistem terhadap kepuasan pengguna memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0,628 dan nilai *t-statistics* sebesar 2,001. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai koefisien jalur adalah positif dan nilai *t-statistics* lebih besar dari nilai *t-tabel* (1.655). Selain itu, nilai *p-value* juga diketahui sebesar 0,000 atau lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas sistem memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna sehingga H_1 dinyatakan diterima.

Tabel 5. *R-Square* (R^2)

Variabel	<i>R-Square</i> (R^2)	<i>R-Square</i> (R^2) Adjusted
Kepuasan Pengguna (Y1)	0.574	0.565
Manfaat Bersih (Y2)	0.038	0.032

Sumber: Data Primer (diolah)



Gambar 3. Hasil Pengujian Model Struktural (*path coefficient* dan *t-values*)
 Sumber: Data Primer (diolah)

Arah pengaruh yang positif, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai koefisien jalur, memiliki arti bahwa semakin tinggi kualitas sistem maka semakin tinggi pula kepuasan pengguna sistem pembelajaran. Tanggapan responden terhadap kualitas sistem pembelajaran secara empiris dapat dijelaskan dari pernyataan yang diajukan dalam kuesioner penelitian ini. Pengguna dalam hal ini peserta pelatihan memberikan penilaian yang positif terhadap kualitas sistem pembelajaran secara terintegrasi.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa persepsi pengguna terhadap kualitas sistem pembelajaran dengan indikator-indikator berupa: (1) kesesuaian metode pembelajaran dengan materi Pelatihan Jarak Jauh; (2) ketercukupan waktu penyelenggaraan Pelatihan Jarak Jauh dengan jumlah materi yang diberikan; dan (3) ketercukupan waktu dalam mengerjakan penugasan, kuis atau ujian, akan mendorong kepuasannya terhadap sistem tersebut.

Hasil ini mendukung model kesuksesan sistem informasi oleh DeLone dan McLean (2003) yang menyatakan bahwa kualitas sistem merupakan salah satu dimensi yang menentukan kesuksesan sistem informasi. Apabila atribut kualitas sistem informasi yang dibangun oleh suatu organisasi dapat memenuhi apa yang dibutuhkan pengguna untuk menyelesaikan pekerjaannya, maka kesuksesan implementasi sistem informasi tersebut dapat tercapai.

Berdasarkan hasil analisis *Cross Loading* pada Tabel 2, indikator kualitas sistem berupa ketercukupan waktu penyelenggaraan Pelatihan Jarak Jauh dengan jumlah materi yang diberikan, memiliki nilai *Cross Loading* tertinggi yaitu 0.836. Hal ini berarti bahwa ketercukupan

waktu penyelenggaraan Pelatihan Jarak Jauh dengan jumlah materi yang diberikan dirasakan sebagai faktor dominan yang dapat mempengaruhi kepuasan peserta pelatihan.

Meskipun demikian, pada hasil pengumpulan data melalui kuesioner pada bagian pertanyaan terbuka, beberapa responden menyatakan bahwa dalam beberapa materi pembelajaran, proporsi waktu pembelajaran dianggap masih perlu ditambah khususnya pada materi yang membutuhkan praktek lapangan atau simulasi secara langsung. Pada umumnya peserta mengeluhkan tentang penyelenggaraan pelatihan yang kurang efektif jika diselenggarakan secara jarak jauh atau *online* dan sebaiknya diselenggarakan dengan tatap muka (langsung), seperti pada pelatihan CNT, karena diklat ini sangat penting untuk melihat langsung jenis-jenis NPP yang ada.

Hipotesis kedua (H_2) menyatakan bahwa variabel kualitas informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna. Hasil analisis menemukan bahwa hubungan variabel kualitas informasi terhadap kepuasan pengguna memiliki nilai koefisien jalur sebesar -0,069 dan nilai *t-statistics* sebesar 0.543. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien jalur adalah negatif dan nilai *t-statistics* lebih kecil dari nilai *t-tabel* (1.655). Selain itu, nilai *p-value* juga diketahui sebesar 0.294 atau lebih besar dari $\alpha=0,05$. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa kualitas informasi memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap kepuasan pengguna sehingga H_2 dinyatakan ditolak.

Hasil analisis yang tidak signifikan ini tidak sejalan dengan penelitian oleh DeLone and McLean (2003) serta Seddon dan Kiew (1996)

terhadap 96 pengguna *Departmental Accounting System* (DAS) yang menyatakan bahwa kualitas informasi memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan pengguna.

Meskipun kualitas informasi pada sistem pembelajaran yang ada saat ini, pada dasarnya membantu peserta pelatihan dalam pembelajaran di bidang kepabeanaan dan cukai, tetapi sayangnya pengguna sistem pembelajaran dalam hal ini peserta pelatihan belum mendapatkan kepuasan yang memadai. Informasi dalam sistem pembelajaran berupa: (1) kesesuaian materi pembelajaran dengan harapan/kebutuhan peserta; (2) bahan ajar mudah dipahami, belum terbukti mampu mendorong kepuasan pengguna sistem pembelajaran.

Hipotesis ketiga (H_3) menyatakan bahwa variabel kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna. Hubungan variabel kualitas layanan terhadap kepuasan pengguna memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0,205 dan nilai *t-statistics* sebesar 0.111. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien jalur adalah positif namun nilai *t-statistics* lebih kecil dari nilai *t-tabel* (1.655). Selain itu, nilai *p-value* juga diketahui sebesar 0.155 atau lebih besar dari $\alpha=0,05$. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa kualitas layanan memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap kepuasan pengguna sehingga H_3 dinyatakan ditolak.

Arah pengaruh yang positif, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai koefisien jalur, memiliki arti bahwa semakin tinggi kualitas layanan maka semakin tinggi pula kepuasan pengguna sistem pembelajaran. Hasil analisis yang tidak signifikan ini tidak mendukung model kesuksesan oleh DeLone dan McLean (2003) yang menyatakan bahwa kualitas layanan merupakan salah satu dimensi kesuksesan sistem informasi. Kesuksesan implementasi sebuah sistem informasi, termasuk sistem yang penggunaannya bersifat *mandatory* seperti pada PJJ ini, tidak terbukti signifikan mempengaruhi kepuasan peserta pelatihan secara terintegrasi di Balai Diklat Keuangan Makassar.

Hipotesis keempat (H_4) menyatakan bahwa variabel kepuasan pengguna berpengaruh positif dan signifikan terhadap manfaat bersih. Hubungan variabel kepuasan pengguna terhadap manfaat bersih memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0.195 dan nilai *t-statistics* sebesar 1.784. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien jalur adalah positif dan nilai *t-statistics* lebih besar dari nilai *t-tabel* (1.655). Selain itu, nilai *p-value* juga diketahui sebesar 0.038 atau lebih kecil dari $\alpha=0,05$. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kepuasan

pengguna memiliki pengaruh yang signifikan secara positif terhadap manfaat bersih sehingga H_4 dinyatakan diterima.

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel kepuasan pengguna berpengaruh secara positif terhadap manfaat bersih. Arah pengaruh yang positif, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai koefisien jalur, memiliki arti bahwa semakin tinggi kepuasan pengguna SAKTI maka semakin tinggi pula manfaat bersih SAKTI terhadap kinerja individu para penggunanya.

Tanggapan responden mengenai kepuasannya terhadap sistem pembelajaran jarak jauh secara empiris dapat dijelaskan dari pernyataan yang diajukan dalam kuesioner penelitian ini. Kepuasan pengguna dalam penelitian ini merupakan persepsi peserta pelatihan mengenai kepuasan atas kemudahan fasilitas pembelajaran yang dikur dengan indikator berupa: (1) fasilitas Pelatihan Jarak Jauh mudah diakses; (2) fasilitas Pelatihan Jarak Jauh mudah digunakan.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa kepuasan terhadap sistem yang memenuhi atribut *system fit for need* akan memberikan kontribusi yang berdampak pada kinerja individu atau hasil pembelajaran. Hasil tersebut mendukung model kesuksesan sistem informasi oleh DeLone dan McLean (2003) yang menyatakan bahwa kepuasan pengguna dan manfaat bersih merupakan dimensi dalam mengukur kesuksesan sistem informasi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Livari (2005), Noviyanti (2016) dan Pambudi (2018) yang menyatakan bahwa kepuasan pengguna sistem informasi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap manfaat bersih yang diterima dari sistem tersebut.

Berdasarkan hasil analisis *Cross Loading* pada Tabel 2, indikator kepuasan pengguna berupa kemudahan fasilitas pembelajaran, memiliki nilai *Cross Loading* yang sangat tinggi yaitu 0.98. Hal ini berarti bahwa indikator tersebut dirasakan sebagai faktor dominan yang dapat mempengaruhi capaian hasil pembelajaran peserta pelatihan. Meskipun demikian, pada hasil pengumpulan data melalui kuesioner pada bagian pertanyaan terbuka, beberapa responden mengeluhkan kualitas jaringan internet yang tidak memadai di beberapa daerah sehingga mempengaruhi pelaksanaan pembelajaran.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian disimpulkan bahwa sistem pembelajaran jarak jauh secara *synchronous* dan *asynchronous* melalui sistem KLC yang berbasis website

(www.klc.kemenkeu.go.id) dan *Zoom Virtual Meeting* terbukti secara empiris belum sepenuhnya berjalan baik dan berhasil berdasarkan indikator atau pendekatan model DeLone dan McLean. Dari empat hipotesis yang diajukan, tidak seluruhnya terbukti dan dapat diterima. Kualitas sistem berpengaruh terhadap kepuasan pengguna dan kepuasan pengguna juga berpengaruh terhadap manfaat bersih. Sedangkan, kualitas informasi dan kualitas layanan tidak berpengaruh terhadap kepuasan pengguna.

REKOMENDASI

1. Balai Diklat Keuangan Makassar sebagai pelaksana teknis BPPK diharapkan dapat melakukan perbaikan kualitas informasi dan kualitas layanan pada sistem pembelajaran jarak jauh yang ada saat ini dalam rangka meningkatkan kepuasan peserta pelatihan dan capaian hasil pembelajaran.
2. Perlu penambahan jamlat, materi studi kasus dan praktik khususnya pada materi pelatihan yang memang membutuhkan simulasi dan semacamnya.
3. Perlu peningkatan kualitas bahan ajar dan materi pembelajaran jarak jauh oleh pengajar atau penyelenggara dalam rangka meningkatkan kepuasan dan capaian hasil pembelajaran peserta pelatihan.
4. Perlu penguatan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal penugasan peserta pelatihan agar peserta pelatihan yang diikutsertakan memang dipersiapkan untuk melakukan tugas di bidang kepabeanaan dan cukai.
5. Diperlukan upaya bersama untuk mewujudkan konsep *link and match* antara pembelajaran dan pengelolaan pengetahuan dengan target kinerja pada unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Bailey, J. E., & Pearson, S. W. 1983. Development of a tool for measuring and analyzing computer user satisfaction. *Management Science*, 29(5), 530-545.

BPPK (Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan). 2017. *Peraturan Kepala BPPK Nomor PER-5/PP/2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan*. Jakarta: BPPK.

BPPK (Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan). 2020. *Kerangka Acuan Program Pelatihan*. Jakarta: BPPK.

BPPK (Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan). 2020. *Majalah Edukasi Keuangan*. 59, 6. Jakarta: BPPK.

Darmawan, E. 2018. Implementasi Model Pembelajaran Asynchronous Dalam Perancangan Aplikasi Simulasi Panduan Pecinta Alam Berbasis Android. *Cloud Information*, 3(2).

Davis, F. D. 1989. Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Technology. *MIS Quarterly*. 13(3), 319-340.

DeLone, W. H., & McLean, E. R. 1992. Information systems success: The quest for the dependent variable. *Information systems research*, 3(1), 60-95.

Delone, W. H., & McLean, E. R. 2003. The DeLone and McLean model of information systems success: a ten-year update. *Journal of management information systems*, 19(4), 9-30.

Elyas, A. H. 2018. Penggunaan Model Pembelajaran E-Learning Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran. *Warta Dharmawangsa*, 56.

Fahirah, Puteri, S. L. E., & Arnesia, P. D. 2020. Analisis Google Classroom Sebagai Sistem Pembelajaran Jarak Jauh Saat Pandemi Covid-19 Menggunakan Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone Dan Mclean. *Prosiding SeNTIK*, 4(1), 57-64.

Ghozali, I. 2008. *Structural Equation Modeling metode alternatif dengan Partial Least Square* (2nd ed.). Semarang: BP-Universitas Diponegoro.

Ghozali, I. 2011. *Analisis Aplikasi Multivariate Dengan Program IBM SPSS 16*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Ghozali, I., & Latan, H. 2015. *Partial Least Squares: konsep, teknik dan aplikasi menggunakan Program SmartPLS 3.0 untuk penelitian empiris*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

Hamdi, M., & Ismaryati, S. 2019. *Materi Pokok Metodologi Penelitian Administrasi; 1-12; MAPU5103/4 SKS*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Hartono, J. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-pengalaman*. Yogyakarta: BPFPE.

Hayadin, H. 2012. Penelitian Evaluasi Penyelenggaraan Diklat Jarak Jauh (DJJ). *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, 10(1).

Hidayatullah, S., Khourouh, U., Windhyastiti, I., Patalo, R. G., & Waris, A. 2020. Implementasi Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone And McLean Terhadap Sistem Pembelajaran Berbasis Aplikasi Zoom Di Saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Teknologi Dan Manajemen Informatika*, 6(1), 44-52.

Iskandar, A. 2019. Evaluasi Diklat ASN Model Kirkpatrick (Studi Kasus Pelatihan Effective Negotiation Skill Balai Diklat Keuangan Makassar). *Jurnal Pendidikan*, 20, 18-39.

- Iskandar, A., & Subekan, A. 2020. Evaluating The Distance Learning In The Pandemic Era: A Case Study At Financial Education And Training Agency Makassar. *JURNAL PAJAR (Pendidikan Dan Pengajaran)*, 4(6), 1206–1221.
- Iskandar, A., Amriani, T., & Subekan, A. 2016. Evaluasi Atas Implementasi Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrua (SAIBA) Dengan Pendekatan DeLone & McLean Information System Success Model (Studi Kasus Mitra Kerja KPPN Gorontalo dan Marisa). *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara, JTAKEN*, 2(2), 111-136.
- Ives, B., Olson, M., & Baroudi, S. 1983. The Measurement of User Information Satisfaction. *Communcations of the ACM*.
- John, W. C. 2013. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. 2000. *Management Information System in Six Edition: Organization and Technology in The Networked Enterprise*. Diakses dari: www.prenhall.com/laudon.
- Livari, J. 2005. An empirical test of the DeLone-McLean model of information system success. *ACM SIGMIS Database: the DATABASE for Advances in Information Systems*, 36(2), 8-27.
- Marlena, N., Dwijayanti, R., & Edwar, M. 2018. Pengembangan Media Pembelajaran Multimedia Interaktif Berbasis Flash untuk Meningkatkan Hasil Belajar Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis (JPEB)*, 6(1), 45–51.
- Nana, N., & Surahman, E. 2019. Pengembangan Inovasi Pembelajaran Digital Menggunakan Model Blended POE2WE di Era Revolusi Industri 4.0. *Prosiding SNFA (Seminar Nasional Fisika dan Aplikasinya)*, 4, 82–90.
- Narayana, I. W. G. 2016. Analisis Terhadap Hasil Penggunaan Metode Pembelajaran Synchronous Dan Asynchronous. *Semnasteknomedia Online*, 4(1), 1–4.
- Noviyanti. 2016. Mengukur kesuksesan Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrua (SAIBA) menggunakan model DeLone & Mclean. *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara*, 2(2), 151-173.
- Nugroho, H. P., & Lestyowati, J. 2020. Analisis Tingkat Kepuasan dan Kepentingan Pengguna Aplikasi SAKTI dengan PIECES Framework. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 93–104.
- Pambudi, K. H. 2018. Analisis Dimensi Kesuksesan Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Pada Satuan Kerja Wilayah Provinsi Jawa Timur Dengan Pendekatan DeLone And McLean Information System Success Model. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 6(2).
- Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. 1988. Servqual: A multiple-item scale for measuring consumer perc. *Journal of Retailing*, 64(1), 12.
- Petter, S., DeLone, W., & McLean, E. 2008. Measuring information systems success: models, dimensions, measures, and interrelationships. *European journal of information systems*, 17(3), 236-263.
- Radityo, D. 2007. Pengujian Model DeLone and McLean Dalam Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (Kajian Sebuah Kasus).
- Rai, A., Lang, S. S. & Welker, R. B. 2002. Assessing the validity of IS success models: An empirical test and theoretical analysis. *Information Systems Research*, 13(1), 50–69.
- Sari, N. L. 2020. Pelatihan Model Pembelajaran Jarak Jauh Berbasis Google Form Sebagai Media Pembela. *KOMMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2).
- Sarwono, J. (2006). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Seddon P. B., & Kiew M. Y. 1996. A partial test and development of DeLone and McLean's model of IS success. *Australian Journal of Information Systems*, 4(1), 90–109.
- Seddon, P., & Yip, S. K. 1992. An empirical evaluation of user information satisfaction (UIS) measures for use with general ledger accounting software. *Journal of Information Systems*, 6(1), 75-92.
- Sedera, D., & Gable, G. 2004. ICIS 2004 Proceedings: A factor and structural equation analysis of the enterprise systems success measurement model.
- Segars, A. H., & Grover, V. 1993. Re-examining perceived ease of use and usefulness: A confirmatory factor analysis. *MIS quarterly*, 517-525.
- Septian, F. 2020. Pelatihan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Berbantuan Media Sosial Edmodo. com bagi Guru SMP Terbuka Sawangan Depok. *JAMAIIKA: Jurnal Abdi Masyarakat*, 1(2), 60–68.
- Shannon, C.E., & Weaver, W. 1949. *The Mathematical Theory of Communication*. Urbana, IL: University of Illinois Press.
- Sugiyono, P. D. 2017. *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Syah, S., Angellia, F. 2020. Analisa Pemanfaatan Teknologi Daring Mahasiswa IBU Kosgoro 1957 Selama Pandemi Covid-19 Dengan Regresi Logistik Ordinal. *JUNIF: Jurnal Nasioanl Informatika*, 1(1): 43-56.
- Yang, X.-P., Liu, X.-X., Guo, Y.-H., & Wang, S.-J. 2012. Optimization and Application of Multimedia Teaching Means of Specialized Courses in Engineering. *Energy Procedia*, 17, 1878–1884.

Hasil Penelitian

HUBUNGAN *SELF-EFFICACY* DENGAN KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI BANJIR PADA MASYARAKAT DESA DUSUN DALAM KECAMATAN SIULAK KABUPATEN KERINCI

(*CORRELATION OF SELF-EFFICACY AND PREPAREDNESS IN FACING FLOOD OF DUSUN DALAM VILLAGE COMMUNITY, SIULAK SUBDISTRICT, KERINCI DISTRICT*)

Tiurmaida Simandalahi

Universitas Andalas
Limau Manis, Kec. Pauh, Kota Padang
Sumatera Barat - Indonesia
Email: tiurmaidamandalahi@gmail.com

Diterima: 24 Maret 2022; Direvisi: 28 Januari 2022; Disetujui: 08 Maret 2022

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hubungan *self-efficacy* dengan kesiapsiagaan menghadapi banjir pada masyarakat Desa Dusun Dalam Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci. Metode penelitian menggunakan deskriptif analitik dengan pendekatan *cross sectional*. Penelitian dilakukan di Desa Dusun Dalam Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci, selama 1 bulan dari Agustus-September 2019 dengan melibatkan semua kepala keluarga yang berjumlah 264 orang. Sampel berjumlah 69 orang, teknik sampel yang digunakan adalah *Random Sampling*. Analisa data yang dilakukan adalah analisa univariat melalui distribusi frekuensi, dan bivariat melalui uji Chi-Square dengan kemaknaan 95% ($\alpha=0,05$) yang diolah secara komputerasi. Hasil univariat didapatkan 59,4% responden tidak siaga, dan 63,8% responden memiliki *self-efficacy* yang rendah. Uji bivariat didapatkan ada hubungan yang bermakna antara *self-efficacy* dengan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana banjir (p -value $0.026 < 0,05$). Rekomendasi penelitian yang diusulkan adalah Optimalisasi edukasi terkait kesiapsiagaan & penguatan *self-efficacy* dalam menghadapi bencana terkhusus Banjir mulai dari level terendah dari masyarakat sampai level tertinggi pemangku dan pengambil kebijakan dengan berkolaborasi dengan stakeholder lain seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat, secara berkala mengadakan pelatihan dan simulasi kesiapsiagaan bencana, optimalisasi kebijakan yang telah diputuskan dan mengimplementasikannya di masyarakat sesuai dengan aturan yang ada, menguatkan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk mengatasi masalah banjir melalui pengadaan program bersama seperti gotong royong, perlombaan, dan lainnya.

Kata kunci: *self-efficacy*, kesiapsiagaan, banjir

ABSTRACT

The research objective was to determine the relationship between *self-efficacy* and flood preparedness in the people of Dusun Dalam Village, Siulak District, Kerinci Regency. The research method used was descriptive analytic with cross sectional approach. The research was conducted in Dusun Dalam Village, Siulak District, Kerinci Regency, for 1 month from August - September 2019, involving all 264 family heads. The sample was 69 people, the sample technique used was random sampling. The data analysis performed was univariate analysis through frequency distribution, and bivariate analysis through Chi-Square test with a significance of 95% ($\alpha = 0.05$) which were computerized. The univariate results obtained were 59.4% of respondents were not alert, and 63.8% of respondents had low *self-efficacy*. The bivariate test found that there was a significant relationship between *self-efficacy* and community preparedness to face flood disasters (p -value $0.026 < 0.05$). The proposed research recommendation is optimizing education related to preparedness & strengthening *self-efficacy* in dealing with disasters, especially floods starting from the lowest level of the community to the highest level of stakeholders and policy makers by collaborating with other stakeholders such as the local Regional Disaster Management Agency (BPBD), periodically holding training and simulation of disaster preparedness, optimizing policies

that have been decided and implementing them in the community in accordance with existing regulations, strengthening community awareness and willingness to overcome flood problems through the provision of joint programs such as mutual cooperation, competitions, and others.

Keywords: *self-efficacy, preparedness, flood disaster*

PENDAHULUAN

Indonesia terletak diantara dua samudra yaitu di sebelah timur laut terdapat samudra Pasifik dan di sebelah barat daya terdapat samudra Indonesia yang tingkat evaporasinya mendatangkan hujan di wilayah tersebut. Negara Indonesia juga merupakan daerah beriklim tropis, memiliki curah hujan tinggi lebih dari 2000 mm/tahun terutama didaerah yang dilalui garis katulistiwa (Wahyuningsih, 2013).

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan kejadian banjir di Indonesia tahun 2016 terdapat 824, 2017 naik menjadi 979 kejadian, dan menurun di 2018 menjadi 679 kejadian. Tahun 2019 terdapat 343 kejadian banjir yang menyebar di 21 provinsi dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Provinsi Jambi termasuk di dalam 5 besar provinsi dengan kejadian banjir yang cukup tinggi, 5 provinsi tersebut antara lain Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Riau, Jambi dan Sumatera Utara (BNPB, 2019).

Secara klimatologi provinsi Jambi memiliki iklim tropis sepanjang tahun 2014, memiliki curah hujan yang bervariasi mulai dari curah hujan sedang hingga sangat tinggi. Curah hujan rata-rata pada tahun 2014 adalah 120-180mm, dan tertinggi ditemukan pada bulan Maret dan November (1.383-1.405 mm/bulan). Selama tahun 2015 - 2019, bencana alam yang terjadi di provinsi Jambi masih didominasi oleh banjir dengan 81 kejadian banjir (BNPB, 2019).

Kabupaten Kerinci yang masuk ke dalam Provinsi Jambi juga tercatat dengan 18 kejadian banjir pada tahun 2017, dan tahun 2018 meningkat menjadi 24 kejadian berdasarkan Data BPBD Kabupaten Kerinci. Adapun kerugian yang ditimbulkan berupa rumah dan sawah terendam banjir, ternak mati, rusaknya jembatan, robohnya saluran irigasi, robohnya pasangan beronjong, jebolnya tanggul penahan tebing, robohnya tembok penahan tebing, terganggunya aktifitas warga, dan kerugian harta benda. Selain itu bencana banjir menimbulkan dampak kesehatan bagi masyarakat seperti diare, psikis, ISPA, dan penyakit kulit yang paling banyak yaitu 270 kasus (BNPB, 2019).

Selain itu banjir juga menjadi permasalahan yang sering terjadi di Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci, terutama di wilayah padat penduduk seperti di Desa Dusun Dalam yang memiliki 266 kepala keluarga tahun 2017,

289 di tahun 2018, dan 264 di tahun 2019. Adapun penyebab banjir di daerah ini dikarenakan kondisi alam, letak geografi, serta faktor alam yang tidak bisa dihindari. Namun terdapat faktor lainnya seperti adanya aktifitas perkembangan kawasan, genangan air serta banyaknya sampah yang menumpuk sehingga sungai tidak mampu menahan air ketika intensitas air hujan yang cukup tinggi terjadi, wilayah daratan yang rendah, serta kurangnya daerah resapan air membuat air sulit mengalami infiltrasi (Supartini, 2017). Selain itu adanya pengerokan sungai di daerah tersebut namun di bagian Kerinci Hilir tidak dilakukan pengerokan sehingga mengakibatkan air terjebak dan menggenangi wilayah tersebut.

Agar kerugian yang ditimbulkan dari bencana banjir tidak terus berdampak pada masyarakat maka masyarakat setempat harus memiliki kesiapsiagaan dalam menanggulangi dampak banjir yang ada. Kesiapsiagaan merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan hidup saat terjadi bencana, seperti tindakan pencegahan selama banjir, tindakan dalam meningkatkan kemampuan darurat sebagai proteksi properti dari kerusakan dan kekacauan akibat bencana, serta kemampuan untuk terlibat dalam kegiatan restorasi dan pemulihan awal pasca bencana (Herdwiyanti A & Sudaryono, 2012), dan ditunjang dengan kemampuan, kompetensi, serta keyakinan untuk dapat mengatasinya melalui perilaku yang baik dari masyarakat setempat.

Jika kesiapsiagaan ini tidak di miliki oleh masyarakat setempat dalam mengatasi masalah banjir ini maka banyak kerugian yang akan dirasakan seperti tergenangnya tempat tinggal masyarakat, adanya korban jiwa yang hanyut maupun hilang, penyakit yang menyerang seperti Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA), penyakit kulit, Diare, dan lain-lain. Selain itu, kerugian material seperti harta benda yang hanyut maupun rusak, kerugian di sektor perekonomian seperti terancam gagal panen, aktifitas pabrik dan pekerjaan lain yang ikut terhenti untuk sementara waktu sampai banjir reda juga terjadi (Wahyuningsih, 2013).

Selain kesiapsiagaan, masyarakat perlu memiliki *self-efficacy* (efikasi diri) yang kuat untuk mengatasi permasalahan banjir ini agar terhindar dari dampaknya. *Self-efficacy* telah diidentifikasi memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku ketika berhadapan dengan

masalah yang dipersepsikan kurang terkontrol. Individu cenderung tidak bertindak jika menganggap dirinya tidak memiliki kompetensi untuk menghadapi bencana (*self-efficacy* rendah), sedangkan individu yang memiliki *self-efficacy* yang tinggi cenderung lebih siap untuk menghadapi bencana, karena *self-efficacy* meningkatkan jumlah rencana yang dikembangkan oleh individu dan ketekunan mereka dalam menerapkannya (Herdwiyanti A & Sudaryono, 2012).

Beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan studi ini diantaranya rata-rata *self-efficacy* pada responden siswa sekolah menengah atas Negeri 2 dan 6 Banda Aceh adalah 27,89 ($\pm 6,42$) dan rata-rata kesiapsiagaan bencana adalah 64,44 ($\pm 16,24$) dan terdapat hubungan yang bermakna dan sangat kuat antara *self-efficacy* dengan kesiapsiagaan bencana ($r = 0,756$; $p = 0,000$) (Syarif & Mastura, 2015).

Hasil penelitian oleh Herdwiyanti dan Sudaryono (2012) tentang perbedaan kesiapsiagaan menghadapi bencana ditinjau dari tingkat *self-efficacy* pada anak usia sekolah dasar di daerah dampak bencana Gunung Kelud mengatakan bahwa terdapat perbedaan kesiapsiagaan menghadapi bencana ditinjau dari tingkat *self-efficacy* pada anak usia sekolah dasar di daerah dampak bencana dengan effect size yang kecil. Uji Mann-Whitney U Test menunjukkan perbedaan signifikan pada level kesiapsiagaan dari subyek dengan *self-efficacy* rendah ($M = 93$, $n = 53$) dan subyek dengan *self-efficacy* tinggi ($M = 1.06$, $n = 49$), $U = 761.5$, $z = -3.6$, $p = .000$, $r = .036$.

Studi pendahuluan yang telah dilakukan peneliti tanggal 20 April 2019 dengan mewawancarai 5 orang masyarakat Desa Dusun Dalam didapatkan bahwa 3 (tiga) responden mengatakan tidak melakukan persiapan apapun jika terjadi banjir, seperti merencanakan lokasi pengungsian/evakuasi keluarga, melakukan latihan simulasi evakuasi dalam keluarga, tidak menyiapkan kotak pertolongan pertama (kotak obat), tidak menyiapkan pakaian, uang tunai, maupun kebutuhan khusus/darurat keluarga, tidak menyiapkan alamat-alamat/nomor telepon yang penting (rumah sakit, Polres, Kebakaran, PLN), namun 2 (dua) responden lainnya melakukan tindakan kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir. Dari 5 (lima) responden, didapatkan juga informasi bahwa 3 (tiga) responden tidak mampu melindungi diri dan menghindari resiko bahaya, tidak mampu mengidentifikasi mana yang bahaya, resiko, kerentanan, dan dampak bencana yang ada di lingkungan sekitar, tidak memiliki informasi, pengetahuan dan kemampuan untuk merespon

kejadian bencana, tidak bertindak tepat guna untuk mencegah kehilangan/kerugian atau kerusakan harta benda, tidak mengembangkan kemampuan untuk mempertahankan diri sendiri selama bencana. Data dari 2 (dua) responden lainnya menyatakan mereka mengetahui bahaya banjir yang sering terjadi di lingkungan mereka, serta melakukan persiapan rencana evakuasi jika banjir datang.

Ketiadaan studi sebelumnya yang serupa tentang apakah ada hubungan antara *self-efficacy* masyarakat setempat dengan kesiapsiagaan terkhusus dalam menghadapi bencana banjir di Desa Dusun Dalam Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci menjadi dasar bagi penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut di daerah ini. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hubungan antara *self-efficacy* dengan kesiapsiagaan menghadapi banjir pada masyarakat Desa Dusun Dalam Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik dengan pendekatan *cross sectional*. Lokasi penelitian yaitu Desa Dusun Dalam mulai April – Agustus 2019. Populasi adalah semua kepala keluarga di Desa Dusun Dalam yang berjumlah 264 kepala keluarga. Sampel berjumlah 69 responden yang diambil menggunakan teknik *Random Sampling*.

Pengumpulan data untuk masing-masing variabel menggunakan lembar kuesioner dengan skala *guttman*. Kuisisioner *self-efficacy* berisi 16 pertanyaan, kuisisioner kesiapsiagaan terdiri dari 18 pertanyaan, yang di sadur dari konsep Badan Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia tahun 2017. Scoring jawaban kuisisioner *self-efficacy* terdiri dari: jika “ya” diberi 1; dan “tidak” diberi 0 (Sugiyono, 2014).

Kemudian diklasifikasikan menjadi: tinggi $\geq 60\%$; rendah $< 60\%$ (Septianingsih, 2010). Skoring penilaian kesiapsiagaan diberi nilai 1 jika “tahu”, dan nilai 0 jika “tidak”. Kemudian dikonversi menjadi: “siaga” jika \geq median; dan “tidak siaga” jika $<$ median, setelah sebelumnya dilakukan uji normalitas dengan standar *Skewnees* menggunakan uji *One Sample Kolmogorov Smirnov* dengan hasil tidak berdistribusi normal ($p \leq 0,05$) (Notoatmodjo, 2012).

Pengolahan data secara komputerisasi dengan perangkat lunak SPSS. Analisa data yang digunakan adalah univariat dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan bivariat menggunakan uji statistik yaitu uji *chi-square* dengan derajat kepercayaan 95 % ($\alpha = 0,05$). Analisis bivariat menggunakan uji statistik *Chi Square* dengan

kemaknaan 0,05, dengan hasil hipotesis: H_a diterima; dan, H_o ditolak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan monografi Desa Dusun Dalam tahun 2019, luas wilayah Desa Dusun Dalam adalah ±2115 Ha terdiri dari 5 RT. Dengan letak geografis Desa Dusun Dalam Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci yang terletak antara: sebelah timur berbatasan dengan Sungai Batang Merao, sebelah barat berbatasan dengan Desa Bandar Sedap, sebelah selatan berbatasan Desa Telago Biru, dan sebelah utara berbatasan dengan Desa Koto Beringin dengan topografi datar (Dalam Desa Dusun, 2019).

Jumlah penduduk yang terdata di Desa Dusun Dalam berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh aparat pemerintah Desa Dusun Dalam pada tahun 2019 adalah sebanyak 727 jiwa, dan jumlah kepala keluarga yaitu sebanyak 264 kepala keluarga. Sebagian besar mata pencaharian penduduk Desa Dusun Dalam adalah tani, pedagang, honorer, PNS, dan lain sebagainya (Dalam Desa Dusun, 2019).

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden

Karakteristik Responden	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Umur		
≤ 30 Tahun	26	37.7
> 30 Tahun	43	62.3
Jumlah	69	100
Jenis Kelamin		
Laki-laki	63	91.3
Perempuan	6	8.7
Jumlah	69	100
Pendidikan		
SD	10	14.5
SMP	13	18.8
SMA	28	40.6
PT	18	26.1
Jumlah	69	100
Pekerjaan		
Tani	30	43.5
Pedagang	8	12.0
IRT	5	7.2
Honorer	21	30.4
PNS	5	7.2
Jumlah	69	100

Berdasarkan karakteristik responden diketahui bahwa: umur responden terbanyak adalah >30 Tahun (62.3%); jenis kelamin dominan laki-laki (91.3%); tingkat pendidikan mayoritas SMA (40,6%); pekerjaan terbanyak

adalah petani (43.5%). Dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir, individu dan rumah tangga harus melakukan antisipasi bencana alam baik dari segi pengetahuan dan sikap terhadap resiko bencana, kebijakan keluarga untuk kesiapsiagaan, rencana tanggap darurat, sistim peringatan bencana, mobilisasi sumber daya, dan mitigasi dalam menghadapi banjir (LIPI-UNESCO/ISDR, 2016).

Guna mendukung respons yang aman dan pemulihan yang cepat, prakarsa kesiapsiagaan bencana secara tradisional berfokus pada menyiapkan individu dengan mempromosikan perilaku kesiapsiagaan pribadi atau rumah tangga. Kampanye komunikasi telah menekankan bahwa setiap rumah tangga harus memiliki perlengkapan persediaan darurat, mengembangkan rencana bencana, dan tetap mendapat informasi tentang bahaya lokal. Dengan demikian, banyak literatur tentang kesiapsiagaan telah difokuskan pada motivator individu dari perilaku ini, dengan studi yang meneliti bagaimana faktor-faktor kognitif sosial yang berbeda mempengaruhi kesiapan pribadi (Levac, Toal-Sullivan, & O'Sullivan, 2012).

Hasil analisis univariat terkait kesiapsiagaan yang disajikan pada Tabel 2 menggambarkan bahwa responden tidak siaga dalam menghadapi bencana banjir (59.4%). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sulistyowati (2014) tentang Kesiapsiagaan Masyarakat Rawan Bencana Banjir Di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, bahwa kesiapsiagaan masyarakat di Kelurahan Kadipiro dikategorikan kurang siap dengan indeks nilai 42,32%, Kelurahan Nusukan dikategorikan kurang siap dengan indeks nilai 42%, dan di Kelurahan Banyuanyar dapat dikategorikan kurang siap dengan indeks nilai 44,15%.

Tabel 2. Analisis Univariat Kesiapsiagaan Menghadapi Banjir

No.	Kesiapsiagaan	Persentase (%)
1	Tidak Siaga	59.4
2	Siaga	40.6
	Jumlah	100

Tabel 3 menyajikan gambaran ketidaksiagaan masyarakat dalam menghadapi banjir. Dari 18 indikator kesiapsiagaan yang ditanyakan, didapatkan 12 indikator memiliki kesiapsiagaan dengan persentase terendah dibawah 50%, seperti hanya 36,2% masyarakat melakukan persiapan untuk evakuasi termasuk memahami rute evakuasi dan daerah yang lebih tinggi; hanya 40,6% yang tahu bantuan apa yang bisa diberikan apabila ada anggota keluarga

terkena banjir; hanya 42% yang tahu cara untuk melindungi rumah dari banjir; dan 42% yang melakukan persiapan untuk hidup mandiri selama sekurangnya tiga hari seperti mempersiapkan tas siaga bencana, penyediaan makanan dan air minum; 5 indikator memiliki kesiapsiagaan rendah dengan persentase 44,5% yaitu nomor 1, 4, 8, 12 dan 14; 1 indikator memiliki persentase 46,4% yaitu nomor 15; serta 2 indikator dengan persentase 47,8% yaitu nomor 11, 18. Hasil penelitian ini juga menjelaskan terdapat 6 indikator masyarakat memiliki kesiapsiagaan diatas 50% yaitu indikator nomor 2, 6, 10, 13, 16, dan 17.

Kesiapsiagaan yang dimiliki responden didasari adanya pengalaman langsung ketika menghadapi bencana dimasa lalu, sehingga menstimulasi adanya dorongan untuk mencari

informasi mengenai peristiwa tersebut. Responden yang tidak memiliki kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana banjir lebih disebabkan adanya aktifitas kesibukan dan jenis pekerjaan yang dimiliki masyarakat setempat yang mayoritasnya bekerja sebagai petani, sehingga menghabiskan waktu sehari penuh dan responden tidak memfokuskan diri untuk merencanakan persiapan dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir. Selanjutnya jika dilihat dari variable *self-efficacy*, dikatakan bahwa *self-efficacy* merupakan keyakinan seseorang dalam kemampuannya untuk melakukan suatu bentuk kontrol terhadap fungsi orang itu sendiri dan kejadian dalam lingkungan (Shohifatul, 2012).

Tabel 3. Persentase Berdasarkan Indikator Kesiapsiagaan Menghadapi Banjir

No.	Indikator	Persentase (%)
1.	Tahu istilah-istilah peringatan yang berhubungan dengan bahaya banjir, seperti Siaga I sampai dengan Siaga IV dan langkah-langkah yang harus dilakukan.	44.5
2.	Tahu tingkat kerentanan tempat tinggal apakah berada di zona rawan banjir.	59.4
3.	Tahu cara untuk melindungi rumah dari banjir.	42.0
4.	Tahu saluran dan jalur yang sering dilalui banjir dan apa dampaknya untuk rumah.	44.5
5.	Lakukan persiapan untuk evakuasi, termasuk memahami rute evakuasi dan daerah yang lebih tinggi.	36.2
6.	Diskusi dengan anggota keluarga mengenai ancaman banjir dan merencanakan tempat pertemuan apabila anggota keluarga terpencar-pencar.	53.6
7.	Tahu bantuan apa yang bisa diberikan apabila ada anggota keluarga yang terkena banjir.	40.6
8.	Tahu kebutuhan khusus anggota keluarga dan tetangga apabila banjir terjadi.	44.5
9.	Lakukan persiapan untuk hidup mandiri selama sekurangnya tiga hari, misalnya persiapan tas siaga bencana, penyediaan makanan dan air minum.	42.0
10.	Tahu bagaimana mematikan air, listrik, dan gas.	60.9
11.	Pertimbangkan untuk asuransi banjir.	47.8
12.	Terkait harta dan kepemilikan, membuat catatan harta, mendokumentasikannya dalam foto, dan menyimpan dokumen tersebut di tempat yang aman.	44.5
13.	Simpan berbagai dokumen penting di tempat yang aman.	57.9
14.	Hindari membangun di tempat rawan banjir kecuali ada upaya penguatan dan peninggian bangunan rumah.	44.5
15.	Awas terhadap alat listrik yang dapat memicu bahaya saat bersentuhan dengan air banjir.	46.4
16.	Turut serta mendirikan tenda pengungsian dan pembuatan dapur umum.	55.0
17.	Libatkan diri dalam pendistribusian bantuan.	50.7
18.	Gunakan air bersih dengan efisien.	47.8

Tabel 4. Analisis Univariat *Self-Efficacy* Masyarakat Desa Dusun Dalam

No.	<i>Self-Efficacy</i>	Persentase (%)
1	Rendah	63.8
2	Tinggi	36.2
	Jumlah	100

Berdasarkan tabel 4, didapatkan hasil 63.8% responden memiliki *self-efficacy* rendah. Hasil ini diperkuat oleh penelitian Herdwiyanti A & Sudaryono (2013) tentang perbedaan kesiapsiagaan menghadapi bencana ditinjau dari tingkat *self-efficacy* pada anak usia Sekolah Dasar di daerah dampak bencana Gunung Kelud, menunjukkan bahwa *self-efficacy* pada responden adalah 64.5% dengan *self-efficacy* rendah.

Bandura (2012) menyatakan manusia yang yakin bahwa mereka dapat melakukan sesuatu yang mempunyai potensi untuk dapat mengubah kejadian dilingkungannya, akan lebih mungkin untuk bertindak dan akan lebih mungkin menjadi sukses dari pada manusia

yang mempunyai efikasi diri yang rendah. Ada 4 faktor yang mempengaruhi *self-efficacy* yang dapat ditumbuhkan yaitu pengalaman menguasai sesuatu (*mastery experience*), modeling sosial, persuasi sosial, kondisi fisik dan emosional (Shohifatul, 2012).

Self-efficacy telah diidentifikasi memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku ketika berhadapan dengan masalah yang dipersepsikan kurang terkontrol. Individu cenderung tidak bertindak jika menganggap dirinya tidak memiliki kompetensi untuk menghadapi bencana, sedangkan individu yang memiliki *self-efficacy* yang baik cenderung lebih siap untuk menghadapi bencana, karena *self-efficacy* meningkatkan jumlah rencana yang dikembangkan oleh individu dan ketekunan mereka dalam menerapkannya (Herdwiyanti A & Sudaryono, 2012). *Self-efficacy* mempengaruhi jumlah dan kualitas dari *action plans*, dan jumlah dari usaha serta keuletan yang diberikan dalam perilaku pengurangan resiko (Paton, 2003).

Tabel 5. Persentase Berdasarkan Indikator *Self-Efficacy*

No	Indikator	Persentase (%)
1.	Tahu cara untuk melindungi rumah dari banjir.	40.6
2.	Tahu saluran dan jalur yang sering dilalui banjir dan apa dampaknya untuk rumah.	42.0
3.	Mampu melakukan persiapan untuk evakuasi, dan paham rute evakuasi dan daerah yang lebih tinggi.	39.1
4.	Tahu mematikan air, listrik, dan gas.	56.2
5.	Simpan berbagai dokumen penting di tempat yang aman.	53.6
6.	Tahu risiko banjir dan banjir bandang di tempat saya	37.7
7.	Siap untuk evakuasi: amankan rumah, tempatkan perabot di luar rumah atau di tempat yang aman dari banjir. Barang yang lebih berharga diletakan pada bagian yang lebih tinggi di dalam rumah.	44.5
8.	Cabut alat-alat yang masih tersambung dengan listrik. Tidak menyentuh peralatan yang bermuatan listrik apabila berdiri di atas/dalam air.	59.4
9.	Gunakan tongkat atau sejenisnya untuk mengecek kepadatan tempat saya berpijak.	46.4
10.	Siapkan penampungan air untuk berjaga-jaga seandainya kehabisan air bersih.	43.5
11.	Hindari air banjir karena kemungkinan kontaminasi zat-zat berbahaya dan ancaman kesetrum.	42.0
12.	Hindari area yang airnya baru saja surut karena jalan bisa saja keropos dan ambles.	57.9
13.	Perhatikan kesehatan dan keselamatan keluarga dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air bersih jika terkena air banjir.	47.8
14.	Buang makanan yang terkontaminasi air banjir.	53.6
15.	Bersihkan tempat tinggal dan lingkungan rumah dari sisa-sisa kotoran setelah banjir.	42.0
16.	Lakukan pemberantasan sarang nyamuk	44.5

Tabel 5 menggambarkan bagaimana *self-efficacy* yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Ditemukan bahwa banyak masyarakat memiliki *self-efficacy* dibawah 50% yang artinya banyak indikator yang tidak dipersiapkan ataupun dilakukan oleh masyarakat seperti indikator yang terendah mengetahui risiko banjir dan banjir bandang di daerah tempat tinggalnya (37,7%), mampu melakukan persiapan untuk evakuasi dan memahami rute evakuasi serta mengetahui daerah yang lebih tinggi untuk evakuasi (39,1), mengetahui cara untuk melindungi rumah dari banjir (40,6%), mengetahui saluran dan jalur yang sering dilalui banjir dan apa dampaknya untuk rumah (42%), menghindari air banjir karena kemungkinan kontaminasi zat-zat berbahaya dan ancaman kesetrum (42%), dan membersihkan tempat tinggal dan lingkungan rumah dari sisa-sisa kotoran setelah banjir (42%), menyiapkan penampungan air untuk berjaga-jaga seandainya kehabisan air bersih (43,5%), dan indikator lainnya.

Individu dengan *self-efficacy* tinggi merasa memiliki kemampuan untuk mencegah kerusakan dan menjadi mandiri jika terjadi bencana melalui persiapan dan usaha mereka sendiri. Kepercayaan masyarakat terhadap efikasi mereka mempegaruhi kesiagaan terhadap potensi ancaman dan bagaimana mereka mempersepsi dengan proses kognitif. *Self-efficacy* mengelola stressor yang kuat dan mempengaruhi tidak hanya bagaimana ancaman diartikan tetapi juga sejauh mana mereka mengatasinya. Semakin kuat rasa *self-efficacy*, maka individu semakin berani dalam menghadapi situasi problematik yang meningkatkan stres (Herdwiyanti A & Sudaryono, 2012).

Selanjutnya Tabel 6 menyajikan proporsi responden yang tidak siaga dengan *self-efficacy* rendah yaitu sebanyak (70.5%), dibandingkan dengan *self-efficacy* tinggi yaitu sebanyak (40.0%). Hasil uji *chi-square* didapatkan nilai *p-value* 0,026 (*p-value* < 0,05) yang artinya adanya hubungan *self-efficacy* dengan kesiapsiagaan menghadapi banjir. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Syarif & Mastura (2015)

tentang “Hubungan *self-efficacy* dengan kesiapsiagaan bencana gempa bumi dan tsunami pada siswa sekolah menengah atas negeri 2 dan 6 Banda Aceh” bahwa ada hubungan yang bermakna dan sangat kuat antara *self-efficacy* dengan kesiapsiagaan bencana dengan *p-value* 0,000. Selanjutnya Wurjatmiko, A. T., Zuhriyah, L., Fathoni, M (2018) tentang “Relationship between personal *self-efficacy* and flood disaster preparedness of Indonesian nurses” bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara *self-efficacy* dengan kesiapsiagaan bencana banjir perawat (*p*=0,00 dan *r*=0,63).

Secara konsep, berdasarkan Ensiklopedia Perilaku Manusia yang dinyatakan oleh Bandura menyatakan bahwa “keyakinan *self-efficacy* menentukan bagaimana orang merasa, berfikir, memotivasi diri dan berperilaku”. Konsep ini telah digunakan dalam penelitian dalam dua cara yang berbeda yang pertama sebagai “tugas *self-efficacy*” menunjukkan kemampuan yang dirasakan untuk melakukan perilaku tertentu. Yang kedua “mengatasi *self-efficacy*” menunjukkan kemampuan yang dirasakan untuk mencegah, mengendalikan, atau mengatasi kesulitan potensial yang mungkin ditemui ketika terlibat dalam kinerja tertentu (Tsang, Hui, & Law, 2012).

Self-efficacy berbanding lurus dengan kesiapan dalam menghadapi dan mengatasi dampak bencana alam, artinya masyarakat yang memiliki *self-efficacy* yang baik dalam menghadapi bencana alam akan memiliki kesiapsiagaan yang lebih baik saat bencana melanda dan sebaliknya ketika masyarakat kurang mampu, maka persiapan mereka akan lebih sedikit ketika bencana itu terjadi (Alwisol, 2004).

Self-efficacy dipengaruhi oleh pengalaman pelatihan bencana, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan budaya kerja di institusi tempatnya bekerja (Anstobar & Miellen, 2013). Konsep ini sejalan dengan hasil penelitian dimana 40.0% responden memiliki *self-efficacy* tinggi namun tidak siaga, 29.5% *self-efficacy* rendah namun siaga, 60.0% *self-efficacy* tinggi tapi siaga, 70.5% *self-efficacy* rendah tapi tidak siaga dalam menghadapi bencana banjir.

Tabel 6. Hubungan *Self-Efficacy* dengan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Banjir

No	<i>Self-Efficacy</i>	Kesiapsiagaan				Jumlah		<i>P-Value</i>
		Tidak Siaga		Siaga		<i>n</i>	%	
		<i>F</i>	%	<i>F</i>	%			
1	Rendah	31	70.5	13	29.5	44	100	0.026
2	Tinggi	10	40.0	15	60.0	25	100	
	Total	41	59.4	28	40.6	69	100	

Peneliti menyimpulkan, banyak faktor yang menyebabkan rendahnya *self-efficacy* dan tidak siaganya masyarakat dalam menghadapi bencana banjir, seperti: kurangnya kemauan responden untuk menyiapkan kesiapsiagaan diri dan keluarga yang dapat dicontoh seperti menyiapkan kotak P3K, pakaian, dan makanan/air minum. Faktor keterbiasaan dalam melakukan upaya pencegahan seperti menyimpan dokumen penting di tempat yang aman, pengalaman peristiwa sebelumnya, serta pelatihan atau simulasi kebencanaan tentang banjir yang pernah didapat menjadi penentu kesiapsiagaan masyarakat.

Selain itu, dari segi karakteristik responden berdasarkan usia, jenjang pendidikan, dan jenis pekerjaan juga menjadi penyumbang hasil penelitian ini. Namun masyarakat juga mengharapkan adanya peran, dan bantuan pemerintah setempat untuk membangun kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi banjir, sebagai contoh membentuk tim tanggap bencana masyarakat di tingkat RW maupun kelurahan, membekali masyarakat dengan pelatihan kesiapsiagaan dan tanggap bencana, memperantarai masyarakat setempat dengan tim tanggap nasional (Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)/ Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan daerah dalam proyek kebencanaan.

KESIMPULAN

Lebih dari separuh masyarakat tidak siaga dan memiliki *self-efficacy* rendah dalam menghadapi banjir. Ditemukan adanya hubungan yang signifikan antara *self-efficacy* dengan kesiapsiagaan menghadapi banjir di Desa Dusun Dalam Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci. Beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya kesiapsiagaan dan rendahnya *self-efficacy* seperti kurangnya kemauan masyarakat untuk menyiapkan tindakan kesiapsiagaan seperti menyiapkan kotak P3K, pakaian, makanan/air minum, dan tidak pernah mendapat latihan atau simulasi kebencanaan tentang banjir.

REKOMENDASI

Beberapa alternatif yang disarankan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan *self-efficacy* masyarakat dalam menghadapi banjir, yaitu:

1. Optimalisasi edukasi terkait kesiapsiagaan & penguatan *self-efficacy* dalam menghadapi bencana terkhusus Banjir mulai dari level terendah dari masyarakat sampai level tertinggi pemangku dan pengambil kebijakan dengan berkolaborasi dengan stakeholder

- lain seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat.
2. Optimalisasikan kebijakan dari pemerintah daerah setempat terkait larangan pengerukan sungai dan pembuangan sampah dan mengimplementasikannya di masyarakat sesuai dengan aturan yang ada.
3. Menguatkan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk mengatasi masalah banjir melalui program masyarakat seperti gotong royong bersama minimal 1x sebulan, melakukan simulasi kesiapsiagaan bencana.
4. Membentuk tim siaga bencana di tiap kelurahan yang siap turun ke lapangan ketika bencana terjadi.
5. Pemerintah daerah setempat bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci mengadakan pelatihan dan simulasi kesiapsiagaan bencana banjir.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada Bapak Kepala Desa Dusun Dalam Kecamatan Siulak beserta staf yang telah memberi izin dalam penelitian ini, serta masyarakat Desa Dusun Dalam yang telah bersedia dan berkontribusi dalam pengisian kuisioner penelitian ini, dan tidak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penulisan ilmiah ini hingga selesai pada waktunya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwisol. 2004. *Psikologi Kepribadian*. Malang: Universitas Muhammyadiah Malang Press.
- Ansthoobar, D., & Miellen, C. 2013. *Disaster Nursing Management*. Delhi: Delhi.
- Bandura. 2012. *Self-Efficacy The Exercices of Control*. New York: W.H Freeman and company.
- BNPB. 2019. *Data Kejadian Bencana. (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) Diambil kembali dari Data & Informasi Bencana Indonesia*. Retrieved from <https://dibi.bnpb.go.id/>
- Dalam Desa Dusun. 2019. *Buku Iduk Penduduk Kecamatan Siulak*.
- Herdwiyanti A, F., & Sudaryono. 2012. Perbedaan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Ditinjau Dari Tingkat Self-Efficacy Pada Anak Usia Sekolah Dasar Di Daerah Dampak Becana Gunung Kelud. *Jurnal Psikologi Kepribadian dan Sosial*, 1(3), 136-141.
- Levac, J., Toal-Sullivan, D., & O'Sullivan, T. L. 2012. Household Emergency Preparedness: a Literature Review. *Journal of Community Health*, 37(3), 725-733.

LIPI-UNESCO/ISDR. 2016. *Kajian Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Mengantisipasi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami*. Jakarta: Ilmu Pengetahuan Kebumihan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Notoatmodjo, S. 2012. *Buku Ilmu Kesehatan Masyarakat Prinsi-Prinsip Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta.

Paton, D. 2003. Disaster Preparedness: A Social-Cognitive Perspective. *Disaster Prevention and Management*, 12(3), 210-216.

Septianingsih. 2010. *Hubungan Efikasi Diri dan Motivasi Berprestasi Siswa Kelas IX SMA Negeri 9 Malang*. Uiversitas Negeri Malang, . Skripsi. Malang : Fakultas Ilmu Pendidikan Jurusan Bimbingan Konseling dan Psikologi. Malang: Uiversitas Negeri Malang.

Shohifatul. 2012. *Perbedaan Tingkat Self-Efficacy Antara Mahasiswa Fakultas Psikologi dan Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Uin Malik Ibrahim*. Malang: Universitas Islam Negeri Uin Malik Ibrahim.

Sugiyono. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sulistyowati, A. N. 2014. *Kesiapsiagaan Masyarakat Rawan Bencana Banjir Di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta*. Retrieved December 2021, from Electronic theses and Dissertations Universitas Muhammadiyah Surakarta: <http://eprints.ums.ac.id/29085/>

Supartini, E. 2017. *Buku Pedoman Latihan Kesiapsiagaan Bencana Nasional: Membangun Kesadaran, Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana*. Jakarta: BNPB.

Syarif, H., & Mastura. 2015. Hubungan Self Efficacy dengan Kesiapsiagaan Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Pada Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 2 dan 6 Banda Aceh. *Idea Nursing Journal*, 1(2), 53-61.

Tsang, S. K., Hui, E. K., & Law, B. C. 2012. Self-Efficacy as a Positive Youth Development Construct: A Conceptual Review. *The Scientific World Journal*, 7.

Wahyuningsih, T. 2013. Pengaruh Pengetahuan Dan Sikap Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Banjir Di Kelurahan Joyotakan Kecamatan Serengan Kota Surakarta. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

Wurjatmiko, A. T., Zuhriyah, L., & Fathoni, M. 2018. Relationship Between Personal Self-Efficacy and Flood Disaster Preparedness of Indonesian Nurses. *Public Health of Indonesia*, 4(1), 25-30.

Hasil Penelitian

PENGELOLAAN GEOWISATA BERKELANJUTAN DALAM MENDUKUNG PELESTARIAN WARISAN GEOLOGI: PERSPEKTIF *COLLABORATIVE GOVERNANCE*

(*SUSTAINABLE GEOTOURISM MANAGEMENT FOR SUPPORTING THE CONSERVATION OF GEOLOGICAL HERITAGE: A COLLABORATIVE GOVERNANCE PERSPECTIVE*)

Angga Wijaya Holman Fasa, Mahardhika Berliandaldo

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Gedung Wisma Antara Lt. 18, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 17, Gambir - Jakarta Pusat 10110
DKI Jakarta -Indonesia
Email: awijayahf@gmail.com

Diterima: 02 Maret 2022; Direvisi: 11 April 2022; Disetujui: 26 April 2022

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami urgensi pengelolaan geowisata berkelanjutan dalam mendukung pelestarian warisan geologi, serta peran dan relasi antar para pemangku kepentingan dalam pengelolaan geowisata berkelanjutan dalam mendukung pelestarian warisan geologi berdasarkan perspektif *collaborative governance*. Setelah mendapatkan temuan studi, kemudian disusun strategi pengelolaan geowisata berkelanjutan dalam mendukung pelestarian warisan geologi berbasis kolaborasi antar para pemangku kepentingan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Studi ini menunjukkan beberapa hal: pertama, pengelolaan dan pemanfaatan warisan geologi ini dapat meningkatkan pendapatan negara dari sektor pariwisata dengan pembangunan ekonomi dan budaya lokal, serta keserasian penataan ruang dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Kedua, Peran dan relasi antar pemangku kepentingan amat dibutuhkan dalam kerangka kolaboratif, dan perlu ditunjang oleh sistem kelembagaan yang jelas, khususnya untuk mengelola keuangan dan pendapatan, manajemen fasilitas, masalah teknis, mengurus sistem manajemen harian, regulasi kolaborasi aktor seperti bisnis lokal, akademisi, pengusaha, pemerintah daerah, badan pariwisata dan masyarakat setempat. Ketiga, strategi berbagi peran dalam pengembangan geowisata adalah dengan penerapan model pentahelix yang melibatkan beberapa pihak pemangku kepentingan, antara lain Academy (Riset dan Pengabdian masyarakat), Business (Kerjasama Pembiayaan dan Penyelenggara Bisnis), Community (Pendukung Pariwisata dan Ekonomi kreatif), Government (Koordinator dan Regulator), dan Media (Promosi, Pemasaran, dan Sosialisasi).

Kata kunci: geowisata, warisan geologi, taman bumi, pengelolaan berkelanjutan, geokonservasi, *collaborative governance*

ABSTRACT

This study aims to identify and understand the urgency of sustainable geotourism management in supporting the preservation of geological heritage, as well as the role and relationship between stakeholders in supporting the preservation of geological heritage based on a collaborative governance perspective. After obtaining the study findings, a sustainable geotourism management strategy is then drawn up. To obtain the findings, the qualitative method with a descriptive analytical approach was employed. This study shows, first, the management and utilization of geology can increase state revenues from the tourism sector with local economic and cultural development, as well as the harmony of spatial planning in realizing sustainable development. Second, the roles and relations between stakeholders are very much needed in a collaborative framework, and need to be supported by a clear institutional system, especially for managing finances and income, facility management, technical issues, managing daily management systems, regulation of collaboration of actors such as local businesses, academics, local governments, tourism agencies and local communities. Third, the strategy of sharing roles

in the development of geotourism is by applying the pentahelix model that involves several stakeholders, including the Academy, Business, Community, Government, and Media.

Keywords: *geotourism, geoheritage, geopark, sustainable management, geoconservation, collaborative governance*

PENDAHULUAN

Sektor pariwisata berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021, nilai Produk Domestik Bruto Langsung Pariwisata/*Tourism Direct Gross Domestic Product* (TDGDP) dari tahun 2016 hingga 2019 menunjukkan peningkatan yaitu dari 4,63 persen pada tahun 2016 menjadi sebesar 4,97 persen atau mencapai 1.734 triliun rupiah pada tahun 2019 yang mana menunjukkan kontribusi nilai tambah industri pariwisata terhadap seluruh Nilai Tambah Bruto (NTB) bagi perekonomian nasional (Badan Pusat Statistik, 2021d).

Berdasarkan data *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) dan *United Nations World Tourism Organization* (UNWTO), angka ini mendudukkan kontribusi sektor pariwisata Indonesia pada posisi ke-4 dunia setelah Perancis sebesar 7,3 persen, Malaysia sebesar 6,5 persen, dan Selandia Baru sebesar 5,8 persen (OECD, 2020; UNWTO, 2020). Pada perkembangannya kondisi pandemi Covid-19 yang membatasi mobilitas manusia berdampak negatif terhadap sektor pariwisata, dimana pada tahun 2020 terdapat penurunan kontribusi secara signifikan sebesar 4 persen, dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto turun hingga -19,2 persen yang merosot jauh dengan angka pada tahun 2016 yaitu sebesar 9,41 persen (Badan Pusat Statistik, 2021a).

Sebagai ilustrasi, pada triwulan ketiga 2019, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) mencapai 4,43 juta kunjungan, sedangkan di triwulan ketiga tahun 2020 tercatat hanya 481,41 ribu kunjungan (Badan Pusat Statistik, 2021b), dan pada perkembangannya data mutakhir menunjukkan bahwa pada periode Januari-November tahun 2021 jumlah kunjungan wisman sebanyak 1,48 juta kunjungan atau turun 61,82 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisman pada periode waktu yang sama tahun 2020, yang tercatat sebanyak 3,89 juta kunjungan (Badan Pusat Statistik, 2022).

Guna pemulihan perekonomian pasca pandemi Covid-19, Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan termasuk untuk sektor pariwisata yang terkena dampak negatif yang signifikan. Salah satu kebijakan tersebut berupa regulasi yang tertuang di dalam

(Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022). Untuk pemulihan sektor pariwisata, salah satu strategi dalam kerangka transformasi ekonomi yang dicanangkan adalah pengembangan taman bumi (*geopark*) sebagai destinasi pariwisata untuk implementasi geowisata.

Hal ini berkesesuaian dengan Outlook Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia 2021 dan Tren Industri Pariwisata 2021 yang dirilis oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) dimana memposisikan wisata alam sebagai salah satu jenis wisata yang sesuai untuk kondisi *new normal* pada masa pandemi karena berkesesuaian dengan protokol kesehatan untuk beraktivitas di area terbuka, dan menjaga jarak (*physical distancing*) dalam mencegah transmisi virus SARS-Cov-2.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknik Pengembangan Geopark Sebagai Destinasi Pariwisata, 2020), geowisata adalah pariwisata yang memanfaatkan seluruh aspek geologi, mencakup bentuk, proses geologi, sejarah geologi, dasar pengetahuan geologi, dan faktor pendukungnya, termasuk budaya dan keanekaragaman hayati yang terkait dengan geologi. Selain itu, dalam Permenparekraf No. 2/2020 juga dijabarkan bahwa salah satu tujuan implementasi geowisata adalah untuk mempromosikan arti penting dan memberikan perlindungan bagi warisan geologi (*geoheritage*).

Merujuk pada Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penetapan Warisan Geologi (Geoheritage), warisan geologi (*geoheritage*) adalah keragaman geologi (*geodiversity*) yang memiliki nilai lebih sebagai suatu warisan karena menjadi rekaman yang pernah atau sedang terjadi di bumi yang karena nilai ilmiahnya tinggi, langka, unik, dan indah, sehingga dapat digunakan untuk keperluan penelitian dan pendidikan kebumihutan. Erat kaitannya dengan keterkaitan antara implementasi geowisata dengan pelestarian warisan geologi. Hasil studi (Ehsan et al., 2013) menunjukkan bahwa geowisata memainkan peran penting dalam pelestarian warisan geologi

(*geoconservation*) dimana hasil kunjungan wisatawan berkontribusi pada perekonomian yang berguna dalam memberikan insentif lingkungan. Selain itu, geowisata dapat meningkatkan kesadaran untuk mendorong kesadaran pelestarian warisan geologi melalui kegiatan bermuatan edukasi, dan memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat (Bentivenga et al., 2019; Gordon, 2018).

Pada tataran kebijakan, untuk mendukung implementasi geowisata pemerintah telah mengundang sejumlah regulasi, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan geopark sebagai destinasi pariwisata prioritas di dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (RPJMN 2020-2024), dimana ditargetkan terdapat 16 geopark yang akan dikembangkan. Selain untuk mendorong peningkatan dan pertumbuhan, rencana pengembangan ini juga bertujuan untuk mengimplementasikan prinsip pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup yang mana menjadi salah satu pengarusutamaan pembangunan nasional.

Selain dituangkan di dalam RPJMN 2020-2024, pengembangan geopark sebagai destinasi pariwisata juga telah diatur di dalam sejumlah regulasi, yaitu: Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark), dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pengembangan Taman Bumi (Geopark) Indonesia Tahun 2021-2025. Dalam sejumlah regulasi tersebut dijabarkan bahwa paradigma pengelolaan dalam kerangka peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan berbasis keterlibatan dan sinergi para pemangku kepentingan.

Salah satu perspektif dalam penyusunan, implementasi, dan pengelolaan kebijakan, khususnya yang berkaitan erat dengan keterlibatan/partisipasi pemangku kepentingan adalah *collaborative governance* (Johnston et al., 2011). Menurut (Emerson et al., 2012), *collaborative governance* adalah proses dan pengambilan keputusan dan pengelolaan kebijakan yang melibatkan multi-pihak secara konstruktif, baik pada ranah pemerintahan dan/atau publik, swasta, maupun masyarakat yang bersendikan pada beberapa faktor, yaitu keterlibatan aktif, motivasi bersama, dan kemampuan untuk mengimplementasikan tindakan kolektif yang dapat menstimulus

perspektif bersama mengenai arah strategis yang diperlukan.

Pada perspektif ini, dimana partisipasi aktif para pemangku kepentingan dibutuhkan, terdapat beberapa elemen indikator yang menentukan berjalan atau tidaknya suatu proses kolaborasi, antara lain: tingkat keterlibatan (*breadth of involvement*), yaitu daya jangkauan pemangku kepentingan dalam proses; komunikasi dan kolaborasi: cara, arah, dan intensitas arus informasi (misalnya, penyediaan informasi yang bersifat dua arah); dan pendelegasian peran dan kewenangan kepada pemangku kepentingan, misalnya sejauh mana mereka diberikan peran dalam pengambilan keputusan atau penyusunan suatu kebijakan (Newig et al., 2017).

Pada umumnya, penggunaan perspektif ini dipergunakan untuk mengkaji topik-topik studi mengenai kolaborasi lintas sektor yang berkaitan dengan usaha mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*sustainable development goals/SDGs*), seperti pengentasan kemiskinan, dan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup (Florini & Pauli, 2018). Pada konteks pelestarian/geokonservasi, implementasi konsep *collaborative governance* dibutuhkan karena dapat mengakselerasi keterlibatan para pemangku kepentingan dalam mewujudkan tujuan, dan meminimalisasi hambatan-hambatan yang bersumber dari perbedaan perspektif dan kepentingan diantara para pihak (Crofts et al., 2020).

Berdasarkan penelusuran penulis terdapat beberapa studi yang berkaitan dengan topik geowisata dan warisan geologi, antara lain kajian dan assesmen potensi wilayah untuk pengembangan taman bumi dan geowisata (Ansori et al., 2022; Ginting et al., 2017; Ginting & Siregar, 2018; Marlina, 2016; Nur et al., 2021; Osronita et al., 2019; Permadi et al., 2014; Rekinagara et al., 2018; Suyanto et al., 2020; Wirakusumah et al., 2019; Wulung & Brahmantyo, 2019; Wulung et al., 2020; Yuliawati et al., 2016), kerangka regulasi dan perlindungan hukum bagi pengembangan geowisata, taman bumi, dan warisan geologi (Siregar et al., 2019, 2020), dampak pandemi Covid-19 terhadap industri geowisata di Indonesia (Cahyadi & Newsome, 2021). Meskipun demikian, belum terdapat studi yang mengkaji secara khusus pengelolaan geowisata berkelanjutan dalam rangka pelestarian warisan geologi di Indonesia yang ditinjau dari perspektif *collaborative governance*.

Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami urgensi pengelolaan geowisata berkelanjutan dalam mendukung pelestarian warisan geologi, serta peran dan

relasi antar para pemangku kepentingan dalam pengelolaan geowisata berkelanjutan dalam mendukung pelestarian warisan geologi berdasarkan perspektif *collaborative governance*. Setelah mendapatkan temuan studi atas kedua hal tersebut, kemudian disusun strategi pengelolaan geowisata berkelanjutan dalam mendukung pelestarian warisan geologi berbasis kolaborasi antar para pemangku kepentingan.

METODE

Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis (Bryman & Burgess, 2002). Tujuan penggunaan metode ini adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data secara sistematis dan mendalam, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti berkaitan dengan tujuan studi ini, yaitu mengetahui dan memahami urgensi pengelolaan geowisata berkelanjutan dalam mendukung pelestarian warisan geologi, serta peran dan relasi antar para pemangku kepentingan dalam pengelolaan geowisata berkelanjutan dalam mendukung pelestarian warisan geologi berdasarkan perspektif *collaborative governance*.

Jenis data yang dipergunakan merupakan data sekunder. Data diperoleh melalui penelusuran literatur yang relevan dan berkaitan berupa buku-buku, jurnal ilmiah, dokumen laporan, artikel, dan peraturan perundang-undangan. Kemudian data-data yang diperoleh dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif analitis, dan disintesis untuk mendapatkan temuan studi, serta memberikan rekomendasi lebih lanjut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi pengelolaan geowisata berkelanjutan dalam mendukung pelestarian warisan geologi.

Beberapa hasil studi menunjukkan bahwa *geoheritage*, berfokus pada unsur geologi dan geomorfologi, secara global, sekarang penting untuk alasan budaya lokal, pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan lahan, penelitian, pendidikan, dan pariwisata (Brocx, 2007). *Geoheritage* terdiri dari semua fitur Bumi yang signifikan dan proses berkelanjutan yang ingin kita pertahankan, lestarian, kelola, dan tafsirkan untuk nilai warisan alam mereka (Osborne, 2000).

Selain itu, karakter khas *geoheritage* berkaitan dengan situs lokasi mineral atau fosil, bagian tipe, lokasi klasik yang menggambarkan sejarah Bumi, dan lokasi di mana proses Bumi beroperasi saat ini, dan secara lokal dengan penekanan khusus pada situs klasik di mana beberapa prinsip geologi pertama kali dikristalisasi (Brocx & Semeniuk, 2007). Menurut (Ruban DA, 2010), terdapat beberapa tipe warisan geologi yaitu Paleontologi (Fosil), Stratigrafi (Hubungan antar unit batuan dalam ruang), Minerologi (Mineral dan Asosiasi mineral), Struktur (Lipatan, patahan, dan ketidakselarasan), Sedimentologi (akumulasi sedimen dan litifikasi), Geomorfologi (Bentang alam dan Prosesnya), Paleogeografi (Paleoenvironment dan fitur gearkeologi), Geotermal (mata air panas dan geysir), Batuan Beku (Magmatisma dan vulkanisma), Geohistori (Sejarah Geologi), Sumber Daya ekonomi (Bijih, hidrokarbon, dan sumber daya lainnya), Geokimia (Unsur kimia dan perubahannya), dan kosmogenik (Pengaruh luar angkasa di Bumi (Meteor). Beberapa fenomena geologi yang cocok dikelola sebagai daya tarik wisata diantaranya (Dowling, 2011) disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Fenomena Geologi sebagai Daya Tarik Wisata

No.	Fenomena Geologi	Deskripsi
1.	Struktur geologi	bangunan alam nonhayati baik di bawah maupun di atas permukaan bumi, dibangun oleh tenaga yang bekerja di dalam dan di atas permukaan bumi. Tenaga yang berkerja di bawah permukaan bumi disebut tenaga endogen, sedang yang bekerja diatas permukaan bumi disebut tenaga eksogen.
2.	Stratigrafi	lapisan batuan degan segala macam jenis batuan, struktur, sifat dan gejala yang ditimbulkan berdasarkan gambaran perlapisannya. Stratigrafi terkadang menjadi fenomena geologi yang sangat menarik dan unik.
3.	Topografi	bentukan dari bentang alam. Secara ilmu geologi, topografi dibentuk oleh tenaga endogen dan eksogen dan oleh karena itu topografi selalu berubah
4.	Minerologi	Kandungan mineral di dalam perut bumi juga mampu menjadi daya tarik geowisata yang bernilai edukatif dan sangat menarik untuk dipelajari, baik namanya, sejarah dan proses terbentuknya, sifat dan unsur-unsur kimianya, beserta kegunaanya dalam kehidupan manusia sehari-hari.

Sumber: (Dowling, 2011)



Gambar 1. Konseptualisasi sifat dan ruang lingkup *geotourism*
 Sumber: (Dowling, R.K. & Newsome, 2006)

Geoheritage perlu dilindungi dan diwariskan ke generasi berikutnya, serta keberadaannya dengan titik-titik minat geologi, biologi dan budaya, serta kumpulannya dengan dilengkapi data destinasi yang jelas, yang menjadi obyek dan daya tarik kunjungan wisata diatur dalam peraturan pemerintah (daerah dan nasional), keberadaannya harus dilestarikan (Mulyaningsih et al., 2021). Upaya pelestarian dengan memanfaatkan komponen *geodiversity* dan nilai warisan geologi dengan konsep wisata berbasis geologi disebut geowisata (Permana, 2020).

Geowisata adalah pariwisata berkelanjutan dengan fokus utama pada pengalaman fitur geologi bumi dengan cara yang menumbuhkan pemahaman lingkungan dan budaya, apresiasi dan konservasi, dan bermanfaat secara lokal (Dowling, R.K. & Newsome, 2006) (Gambar 1). Dengan demikian, geowisata adalah pariwisata berkelanjutan dengan fokus utama pada pengalaman fitur geologi bumi dengan cara yang menumbuhkan pemahaman lingkungan dan budaya, apresiasi dan konservasi, dan bermanfaat secara lokal.

Hal ini terkait menciptakan produk geowisata yang melindungi geoheritage, membantu membangun komunitas, berkomunikasi dan mempromosikan warisan geologi dan bekerja dengan berbagai orang yang berbeda. Secara keseluruhan, geowisata terdiri dari unsur geologis 'bentuk dan proses' yang dikombinasikan dengan komponen pariwisata seperti atraksi, akomodasi, wisata, kegiatan,

interpretasi dan perencanaan & manajemen (Dowling, 2014).

Pada perkembangannya, atraksi geowisata sedang dikembangkan di seluruh dunia, terutama sebagai instrumen pendukung pembangunan berkelanjutan dalam konteks pemberdayaan dan pengembangan potensi masyarakat lokal dan regional. Wahana pengembangan semacam itu adalah melalui 'geopark' UNESCO. Geopark adalah area terpadu dengan warisan geologis yang penting secara internasional dan warisan itu digunakan untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan ikatan komunike lokal yang tinggal di sana (Dowling, 2014).

Geowisata dapat lebih lanjut digambarkan sebagai memiliki sejumlah karakteristik penting. Elemen-elemen ini bergabung untuk membentuk geowisata dalam bentuknya yang sekarang. Ini terdiri dari sejumlah komponen yang saling terkait yang semuanya harus ada agar geowisata otentik terjadi. Ada lima prinsip utama yang mendasar bagi geotourism (Dowling, 2009), yaitu: a) geowisata berbasis geologis (yaitu, berdasarkan geoheritage bumi); b) berkelanjutan (yaitu: layak secara ekonomi, meningkatkan masyarakat dan mendorong geokonservasi); c) edukatif (dicapai melalui geo-interpretasi); d) menguntungkan secara lokal; dan, e) menghasilkan kepuasan wisatawan seperti disajikan pada Tabel 2. Tiga karakteristik pertama dianggap penting bagi suatu produk untuk dianggap 'geowisata' sementara dua karakteristik terakhir dipandang diinginkan untuk semua bentuk pariwisata.

Tabel 2. Prinsip-Prinsip yang membentuk Geowisata

No.	Prinsip-Prinsip	Deskripsi
1.	<i>Berbasis Geologis</i>	Geowisata didasarkan pada warisan bumi dengan fokus pada bentuk geologis (fitur) dan / atau proses. Tidak seperti ekowisata yang terjadi di, dan tergantung pada, pengaturan alami, geowisata dapat terjadi baik dalam pengaturan alami atau perkotaan. Fokus pada bumi dan fitur geologisnya (pada berbagai skala dari singkapan batuan hingga seluruh pemandangan lanskap), sangat penting untuk perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan geotourism.
2.	<i>Berkelanjutan</i>	Geotourism mendorong kelangsungan ekonomi, peningkatan masyarakat dan geokonservasi. Tantangan terhadap geowisata di wilayah atau negara mana pun adalah mengembangkan kapasitas pariwisata dan kualitas produknya tanpa mempengaruhi geolingkungan yang memelihara dan memeliharanya. Ini melibatkan memastikan bahwa jenis, lokasi dan tingkat penggunaan geotourism tidak menyebabkan kerusakan pada fitur geologi atau daerah sekitarnya, terutama dalam pengaturan alami.
3.	<i>Informatif</i>	Pendidikan bumi dan geo-interpretasi adalah alat penting dalam menciptakan pengalaman geowisata yang menyenangkan dan bermakna. Geowisata menarik orang-orang yang ingin berinteraksi dengan lingkungan bumi untuk mengembangkan pengetahuan, kesadaran, dan apresiasi mereka terhadapnya. Dengan perluasan, geowisata idealnya harus mengarah pada tindakan positif bagi bumi dengan mendorong peningkatan kesadaran konservasi.
4.	<i>Bermanfaat bagi masyarakat lokal</i>	Keterlibatan masyarakat lokal tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan tetapi juga meningkatkan kualitas pengalaman wisata. Masyarakat lokal dapat terlibat dalam operasi geowisata, dan dalam penyediaan pengetahuan, layanan, fasilitas dan produk. Geotourism juga dapat menghasilkan pendapatan untuk pengelolaan konservasi sumber daya selain manfaat sosial dan budaya. Kontribusi mungkin finansial dengan bagian dari biaya tur yang membantu mensubsidi proyek geokonservasi. Atau itu bisa terdiri dari bantuan praktis di lapangan dengan wisatawan yang terlibat dalam pengumpulan data geologi dan / atau analisis.
5.	<i>Berorientasi kepuasan wisatawan</i>	Kepuasan pengunjung dengan pengalaman geowisata sangat penting untuk kelangsungan hidup jangka panjang industri geowisata. Termasuk dalam konsep ini adalah pentingnya keselamatan pengunjung dalam hal kunjungan situs. Informasi yang diberikan tentang peluang geowisata harus secara akurat mewakili peluang yang ditawarkan di tujuan geowisata tertentu. Pengalaman geowisata harus sesuai atau melebihi harapan realistis pengunjung. Layanan dan kepuasan klien harus menjadi yang kedua setelah konservasi dan perlindungan dari apa yang mereka kunjungi.

Sumber: (Dowling, 2009)

Geoheritage dan *culture-heritage* di area destinasi dapat menjadi obyek yang sangat menarik untuk tujuan pariwisata, jika dimanfaatkan secara arif dan dijaga keberlanjutannya (Mulyaningsih et al., 2021). Dalam konteks pengembangan geotourism, (Schutte, 2009) mengungkapkan 5C yakni *Creating authentic geotourism product, Conserving geoheritage, Community Building, Communicating geo heritage, and Cooperation with a range of stakeholders. Geotourism*

menempatkan fokus utama pada menginformasikan wisatawan dan masyarakat lokal tentang bumi melalui interpretasi geologi dan pendidikan. Bisnis geowisata biasanya dioperasikan oleh masyarakat lokal dan mungkin termasuk interpretasi, tur, akomodasi, dan gerai makanan. Ini pada gilirannya menghasilkan bisnis bagi penduduk setempat, menciptakan tenaga kerja dan bantuan ekonomi yang lebih besar.

Tabel 3. Warisan Geologi Indonesia per Wilayah (Data s.d. 2018)

No.	Wilayah	Geoheritage	Dokumentasi	
1.	Sumatera	1) Tsunami Aceh Besar, NAD 2) Tektono D. Lut Tawar, NAD 3) Kaldera Danau Toba, Sumut 4) Lembah Harau, Sumbar 5) Volcano Danau Maninjau 6) Tektono Danau Singkarak 7) Bekas Tambang Sawahlunto 8) Tekto-Volcano Kerinci. 9) Fossil Flora Merangin, Jambi 10) Vulkano D. Ranau, Sumsel 11) Vulkano Krakatau, Lampung 12) Granit Belitung	 Danau Lut Tawar.	 Fossil Flora Marangin
2.	Jawa	1) Bayah Dome, Banten 2) Melange Ciletuh, Jabar 3) Vulkano aktif Priangan 4) Kars Cukangtaneuh, Pangandaran 5) Dataran Tinggi Dieng, Jateng 6) Batuan Tua Karangsembung 7) Vulkano Merapi, Jateng 8) Karst Pegunungan Sewu 9) Lumpur Sidoarjo, Jatim 10) Komplek Vulkano Bromo, Jatim	 Kars Cukangtaneuh	 Batuan Karangsembung
			 Dat. Tinggi Dieng.	 Komp. Vulkano Bromo
3.	Bali - Nusa Tenggara	1) Kaldera Batur, Bali 2) Kaldera Rinjani, Lombok 3) Old Sub-Marine Volcano, Lombok 4) Kaldera Tambora, Sumbawa 5) Kaldera Purba Sanonggoang, NTT 6) Vulkano Kalimutu, Flores, NTT	 Kaldera Batur	 Kaldera Tambora
4.	Kalimantan	1) Rawa Danau Sentarum, Kalbar 2) Karst Sangkulirang-Mangkaliat 3) Delta Mahakam, Kaltim	 Rawa Sentarum	 Karst Sangkulirang
5.	Sulawesi	1) Kars Maros-Pangkep, SulSel 2) Tektonik Danau Metano, Sulsel 3) Kaldera Danau Tondano, Sulut	 Kars Maros-Pangkep	 Kaldera Tondano
6.	Maluku - Papua	1) Karst Rajaampat, Papua 2) Pra-Tersier Lorentz, Papua	 Karst Rajaampat.	 Pra-Tersier Lorentz

Sumber: Diolah dan dimodifikasi (Oktariadi, 2018)

Tujuan pengembangan geowisata berkelanjutan adalah (Dowling, 2009): 1) Untuk mengembangkan kesadaran dan pemahaman yang lebih besar tentang kontribusi signifikan yang dapat dilakukan geowisata terhadap lingkungan, masyarakat lokal, dan ekonomi; 2) Untuk mempromosikan ekuitas dalam pengembangan geografis; 3) Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat tuan rumah; 4) Untuk memberikan kualitas pengalaman geologis yang tinggi bagi pengunjung; dan, 5) Untuk menjaga kualitas geoheritage di mana tujuan di atas tergantung.

Negara Indonesia yang secara tatanan tektonik berada diantara pertemuan tiga lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia dan Lempeng Pasific, diperkirakan merupakan *Hot Spot Geodiversity* sehingga memiliki keanekaragaman geologi yang unik, seperti bentang alam, batuan dan fosil, struktur geologi serta proses pembentukan dan keterdapatannya (Permana, 2020). Situs warisan geologi di Indonesia didominasi oleh bentang alam vulkanik dan bentang alam karst. Bentang alam vulkanik sangat dipengaruhi proses tektonik modern sedangkan bentang alam karst sangat dipengaruhi oleh proses evolusi geologi serta proses pelapukan dan erosi.

Keragaman dan keunikan geologi memberikan nilai tersendiri sebagai potensi warisan geologi yang sangat besar dan menjadi fondasi dasar dalam pengembangan geopark dan Geotourism yang berkelanjutan di Indonesia. Pengelolaan dan pemanfaatan warisan geologi (Geowisata atau Geokonservasi) dalam Kawasan Geopark dapat meningkatkan pendapatan negara dari sektor pariwisata dengan pembangunan ekonomi dan budaya lokal, serta keserasian penataan ruang dalam upaya terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Tabel 3 menyajikan data warisan geologi Indonesia pada masing-masing wilayah di Indonesia.

Berdasarkan data geoheritage tersebut, Karst Rajaampat memiliki cita rasa pariwisata yang sangat menarik dalam pengembangan sustainable geotourism. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya para wisatawan nasional maupun mancanegara yang sering berkunjung ke Rajaampat. Akan tetapi, hal ini masih dianggap minim oleh para pemangku kebijakan pemerintah, karena akses dan akomodasi yang menuju ke Rajaampat masih tergolong mahal bagi para wisatawan. Data kunjungan wisatawan ke Rajaampat dari tahun 2014 – 2019 mencapai 193.176 wisatawan, dengan rata-rata kunjungan per tahun adalah sebesar 32.196 wisatawan (Badan Pusat Statistik, 2021c).

Peran pemerintah dalam hal ini sangatlah dibutuhkan untuk dapat mendongkrak geowisata berbasis warisan geologi nusantara agar menjadi daya tarik wisatawan untuk dapat mengunjungi masing-masing geoheritage. Arti penting Warisan Geologi (*Geoheritage*) kian disadari oleh warga dunia, karena warisan ini lambat laun akan habis, bila masyarakat dunia memilih Eksploitasi sebagai jalan satu-satunya untuk meraih Kesejahteraan Ekonomi. Perlindungan terhadap Warisan Geologi menjadi penting dan telah di akomodasi dalam undang-undang Penataan Ruang serta dalam peraturan perundangan turunannya.

Hal ini dilakukan untuk melestarikan peninggalan geologi untuk generasi saat ini dan masa depan, mendidik dan mengajar masyarakat luas mengenai isu-isu dalam ilmu geologi dan kaitannya dengan permasalahan lingkungan, memastikan pembangunan sosio-ekonomi dan budaya yang berkelanjutan, serta membangun jembatan multi-budaya untuk warisan dan konservasi dan pemeliharaan perbedaan budaya dan geologi, menggunakan skema partisipasi dan *co-partnership*. Peran pengembangan geowisata ini cukup penting dalam pembangunan berkelanjutan. Kontribusi geowisata dalam *SDGs* sebagaimana disampaikan oleh Pardede (2021), seperti disajikan pada tabel 4.

Peran dan relasi antar para pemangku kepentingan dalam pengelolaan geowisata berkelanjutan berdasarkan perspektif collaborative governance. Arah pengembangan dan pemanfaatan situs warisan geologi merupakan pengembangan kawasan yang berkelanjutan dengan lingkup konservasi geologi; objek penelitian, pendidikan kebumih, geowisata; serta sebagai acuan dalam penyusunan tata ruang wilayah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota. Pemanfaatan situs warisan geologi harus memperhatikan aspek perlindungan dan pelestarian situs warisan geologi. Para Pemangku Kepentingan (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat) berperan menjaga situs warisan geologi yang sudah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembagian peran tersebut dilakukan dalam rangka mengupayakan integrasi substansi (hulu-hilir/holistik); integrasi spasial (keterkaitan kegiatan dalam suatu lokasi); pembagian kewenangan (kerangka regulasi) dan pembagian sumber pendanaan (kerangka pendanaan). Sinergi antar program dan Kolaborasi antar pelaku (Indrayati & Lestari, 2021).

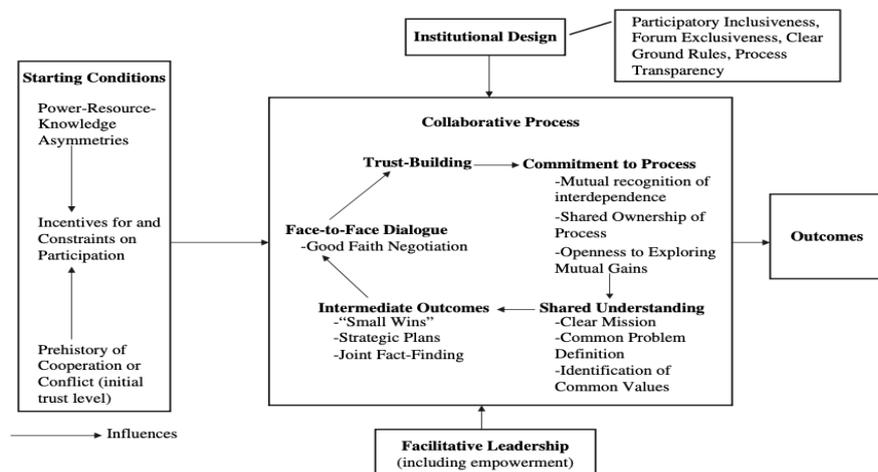
Tabel 4. Kontribusi Geowisata dalam Pengembangan SDGs

No.	Sustainable Development Goals	Target	Deskripsi
1.	SDGs 1. Mengurangi Kemiskinan	Target 1.5	Membangun ketahanan masyarakat terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.
2.	SDGs 4. Pendidikan berkualitas	Target 4.7	Mendidik masyarakat lokal dan pengunjung untuk menerapkan pengetahuan pembangunan dan gaya hidup berkelanjutan, menghargai keragaman dan perdamaian
3.	SDGs 5. Kesetaraan Gender	Target 5.5	Menjamin partisipasi penuh dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mengambil keputusan dalam kehidupan masyarakat, konervasi dan pembangunan
4.	SDGs 8. Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi	Target 8.9	Meningkatkan ekonomi local berkelanjutan melalui pembangunan pariwisata geotourism yang menciptakan lapangan kerja sekaligus mempromosikan budaya dan produk lokal
5.	SDGs 11. Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan	Target 11.4	Melindungi warisan budaya dan warisan alam serta membuat masyarakat bangga pada wilayahnya
6.	SDGs 12. Konsumsi & Produksi yang Bertanggungjawab	Target 12.8 & 12.8b	Mendidik dan meningkatkan kesadaran pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras
7.	SDGs 13. Penanganan Perubahan Iklim	Target 13.3	Meningkatkan kualitas Pendidikan, kesadaran, kapasitas mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim
8.	SDGs 14. Ekosistem Lautan	Target 14.2 & 14.7	Mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir, meningkatkan keuntungan ekonomi dari sumber daya kelautan
9.	SDGs 15. Ekosistem Daratan	Target 15,1; 15.4, & 15.9	Menjamin pelestarian ekosistem daratan dan pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan
10.	SDGs 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan	Target 17.6; 17.9; & 17.16	Meningkatkan kerjasama jaringan para pemangku kepentingan lokal, regional dan internasional dalam berbagai ilmu pengetahuan dan ide best practices

Sumber: Dimodifikasi dari (Pardede, 2021)

Proses kolaboratif dapat dimaknai sebagai sebuah siklus atau proses berulang. Siklus ini penting di semua tahapan kolaborasi dan merupakan inti pelaksanaan kolaborasi. Proses kolaboratif mencakup pengaturan masalah, proses negosiasi untuk mengatasi masalah yang

ada, sampai kepada implementasinya (Aristy et al., 2021). Model kolaborasi terkait *Collaborative Governance* pada Pengembangan Geowisata Keberlanjutan ini menyesuaikan dengan model yang dikembangkan oleh (Ansell & Gash, 2008) (Gambar 2).



Gambar 2. Model *Collaborative Governance*
 Sumber: (Ansell & Gash, 2008)

Model ini memiliki empat variabel yang luas, yakni kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan, dan proses kolaboratif. Masing-masing variabel yang luas ini dapat dipilah menjadi variabel yang lebih halus. Variabel proses kolaboratif diperlakukan sebagai inti dari model kami, dengan kondisi awal, desain kelembagaan, dan variabel kepemimpinan yang direpresentasikan sebagai kontribusi kritis atau konteks untuk proses kolaboratif.

Kondisi awal menetapkan tingkat dasar kepercayaan, konflik, dan modal sosial yang menjadi sumber daya atau kewajiban selama kolaborasi. Desain institusional menetapkan aturan dasar di mana kolaborasi terjadi. Dan, kepemimpinan memberikan mediasi dan fasilitasi penting untuk proses kolaboratif. Proses kolaboratif itu sendiri sangat berulang dan nonlinier, dan dengan demikian, hadir (dengan penyederhanaan yang cukup besar) sebagai siklus.

Kondisi yang hadir pada awal kolaborasi dapat memfasilitasi atau mencegah kerja sama antara para pemangku kepentingan dan antara lembaga dan pemangku kepentingan. Di sisi lain, para pemangku kepentingan memiliki visi bersama untuk apa yang ingin dicapai melalui kolaborasi dan sejarah kerja sama masa lalu dan saling menghormati. Terdapat tiga variabel dalam Kondisi awal ini, yaitu ketidakseimbangan antara sumber daya atau kekuatan pemangku kepentingan yang berbeda, insentif yang harus berkolaborasi oleh para pemangku kepentingan, dan sejarah konflik atau kerja sama di masa lalu di antara para pemangku kepentingan.

Desain kelembagaan pada proses ini mengacu pada protokol dasar dan aturan dasar untuk kolaborasi, yang sangat penting untuk legitimasi prosedural dari proses kolaboratif. Akses ke proses kolaboratif itu sendiri mungkin adalah masalah desain yang paling mendasar. Tata kelola kolaboratif menekankan ukuran bahwa prosesnya harus terbuka dan inklusif, karena hanya kelompok yang merasa mereka memiliki kesempatan yang sah untuk berpartisipasi cenderung mengembangkan komitmen terhadap proses tersebut.

Kondisi pertama dari kolaborasi yang sukses adalah bahwa hal itu harus secara luas mencakup semua pemangku kepentingan yang terkena dampak atau peduli dengan masalah ini. Kolaborasi yang sukses tergantung pada memasukkan spektrum pemangku kepentingan yang cukup luas untuk mencerminkan masalah ini. Model proses tata kelola kolaboratif menggambarkan kolaborasi sebagai berkembang secara bertahap. Proses kolaboratif sulit untuk diwakili dan diduga hal ini justru karena karakter interaksi nonlinier.

Representasi dari proses kolaborasi sebagai siklus jelas merupakan penyederhanaan yang hebat. Namun hal itu menarik perhatian pada cara umpan balik dari kolaborasi awal dapat secara positif atau negatif mempengaruhi kolaborasi lebih lanjut. Bahkan sulit untuk mengetahui di mana harus memulai deskripsi proses kolaboratif. Namun, karena komunikasi adalah jantung kolaborasi, dapat mulai dengan dialog tatap muka.

Dua strategi yang mungkin untuk mensukseskan kolaborasi dapat dilakukan, yaitu: Pertama, survei terhadap pemangku kepentingan individu dapat digunakan untuk mengoperasionalkan variabel perilaku utama, seperti "komitmen terhadap proses." Kedua, penelitian mungkin dirancang untuk mengambil keuntungan dari "eksperimen alami" dalam kolaborasi: situasi di mana ada beberapa kasus kolaborasi independen yang beroperasi di bawah naungan program peraturan serupa, lembaga publik, atau hukum.

Guna mendukung model *collaborative governance* (Ansell & Gash, 2008) perlu disusun peran dan relasi antar para pemangku kepentingan dalam pengelolaan geowisata berkelanjutan di Indonesia. Hal ini untuk menunjukkan proses kolaborasi dapat berjalan lancar dan saling menjaga komitmen secara bersama. Perkembangan mutakhir menunjukkan bahwa kolaborasi menjadi bagian yang sangat penting, khususnya dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama antar para pemangku kepentingan, sehingga memiliki rasa tanggung jawab (*sense of responsibility*) dalam kelangsungan pembangunan wilayah (Bakti et al., 2018).

Melalui paradigma pembangunan inklusif, dapat mendorong tercapainya bentuk-bentuk kerjasama dalam proses pembangunan melalui upaya pelibatan masyarakat seutuhnya. Skema pembangunan inklusif dalam pengembangan Geowisata sebagaimana gambar 3 di bawah disebutkan terdapat 4 skema, yaitu *BioGeo Cultural Diversity*, Informasi Pembelajaran, Peningkatan ekonomi, dan Tata Kelola Infrastruktur & Pembiayaan. Hal ini dapat terlihat dalam *stakeholder-issue interrelationship* yang disajikan pada Gambar 3.

Pengelolaan di Indonesia memerlukan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kapabilitas dan akseptabilitas terhadap sumber daya alam dan budaya di wilayah tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan pengelolaan wisata alam, *tour guide*, dan pelatihan kewirausahaan agar mereka mampu mengelola kawasan *geopark*, dan akhirnya mereka mampu meningkatkan kondisi ekonomi keluarga dan

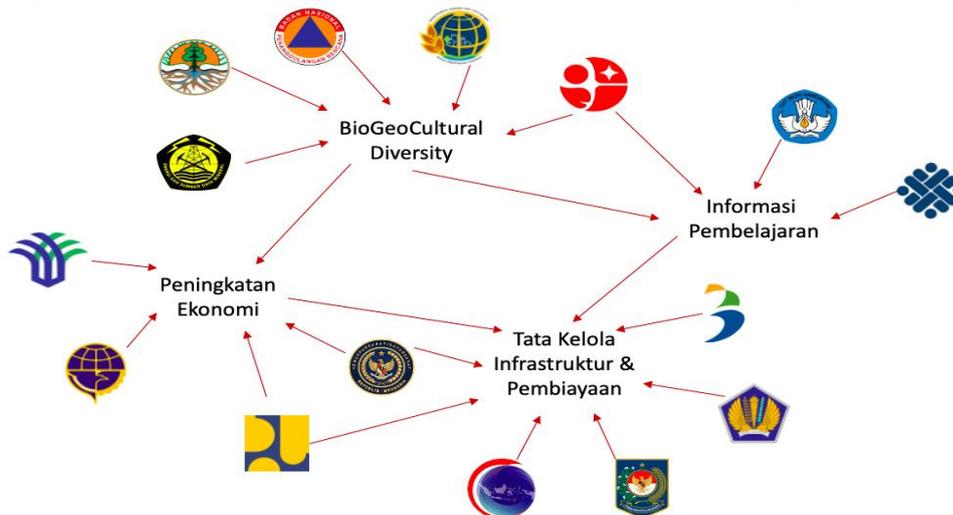
meningkatkan sumber pendapatan daerah (Indrayati & Lestari, 2021). Salah satu contoh pengembangan ekonomi dalam pengembangan *Geopark* adalah geowisata.

Geowisata menjadi pendekatan yang komprehensif dalam menjamin keberlanjutan, bukan hanya fokus pada konservasi lingkungan tapi juga pemberdayaan masyarakat dan pembangunan ekonomi wilayah. Tentunya pengelolaan yang profesional perlu ditunjang oleh sistem kelembagaan yang jelas. Pengelolaan yang profesional dan bertanggung jawab untuk mengelola keuangan dan pendapatan, manajemen fasilitas, menyelesaikan masalah teknis, mengurus sistem manajemen harian, regulasi kolaborasi aktor seperti bisnis lokal, akademisi, pengusaha, pemerintah daerah, badan pariwisata dan masyarakat setempat (Rosyidie et al., 2018).

Menurut (Pardede, 2021), Peran dan relasi antar para pemangku kepentingan dalam pengelolaan geowisata berkelanjutan dalam

konteks Pilar utama Rencana aksi Pengembangan *Geopark*, dibagi ke dalam 4 Pilar utama, yaitu Pilar Konservasi, Pilar Edukasi, Pilar Ekonomi, dan Pilar Dukungan Pelaksanaan (Gambar 4).

Kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu kunci dalam pengembangan Geowisata berkelanjutan, karena melalui kolaborasi dengan berbagi stakeholders maka pembagian peran dapat dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, pelibatan masyarakat lokal dalam pengembangan geowisata ini juga merupakan faktor kunci dalam pengelolaan pengetahuan dan pelestarian geoheritage sebagai tempat wisata baru. Pengembangan pariwisata termasuk dalam ilmu interdisipliner, maka kolaborasi dan aktivitas jaringan antar spesialis dalam ilmu terkait seperti geologi, geografi, ekologi, pariwisata, biologi, pertanian, lingkungan dapat menjadi instrumen yang bermanfaat bagi perkembangan pariwisata di masa kini dan masa depan (Farsani et al., 2014).



Gambar 3. Peran dan Relasi Pengembangan Geowisata
 Sumber: Hasil Penelitian (2022)

Pilar Konservasi	Pilar Edukasi	Pilar Ekonomi	Pilar Dukungan Pelaksanaan
Kernen. ESDM, Kernen. LHK, BNPB, BRIN, BPN	BRIN, Kernen. P&K, Kernenaker	Kernen. Parekraf, Kernen. PUPR, Kernen. Perhubungan, Kernen. Investasi	Kernen. Kord. Marvest, Kernen. Kemendagri, Kernen. Kemenkeu, Bappenas
<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan keanekaragaman atas warisan geologi, keragaman budaya, dan keanekaragaman hayati beserta sistem penyangga kehidupan 2. Penyelamatan dan pengawetan keanekaragaman atas warisan geologi keragaman budaya, dan keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya 3. Pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman atas atas warisan geologi keragaman budaya, dan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Penelitian dan Publikasi untuk mendukung pengembangan Geopark 2. Peningkatan Pendidikan dan penyebaran informasi untuk meningkatkan kesadaran dalam mendukung pengembangan Geopark 3. Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam pengembangan dan pengelolaan Geopark 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan ekonomi komunitas dan wilayah yang berkelanjutan 2. Pengembangan pariwisata berkelanjutan dan ekonomi kreatif 3. Pengembangan infrastruktur Kawasan Geopark dan Kawasan sekitar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan pembiayaan berkelanjutan dalam pengembangan Geopark 2. Pengembangan tata Kelola percepatan pengembangan Geopark 3. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pengembangan Geopark

Gambar 4. Peran dan Relasi Antar Pemangku Kepentingan Dalam Pengembangan Geowisata
 Sumber: Dimodifikasi dari (Pardede, 2021)

Strategi pengelolaan geowisata berkelanjutan dalam mendukung pelestarian warisan geologi berbasis kolaborasi antar para pemangku kepentingan. Geowisata merupakan bentuk pariwisata minat khusus yang fokus utamanya pada kenampakan geologis permukaan bumi maupun yang terkandung di dalamnya dalam mendorong pemahaman akan lingkungan hidup, alam dan budaya, lebih lanjut sebagai bentuk apresiasi, dan kegiatan konservasi, serta memiliki kepedulian terhadap kelestarian kearifan lokal (Kandouw, 2021).

Melalui paradigma pembangunan ekonomi inklusif, pengembangan pariwisata dalam pelestarian warisan geologi membutuhkan upaya pelibatan masyarakat sekitarnya berbasis *Community Economic Development* (CED) yang dapat menawarkan peran masyarakat lokal melalui alternatif kegiatan ekonomi dan pembangunan sehingga masyarakat memiliki kendali terhadap pengembangan sosial dan ekonomi di lokasi tersebut. Selain itu, konsep pengembangan lainnya dapat berbasis *Community Based Tourism* (CBT) dimana masyarakat lokal memiliki, mengelola dan mengendalikan secara substansial kegiatan pariwisata dan proporsi keuntungan yang besar tetap ada di masyarakat (Hindersah et al., 2017).

Dengan membangun kapasitas masyarakat berbasis CBT tersebut, kemampuan masyarakat untuk memiliki, mengelola obyek wisata dapat meningkat dan secara substansial mampu mengendalikan kegiatan pariwisata untuk peningkatan ekonomi sekitar. Maka pengembangan geowisata yang inklusif akan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat yang secara tidak langsung akan mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan ekonomi atau derajat kehidupan masyarakat sekitar. Pengembangan *Geotourism* berbasis warisan geologi bertumpu pada tiga pilar secara multi-perspektif yaitu ekonomi, konservasi, dan edukasi.

Selain itu, pengembangan geowisata juga perlu memperhatikan tren pariwisata dunia dan arahan kebijakan pemerintah, diantaranya (Indrayati & Lestari, 2021): 1) *Evolving visitor demand*: Paska Pandemi, terjadi permintaan akan pariwisata baru yang mengedepankan protokol kebersihan dan keselamatan yang tinggi; 2) *Sustainable tourism growth*: Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan memainkan peran kunci mendorong transisi ekonomi rendah karbon dan hemat sumber daya; 3) *Enabling technologies*: Perkembangan ekonomi digital untuk membuat perjalanan lebih terjangkau, efisien dan terakses oleh banyak orang; dan, 4) *Travel mobility*: Health and Safety Mobilitas aman dan kebutuhan paska new

normal perjalanan dengan kendaraan pribadi atau kebutuhan akan *direct flight* atau *short gateway*.

Guna mengembangkan pariwisata berbasis *Geoheritage* ini perlu diperhatikan pola pengelolaan geowisata sebagaimana yang diungkapkan oleh Paskova & Josef, 2018, yaitu: a) Dalam pengelolaan wisata di Geopark, perlu memperkuat urgensi konservasi lingkungan dan kekayaan rupabumi yang dimiliki; b) Perkembangan Geowisata yang pesat perlu menyiapkan fasilitas sesuai kapasitas daya dukung dan daya tampung kawasan tersebut; c) Menjamin keberlanjutan melalui antisipasi dampak negatif dengan perencanaan dan strategi yang matang; d) Pemberdayaan masyarakat lokal perlu dilakukan secara kontinyu dan intensif dalam menunjang kegiatan wisata tersebut; e) Bernilai edukasi dan meningkatkan kepuasan pengunjung/turis; dan, f) Menyiapkan pengelolaan yang profesional.

Penguatan dalam pengelolaan *Geotourism* ini harus didasarkan sesuai dengan aturan serta kondisi yang terdapat di kawasan tersebut. Strategi pengembangan kawasan berkelanjutan untuk meningkatkan *geotourism* dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti disajikan pada tabel 5. Pariwisata yang berkelanjutan merupakan salah satu sektor pembangunan yang mendapat perhatian pemerintah untuk terus dikembangkan dinilai cukup berpotensi meningkatkan perekonomian masyarakat (Ismayanti, 2011). Potensi ini didasarkan pada kekhasan sosial budaya masyarakat, kondisi geografis dan keindahan alam yang potensial dalam pengembangan sektor wisata. Dilihat dari potensi dan arahan pengembangan pariwisata di Indonesia, khususnya terkait destinasi wisata berbasis alam, kawasan geowisata lebih tepat untuk dikembangkan sebagai lingkungan yang berkelanjutan dan objek wisata berbasis budaya masyarakat sesuai dengan konsep *geopark* atau berbasis *Geoheritage*.

Konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan ini memiliki tujuan untuk mendukung segala upaya pelestarian lingkungan (alam dan budaya) dan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam manajemen (Marlina, 2016). Dengan demikian, dapat membawa manfaat dalam hal pendidikan ekonomi kepada masyarakat dan pemerintah daerah. Mengembangkan Geowisata tidak luput dari tahap perencanaan yang melibatkan multi sektor dan multi aspek serta multi wilayah. Kolaborasi dalam pengembangan tersebut merupakan suatu proses yang terintegrasi baik secara sektor (berbagai kelembagaan/kementerian) maupun secara hirarki (Provinsi, Kabupaten, Kota).

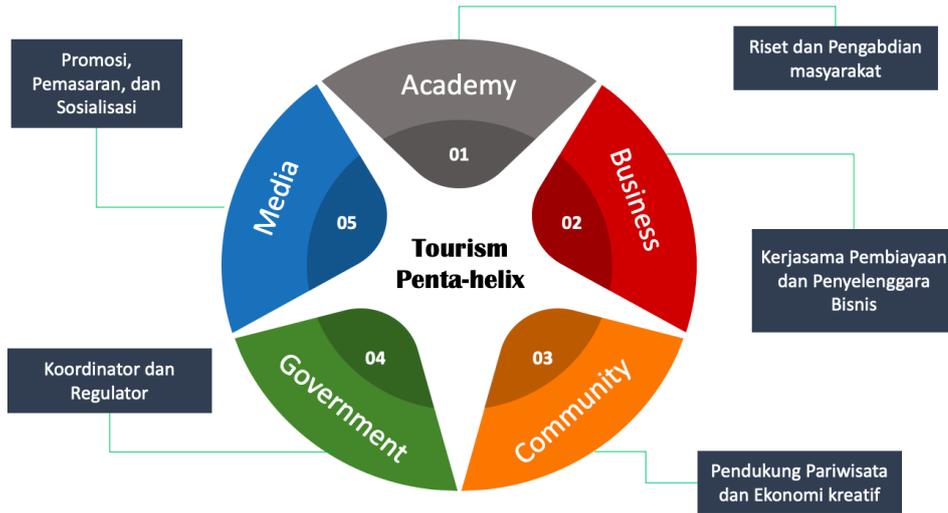
Tabel 5. Strategi Pengembangan *Geotourism* yang Berkelanjutan

No.	Unsur Pengembangan	Dimensi Terkait	Strategi Peningkatan
1.	Geologis	Fisik	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya situs geologi atau warisan geologi terkait fitur-fitur kebumihan dengan pembentukan secara alami yang menjadi fokus perencanaan dan pengembangan geowisata - Penetapan warisan geologi sesuai dengan peraturan yang berlaku agar dapat dikembangkan secara optimal terkait <i>Geoheritage, Geoconservation, Geodiversity, Geotourism, dan Geopark</i> - Membangun tempat atraksi wisata agar mampu menghadirkan hal yang berbeda dari lokasi wisata lainnya - Membangun sarana dan prasarana fisik yang sesuai dengan <u>ketetapan pengelolaan kawasan <i>Geoheritage</i></u>
		Aksesibilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan akses agar dapat ditempuh oleh kendaraan menuju ke dalam kawasan - Akses yang dapat memudahkan masyarakat dan stakeholder lain menuju ke lokasi
2.	Berkelanjutan	Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun perekonomian masyarakat dan sekitara kawasan geotourism dengan pendekatan ekonomi inklusif - Mendorong kelayakan ekonomi masyarakat dan pengelolaan kawasan <i>Geotourism</i> berbasis <i>sustainable tourism</i>
		Konservasi	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga lingkungan kawasan dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan - Bertanggungjawab terhadap penggunaan kawasan geoheritage dan tidak merusak keindahan dan keaslian kawasan tersebut
3.	Edukatif	Informatif	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun media interpretasi yang menarik dan edukatif - Mengembangkan Digital Informasi agar lebih memudahkan para wisatawan untuk mengetahui informasi-informasi terkait warisan Geologi tersebut - Pembangunan kesadaran bagi wisatawan tentang konservasi lingkungan secara edukatif dan <i>eco-friendly</i>
4.	Partisipasi Masyarakat	Pengembangan Berbasis Partisipasi Masyarakat/CBT	<ul style="list-style-type: none"> - Keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan kawasan <i>geotourism</i> - Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memiliki dan mampu mengelola obyek wisata serta mampu mengendalikan kegiatan pariwisata untuk peningkatan ekonomi sekitar
5.	Kepuasan Wisatawan	Layanan Wisata	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun program wisata alam bahari agar mamu memberikan kesan khusus bagi para wisatawan - Meningkatkan pelayanan wisata untuk membangun kepercayaan bagi para wisatawan

Sumber: Data penelitian diolah (Dowling, R.K. & Newsome, 2006)

Agar perencanaan kolaboratif (*collaborative planning*) dapat diwujudkan maka yang harus diperhatikan beberapa hal berikut ini, (Persada, 2018): a) Semua pihak yang terlibat bersedia membuka diri, sehingga muncul "*trust*" atau saling percaya di antara berbagai pihak yang akan berkolaborasi. Semua pihak harus terbuka, jujur, saling menghormati dan menghargai, sehingga tidak muncul konfli; b) Pendekatannya harus kerja sama atau

bersinergi, bukan berarti tidak ada kompetisi, kompetisi boleh ada tapi harus dijaga sebagai usaha untuk daya dorong mencapai tujuan bersama; dan, c) Setiap pihak memposisikan dirinya sama atau ada kesederajatan jadi tidak ada yang tinggi atau rendah, tetapi berbeda dalam peran, misal: pemerintah sebagai mediator, fasilitator dan legislator. Sedangkan swasta sebagai praktisi dan investor.



Gambar 5. *Tourim Pentahelix*

Sumber: Diolah dan dimodifikasi (Indrayati & Lestari, 2021; Khusniyah, 2020; Persada, 2018)

Tabel 6. Model ABCGM untuk *Geotourism* Berkelanjutan

No.	Stakeholder	Peran	Deskripsi	Keterangan
1.	Academic (Akademisi)	Riset dan Pengabdian masyarakat	Akademisi berperan memberikan solusi dan kajian sehingga menghasilkan solusi untuk perkembangan di sektor pariwisata. Selain itu juga, akademisi memiliki peran untuk melakukan berbagai riset dan pengabdian masyarakat berkaitan pengembangan pariwisata, agar pembangunan pariwisata berbasis penelitian. Seringkali peran hasil penelitian tidak dimanfaatkan dalam pengembangan pariwisata. Berbagai pengabdian masyarakat dapat dilakukan akademisi dalam pengembangan pariwisata, untuk itu diperlukan komunikasi dan kerjasama dengan akademisi dalam pengembangan pariwisata.	Perguruan Tinggi, Lembaga Riset, Lembaga Pelatihan & Keterampilan
2.	Business (Pelaku Usaha)	Kerjasama Pembiayaan dan Penyelenggara Bisnis	Sektor bisnis memiliki peran sebagai penyelenggara bisnis pariwisata sesuai etika bisnis, profesional, bertanggung jawab dan berkelanjutan. Peran bisnis, menghasilkan strategi, bagaimana pariwisata itu bisa meningkatkan perekonomian rakyat, dengan berbagai strategi marketing, Peran dunia usaha sebagai lembaga yang "profit oriented" juga harus ikut bertanggung jawab dalam keberlanjutan lingkungan sebagai modal utama pariwisata. Kemitraan swasta dengan masyarakat dan pemerintah sangat diperlukan dalam arti yang "sebenarnya". Hubungan yang saling menguntungkan (<i>win-win</i>) harus dibangun dengan pola-pola pendekatan yang formal maupun non formal. Beberapa destinasi pariwisata yang berhasil melibatkan banyak pihak, salah satu karena membangun pendekatan non formal antara swasta dan pemerintah.	Badan Usaha Milik Negara/Swasta/ Daerah, Unit Usaha Pariwisata, dan sektor Perbankan

No.	Stakeholder	Peran	Deskripsi	Keterangan
3.	Community (Komunitas)	Pendukung Pariwisata dan Ekonomi kreatif	Community di sini dimaksudkan adalah masyarakat dan komunitas-komunitas seperti NGO/LSM; masyarakat berperan mendukung sapa pesona/darwis plus dan menyediakan jasa pariwisata/ekonomi kreatif. Masyarakat adalah obyek dan subyek dari pariwisata itu sendiri, tapi di sisi lain masyarakat bisa menjadi kendala pengembangan pariwisata di suatu destinasi. Oleh sebab itu masyarakat harus tahu persis apa peran mereka dan pariwisata adalah untuk kesejahteraan mereka juga. Pendampingan terus menerus dari pemerintah, LSM dan swasta dapat meningkatkan peran masyarakat dalam pengembangan pariwisata daerah. Komunitas pariwisata dapat menggerakkan pariwisata seperti Asita (Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies), Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia, HPI (Himpunan Pemandu Wisata Indonesia), GenPI (Generasi Pesona Indonesia).	Paguyuban/Perhimpunan, LSM/NGO, Pokdarwis, Karang Taruna
4.	Government (Pemerintah)	Koordinator dan Regulator	Peran pemerintah dalam mendukung pariwisata ini sangat penting, yakni dalam hal koordinasi. berperan menyiapkan prasarana dan sarana dasar yang mendukung pengembangan pariwisata, menyiapkan berbagai peraturan berkaitan dengan pariwisata, memfasilitasi kemudahan berwisata dan berusaha dan melakukan kegiatan promosi dan pemasaran destinasi. Peran Pemerintah Daerah dalam pengembangan destinasi adalah sebagai: regulator, fasilitator, mediator dan penyedia prasarana. Pengembangan destinasi maupun pengembangan industri memerlukan regulasi yang jelas dan bijak serta kelembagaan yang padu baik dari pihak swasta maupun pemerintah. Dalam ketergantungan tersebut dapat diidentifikasi pembagian peran atau siapa melakukan apa. Pengembangan industri atau usaha pariwisata tentunya dilakukan oleh swasta dan pemerintah berfungsi memfasilitasi dan mendukungnya. Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota bertugas mengembangkan masyarakat dan berbagai macam pelayanan publik yang diperlukan agar pariwisata dapat terselenggara di tempat tersebut dan industri kepariwisataannya dapat berkembang. Selain itu pemerintah berperan langsung dalam pengembangan regulasi untuk mengatur, mengendalikan kegiatan pengembang dan industri, serta memperkuat kelembagaan untuk peningkatan kapasitas dalam merumuskan kebijakan dan pengambilan keputusan di berbagai tingkatan pemerintahan.	a. Pusat (Kementerian) meliputi: Kementerian ESDM, Kemen.Parekraf, Bappenas, Kemen PUPR, dan Kemenko. Marinvet) b. Daerah (Dinas/OPD) meliputi: Dinas Pariwisata, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum

No.	Stakeholder	Peran	Deskripsi	Keterangan
5.	Media	Promosi, Pemasaran, dan Sosialisasi	Media terutama media on line saat ini menjadi kekuatan informasi dan andalan dalam promosi pariwisata. Promosi dan pemasaran pariwisata sekarang dapat dilakukan dengan cepat dengan memanfaatkan media sosial. Promosi sekarang lebih bersifat inklusif, contoh: wisatawan dapat menunggah testimony berkunjung ke suatu obyek wisata di media sosial.	- Media Massa (Cetak dan Elektronik) - Medisa Sosial (Youtube, Blog, IG, FB, TT, dll)

Sumber: Data penelitian diolah (Indrayati & Lestari, 2021; Khusniyah, 2020; Persada, 2018)

Pada pengembangan geowisata di Indonesia saat ini terlihat kolaborasi lintas sektor telah mulai diinisiasi, baik yang sifatnya lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas kewenangan. Ada 5 kelompok kunci yang dapat berkolaborasi yaitu: *Academic, Businessman, Community, Government, and Media* atau dikenal dengan nama 5 Pilar ABCGM (Persada, 2018) (Gambar 5). Model ABCGM ini merupakan konsep *Pentahelix* yang dikembangkan untuk mencapai sinergitas dan kolaborasi untuk pembangunan pariwisata berkelanjutan (Tabel 6).

Menurut Soemaryani (2016) Model *pentahelix* merupakan referensi dalam mengembangkan sinergi antara instansi terkait (ABCGM) dalam rangka mencapai tujuan. Penggunaan model ABCGM atau *Pentahelix* ini merupakan strategi kolaborasi yang telah dicanangkan oleh pemerintah dalam pengembangan pariwisata sesuai dalam Peraturan Menteri (Permen) Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Dalam pariwisata masing-masing stakeholder ini mempunyai peran yang berbeda, walaupun mungkin dalam beberapa hal ada yang bersinggungan.

KESIMPULAN

Pengelolaan dan pemanfaatan warisan geologi dalam menunjang sektor pariwisata merupakan salah satu instrumen pendukung pembangunan berkelanjutan dalam konteks pemberdayaan dan pengembangan masyarakat lokal serta regional. Selain itu, pengembangan geowisata memiliki kontribusi dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang dilaksanakan secara kolaborasi lintas sektor yaitu meliputi *Academic, Businessman, Community, Government*, dan *Media* atau dikenal dengan nama 5 Pilar ABCGM. Konsep *Pentahelix* yang dikembangkan bertujuan untuk pembangunan pariwisata dalam mencapai strategi pengembangan Geotourism yang berkelanjutan melalui Skema pembangunan

inklusif. Dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan masing-masing stakeholder ini memiliki peran dan fungsi yang berbeda-beda, yaitu Riset dan pengabdian masyarakat (Akademisi), kerjasama pembiayaan dan penyelenggaraan bisnis (Pelaku bisnis), Pendukung pariwisata dan ekonomi kreatif (Komunitas), Fungsi koordinator dan regulator (Pemerintah), serta Promosi dan Sosialisasi (Media).

REKOMENDASI

1. Pengembangan geowisata dengan tujuan tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) harus memenuhi lima prinsip utama yaitu bahwa geowisata berbasis geologis (yaitu, berdasarkan geohéritage bumi), berkelanjutan (layak secara ekonomi, bermanfaat bagi masyarakat, dan mendorong geokonservasi), edukatif (dicapai melalui *geo-interpretasi*), menguntungkan secara lokal, dan menghasilkan kepuasan wisatawan.
2. Kolaborasi lintas sektor yang dikembangkan untuk pengelolaan geowisata berkelanjutan dengan menggunakan model ABCGM atau *Pentahelix* harus memiliki motif keterbukaan dan saling menghormati, mampu bersinergi dalam mencapai tujuan, serta memposisikan dirinya sama.
3. Konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan dalam pelestarian Geologi dapat dilaksanakan dengan model *Community Based Tourism* (CBT).
4. Strategi untuk meningkatkan pariwisata minat khusus di Indonesia, salah satunya dapat dilakukan dengan Pengembangan Geowisata yaitu meliputi peningkatan aksesibilitas, pengembangan media informatif, membangun sarana dan prasarana fisik, dan meningkatkan layanan wisata.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan studi, penyusunan paper, hingga terpublikasinya hasil studi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Ansell, C., & Gash, A. 2008. Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.

Ansori, C., Setiawan, N. I., Warmada, I. W., & Yogaswara, H. 2022. Identification of geodiversity and evaluation of geosites to determine geopark themes of the Karangsembung-Karangbolong National Geopark, Kebumen, Indonesia. *International Journal of Geoh Heritage and Parks*, 10(1), 1–15.

Aristy, K. W., Candradewini, ;, & Buchari, ; R Ahmad. 2021. Proses Kolaboratif Dalam Pengembangan Geopark Pongkor Sebagai Kawasan Pariwisata di Kabupaten Bogor Collaborative Process in the Development of Pongkor Geopark as a Tourism Area in Bogor Regency. *JANE) Jurnal Administrasi Negara, Agustus*, 13(1), 138–142.

Badan Pusat Statistik. 2021a. *Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia 2021*. Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. 2021b. *Indonesia Tourism Satellite Accounts (TSA), 2016-2019*. Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. 2021c. *Kabupaten Raja Ampat dalam Angka 2021*. Badan Pusat Statistik - Kabupaten Raja Ampat.

Badan Pusat Statistik. 2021d. *Laporan Perekonomian Indonesia 2021*. Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. 2022. *Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Januari 2022*. Badan Pusat Statistik.

Bakti, I., Sumartias, S., Damayanti, T., & Nugraha, A. R. 2018. Pengembangan model komunikasi pariwisata berbasis kearifan lokal di kawasan geopark Pangandaran. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 6(2), 217–230.

Bentivenga, M., Cavalcante, F., Mastronuzzi, G., Palladino, G., & Prosser, G. 2019. Geoh Heritage: the Foundation for Sustainable Geotourism. *Geoh Heritage*, 11(4), 1367–1369.

Brocx, M. 2007. Geoh Heritage - from global perspectives to local principles for conservation and planning. *Western Australian Museum, Perth (in Press)*.
Brocx, M., & Semeniuk, V. 2007. Geoh Heritage and geoconservation - History, definition, scope and scale. *Journal of the Royal Society of Western Australia*, 90(2), 53–87.

Bryman, A., & Burgess, R. G. (2002). *Analyzing Qualitative Data*. New York: Routledge.

Cahyadi, H. S., & Newsome, D. 2021. The post COVID-19 tourism dilemma for geoparks in Indonesia. *International Journal of Geoh Heritage and Parks*, 9(2), 199–211.

Crofts, R., Gordon, J., Brilha, J., Gray, M., Gunn, J., Larwood, J., Santucci, V., Tormey, D., & Worboys, G. 2020. *Guidelines for geoconservation in protected and conserved areas*.

Dowling, R.K. & Newsome, D. 2006. *Geotourism*. Elsevier, Oxford.

Dowling, R. K. 2011. *Geotourism's Global Growth. Geoh Heritage* (3rd ed.).

Dowling, R. K. 2009. The growth of global geotourism. *Proceedings of the VIII European Geoparks Conference*, 24–30.

Dowling, R. K. 2014. Global Geotourism – An Emerging Form of Sustainable Tourism. *Czech Journal of Tourism*, 2(2).

Ehsan, S., Leman, M. S., & Ara Begum, R. 2013. Geotourism: A Tool for Sustainable Development of Geoh Heritage Resources. *Advanced Materials Research*, 622–623, 1711–1715.

Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. B. 2012. An Integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22, 1–29.

Farsani, N. T., Coelho, C. O. A., Costa, C. M. M., & Amrikazemi, A. 2014. Geo-knowledge Management and Geoconservation via Geoparks and Geotourism. *Geoh Heritage*, 6(3), 185–192.

Florini, A., & Pauli, M. 2018. Collaborative governance for the Sustainable Development Goals. *Asia & the Pacific Policy Studies*, 5(3), 583–598. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/app5.252>

Ginting, N., Rahman, N., & Sembiring, G. 2017. Tourism Development Based on Geopark in Bakkara Caldera Toba, Indonesia. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 180, 12086.

Ginting, N., & Siregar, N. 2018. Geotrail development to connect the dots in Muara Caldera Toba, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 126, 12169.

Gordon, J. 2018. Geoh Heritage, Geotourism and the Cultural Landscape: Enhancing the Visitor Experience and Promoting Geoconservation. *Geosciences*, 8, 136.

Hindersah, H., Asyiwati, Y., Akliyah, L. S., & Ramadhan, T. A. 2017. Tantangan Pembangunan Pariwisata Inklusif Geopark Ciletuh, Desa Ciwaru Kabupaten Sukabumi – Provinsi Jawa Barat. *Prosiding Seminar Nasional: Perencanaan Pembangunan Inklusif Desa - Kota*, 125–134.

Indrayati, I., & Lestari, F. 2021. *Kajian Pengembangan*

Kelembagaan & Pembiayaan Geopark di Indonesia.

- Ismayanti. 2011. *Pengantar Pariwisata*. Grasindo.
- Johnston, E., Hicks, D., Nan, N., & Auer, J. 2011. Managing the Inclusion Process in Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory: J-PART*, 21, 699–721.
- Kandouw, M. R. A. 2021. *Geowisata : Kontribusi Sektor Pariwisata Melalui Geowisata Untuk Pendapatan Asli Daerah*. [Online] Dari: https://www.researchgate.net/publication/352504965_Geowisata_Kontribusi_Sektor_Pariwisata_Melalui_Geowisata_Untuk_Pendapatan_Aslil_Daerah
- Khusniyah, K. 2020. Implementasi Model Pentahelix Sebagai Landasan Pengembangan Potensi Pariwisata Di Kabupaten Kediri (Studi Literatur). *Seminar Nasional Kahuripan I*.
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknik Pengembangan Geopark Sebagai Destinasi Pariwisata. 2020.
- Marlina, E. 2016. Geotourism as a strategy of geosite empowerment towards the tourism sustainability in Gunungkidul Regency, Indonesia. *International Journal of Smart Home*, 10(5), 131–148.
- Mulyaningsih, S., Suhartono, S., Heriyadi, N. W. A. A. T., & Tania, D. 2021. Pendampingan Kepemanduan Geowisata Kawasan Cagar Alam Geologi Gunungkidul: Menuju Kebangkitan “Thoughtful” Indonesia. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 3(1), 31.
- Newig, J., Challies, E., Jager, N., Kochskämper, E., & Adzersen, A. 2017. The Environmental Performance of Participatory and Collaborative Governance: A Framework of Causal Mechanisms. *Policy Studies Journal*, 46.
- Nur, H., Chairil, A. M., Rachmat, T., Achmad, H., & Wirakusumah, D. 2021. *Geoheritage Preliminary Evaluation And Its Implication On Geotourism Potential In West Bandung*. *BANDUNG, INDONESIA*. 1(1), 28–37.
- OECD. 2020. *OECD Tourism Trends and Policies 2020*.
- Oktariadi, O. 2018. *Geopark Dan Penataan Ruang*.
- Osborne, R. A. L. 2000. Geodiversity: “Green” geology in action - Presidential address for 1999-2000. *Proceedings of the Linnaean Society of New South Wales* 122, 149–173.
- Osrnita, Anwar, S., Heldi, & Barlian, E. 2019. The geodiversity potential of Tanah Datar District developing into a geotourism asset as a geopark in Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 314, 12051.
- Pardede, T. 2021. *Geopark Jalan Eklektik Pembangunan Berkelanjutan Di Masa Pandemi COVID19*.
- Paskova, M., & Josef, Z. 2018. Sustainability Management of Unesco Global Geoparks. *Sustainable Geoscience and Geotourism*, 2, 44–64.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Warisan Geologi (Geoheritage).
- Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pengembangan Taman Bumi (Geopark) Indonesia Tahun 2021-2025.
- Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022.
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (RPJMN 2020-2024). (n.d.).
- Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark).
- Permadi, R., Rachwibowo, P., & Hidajat, W. K. 2014. Potensi Situs-Situs Warisan Geologi di Area Kars Gunung Sewu sebagai Pendukung dan Peluang Pengembangan Geopark di Indonesia untuk Aset Geowisata Kreatif. *Geological Engineering E-Journal*, 6(2).
- Permana, A. K. 2020. Penetapan Warisan Geologi Fondasi Dasar Dalam Pengembangan Geopark. In *Webinar BDTBT “Taman Bumi Ranah Minang”* (pp. 1–27).
- Persada, C. 2018. *Perencanaan Pariwisata Dalam Pembangunan Wilayah Berkelanjutan*. Aura, Bandarlampung.
- Rekinagara, I., Mugiyantoro, A., Kusuma Aji, B., Biddinika, M., & Takahashi, F. 2018. Uncovering the geo-sites as geo-heritage potential to increase educational and socio-cultural value in Parangtritis, Yogyakarta, Indonesia. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2026).
- Rosyidie, A., Sagala, S., Syahbid, M. M., & Sasongko, M. A. 2018. The Current Observation and Challenges of Tourism Development in Batur Global Geopark Area, Bali Province, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 158(1).
- Ruban DA, K. I.-L. 2010. *Essentials of geological heritage site (geosite) management: a conceptualassessment of interests and conflicts*. *Natura Nascosta* 41.
- Schutte, I. C. 2009. a Strategic Management Plan for the Sustainable Development of Geotourism in South Africa. In *North-West University* 53(1).
- Siregar, H. F., Nurhayati, & Nurwillan, S. 2019. Analisis perlindungan hukum terhadap Geopark Nasional Ciletuh sebagai Kawasan Geowisata di Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat. *Jurnal*

Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan, 10(01), 15–32.

Siregar, H. F., Nurhayati, & Nurwullan, S. 2020. Kepastian Hukum Perlindungan Ciletuh-Palabuhan Ratu Unesco Global Geopark Sebagai Kawasan Geowisata di Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat. *Proceedings Universitas Pamulang*.

Soemaryani, I. 2016. Pentahelix Model to Increase Tourist Visit to Bandung and Its Surrounding Areas through Human Resource Development. *Academy of Strategic Management Journal*, 15, 249.

Suyanto, A., Haryono, E., & Baiquni, M. 2020. Visitors satisfaction monitoring using important perform analysis in Pindul Geoheritage-Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 451, 12043.

UNWTO. 2020. *World Tourism Barometer, Statistical Annex* (January 20).

Wirakusumah, A., Murdohardono, D., & Rosiani, D. 2019. Geotourism Of Banyuputih Catchment Area, Mount Ijen, East Java, Indonesia. *Journal of Physics: Conference Series*, 1363, 12012.

Wulung, S., & Brahmantyo, B. 2019. *Geotourism Reinterpretation towards Natural Tourist Attractions in Bandung Basin, West Java, Indonesia*.

Wulung, S., Putra, R. R., Permadi, R. W. A., & Maulana, M. I. 2020. Concentration-Dispersal Strategies to Assist Geotourism Destination Planning: A Case Study of Ciletuh-Palabuhanratu UNESCO Global Geopark. *Journal of Indonesian Tourism and Development Studies*, 8(3), 156–164.

Yulawati, A. K., Pribadi, K. N., & Hadian, M. S. D. 2016. Geotourism Resources as Part of Sustainable Development in Geopark Indonesia. *Proceedings of the 2016 Global Conference on Business, Management and Entrepreneurship*, 962–965.

Pedoman Penulisan Naskah Ilmiah Jurnal INOVASI

Jurnal INOVASI memuat karya tulis ilmiah hasil penelitian atau tinjauan kepustakaan dalam bidang pemerintahan dan kemasyarakatan, sosial budaya, ekonomi dan pembangunan, sumberdaya alam dan maritim sebagai bahan kebijakan dan wawasan berpolitik. Jurnal INOVASI terbit dua kali dalam setahun setiap bulan Mei dan Oktober.

Naskah yang akan diterbitkan dalam Jurnal INOVASI Balitbang Provinsi Sumatera Utara, harus memenuhi ketentuan berikut :

1. Naskah berupa karya asli yang belum pernah dipublikasikan di tempat lain dan tidak sedang diajukan ke tempat lain.
2. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia sesuai kaidah bahasa Indonesia yang disempurnakan.
3. Komponen utama naskah setidaknya memuat hal-hal berikut:
 - a. **Judul**, ditulis dengan jelas menggambarkan isi tulisan.
 - b. **Identitas Penulis**, dimuat di bawah judul tulisan, memuat nama, nama instansi, asal negara, alamat korespondensi dan e-mail.
 - c. **Abstrak** ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris beserta kata kuncinya. Abstrak ditulis dalam 1 alinea berisi masalah, tujuan penelitian, hasil dan saran/usulan, dengan jumlah kata 200-300 kata.
 - d. **Pendahuluan**, tidak menggunakan subjudul, berisi penjelasan padat dan ringkas tentang latar belakang penelitian, studi pustaka yang mendukung dan relevan, serta tujuan penelitian.
 - e. **Metode Penelitian** berisikan disain penelitian yang digunakan, populasi/sampel atau subjek/objek, sumber data, instrumen, analisis dan teknik analisis yang digunakan.
 - f. **Hasil dan Pembahasan**. Hasil adalah temuan penelitian yang disajikan apa adanya tanpa pendapat penulis, pembahasan adalah argumentasi penulis tentang temuan penelitian serta relevansinya dengan penelitian terdahulu. Pembahasan hasil penelitian diarahkan pada ranah kebijakan untuk semua disiplin ilmu. Disajikan tanpa subjudul.
 - g. **Kesimpulan** menjawab tujuan penelitian tanpa melampauinya, disajikan dalam bentuk narasi.
 - h. **Rekomendasi** berupa alternatif-alternatif kebijakan dalam bentuk pointer, berisi bentuk dan telaahtannya untuk dilaksanakan mengacu pada prinsip tepat-guna, logis dan relevan.

- i. **Ucapan terimakasih**. Memuat pihak-pihak yang berkontribusi dalam kegiatan penelitian.

4. Tabel, gambar dan grafik dapat terbaca dengan jelas dan hendaknya agar dilampirkan secara terpisah serta diberi penjelasan yang memadai.
5. Penulisan rujukan sesuai dengan model Harvard. Pada isi tulisan, nama penulis ditulis disertai dengan tahun penulisannya. Pada bagian Daftar Pustaka, penulisan diurut sesuai dengan abjad.
6. Referensi 50% hasil penelitian relevan terdahulu. Beberapa contoh bentuk referensi dalam jurnal ini adalah:

Buku

Abel, R. 2004. Revolusi Kesehatan Mata: Pencegahan dan Pengembalian Masalah Penglihatan. New York: Kensington Book

Chaniago, A. 2010. Studi Pustaka dan Konseptualisasi Penelitian. Dalam: Zaluchu, F. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Bandung: Citapustaka Media, hal 79-92.

Artikel dari Jurnal

Ang, L. dan Taylor, B. 2005. Memanajemen Keuntungan Konsumen Menggunakan Matriks Portofolio. *Jurnal Pemasaran dan Manajemen Konsumen Strategik* 12 (5), hal 298-304

Bagian di dalam buku

Ballinger, A. dan Clark, M. 2001. Nutrisi, Pengendalian Nafsu Makan dan Penyakit. Dalam: Payne-James, J. dkk. editor. *Dukungan Artifisial bagi Praktik Klinik*. Edisi kedua. London: Greenwich Medical, hal 225-239

Koran

Benoit, B. 2007. Peran G8 dalam Pemanasan Global. *Harian Kompas* 29 Mei 2007, hal 9.

Laporan

Komisi Eropa. 2004. *Laporan Pendahuluan terhadap Implementasi dari Strategi Pemasaran Internal 2003-2006*. Luxemburg: Unit Publikasi Komisi Eropa.

Konferensi

Fiedelius, H.C. 2000. Miopi dan Penurunan Visual: Aspek Global. Dalam: Lin, L.L.K. dkk. editor. *Miopia Terbaru II: Prosiding Konferensi Internasional ke-7*. Taipei, 17-20 Nopember 1998. Tokyo: Springer, hal 31-37.

Tesis

Garcia-Sierra, A. 2000. Investigasi Penyebab Ca-Serviks pada Wanita Usia Subur di Perkotaan. Tesis PhD, Universitas Indonesia.

Jurnal Artikel Elektronik

Merchant, A.T. 2009. Diet dan Aktifitas Fisik pada Anak-Anak di Kawasan Kumuh Perkotaan: sebuah Studi Cross Sectional. *Jurnal Nutrisi* [Online] Edisi 6. Dari: <http://www.nutritionj.com/content/pdf/1475-2891-6.1.pdf> [Diakses: 10 Mei 2007].

Web Page

Thompson, B. 2006. Mengapa Balita Butuh ASI [Online]. Dari: <http://news.bbc.co.uk/1/hi/health/459876> [Diakses: 10 Mei 2007].

Depkes RI. 2006. Panduan Imunisasi [Online]. Dari: http://www.depkes.go.id/bayi_panduan_imunisasi/2345 [Diakses: 19 Februari 2011].

7. Naskah dituliskan dengan menggunakan Times New Roman 12, maksimal 20 halaman A4 spasi ganda, ditulis dengan program komputer Microsoft Word.
8. Naskah yang masuk hendaknya diterima 2 (dua) bulan sebelum waktu penerbitan untuk *direview* oleh anggota dewan redaksi dan *reviewer* (mitra bestari) yang ditunjuk oleh Dewan Redaksi.
9. Dewan Redaksi berhak menolak naskah ilmiah yang dianggap tidak layak muat di Jurnal Inovasi. Pengiriman naskah ke alamat redaksi melalui Open Journal System (OJS) pada laman: <http://jurnal.balitbang.sumutprov.go.id>
10. Redaksi berhak menolak naskah yang isi dan formatnya tidak sesuai dengan pedoman penulisan naskah di atas dan redaksi tidak berkewajiban untuk mengembalikan naskah tersebut.
11. Setiap penulis yang karya tulisnya telah diterbitkan, akan mendapat satu buah cetak lepas dan satu buah *full print*.
12. Setiap penulis menyetujui untuk mengalihkan hak ciptanya ke Jurnal Inovasi jika naskahnya diterima untuk diterbitkan.